LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2016-2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Karena itu disusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di bidang perencanaan, diamanatkan juga bahwa Pemerintahan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman 2006-2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan **Visi Daerah: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman Yang Sejahtera, Demokratis, Dan Berdaya Saing"**, yang terdiri dari 4 (empat) Misi yang didalamnya memuat mengenai indikator dan target capaian. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: Tahap I (2006-2010), Tahap II (2011-2015), Tahap III (2016-2020), dan Tahap IV (2021-2025).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sehubungan dengan telah dilantiknya Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. sebagai Bupati Sleman dan Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes. sebagai Wakil Bupati Sleman pada Tanggal 17 Februari 2016 untuk masa jabatan 2016–2021, maka Pemerintah Kabupaten Sleman berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Periode 2016-2021merupakan Tahap III (ketiga) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025. Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 5

(lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 juga wajib mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun ini juga telah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

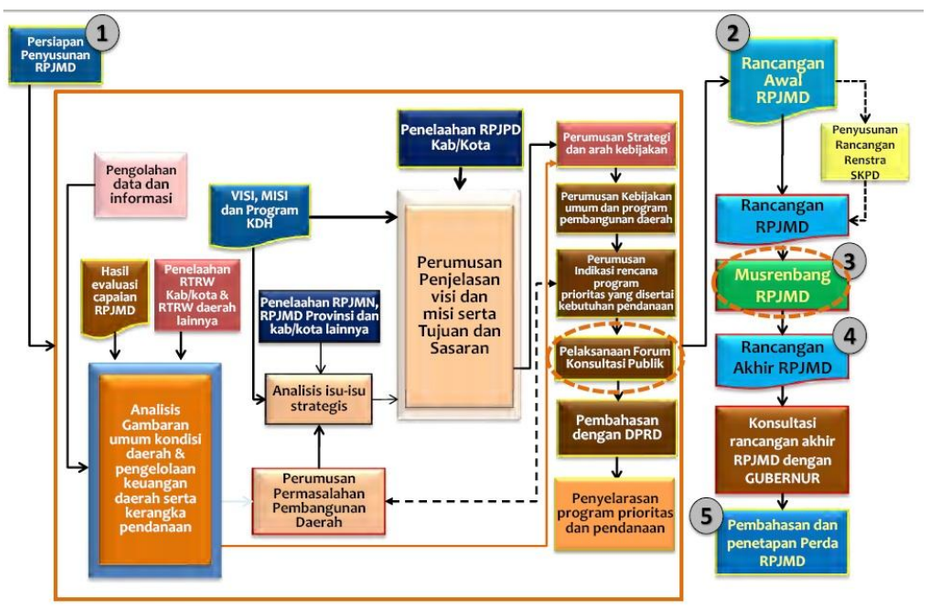
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi DIY Tahun 2012-2017, RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031,kondisi lingkungan hidupstrategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode sebelumnya, juga disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.

3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan *(stakeholders)* pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah *(top-down)* dan Bawah-Atas *(bottom-up),* pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Proses penting lainnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman ini adalah pemahaman awal posisi Kabupaten Sleman yang unik atau berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Keunikan ini muncul dari faktor karakteristik geografis serta sejarahnya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010

: ~~Tindaklanjut~~
: - - - - - - - Sebagaipedoman

Gambar 1.1Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 tersebut serta merujuk pada

ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukan bahwa:

1. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.
3. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan.
5. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah danKepala SKPD selama 5 (lima) tahun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Sleman Tahun 2011-2031;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

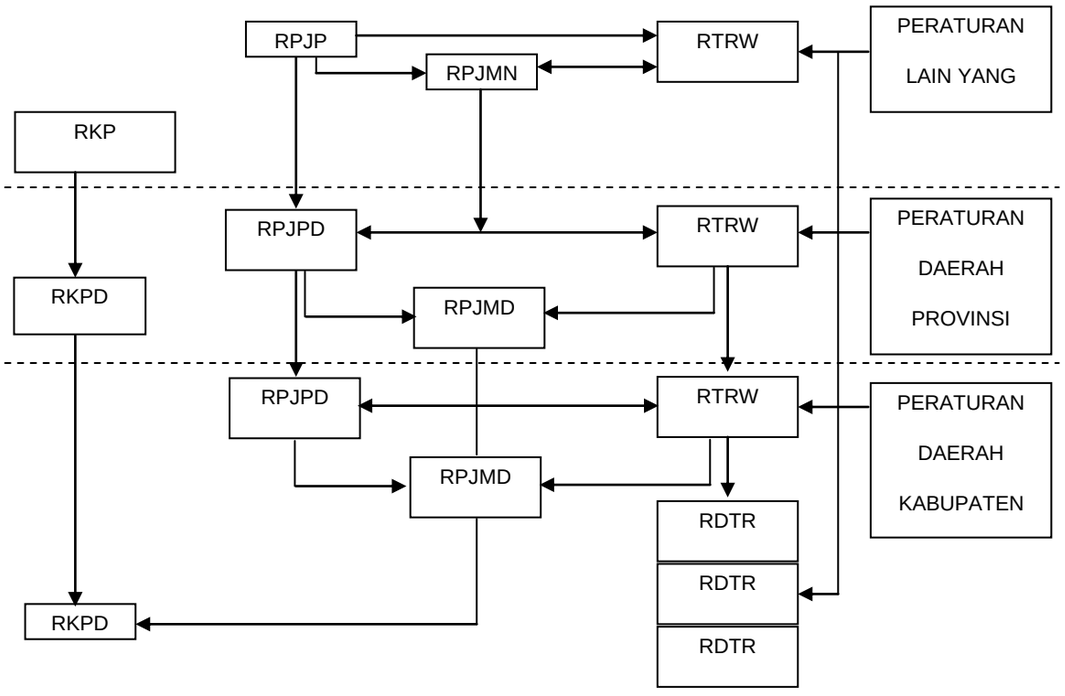
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi, dan program Kepala Daerah.

RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019, serta RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta 2005-2025, dan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017.

Agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004

→ : sebagai pedoman penyusunan

Gambar 1.2Kedudukan RPJMD Kabupaten Sleman diantara Dokumen Perencanaan Lainnya

Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1.3.1. RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Sleman

RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2006-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Sleman periode 2016-2021, juga berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Slemanpada RPJPD 2006-2025 beserta arah pembangunannya.

Visi daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah adalah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman Yang Sejahtera, Demokratis, Dan Berdaya Saing" ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; dan
4. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis.

Penjelasan masing-masing misi:

Misi kesatu

Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam mewujudkan cita-cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, kerangka hukum yang adil, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif dan efisien, akuntabel, dan misi yang strategis.

Misi kedua

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan sosial dan ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan.

Misi ketiga

Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif, dan berakhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi mutu pelayanan dasar.

Misi keempat

Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam menegakkan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan

ketertiban masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Penegakan supremasi hukum dilakukan untuk menjaga norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta mempertahankan nilai nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat.

Keempat misi di atas dijabarkan dan dilaksanakan melalui prioritas pembangunan daerah yang berupa program-program pembangunan daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup masyarakat, mewujudkan masyarakat yang demokratis, dan terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

1.3.2. RPJMD dengan RTRW Kabupaten Sleman

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3.3. RPJMD dengan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman.

1.3.4. RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sleman yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Sleman yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari 11 (sebelas) bab, sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman.

BAB 2 GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Sleman secara komprehensif sebagai basis atau

pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sleman untuk jangka menengah.

BAB 4 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sleman untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dibagi dalam setiap misi. Dalam bab ini juga memuat Pengembangan Wilayah Terpadu jangka menengah.

BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.

BAB 8 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan Pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab SKPD beserta pagu indikatif pendanaannya.

BAB 9 PENETAPAN INDIKATORKINERJA DAERAH

Dalam bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja daerah dan indikator kinerja utama Kabupaten Sleman dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab terakhir ini memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sesudahnya, serta kaidah pelaksanaannya.

BAB 11 PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sleman sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

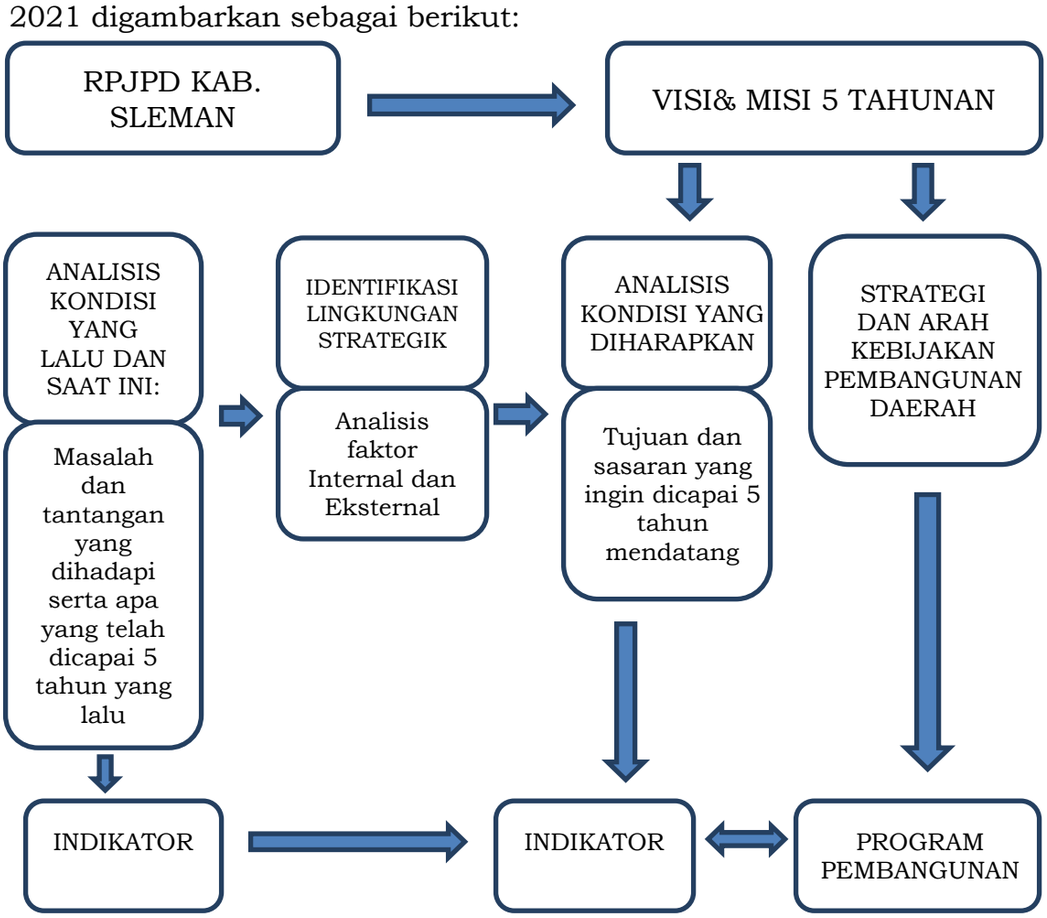
1.5.2. Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyusun Renstra SKPD periode 2016-2021;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sleman kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;

4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021.
5. Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2016-2021;

1.6. KerangkaPikir

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 diawali dengan analisis kondisi masalalu yang memuat hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan strategik internal daneksternal. Perumusan visi dan misi, analisis kondisi yang diharapkan, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta program pembangunan dilakukan dengan mengacu hasil analisis lingkungan strategik dan tahapan lima tahunan dalam RPJPD. Kerangka pikir penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.3 Kerangka pikir penyusunan RPJMD Kabupaten SlemanTahun 2016-2021

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Letak, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai 110°13'00" sampai dengan 110°33'00" Bujur Timur dan 7°34'51" sampai dengan 7°47'30" Lintang Selatan. Di sebelah utara, wilayah Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

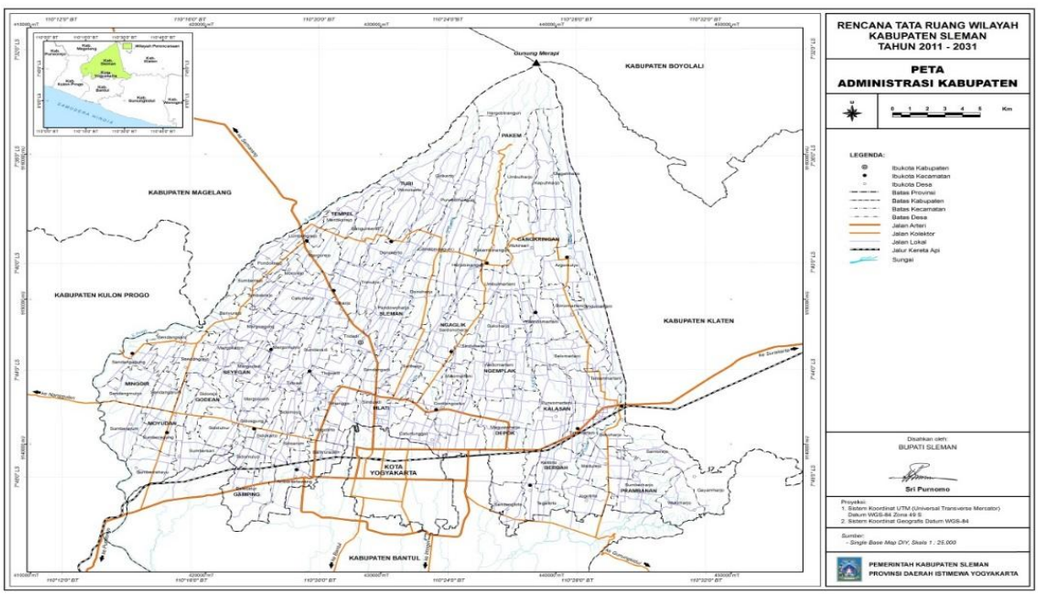
Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km^2 atau sekitar 18% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km^2. Jarak terjauh utara-selatan wilayah Kabupaten Sleman 32 km, sedangkan jarak terjauh timur-barat 35 km. Dalam perspektif mata burung, wilayah Kabupaten Sleman berbentuk segitiga dengan alas di sisi selatan dan puncak di sisi utara.

Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 ha), dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 ha). Kecamatan dengan padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan). Kecamatan dengan desa terbanyak adalah Tempel (8 desa), sedangkan Kecamatan dengan desa paling sedikit adalah Depok (3 desa). Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)
		Desa	Padukuhan	
1	Moyudan	4	65	2.762
2	Minggir	5	68	2.727
3	Seyegan	5	67	2.663
4	Godean	7	77	2.684
5	Gamping	5	59	2.925
6	Mlati	5	74	2.852
7	Depok	3	58	3.555
8	Berbah	4	58	2.299
9	Prambanan	6	68	4.135
10	Kalasan	4	80	3.584
11	Ngemplak	5	82	3.571
12	Ngaglik	6	87	3.852
13	Sleman	5	83	3.132
14	Tempel	8	98	3.249
15	Turi	4	54	4.309
16	Pakem	5	61	4.384
17	Cangkringan	5	73	4.799
	Jumlah	86	1.212	57.482

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Kab. Sleman, 2014



Sumber: Perda no.12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sleman.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Sleman

2.1.2. Topografi

Keadaan tanah Kabupaten Sleman di bagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kecamatan Prambanan dan

sebagian di Kecamatan Gamping. Semakin ke utara relatif miring dan di bagian utara sekitar lereng gunung Merapi relatif terjal.

Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara 100 meter sampai dengan 2.500 meter di atas permukaan laut (m dpl). Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi 4 kelas yaitu ketinggian <100 meter, 100-499 meter, 500-999 meter, dan >1.000 meter dpl. Ketinggian <100 m dpl seluas 6.203 ha, terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Gamping, Berbah, dan Prambanan.

Ketinggian 100-499 m dpl seluas 43.246 ha, terdapat di 17 kecamatan. Ketinggian 500-999 m dpl meliputi luas 6.538 ha, ditemui di Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian >1.000 m dpl seluas 1.495 ha, terdapat di Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian wilayah di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Ketinggian Wilayah Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	<100 m dpl (ha)	100-499 m dpl (ha)	500-999 m dpl (ha)	>1.000 m dpl (ha)	Jumlah (Ha)
1.	Moyudan	2.407	355	-	-	2.762
2.	Minggir	357	2.370	-	-	2.727
3.	Godean	209	2.475	-	-	2.684
4.	Seyegan	-	2.663	-	-	2.663
5.	Tempel	-	3.172	77	-	3.249
6.	Gamping	1.348	1.577	-	-	2.925
7.	Mlati	-	2.852	-	-	2.852
8.	Sleman	-	3.132	-	-	3.132
9.	Turi	-	2.076	2.155	78	4.309
10.	Pakem	-	1.664	1.498	1.222	4.384
11.	Ngaglik	-	3.852	-	-	3.852
12.	Depok	-	3.555	-	-	3.555
13.	Kalasan	-	3.584	-	-	3.584
14.	Berbah	1.447	852	-	-	2.299
15.	Prambanan	435	3.700	-	-	4.135
16.	Ngemplak	-	3.571	-	-	3.571
17.	Cangkringan	-	1.796	2.808	195	4.799
	Jumlah	**6.203**	**43.246**	**6.538**	**1.495**	**57.482**

Sumber: Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kab. Sleman, 2014

2.1.3. Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Sleman didominasi dari keberadaan gunung Merapi. Formasi geologi dibedakan menjadi endapan vulkanik, sedimen, dan batuan terobosan, dengan endapan vulkanik mewakili lebih dari 90% luas wilayah.

Material vulkanik gunung Merapi yang berfungsi sebagai lapisan pembawa air tanah (akifer) yang sudah terurai menjadi material pasir vulkanik, yang sebagian besar merupakan bagian dari endapan vulkanik

Merapi muda. Material vulkanik Merapi muda ini dibedakan menjadi 2 unit formasi geologi yaitu formasi Sleman (lebih didominasi oleh endapan piroklastik halus dan tufa) di bagian bawah dan formasi Yogyakarta (lebih didominasi oleh pasir vulkanik berbutir kasar hingga pasir berkerikil) di bagian atas. Formasi Yogyakarta dan Formasi Sleman ini berfungsi sebagai lapisan pembawa air utama yang sangat potensial dan membentuk satu sistem akifer yang disebut Sistem Akifer Merapi (SAM). Sistem akifer tersebut menerus dari utara ke selatan dan secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Selain formasi geologi tersebut diatas terdapat formasi batu gamping muda yaitu Formasi Sentolo di Kecamatan Gamping dan Formasi Semilir di Kecamatan Prambanan.

Jenis tanah di Kabupaten Sleman terbagi menjadi litosol, regosol, grumusol, dan mediteran. Sebagian besar di wilayah Sleman didominasi jenis tanah regosol sebesar 49.262 ha, mediteran 3.851 ha, litosol 2.317 ha, dan grumusol 1.746 ha, jenis tanah di Kabupaten Sleman selengkapnya seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Jenis Tanah di Kabupaten Sleman

No.	Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
		Litosol	Regosol	Grumusol	Mediteran	
1.	Moyudan	-	584	808	1.370	2.762
2.	Minggir	-	558	606	1.563	2.727
3.	Seyegan	-	2.187	8	468	2.663
4.	Godean	-	2.018	216	450	2.684
5.	Gamping	-	2.817	108	-	2.925
6.	Mlati	-	2.582	-	-	2.852
7.	Depok	-	3.555	-	-	3.555
8.	Berbah	-	2.299	-	-	2.299
9.	Prambanan	2.155	1.980	-	-	4.135
10.	Kalasan	162	3.422	-	-	3.584
11.	Ngemplak	-	3.571	-	-	3.571
12.	Ngaglik	-	3.852	-	-	3.852
13.	Sleman	-	3.132	-	-	3.132
14.	Tempel	-	3.249	-	-	3.249
15.	Turi	-	4.309	-	-	4.309
16.	Pakem	-	4.384	-	-	4.384
17.	Cangkringan	-	4.799	-	-	4.799
Jumlah		2.317	49.262	1.746	3.851	57.482

Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Tahun 2014

2.1.4. Hidrologi

Air tanah Merapi yang mengalir di bawah permukaan secara rembesan bergerak menuju daerah yang lebih rendah terpotong oleh topografi, rekahan atau patahan maka akan muncul mata air. Di Kabupaten Sleman terdapat 4 jalur mata air (*springbelt*) yaitu: jalur mata air Bebeng, jalur mata air Sleman-Cangkringan, jalur mata air Ngaglik dan jalur mata air Yogyakarta. Mata air ini telah banyak dimanfaatkan untuk sumber air bersih maupun irigasi.

Di Kabupaten Sleman terdapat 182 sumber mata air yang terukur debitnya mulai dari 1 s/d 400 lt/detik, yang airnya mengalir ke sungai-sungai utama yaitu Sungai Boyong, Kuning, Gendol, dan Krasak. Di samping itu terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke arah selatan dan bermuara di Samudera Hindia.

2.1.5. Klimatologi

Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta, kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman termasuk tropis basah, hari hujan terbanyak dalam satu bulan 24 hari. Kecepatan angin maksimum 10,8 m/s dan minimum 0,00 m/s, rata-rata kelembaban nisbi udara tertinggi 100% dan terendah 19,9%. Temperatur udara tertinggi 34,4°C dan terendah 16,4°C. Kondisi agroklimat di atas menunjukkan bahwa iklim di wilayah Kabupaten Sleman pada umumnya cocok untuk pengembangan sektor pertanian.

2.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Sleman secara garis besar dapat dibagi sebagai fungsi sawah, tegalan, dan pekarangan. Perkembangan penggunaan lahan selama 5tahun terakhir menunjukkan luas dan jenis lahan sawah turun, rata-rata per tahun sebesar 0,11%, luas pekarangan naik 0,13%, dan luas tegalan turun 0,02% dari total luas wilayah Kabupaten Sleman. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan di Kabupaten Sleman
Tahun 2009 – 2015

No	Tahun	Penggunaan Lahan (Ha.)		
		Sawah	Tegal	Pekarangan
1	2009	24.889	5.104	18.909
2	2010	24.796	5.094	19.012
3	2011	24.749	5.047	19.107
4	2012	24.665	5.036	19.201
5	2013	24.600	5.025	19.278
6	2014	24.543	5.018	19.340
7	2015*)	24.486	5.014	19.402

Sumber: Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah, 2015.
*) angka sementara

Data diatas menyatakan bahwa alih fungsi lahan yang terjadi mengakibatkan semakin sempitnya luas lahan sawah dan tegalan dari tahun ke tahun. Hal ini memacu Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mencari terobosan agar alih fungsi lahan dapat lebih dikendalikan, antara lain dapat menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengembangan desa wisata.

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Sleman meliputi beberapa kawasan antara lain :

1) Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah (21.113 ha) dan kawasan pertanian lahan kering (9.117 ha) yang tersebar di 17 kecamatan.
2) Kawasan peruntukan pertambangan;
   - Batu kapur di Kecamatan Gamping;
   - Breksi batuapung di Kecamatan Prambanan, dan Berbah;
   - Andesit di Kecamatan Tempel, Pakem, Turi, Cangkringan, Godean, Seyegan, dan Prambanan;
   - Tanah liat di Kecamatan Tempel, Godean, Seyegan, Sleman, Gamping, Prambanan, dan Berbah;
   - Pasir dan kerikil di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman.
3) Kawasan peruntukan industri meliputi lahan seluas 299 ha di Kecamatan Gamping, Berbah, dan Kalasan (industri non-polutan).

4) Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman perdesaan (10.232 ha) dan kawasan permukiman perkotaan (12.590 ha) yang tersebar di 17 kecamatan.
5) Kawasan peruntukan pariwisata meliputi tema wisata alam, tema wisata budaya, tema wisata perkotaan dan tema wisata pertanian.
6) Kawasan hutan kawasan hutan rakyat (3.171 ha) di Kecamatan Gamping, Seyegan, Prambanan, Turi, Pakem dan Cangkringan.
7) Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
   - Kompi C Batalyon Infanteri 403 dan Kompi Panser 2 Batalyon Kavaleri 2 di Kecamatan Gamping;
   - Batalyon Infanteri 403 di Kecamatan Depok; dan
   - Bandar Udara Adisutjipto dan Pangkalan Udara TNI AU Adisutjipto di Kecamatan Depok dan Berbah.

2.1.7.1. Wilayah Rawan Bencana Alam dan Risiko Bencana

Wilayah kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Sleman terdiri dari:

1) Kawasan rawan bencana di dalam RTRW terdiri dari:
   a. kawasan rawan tanah longsor; dan
   b. kawasan rawan kekeringan.
2) Kawasan rawan tanah longsor seluas kurang lebih 3.303 ha (tiga ribu tiga ratus tiga hektar) meliputi:
   a. Kecamatan Gamping; dan
   b. Kecamatan Prambanan.
3) Kawasan rawan kekeringan seluas ± 1.969 ha (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan hektar) berada di Kecamatan Prambanan.

Berdasarkan hasil kajian, potensi bencana yang mengancam Kabupaten Sleman dapat digolongkan pada tiga kategori, yaitu: bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Jenis bencana tersebut antara lain:

1) Erupsi Gunungapi Merapi
2) Aliran/Banjir Lahar
3) Gempa Bumi
4) Gerakan Tanah
5) Angin Puting Beliung
6) Kebakaran
7) Kekeringan

Analisis lebih lanjut terkait tingkat risiko bencana ada pada dokumen analisis risiko bencana Kabupaten Sleman.

2.1.7.2. Kawasan Lindung Geologi

1. Kawasan Lindung Geologi terdiri atas:
   a. Kawasan rawan bencana gunungapi;
   b. Kawasan rawan gempa bumi.
2. Kawasan Rawan Bencana Gunungapi meliputi:
   a. Area terdampak langsung letusan Merapi 2010 seluas ± 1.578 ha meliputi Kecamatan Ngemplak, Pakem, dan Cangkringan;
   b. Kawasan Rawan Bencana Merapi III seluas ± 3.302 ha meliputi Kecamatan Ngemplak, Turi, Pakem, dan Cangkringan;
   c. Kawasan Rawan Bencana Merapi II seluas ± 3.279 ha meliputi Kecamatan Ngemplak, Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan;
   d. Kawasan Rawan Bencana Merapi I seluas 1.357 ha meliputi Kecamatan Mlati, Depok, Berbah, Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Tempel, Pakem, dan Cangkringan.
3. Kawasan Rawan Gempa Bumi seluas kurang lebih 13.782 ha tersebar di seluruh kecamatan.

2.1.8. Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penduduk di Kabupaten Sleman pada tahun 2012 tercatat sebanyak 1.136.602 jiwa. Pada akhir tahun 2013 terjadi penurunan jumlah penduduk dari tahun 2012 sebanyak 77.219 orang atau 0,93% yaitu dari 1.136.602 orang pada tahun 2012 menjadi 1.047.325 orang pada tahun 2013. Jumlah penduduk akhir tahun 2013 turun dikarenakan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/135/SJ tanggal 23 Februari 2013 bahwa data yang dapat digunakan adalah data penduduk kabupaten/kota yang telah diolah dan dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penerbitan data dimaksud pada tanggal 30 Juni untuk semester I dan 31 Desember untuk semester II. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah penduduk di Kabupaten Sleman sebesar 1.075.126 jiwa. Selengkapnya seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Tahun	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Jiwa	%	Jiwa	%	
1	2011	560.146	49,70	566.742	50,30	1.126.888
2	2012	564.978	49,71	571.624	50,29	1.136.602
3	2013	521.444	49,79	525.881	50,21	1.047.325
4	2014	539.731	50,78	523.071	49,22	1.062.802
5	2015*)	538.074	50,05	537.052	49,95	1.075.126

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 *) semester II tahun 2015

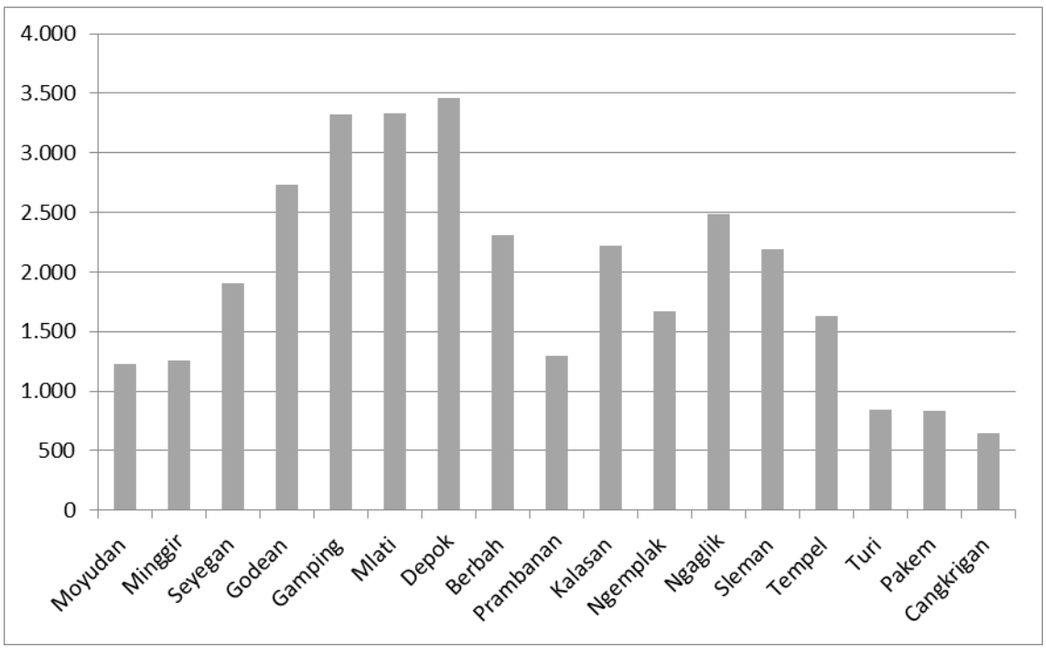
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Sleman sebagaimana data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki. Kenaikan persentase penduduk perempuan ini disebabkan oleh usia harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dari pada laki-laki.

Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu kepadatan penduduk geografis menunjukkan persebaran penduduk dari tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah.

Tabel 2.6
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk (Orang)	Kepadatan Penduduk(Orang/Km^2)
1	Moyudan	27,62	33.866	1.226
2	Minggir	27,27	34.340	1.259
3	Seyegan	26,63	50.869	1.910
4	Godean	26,84	73.455	2.737
5	Gamping	29,25	97.060	3.318
6	Mlati	28,52	95.134	3.336
7	Depok	35,55	123.152	3.464
8	Berbah	22,99	53.051	2.308
9	Prambanan	41,35	53.600	1.296
10	Kalasan	35,84	79.682	2.223
11	Ngemplak	35,71	59.557	1.668
12	Ngaglik	38,52	95.719	2.485
13	Sleman	31,32	68.567	2.189
14	Tempel	32,49	53.026	1.632
15	Turi	43,09	36.469	846
16	Pakem	43,84	36.596	835
17	Cangkringan	47,99	30.983	646
	Jumlah	574,82	1.075.126	1.870

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 *) semester II tahun 2015



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015
*) semester II tahun 2015

Gambar 2.2. Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2015

Dari data diatas menunjukkan bahwa kepadatan penduduk yang tidak merata. Kepadatan penduduk tertinggi ada di wilayah kecamatan yang berbatasan dengan perkotaan yaitu Kecamatan Depok, Mlati, dan Gamping. Kepadatan rendah terjadi di wilayah kecamatan yang berbatasan dengan GunungApi Merapi yaitu Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan. Kepadatan penduduk yang berbeda berakibat pada kebijakan pengembangan wilayah yang berbeda.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman jika dilihat dari 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 1,26%. Pertumbuhan ini relatif tinggi, hal ini disebabkan fungsi Kabupaten Sleman sebagai penyangga Kota Yogyakarta, sebagai daerah tujuan untuk melanjutkan pendidikan, dan daerah pengembangan pemukiman/perumahan, sehingga pertumbuhan penduduk yang terjadi lebih banyak didorong oleh faktor migrasi penduduk bukan oleh tingkat kelahiran yang tinggi.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Penduduk
di Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No.	Jenis Data	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%/th)	1,36	1,31	1,26	1,21	1,19

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Jumlah kepala keluarga mengalami kenaikan dari 313.309 KK pada tahun 2011 menjadi 348.781 KK pada tahun 2015. Rata-rata jumlah jiwa setiap rumah tangga sebanyak 3,05 jiwa per rumah tangga.

Tabel 2.8
Banyaknya KK dan Rata-rata Jiwa Dalam Keluarga
di Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Jenis Data	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1.	Banyaknya Kepala Keluarga (KK)	313.309	315.445	324.241	369.534	348.781
2.	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga (orang)	3,29	3,60	3,26	2,88	3,05

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015*) semester II 2015

Berdasarkan struktur umur penduduk laki-laki Tahun 2013, komposisi penduduk usia 14 tahun kebawah mencapai 22,32%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 65,47% dan penduduk usia diatas 60 tahun sebesar 12,21%.

Pada tahun 2014 komposisi penduduk laki-laki usia 14 tahun ke bawah mencapai 19,5%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 66,25%, dan usia diatas 60 tahun sebesar 14,25%.

Selanjutnya pada tahun 2015 komposisi penduduk laki-laki usia 14 tahun ke bawah mencapai 22,08%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 64,50%, dan usia diatas 60 tahun sebesar 13,42%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Penduduk Laki-laki Berdasarkan Umur
di Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

Kelompok Umur	2011	2012	2013	2014	2015
0-4	32.845	32.323	34.229	28.049	34.829
5-9	38.820	38.153	40.319	37.709	41.144
10-14	40.234	40.741	41.830	39.490	42.825
15-19	37.500	37.838	38.839	37.017	40.193
20-24	37.158	37.271	37.821	35.865	36.125
25-29	49.773	45.912	37.356	36.796	34.980
30-34	55.976	57.220	44.832	47.308	43.247
35-39	51.451	51.762	43.204	46.896	45.373
40-44	48.387	49.619	42.325	45.919	42.709
45-49	39.479	41.009	37.868	42.317	41.257
50-54	32.827	33.830	31.827	35.284	33.227

Kelompok Umur	2011	2012	2013	2014	2015
55-59	26.942	27.655	27.310	30.170	29.944
60+	68.754	71.645	63.684	76.911	72.221
JUMLAH	**560.146**	**564.978**	**521.444**	**539.731**	**538.074**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015

Berdasarkan struktur umur penduduk perempuan Tahun 2013, komposisi penduduk usia 14 tahun ke bawah mencapai 20,81%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 65,51% dan penduduk usia diatas 60 tahun sebesar 13,68%.

Berdasarkan struktur umur penduduk perempuan Tahun 2014, komposisi penduduk usia 14 tahun kebawah mencapai 18,37%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 66,62% dan penduduk usia diatas 60 tahun sebesar 15,01%.

Berdasarkan struktur umur penduduk perempuan Tahun 2015, komposisi penduduk usia 14 tahun kebawah mencapai 20,95%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 64,34% dan penduduk usia diatas 60 tahun sebesar 14,71%.

Tabel 2.10
Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur
di Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

Kelompok Umur	2011	2012	2013	2014	2015
0-4	30.974	32.575	32.950	26.122	33.479
5-9	36.392	35.704	37.686	34.262	39.047
10-14	37.401	37.964	38.797	35.697	39.979
15-19	35.353	35.146	36.010	34.365	37.564
20-24	36.387	36.643	36.636	35.142	35.122
25-29	50.089	46.868	38.124	37.727	35.540
30-34	54.880	56.102	45.073	46.294	43.480
35-39	51.704	51.799	43.720	45.265	44.369
40-44	48.413	49.655	42.736	43.324	41.903
45-49	40.393	41.342	39.454	40.944	41.157
50-54	34.401	35.771	34.178	35.775	34.916
55-59	26.948	28.202	28.563	29.615	31.497
60+	83.407	83.853	71.954	78.539	78.999
JUMLAH	**566.742**	**571.624**	**525.881**	**523.071**	**537.052**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015

Berdasarkan data struktur penduduk, nampak bahwa penduduk kelompok umur 0-4 tahun mengalami penurunan yang signifikan

sedangkan jumlah penduduk yang berumur diatas 60 tahun mengalami peningkatan yang siginifikan, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Tabel 2.11
Rasio Ketergantungan Penduduk
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Rasio Ketergantungan (%)		
	0-14 tahun	15-64 tahun	≥ 65 tahun	Muda (Anak)	Tua (Lansia)	Total
2011	216.008	795.512	115.368	28	15	43
2012	231.798	781.207	123.597	30	16	46
2013	225.760	725.097	96.461	31	13	44
2014	201.329	749.805	111.667	27	15	42
2015	231.303	737.483	106.340	31	14	45

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015

Berdasarkan data Tahun 2015 dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan total adalah sebesar 45%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 45% ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 31%, dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 14%. Rasio Ketergantungan *(Dependency Ratio)* 45 ini masuk kategori tinggi. Hal ini disebabkan oleh bonus demografi yang akan menjadi usia produktf di tahun 2025. Disisi yang lain pada tahun 2025 akan terjadi pergeseran usia ketergantungan penduduk tua yang semakin tinggi.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Berdasarkan angka realisasi yang diambil dari tahun dasar 2010 adalah tahun 2011 sebesar 5,42%, tahun 2012 sebesar 5,79%, tahun 2013 sebesar 5,89%, tahun 2014 sebesar 5,41%, dan pada tahun 2015 sebesar 5,34%. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Sleman selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Pertumbuhan Sektor dan PDRB
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015*) %
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,75	5,86	2,74	-4,76	2,40
B	Pertambangan dan Penggalian	10,34	1,50	2,28	1,01	0,21
C	Industri Pengolahan	4,48	-2,12	6,01	2,04	2,06
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,16	9,82	6,71	0,46	-1,58
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,09	4,24	1,17	4,02	3,05
F	Konstruksi	6,11	6,08	4,74	6,14	4,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,80	7,76	5,27	6,45	6,46
H	Transportasi dan Pergudangan	7,29	8,50	9,03	5,40	4,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,45	6,79	7,12	6,02	6,41
J	Informasi dan Komunikasi	9,76	10,05	8,45	7,25	5,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,08	3,66	13,17	11,13	8,52
L	Real Estate	4,64	8,86	5,00	8,37	6,79
M,N	Jasa Perusahaan	6,67	8,30	3,37	9,03	7,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,26	7,09	4,96	6,60	5,23
P	Jasa Pendidikan	7,12	5,05	4,21	8,57	7,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,22	10,08	7,94	8,01	7,69
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,64	5,90	4,92	5,80	8,22
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**5,42**	**5,79**	**5,89**	**5,41**	**5,34**

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2015 (tahun dasar 2010) *) angka sementara

Pada tahun 2015 sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) adalah industri pengolahan yaitu sebesar 12,73%, dan yang paling rendah adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 0,05%. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Sleman selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha ADH Konstan 2010
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian/Sektor	2011		2012		2013		2014		2015*)	
		(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.899.940,0	8,39	2.011.265,1	8,40	2.066.440,3	8,15	1.968.070,7	7,36	2.015.359,1	7,15
B	Pertambangan dan Penggalian	109.962,6	0,49	111.615,1	0,47	114.158,6	0,45	115.316,4	0,43	115.553,6	0,41
C	Industri Pengolahan	3.318.220,1	14,65	3.247.733,5	13,56	3.442.811,3	13,57	3.513.098,4	13,14	3.585.625,6	12,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	27.942,7	0,12	30.687,6	0,13	32.747,5	0,13	32.897,8	0,12	32.379	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.898,0	0,05	12.402,5	0,05	12.547,3	0,05	13.051,2	0,05	13.450	0,05
F	Konstruksi	2.535.035,0	11,19	2.689.103,6	11,22	2.816.446,0	11,10	2.989.378,7	11,18	3.118.415	11,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.659.343,1	7,33	1.788.177,8	7,46	1.882.435,0	7,42	2.003.871,3	7,49	2.133.402,0	7,57
H	Transportasi dan Pergudangan	1.370.422,6	6,05	1.486.851,7	6,21	1.621.175,8	6,39	1.708.682,4	6,39	1.784.542,4	6,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.128.690,7	9,40	2.273.315,2	9,49	2.435.074,3	9,60	2.581.614,6	9,65	2.747.147,4	9,75
J	Informasi dan Komunikasi	2.154.212,9	9,51	2.370.708,0	9,90	2.571.044,5	10,14	2.757.450,5	10,31	2.915.395	10,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	608.323,0	2,69	630.611,7	2,63	713.637,0	2,81	793.030,1	2,97	860.618,5	3,06
L	Real Estate	1.766.791,0	7,80	1.923.376,6	8,03	2.019.632,4	7,96	2.188.665,9	8,18	2.337.208	8,30
M,N	Jasa Perusahaan	422.228,5	1,86	457.275,9	1,91	472.690,1	1,86	515.392,4	1,93	552.323	1,96
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.350.369,6	5,96	1.446.081,9	6,04	1.517.840,3	5,98	1.618.043,2	6,05	1.702.640	6,04
P	Jasa Pendidikan	2.256.431,2	9,96	2.370.403,3	9,89	2.470.132,9	9,74	2.681.853,4	10,03	2.894.124	10,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	499.901,9	2,21	550.302,6	2,30	593.989,7	2,34	641.582,9	2,40	690.891	2,45
R,S,T,U	Jasa lainnya	526.138,9	2,32	557.200,8	2,33	584.611,3	2,30	618.537,2	2,31	669.409	2,38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**22.645.851,9**	**100,0**	**23.957.112,8**	**100,0**	**25.367.414,2**	**100,0**	**26.740.537,1**	**100,0**	**28.168.481,7**	**100,0**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		**22.645.851,9**		**23.957.112,8**		**25.367.414,2**		**26.740.537,1**		**28.168.481,7**	

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2015 *) angka sementara

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB 2010) tahun 2015 sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah industri pengolahan yaitu sebesar 13,45%, dan yang paling rendah adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 0,05%. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Sleman selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha ADH Berlaku 2010 Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

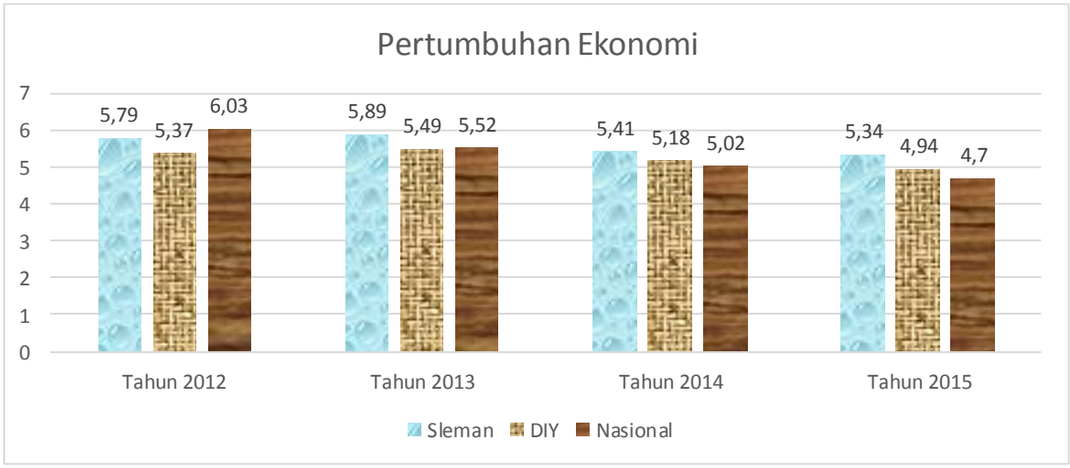
Kategori	Uraian/Sektor	2011		2012		2013		2014		2015*)	
		(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.074.187,9	8,73	2.290.986,4	8,90	2.534.773,3	8,96	2.574.199,3	8,35	2.803.418,1	8,46
B	Pertambangan dan Penggalian	113.929,1	0,48	116.627,4	0,45	122.599,9	0,43	137.850,2	0,45	144.705,3	0,44
C	Industri Pengolahan	3.525.819,9	14,84	3.564.850,8	13,85	4.021.392,5	14,21	4.310.924,1	13,99	4.456.404,7	13,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25.462,1	0,11	25.229,9	0,10	24.296,8	0,09	24.641,2	0,08	24.860,6	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.575,9	0,05	13.270,2	0,05	14.052,2	0,05	16.069,8	0,05	16.882,3	0,05
F	Konstruksi	2.672.609,9	11,25	2.892.462,5	11,24	3.109.586,7	10,99	3.339.673,5	10,84	3.564.426,7	10,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.770.478,2	7,45	1.935.808,7	7,52	2.103.955,9	7,44	2.292.696,9	7,44	2.461.108,9	7,43
H	Transportasi dan Pergudangan	1.427.247,1	6,01	1.638.557,6	6,37	1.929.376,7	6,82	2.164.299,8	7,02	2.336.271,9	7,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.256.011,2	9,49	2.495.259,2	9,70	2.796.604,3	9,88	3.086.048,1	10,02	3.394.553,5	10,24
J	Informasi dan Komunikasi	2.145.998,4	9,03	2.343.189,4	9,11	2.470.222,7	8,73	2.612.761,5	8,48	2.680.898,5	8,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	647.864,9	2,73	726.674,2	2,82	860.246,4	3,04	993.408,7	3,22	1.094.737,2	3,30
L	Real Estate	1.832.978,6	7,71	2.014.600,3	7,83	2.129.836,5	7,53	2.383.940,9	7,74	2.581.048,5	7,79
M,N	Jasa Perusahaan	431.986,4	1,82	460.136,2	1,79	470.231,8	1,66	528.106,6	1,71	567.772,1	1,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.422.703,0	5,99	1.594.237,3	6,20	1.796.460,4	6,35	2.021.715,0	6,56	2.209.705,9	6,67
P	Jasa Pendidikan	2.342.505,6	9,86	2.459.108,3	9,56	2.644.487,8	9,35	2.943.821,9	9,55	3.285.116,6	9,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	533.367,0	2,24	590.589,7	2,30	646.475,9	2,28	701.977,8	2,28	776.748,3	2,34
R,S,T,U	Jasa lainnya	528.640,6	2,22	570.660,8	2,22	620.762,9	2,19	680.848,8	2,21	737.493,3	2,23
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**23.764.365,7**	**100,0**	**25.732.248,9**	**100,0**	**28.295.362,8**	**100,0**	**30.812.984,1**	**100,0**	**33.136.152,3**	**100,0**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		**23.764.365,7**		**25.732.248,9**		**28.295.362,8**		**30.812.984,1**		**33.136.152,3**	

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2015 *) angka sementara

Berdasarkan data diatas, industri pengolahan memiliki pertumbuhan dan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Sleman. Meskipun pertumbuhan dan kontribusinya dibawah industri pengolahan, perhatian terhadap pembangunan sektor pertanian masih sangat diperlukan mengingat sektor ini cukup strategis terutama terkait dengan ketahanan pangan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman selama dua tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,89%, kemudian berturut-turut menurun pada tahun 2014 sebesar 5,41%, dan pada tahun 2015 sebesar 5,34%. Pertumbuhan ekonomi

suatu daerah sulit diprediksi karena sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman dapat dilihat seperti gambar diagram berikut ini:



Sumber : BPSTahun 2015

Gambar 2.3. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional

PDRB perkapita menurut harga berlaku 2010 (Hb) selama 5 tahun meningkat rata-rata 10,08% per tahun, sedangkan menurut harga konstan 2010 (Hk) meningkat rata-rata 6,95%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya PDRB perkapita harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 6,31% yaitu dari Rp28,99 juta pada tahun 2014 menjadi Rp30,82 juta pada tahun 2015, sedangkan PDRB harga konstan mengalami peningkatan sebesar 4,13% yaitu dari Rp25,16 juta pada tahun 2014 menjadi Rp26,20 juta pada tahun 2015. PDRB per kapita selama 5 tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.15
PDRB Per Kapita Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	PDRB	Nilai (Juta Rp.)				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1.	Hb	21,09	22,64	27,02	28,99	30,82
2.	Hk	20,10	21,08	24,22	25,16	26,20

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2015*) angka sementara

2.2.1.2. Laju Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2014 yaitu dari 5,85% pada tahun 2014 menjadi 4,21% pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.16
Nilai inflasi Rata-rata Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Inflasi (%)	3,19	4,06	6,92	5,85	4,21	4,85

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2015

Pada tahun 2015 inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 9,12%, dan terendah pada kelompok pengeluaran sandang sebesar 0,01%. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Kelompok Pengeluaran	Tingkat Inflasi (%)					
		2011	2012	2013	2014	2015*)	Rata-rata
1	Bahan Makanan	1,97	7,07	12,89	7,85	7,97	7,55
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	5,19	6,72	8,48	4,35	9,12	6,77
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	3,02	3,90	5,41	6,16	2,71	4,24
4	Sandang	5,63	2,63	0,33	3,11	0,01	2,34
5	Kesehatan	5,58	1,44	2,24	3,50	2,37	3,03
6	Pendidikan, Rekreasi, & Olah Raga	0,94	1,32	1,20	2,16	1,10	1,34
7	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	2,12	1,18	12,09	8,41	1,05	4,97
	Umum	**3,19**	**4,06**	**6,92**	**5,85**	**4,21**	**4,85**

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2015*) angka sementara

2.2.1.3. Indeks Gini

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah *(gap)* yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau *Gini Ratio*. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah **G<0,30** berarti ketimpangan rendah, **0,30≤G≤0,50** berarti ketimpangan sedang dan **G > 0,50** berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa angka Indeks Gini di Kabupaten Sleman semakin meningkat yang berarti bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman dari tahun 2010-2012 lebih tidak merata, meskipun angka Indeks Gini tersebut masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan sedang. Pada Tahun 2013, angka Indeks Gini di Kabupaten Sleman semakin mengecil yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Sleman semakin mengecil atau distribusi pendapatan antar penduduk semakin merata. Namun pada tahun 2014 angka indeks gini meningkat yang berarti ketimpangan semakin melebar. Angka Indeks Gini tahun 2010-2015 dapat dilihat padatabel berikut ini :

Tabel 2.18
Indeks Gini Kabupaten Sleman Tahun 2010-2015

No.	Tahun	Indeks Gini
1	2010	0,37
2	2011	0,41
3	2012	0,44
4	2013	0,38
5	2014	0,41
6	2015*)	0,40

Sumber : BPS Kabupaten Sleman, 2015*) angka sementara

2.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Berdasarkan rata-rata ketiga indeks yang menjadi penyusun IPM, diperoleh nilai IPM Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sebesar 80,73. Dari tahun ke tahun, nilai IPM Kabupaten Sleman terus mengalami kenaikan, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman menempati peringkat kedua tertinggi di DIY setelah Kota Yogyakarta. Nilai IPM Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori sangat tinggi (IPM>80).

Tabel 2.19
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
Indikator Penyusunan IPM						
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,43	74,44	76,47	74,47	74,47
2.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,42	15,45	15,48	15,52	15,64
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,03	10,03	10,03	10,28	10,28
4.	Pengeluaran Perkapita Riil Sehari Disesuaikan	13.848	13.882	13.916	14.085	14.170
Indeks IPM						
1.	Indeks Kesehatan	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
2.	Indeks Pengetahuan	0,75	0,76	0,76	0,77	0,78
	Indeks Harapan Lama Sekolah	0,86	0,86	0,86	0,86	0,87
	Indeks Rata-rata Lama Sekolah	0,65	0,67	0,67	0,67	0,69
3.	Indeks Pendapatan	0,80	0,80	0,80	0,81	0,81
IPM		**79,69**	**80,04**	**80,10**	**80,26**	**80,73**

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2015*) angka sementara

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap beberapa indikator pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kemiskinan.

2.2.2.1. Pendidikan

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat bidang pendidikan dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah.

1) Angka Melek Huruf (AMH)

   Angka Melek Huruf digunakan untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf terutama di daerah pedesaan. Selain itu AMH juga untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media. Angka Melek Huruf juga dapat menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga AMH dapat dipakai sebagai dasar kabupaten untuk melihat potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

   Angka melek huruf di Sleman pada tahun 2011 mencapai 93,94%. Sedangkan pada tahun 2012 AMH di Sleman naik menjadi 94,53%. Jika dibandingkan tahun 2012, AMH Kabupaten Sleman tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 98,03%. Sedangkan untuk

tahun 2014 AMH di Sleman sebesar 98,31%. Ini artinya bahwa di Kabupaten Sleman pada tahun 2014 masih ada 1,69% penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf. Sedangkan pada tahun 2015 AMH di Kabupaten Sleman mencapai 98,80%. Artinya di Kabupaten Sleman yang masih buta huruf ada 1,20%. Berikut disajikan data perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Sleman.

Tabel 2.20
Angka Melek Huruf, Lama Sekolah dan Angka Partisipasi Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka melek huruf	93,94	94,53	98,03	98,31	98,80
2	APK SD/MI	116,45	116,51	114,77	116,78	116,81
3	APK SMP/MTs	113,68	113,70	108,93	111,41	111,70
4	APK SMA/MA/SMK	77,66	77,69	79,00	86,39	87,37
5	APM SD/MI	101,51	100,87	99,96	102,07	103,20
6	APM SMP/MTs	79,65	81,84	81,24	81,63	83,96
7	APM SMA/MA/SMK	54,04	55,11	55,16	57,73	58,95

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2015*)angka sementara

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2011 sebesar 116,45%. Pada tahun 2012 APK SD/MI mencapai 116,51%. Sedangkan pada tahun 2013 APK SD/MI mencapai 114,77%. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/135/SJ tanggal 23 Februari 2013 bahwa data yang dapat digunakan adalah data penduduk kabupaten/kota yang telah diolah dan dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, maka penghitungan APK mengalami perubahan, karena pada tahun-tahun sebelumnya jumlah penduduk berdasarkan data dari BPS. Pada tahun 2014 APK SD/MI mengalami kenaikan menjadi 116,78%. Sedangkan pada tahun 2015 APK SD/MI Kabupaten Sleman mencapai 116,81%.

Sementara itu APK SMP/M.Ts pada tahun 2011 mencapai 113,68% dan meningkat menjadi 113,70% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 dapat dilihat bahwa APK SMP/M.Ts sebesar 108,93% dan naik pada tahun 2014 menjadi 111,41%. Sedangkan pada tahun 2015 APK SMP/M.Ts mencapai 111,70%.

Untuk APK SMA/MA/SMK pada tahun 2011 mencapai 77,66% dan meningkat menjadi 77,69% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 SMA/MA/SMK sebesar 79,00% dan pada tahun 2014 APK SMA/MA/SMK menjadi 86,39% atau meningkat sebesar 7,39% dari tahun 2013. Sedangkan APK SMA/MA/SMK Sleman pada tahun 2015 sebesar 87,37%.

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Pada jenjang SD/MI APM pada tahun 2011 mencapai 101,51% dan pada tahun 2012 mencapai 100,87%. Pada tahun 2013 APM SD/MI di Sleman sebesar 99,96% dan tahun 2014 sebesar 102,07%. Sedangkan APM SD/MI di Sleman pada tahun 2015 sebesar 103,20%.

Untuk APM tingkat SMP/M.Ts pada tahun 2011 sebesar 79,65% dan pada tahun 2012 sebesar 81,84%. Adapun untuk APM SMP/M.Ts pada tahun 2013 sebesar 81,24% dan tahun 2014 menjadi 81,63%. Sedangkan pada tahun 2015 APM SMP/M.Ts sebesar 83,96%

APM SMA/MA/SMK pada tahun 2011 mencapai 54,04% dan pada tahun 2012 mencapai 55,11%. Pada tahun 2013 APM SMA/MA/SMK sebesar 55,16% dan tahun 2014 menjadi 57,73%. Sedangkan APM SMA/MA/SMK pada tahun 2015 mencapai 58,95%. Data selengkapnya AMH, Rata-rata lama sekolah, APK, APM Kabupaten Sleman tahun 2011-2015 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.21

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) DAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) TIAP JENJANG PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
TAHUN 2015/2016

No.	Kecamatan	APK Tingkat SD			APM Tingkat SD			APK Tingkat SMP			APM Tingkat SMP			APK Tingkat SM			APM Tingkat SM		
		Termasuk Paket A			Termasuk Paket A			Termasuk Paket B			Termasuk Paket B			Termasuk Paket C			Termasuk Paket C		
		L	P	Rata-Rata	L	P	Rata-Rata	L	P	Rata-Rata	L	P	Rata-Rata	L	P	Rata-Rata	L	P	Rata-Rata
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
01	Sleman	132,35	132,87	132,60	118,40	118,49	118,44	124,99	145,27	134,65	91,91	105,88	98,57	97,30	82,82	90,16	72,11	61,47	66,86
02	Mlati	102,43	97,16	99,82	91,25	86,33	88,82	96,18	89,15	92,79	71,54	63,56	67,69	41,62	59,43	50,11	28,93	39,26	33,86
03	Gamping	102,15	95,21	98,80	90,97	84,53	87,86	97,12	90,51	93,90	70,39	65,60	68,06	51,53	40,01	45,97	37,31	24,33	31,04
04	Godean	122,35	124,55	123,41	108,58	111,14	109,81	98,05	117,24	107,38	74,62	88,89	81,56	31,21	160,56	93,66	20,74	106,64	62,21
05	Moyudan	139,28	136,55	137,96	121,17	118,64	119,95	171,08	191,62	180,56	132,99	148,73	140,26	152,16	86,53	118,22	109,90	63,33	85,81
06	Minggir	119,02	129,66	124,00	102,59	111,44	106,73	182,44	166,34	174,55	136,88	125,19	131,15	36,04	41,96	38,90	25,85	31,93	28,79
07	Seyegan	115,90	107,68	111,88	100,36	93,25	96,88	89,50	89,62	89,56	66,34	63,69	65,03	158,91	64,01	110,57	118,80	41,81	79,59
08	Tempel	118,35	116,08	117,27	102,73	102,03	102,39	113,58	110,31	112,06	84,58	85,35	84,93	63,04	182,28	122,34	48,30	130,49	89,18
09	Turi	117,99	124,32	121,06	103,18	110,50	106,73	124,91	120,12	122,69	97,84	98,29	98,05	41,34	64,92	52,66	32,57	49,98	40,93
10	Pakem	143,29	139,18	141,27	124,94	123,60	124,28	206,35	257,65	229,36	162,81	197,54	178,39	168,92	132,18	151,83	122,07	78,73	101,92
11	Cangkringan	135,04	134,03	134,56	118,36	117,14	117,79	100,27	89,88	95,33	82,65	69,49	76,40	146,25	146,10	146,17	105,10	94,32	99,88
12	Ngemplak	103,66	96,93	100,40	90,16	85,82	88,06	109,19	104,55	106,98	84,38	78,53	81,59	33,09	37,34	35,10	19,26	23,80	21,42
13	Ngaglik	93,11	97,84	95,37	82,19	86,51	84,26	111,33	124,45	117,51	87,19	94,70	90,73	73,05	79,49	76,07	50,21	51,86	50,98
14	Depok	138,86	136,67	137,82	123,56	120,89	122,29	88,16	90,59	89,30	64,43	68,18	66,19	149,09	149,90	149,47	108,49	110,26	109,33
15	Kalasan	114,23	117,21	115,62	100,15	102,75	101,37	79,78	81,99	80,88	61,12	61,91	61,52	48,57	70,08	58,71	27,05	38,26	32,33
16	Berbah	109,46	99,52	104,54	95,00	88,97	92,01	69,05	86,83	77,84	53,32	69,07	61,11	66,05	63,13	64,63	44,97	48,18	46,53
17	Prambanan	141,57	136,82	139,21	126,60	123,94	125,27	187,58	187,41	187,50	134,00	133,05	133,54	139,78	83,60	113,42	39,13	36,31	37,81
	Rata-rata	117,75	115,79	116,81	103,86	102,49	103,20	109,78	113,79	111,70	82,77	85,26	83,96	83,63	91,42	87,37	56,60	61,48	58,95

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2015
*)angka sementara

4) Angka rata-rata lama sekolah

Lamanya sekolah atau *years of schooling* merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.

Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 rata-rata lama sekolah sebesar 10,03%. Dan pada tahun 2014 rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan menjadi 10,28% Sedangkan pada tahun 2015 diasumsikan rata-rata lama sekolah tetap sama dengan tahun 2014.

5) Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk dalam bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2011 angka HLS adalah 15,45 artinya bahwa penduduk Sleman pada tahun 2011 harapan lama sekolahnya sampai 15,45 atau setingkat dengan jenjang D2. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 15,48. Sedangkan pada tahun 2013 mencapai 15,52 dan pada tahun 2014 menjadi 15,64. Diasumsikan pada tahun 2015 menjadi 15,65. Perkembangan data angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Harapan Lama Sekolah	15,45	15,48	15,52	15,64	15,65*
2	Rata-rata Lama Sekolah	10,03	10,03	10,03	10,28	10,28*

Sumber : BPS, 2015*) angka sementara

2.2.2.2. Kesehatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan pada tahun 2015 telah mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Capaian indikator pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Usia Harapan Hidup

   Rata-rata usia harapan hidup dengan cara perhitungan baru tahun 2014 sebesar 74,47 (laki-laki 73,43 tahun; perempuan 76,39).

2) Angka Kematian Bayi

   Angka kematian bayi 4,65 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 3,45 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

3) Angka Kematian Ibu Melahirkan

   Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2014 sebesar 83,29 per 100.000 kelahiran hidup mengalami penurunan menjadi 27,67 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

4) Balita Gizi Buruk

   Persentase balita dengan gizi buruk pada tahun 2014 mencapai 0,44%, mengalami penurunan menjadi 0,40% pada tahun 2015.

5) Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

   Persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2014 sebesar 99,99%, turun menjadi sebesar 99,98% pada tahun 2015, sudah lebih baik dari target nasional 95%.

6) Cakupan Penggunaan Air Bersih

   Cakupan penggunaan air bersih pada tahun 2014 sebesar 99,29% dan pada tahun 2015 mencapai 100% (angka sementara). Penggunaan air bersih tidak hanya meliputi pelayanan air bersih dari PDAM tetapi juga melalui SPAMDES dan sumur terlindungi.

7) Cakupan Penggunaan Jamban Keluarga

   Cakupan penggunaan jamban keluarga di Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sebesar 92,94%. Hasil pencapaian ini sudah di atas capaian tingkat Propinsi yaitu sebesar 82,88%, dan di atas capaian target Nasional yaitu sebesar 72%.

8) Cakupan Penggunaan SPAL

   Cakupan penggunaan SPAL tahun 2015 sebesar 78,99% jika dibadingkan dengan capaian tahun 2014 hanya sebesar 77,46% namun demikian hal ini sudah diatas target Nasional yaitu 65%. Pencapaian ini dikarenakan adanya kegiatan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM) yang sampai dengan tahun 2015 sudah terselenggara di 86 Desa.

Adapun capaian indikator kesehatan tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.23
Indikator Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator	Capaian Kabupaten Sleman				
		2011	2012	2013	2014	2015**)
1	Usia harapan hidup rata-rata *):	74,44	74,46	74,47	74,47	74,47
2	Angka Kematian Bayi/1.000 KH	5,25	4,70	4,6	4,65	3,45
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000 KH	122	81,88	63,70	83,29	27,67
4	Persentase Balita Gizi Buruk	0,5	0,45	0,37	0,44	0,40
5	Universal Child Immunization/UCI (%)	100	100	100	100	100
6	Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100
7	Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (%)	99,61	99,86	99,90	99,99	99,98
8	Cakupan Rumah Tangga Sehat (%)	82,8	83,82	85,47	86,78	88,99
9	Cakupan penggunaan Air Bersih (%)	94,9	95,14	98,33	99,29	100
10	Cakupan penggunaan Jamban Keluarga (%)	65,1	75,11	81,65	92,94	94,26
11	Cakupan penggunaan SPAL (%)	48,8	59,62	70,93	77,46	78,99

Sumber : Dinas Kesehatan, 2015;
*) sumber BPS Kab. Sleman, 2015
**) angka sementara

2.2.2.3. Ketenagakerjaan

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang bekerja. Pembangunan ekonomi mampu menyerap sebagian tenaga kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Gambaran ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman Tahun 2015 tercatat sebanyak 829.355 orang penduduk usia kerja yang terdiri dari angkatan kerja sebanyak 569.584 orang dan 259.771 orang bukan angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) atau rasio angkatan kerja dengan penduduk usia kerja yaitu 68,68%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,12%. Selengkapnya dapat dilihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.24
Perkembangan Ketenagakerjaan
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penduduk Usia Kerja (orang)	782.251	939.463	875.102	861.472	829.355
2.	Angkatan Kerja	524.326	560.378	541.921	560.772	569.584
	- Bekerja (orang)	484.405	522.622	506.862	526.171	534.725
	- Penganggur Terbuka (orang)	39.921	37.754	35.059	34.601	34.859
3.	Bukan Angkatan Kerja (orang)	257.925	379.087	333.181	300.700	259.771
4.	TPAK (%)	67,03	59,65	61,93	65,09	68,68
5.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,61	6,74	6,47	6,17	6,12

Sumber: Dinas Tenagakerja dan Sosial, 2015

Lapangan usaha yang menjadi sumber penyerapan tenaga kerja dan perkembangan ekonomi daerah tumbuh variatif sehingga daya serap tenaga kerja dan kontribusinya pada PDRB berbeda. Kemampuan lapangan usaha sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja pada periode 2011-2015 cukup fluktuatif. Sektor pertanian mengalami penurunan, sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan dan jasa serta sektor listrik, air dan gas mengalami kenaikan. Gambaran penduduk bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2011-2015 seperti pada Tabel 2.25.

Pada tahun 2015, sebagian besar penduduk di Kabupaten Sleman bekerja di sektor pertanian serta jasa-jasa yang masing-masing menyerap 123.073 orang (23.02%) dan 116.256 orang (21,74%). Sektor lainnya yang relatif besar menyerap tenaga kerja adalah sektor Perdagangan dan Hotel serta Keuangan dan Jasa Perusahaan yang masing-masing menyerap 76.531 orang (14,37%) dan 72.485 orang (13,56%). Selengkapnya dapat dilihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.25
Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sleman Tahun 2011–2015

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	136.903	159.037	129.249	123.981	123.073
2.	Pertambangan/ Penggalian	11.946	11.972	9.599	9.648	9.913
3.	Industri Pengolahan	54.424	48.130	52.181	55.765	54.662
4.	Listrik, Air, dan Gas	9.979	8.847	9.363	10.817	11.809
5.	Bangunan	55.557	50.879	43.246	43.895	46.802
6.	Perdagangan dan Hotel	50.995	75.797	78.602	80.031	76.531
7.	Angkutan dan Komunikasi	20.491	18.260	21.180	23.688	23.193
8.	Keuangan dan Jasa Perusahaan	23.237	32.648	46.541	58.557	72.485
9.	Jasa-jasa	120.873	117.052	116.901	119.789	116.256
	Jumlah	484.405	522.622	506.862	526.171	534.724

Sumber: Dinas Tenagakerja dan Sosial, 2015

2.2.2.4. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun semakin menurun. Penurunan ini di dukung dengan telah adanya basis data terpadu (SIM Kemiskinan) dan semakin sinerginya pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan antar SKPD. Penurunan persentase penduduk miskin dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.26
Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Sleman Tahun 2012-2015

2012(%)	2013(%)	2014(%)	2015(%)
15,85	13,89	11,85	11,36

Sumber : Badan KBPMPP, 2015

2.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Analisis atas kinerja Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap indikator kebudayaan dan olahraga:

2.2.3.1. Kebudayaan

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa,

memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat.

Di bawah ini disampaikan data tentang grup kesenian serta gedung kesenian yang ada di Kabupaten Sleman, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.27
Perkembangan Seni, Budaya
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No.	Capaian Pembangunan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah grup kesenian	893	1.125	1.353	1.353	1.346
2	Jumlah gedung kesenian	7	8	10	10	12

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2015

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa di Kabupaten Sleman pada tahun 2011 memiliki kelompok kesenian sejumlah 893 kelompok kesenian yang tersebar di 17 Kecamatan dan 86 desa. Pada tahun 2012 jumlahnya bertambah menjadi 1.125 kelompok. Dan pada tahun 2013 bertambah lagi menjadi 1.353 kelompok. Pada tahun 2014 jumlah grup kesenian di Sleman jumlahnya tetap sama tidak ada perubahan dengan tahun 2013, yakni sebanyak 1.353 grup. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah grup kesenian yang ada di Sleman mencapai 1.346 grup. Hal ini menggambarkan bahwa kelompok-kelompok kesenian tetap terpelihara dengan baik di masyarakat untuk mendukung desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman.

Pemerintah Kabupaten Sleman memliki potensi budaya *tangible* dan *intangible* yang variatif berupa candi dan situs, rumah tradisional, tempat bersejarah, monumen, museum, upacara adat, desa budaya dan berbagai macam kesenian. Selain itu di kabupaten Sleman juga marak dengan berbagai aktivitas budaya dan kesenian, demikian juga dengan partisipasi masyarakat yang cukup dinamis. Potensi Budaya di Kabupaten Sleman digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.28
Potensi Budaya dan kesenian
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Candi	70	70	70	70	70
2	Situs	116	116	116	116	117
3	Rumah Tradisional	414	414	414	414	414
4	Wisata sejarah	11	11	11	11	11
5	Monumen/ tetenger	33	33	33	33	33
6	Museum	10	10	10	13	13
7	Upacara Adat	10	10	10	10	10
8	Tradisi Budaya	30	32	36	50	55
9	Desa Budaya	6	6	6	10	14
9	Jenis Kesenian	890	1.278	1.353	1.353	1.346
10	Gedung kesenian	7	8	8	10	12

Sumber: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 2015

Dari data di atas menggambarkan bahwa di Kabupaten Sleman marak dengan berbagai aktivitas budaya dan kesenian. Partisipasi masyarakat cukup dinamis. Namun demikian hal tersebut belum diikuti dengan fasilitas gedung kesenian yang memadai. Dengan jumlah penduduk sebesar 1.075.126 jiwa pada tahun 2015 Kabupaten Sleman baru memiliki fasilitas gedung kesenian sebanyak 12 gedung kesenian.

Gedung kesenian di Kabupaten Sleman adalah Balai Budaya Minomartani, Balai Budaya Sinduharjo Ngaglik, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kependidikan Seni Budaya Klidon, Gedung Kesenian Sleman, Gedung Kesenian Universitas Negeri Yogyakarta, Panggung Trimurti dan Panggung Rorojonggrang Prambanan, Gedung Kesenian Hardjo Sumantri, Ndalem Notoprajan Rejodani, Panggung Terbuka Kaliurang, Gedung Serba Guna Sleman, Pendopo Ambarukmo, Gedung MMTC, Gedung RRI Nusantara II Yogyakarta.

2.2.3.2. Olahraga

Dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Sebagaimana kata pepatah terkenal “Men Sana In Corporesano” yang artinya adalah “Didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat”. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu

indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas olahraga. Di bawah ini data tentang jumlah klub olahraga serta data gedung olahraga yang ada di Kabupaten Sleman sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.29
Perkembangan Olahraga
di Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No.	Capaian Pembangunan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah klub olahraga	37	74	97	138	215
2	Jumlah gedung olahraga	11	52	52	71	206

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2015

Berdasarkan data diatas jumlah klub olahraga pada tahun 2014 sebanyak 138 klub yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Sleman yang terdiri dari 7 cabang olahraga yaitu: Sepak Bola, Bulu Tangkis, Bola Volli, Tenis Meja, Sepak Takraw, Bola Basket, dan Futsal. Dari cabang olahraga tersebut tersedia prasarana dan sarana berupa gedung olahraga indoor baik yang dimiliki perseorangan, dusun, desa, pemerintah daerah, maupun lembaga pendidikan. Sesuai pendataan yang dilakukan pada tahun 2014 jumlah gedung olahraga sebanyak 71 gedung.Sedangkan data jumlah cabang olahraga pada tahun 2015 terdapat peningkatan jumlah yang cukup signifikan yaitu sebanyak 23 cabang olahraga, dengan jumlah klub olahraga sebanyak 215 klub yang didukung dengan gedung olahraga sebanyak 206 gedung olahraga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari SKPD Kabupaten Sleman.

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintahan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1.1. Urusan Wajib Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara

umum. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut:

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda.

Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Bisa jadi kenaikan tersebut karena dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah.

Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di lingkup kabupaten dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.30
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	APS SD/MI	113,17	115,42	111,77	104,43	115,34
2	APS SMP/MTs	108,18	110,81	110,52	103,19	114,84
3	APS SMA/MA/SMK	57,89	76,66	56,76	58,99	62,12

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2015

Dengan melihat tabel di atas maka dapat dikatakan APS untuk SD/MI pada tahun 2011 sebesar 113,17% dan pada tahun 2012 mencapai 115,42%. Sedangkan pada tahun 2014 APS SD/MI sebesar 104,43% meningkat pada tahun 2015 menjadi 115,34%. Artinya prosentase pertumbuhan penduduk justru lebih besar dari pertumbuhan siswa, maka prosentase APS akan menurun. Sedangkan pada tahun 2015 APS SD/MI mencapai 115,34%.

Jenjang SMP/M.Ts APS pada tahun 2011 mencapai 108,18% dan mencapai 110,81% pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2014 APS SMP/MTs di Sleman mencapai sebesar 103,19% bertambah menjadi 114,84 % pada tahun 2015.

Untuk jenjang SMA/MA/SMK besarnya APS pada tahun 2011 mencapai 57,89% dan pada tahun 2012 mencapai 76,66%. Pada tahun 2014 APS SMA/MA/SMK sebesar 58,99% meningkat menjadi 62,12% pada tahun 2015.

Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah.

Untuk melihat ketersediaan fasilitas gedung sekolah bagi penduduk untuk memenuhi pelayanan pendidikan, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.31
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio SD/MI	67	67	66	65	57
2	Rasio SMP/MTs	33	35	34	34	28
3	Rasio SMA/MA/SMK	25	25	25	26	27

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2015

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2011 rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI mencapai 67. Demikian juga pada tahun 2012 mencapai sebesar 67. Pada tahun 2013 rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI terhadap penduduk usia sekolah SD/MI mengalami penurunan menjadi 66. Dan turun lagi menjadi 65 pada tahun 2014. Perbedaan angka ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk usia sekolah SD/MI sebesar 9,94% sedangkan peningkatan jumlah gedung sekolah hanya 0,76%, sehingga menyebabkan penurunan pada rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI pada tahun 2015 sebesar 57. Rasio gedung sekolah SMP/MTs dan penduduk usia sekolah SMP/MTs pada tahun 2011 adalah sebesar 33 setiap 10.000 penduduk usia SMP, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 35. Pada tahun 2014 Rasio gedung sekolah SMP/MTs mencapai 34 dan pada tahun 2015 menjadi 28.

Rasio gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK pada tahun 2011 sebesar 25 dan pada tahun 2012 juga sebesar 25. Pada tahun 2014 Rasio gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK menjadi 26 mengalami perubahan dari tahun 2013 yaitu sebesar 25. Hal ini terjadi karena jumlah sekolah bertambah 1,75%, sedangkan jumlah penduduk usia sekolah menengah mengalami penurunan sebesar 3,52%. Pada tahun 2015 Rasio gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK sebesar 27.

Rasio Guru/Murid

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Sleman, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Sleman dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.32
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio SD/MI	14	15	15	15	15
2	Rasio SMP/MTs	12	12	12	13	13
3	Rasio SMA/MA/SMK	9	9	9	9	9

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2015

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2011 rasio guru/murid jenjang SD/MI adalah sebesar 14 artinya setiap satu guru dibebani murid sejumlah 14 anak. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Rasio guru dan murid SD/MI tidak berubah, yakni sebesar 15. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka 1 (satu) orang guru SD/MI mengajar 28 siswa.

Pada tahun 2011 jenjang SMP/M.Ts rasio guru/murid adalah 12 dan tidak mengalami perubahan hingga tahun 2013. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 rasio guru dan murid SMP/M.Ts sebesar 13. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41

tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka 1 (satu) orang guru SMP/M.Ts mengajar 32 siswa.

Untuk jenjang SMA/MA/SMK rasio guru/murid sebesar 9 pada tahun 2011 masih tetap sama hingga tahun 2015. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka 1 (satu) orang guru SMA/SMK mengajar 32 siswa.

Perkembangan dan hasil penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.33
Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Uraian Data		Tahun Anggaran				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Taman Kanak-kanak						
	a.	Jumlah sekolah	**521**	**535**	**539**	**545**	**553**
		- Negeri	4	5	5	5	5
		- Swasta	517	530	534	540	548
	b.	Jumlah guru	**2.284**	**2.300**	**2.324**	**2.324**	**2.297**
		- Negeri	47	49	49	48	48
		- Swasta	2.237	2.251	2.275	2.276	2.249
	c.	Jumlah tenaga non guru	**269**	**441**	**399**	**404**	**394**
		- Negeri	14	17	18	17	17
		- Swasta	255	424	381	387	377
	d.	Jumlah siswa	**27.141**	**27.740**	**29.362**	**30.184**	**30.788**
		- Negeri	440	515	474	560	580
		- Swasta	26.701	27.225	28.888	29.624	30.208
2.	Sekolah Dasar/MI						
	a.	Jumlah sekolah	**521**	**574**	**527**	**531**	**533**
		- Negeri	381	329	379	379	379
		- Swasta	140	145	148	152	154
	b.	Jumlah guru	**6.328**	**6.250**	**6.159**	**6.040**	**6.113**
		- Negeri	4.474	4.340	4.199	4026	4016
		- Swasta	1.854	1.910	1.960	2014	2097
	c.	Jumlah tenaga non guru	**1.103**	**1.163**	**1.206**	**1.291**	**1.331**
		- Negeri	745	785	820	866	884
		- Swasta	358	378	386	425	447
	d.	Jumlah siswa	**90.622**	**89.886**	**91.338**	**92.859**	**94.200**
		- Negeri	66.133	64.982	64.192	64.169	64.084
		- Swasta	24.489	24.904	27.146	28.690	30.116
3.	SMP/MTS						
	a.	Jumlah sekolah	**123**	**129**	**132**	**133**	**134**
		- Negeri	64	64	64	64	65

No	Uraian Data		Tahun Anggaran				
			2011	2012	2013	2014	2015
		- Swasta	59	65	68	69	69
	b.	Jumlah guru	**2.256**	**3.359**	**3.303**	**3.350**	**3.401**
		- Negeri	2.035	2.012	1.939	1892	1.870
		- Swasta	1.221	1.347	1.364	1.458	1.531
	c.	Jumlah tenaga non guru	**1.030**	**1.001**	**974**	**957**	**1.002**
		- Negeri	713	684	663	633	660
		- Swasta	317	317	311	324	342
	d.	Jumlah siswa	**39.857**	**40.730**	**41.352**	**44.257**	**45.014**
		- Negeri	28.278	27.780	27.708	27.703	28.158
		- Swasta	11.579	12.950	13.644	16.554	16.856
4.	SMA/MA						
	a.	Jumlah sekolah	**57**	**58**	**56**	**58**	**61**
		- Negeri	22	22	22	22	22
		- Swasta	35	36	34	36	39
	b.	Jumlah guru	**1.699**	**1.688**	**1.631**	**1.676**	**1.763**
		- Negeri	903	875	853	847	851
		- Swasta	796	813	778	829	912
	c.	Jumlah tenaga non guru	**549**	**572**	**537**	**543**	**535**
		- Negeri	333	345	331	326	317
		- Swasta	216	227	206	217	218
	d.	Jumlah siswa	**14.734**	**14.936**	**14.912**	**15.565**	**16.347**
		- Negeri	9.971	10.120	10.135	10.241	10.668
		- Swasta	4.763	4.816	4.777	5.324	5.679
5.	SMK						
	a.	Jumlah sekolah	**53**	**54**	**58**	**58**	**57**
		- Negeri	8	8	8	8	8
		- Swasta	45	46	50	50	49
	b.	Jumlah guru	**1.925**	**1.973**	**2.043**	**2.104**	**2.121**
		- Negeri	602	610	613	612	622
		- Swasta	1.323	1.363	1.430	1.492	1.499
	c.	Jumlah tenaga non guru	**576**	**569**	**589**	**606**	**596**
		- Negeri	202	192	203	206	208
		- Swasta	374	377	386	400	388
	d.	Jumlah siswa	**19.461**	**19.592**	**20.072**	**20.294**	**21.088**
		- Negeri	6.893	6.981	7.222	7.654	8.085
		- Swasta	12.568	12.611	12.850	12.640	13.003
6.	Kondisi Bangunan Sekolah						
	a.	Jumlah Ruang SD	**3.646**	**3.664**	**3.721**	**3.863**	**3.852**
		- Baik	2.686	2.711	3.007	3.077	3.273
		- Rusak Ringan	679	659	585	678	494
		- Rusak Berat	281	294	129	108	85

No	Uraian Data		Tahun Anggaran				
			2011	2012	2013	2014	2015
	b.	Jumlah Ruang SLTP	**1.209**	**1.241**	**1.362**	**1.443**	**1.534**
		- Baik	1.074	1.125	1.232	1345	1.429
		- Rusak Ringan	84	72	98	68	77
		- Rusak Berat	51	44	32	30	28
	c.	Jumlah Ruang SLTA	**1.246**	**1.229**	**1.282**	**1291**	**1.404**
		- Baik	1.117	1.122	1170	1180	1.343
		- Rusak Ringan	102	105	103	106	53
		- Rusak Berat	27	2	9	5	8
B	**Pendidikan Luar Sekolah**						
1.	Lembaga Pendidikan Kursus						
	a.	Jumlah lembaga	127	116	132	135	114
	b.	Jumlah tutor	508	474	528	532	346
	c.	Jumlah warga belajar	2.651	2.519	2.640	2.720	3.204
2.	Sanggar kegiatan belajar						
	a.	Jumlah kegiatan	7	4	7	9	16
	b.	Jumlah pamong belajar	10	10	9	9	10
3.	Kelompok Belajar						
	a.	Kejar Paket B setara SMP					
		- Jumlah tutor	108	178	108	83	48
		- Jumlah kelompok	18	33	43	22	8
		- Jumlah warga belajar	360	825	360	300	170
	b.	Kejar Paket C setara SMA					
		- Jumlah tutor	120	91	101	165	45
		- Jumlah kelompok	20	20	17	21	5
4.	Satuan PAUD Sejenis						
	a.	Jumlah tutor	2.442	1.684	1.766	1.240	1148
	b.	Jumlah kelompok	507	327	573	573	290
	c.	Jumlah warga belajar	20.580	10.790	20.683	20468	11208
5.	Play Group (Kelompok Bermain)						
	a.	Jumlah tutor	1.046	925	862	1.052	1.081
	b.	Jumlah kelompok	219	212	224	231	243
	c.	Jumlah warga belajar	6.755	6.474	6.596	7.262	6.843
6.	TPA						
	a.	Jumlah tutor	516	408	410	460	464
	b.	Jumlah kelompok	107	78	88	82	87
	c.	Jumlah warga belajar	2.739	2.075	2.028	2.876	2.512
C	**Hasil Pelayanan Publik**						
1.	Angka Partisipasi Kasar (%)						
	a.	SD	116,45	116,51	114,77	116,78	116,81
	b.	SMP	113,68	113,70	108,93	111,41	111,70
	c.	SMU/SMK	77,66	77,69	79,00	86,39	87,37

No	Uraian Data		Tahun Anggaran				
			2011	2012	2013	2014	2015
2.	Angka Partisipasi Murni (%)						
	a.	SD	101,51	100,81	99,96	102,07	103,20
	b.	SMP	79,65	81,84	81,24	81,63	83,96
	c.	SMU/SMK	54,04	55,11	55.16	57,73	58,95
3.	Anak Putus Sekolah						
	a.	SD	40	36	29	42	29
	b.	SMP	32	30	14	18	14
	c.	SMU/SMK	74	73	41	54	48
4.	Rasio Siswa:Sekolah						
	a.	TK	52	53,30	55	55	56
	b.	SD	174	173,16	173	174,88	177
	c.	SMP	314	317,46	313	332,76	336
	d.	SMU/SMK	311	311,64	307	309,13	317
5.	Rasio Siswa: Guru						
	a.	TK	12	12,40	13	13	13
	b.	SD	14	14,52	15	15	15
	c.	SMP	12	12,19	12	13	13
	d.	SMU/SMK	9	9,45	9	9	9
6.	Rasio Siswa: Kelas						
	a.	SD	24,90	24,46	24	24,40	24
	b.	SMP	31,31	31,38	30	30,21	30
	c.	SMU/SMK	28,52	24,15	27	25,82	26
7.	Rata-rata Nilai Hasil Belajar						
	a.	UAN SD	7,53	7,70	7,76	7,55	49,62
	b.	UAN SMP	6,64	6,76	7,22	6,54	49,99
	c.	UAN SMA	6,60	6,16	6,87	5,76	5,49
	d.	UAN SMK	6,78	6,99	7,02	6,61	6.86
8.	Rata-rata nilai Hasil Belajar program Kesetaraan						
	a.	UAN Paket A Setara SD	0	6,09	6,00	-	-
	b.	UAN Paket B Setara SMP	6,60	6,4	6,20	5,71	33,41
	c.	UAN Paket C Setara SMA	6,75	6,6	6,30	5,05	46,69
9.	Rata-rata Kelulusan (%)						
	a.	SD	99,59	99,26	98,94	98,56	99,47
	b.	SMP	99,93	98,37	93,74	96,88	99,36
	c.	SMU/SMK	99,34	95,94	95,46	99,64	95,02
10.	Prosentase guru yang layak mengajar						
	a.	TK	40,32	46,26	61,14	66,88	69,05
	b.	SD	58,19	67,44	75.48	82,22	85,38
	c.	SMP	82,12	84,52	85.89	87,85	87,53
	d.	SMU/SMK	88,47	90,33	91.26	91,64	92,04

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2015

2.3.1.1.2. Urusan wajib Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajad kesehatan yang lebih baik.

Pelayanan di RSUD Sleman juga telah memenuhi standar ISO 9001:2000/ISO 9001:2008. Pencapaian indikator pelayanan RSUD tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1) Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/*Bed Occupancy Rate* (BOR) mencapai 67,94%, kondisi ini belum efisien karena BOR dikatakan baik jika realisasinya 70%-85%.
2) Frekuensi pemakaian (*Bed Turn Over*) tahun 2015 mencapai 55,91 kali.
3) Pada tahun 2015 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya (*Turn Over Interval*) mencapai 2,09 hari. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada pasien sudah mencapai ideal yaitu sesuai standar Kementerian Kesehatan 6 jam sampai dengan 3 hari.
4) Rata-rata lama perawatan pasien (*Length of Stay*) mencapai 5,31 hari pada tahun 2015. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan rumah sakit terhadap pasien cukup memadai, karena sesuai dengan standar nasional lama perawatan 3 - 6 hari.
5) Angka kematian bersih (*Net Death Rate*) yang menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit pada tahun 2015 mencapai 20,51% pasien, mengalami kenaikan sebesar 6,59% pasien dari tahun 2014 yang menunjuk angka 13,92% pasien. Walaupun angka kematian pasien ketika dirawat di RS mengalami kenaikan, masih merupakan angka realisasi yang aman, selama tidak melebihi 25%.
6) Angka kematian kasar (*Gross Death Rate*) merupakan angka kematian pasien pasca rawat inap di rumah sakit mencapai 23,86% pasien pada tahun 2014, mengalami kenaikan tahun 2015 menjadi 34,59%.
7) Target nasional untuk NDR maksimal 25 orang per-1.000 pasien keluar RS; sedangkan GDR 40 orang per-1.000 pasien keluar. Apabila dikomparasikan dengan target nasional, realisasi RSUD Sleman pada parameter angka kematian, masih dibawah target

nasional cukup jauh. Hal ini berarti kinerja pelayanan dilihat dari aspek angka kematian pasien masih dapat dinilai baik.

Pencapaian Kinerja Pelayanan di RSUD Prambanan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1) Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/*Bed Occupancy Rate* (BOR) mencapai 52,31%. Kondisi ini belum efisien karena BOR dikatakan baik jika realisasinya 70% - 85%,
2) Frekuensi pemakaian (*Bed Turn Over*) tahun 2015 mencapai 65,16% per tahun, kondisi pelayanan pemakaian tempat tersebut masih dibawah standar nasional yaitu 75 kali per tahun.
3) Pada tahun 2015 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya (*Turn Over Interval*) mencapai 2,67 hari. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada pasien masih kurang ideal karena sesuai standar Departemen Kesehatan 6 jam sampai dengan 3 hari.
4) Rata-rata lama perawatan pasien (*Length of Stay*) mencapai 2.83 hari pada tahun 2015. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan rumah sakit terhadap pasien masih belum memadai, karena sesuai dengan standar nasional lama perawatan 3 - 6 hari.
5) Angka kematian bersih (*Net Death Rate*) yang menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit pada tahun 2015 sebesar 11,72‰, masih merupakan angka realisasi yang aman, selama tidak melebihi 25‰, Angka kematian kasar (*Gross Death Rate*) merupakan angka kematian pasien pasca rawat inap di rumah sakit pada tahun 2015 sebesar 25,67‰.
6) Target nasional untuk NDR maksimal 25 orang per 1.000 pasien keluar RS; sedangkan GDR 40 orang per 1.000 pasien keluar. Apabila dikomparasikan dengan target nasional, realisasi RSUD pada parameter angka kematian, sangat baik masih dibawah, jauh dari target nasional. Hal ini berarti kinerja pelayanan dilihat dari aspek angka kematian pasien masih dapat dinilai baik.

Gambaran indikator capaian urusan kesehatan dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 2.34
Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Rasio posyandu persatuan balita	50,8	35	41,08	40,89	40,89
2	• Rasio puskesmas persatuan Penduduk • Rasio pustu per satuan penduduk	40.232 14.166	44.292 15.595	42,375 14.921	42.487 15.394	42.487 15.394
3	Rasio RS per satuan penduduk	47.895	42.588	40.756	37.935	37.935
4	Rasio dokter per satuan penduduk	878	1.401	1.416	2.365	2.365
5	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	898	960	969	3.096	3.096
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	99,61	99,86	99,9	99.99	99.99
7	CakupanDesa/kelurahan*Universal Child Immunization* (UCI) (%)	100	100	100	100	100
8	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	67,5	55,83	86,87	100	100
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100
12	Cakupan kunjungan bayi (%)	98,32	88,94	96,06	92,57	92,57
13	Jumlah Puskesmas (bh)	25	25	25	25	25
14	Jumlah pembantu Puskesmas (bh)	71	71	70	69	69

Sumber : Dinas Kesehatan,2015*) angka sementara

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajad kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya.

2.3.1.1.3. Urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sleman yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Pada tahun 2014 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 0,516 dan pada tahun

2015 mencapai angka 0,5426. Terdapat kenaikan kondisi jalan baik karena telah dilakukan banyak perbaikan.

Indikator kedua adalah rasio jaringan irigasi. Angka rasio jaringan irigasi pada tahun 2014 menunjukan jumlah angka 1:8.244 pada tahun 2015 menjadi 1:3.080 meningkat karena adanya rehabilitasi dan pembangunan saluran irigasi, dan penurunan jumlah lahan pertanian budidaya. Rasio tersebut didapat dari hasil perhitungan panjang saluran irigasi (km) dibagi dengan luas lahan pertanian budidaya (Ha). Sampai dengan tahun 2014 panjang saluran irigasi 2.698,34 km yang terdiri atas saluran irigasi primer sepanjang 419,966 km, irigasi sekunder 317,480 km, dan tersier sepanjang 1.960,894 km, dan luas lahan pertanian budidaya seluas 22.233 Ha.

Indikator ketiga adalah rasio tempat ibadah per satuan penduduk. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Sleman tercatat 1:312 pada tahun 2014, tetap pada tahun 2015 menjadi 1:312.

Indikator keempat adalah rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk yang mencapai angka 286.08 pada awal tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 masih sama di angka 286,08.

Indikator kelima adalah rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk. Pada tahun 2014 didapat angka sebesar 1.052 dari hasil penghitungan TPS dengan kapasitas 1.201 m^3 dibagi jumlah penduduk eksisting dikalikan 1.000. untuk tahun 2015 masih sama yaitu di angka 1.052.

Indikator keenam adalah panjang jalan yang dilalui roda 4, dimana angka tersebut mencapai 0,00270 km pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 masih sama, yaitu untuk jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Indikator ketujuh adalah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam) dimana pada tahun 2015 mencapai prosentase sebesar 51,59% didapat dari hasil panjang jalan baik dan bisa dilalui kendaraan dengan kecepatan >40 Km/jam dibagi seluruh panjang jalan kabupaten yang ada.

Indikator selanjutnya adalah drainase dalam kondisi baik, di Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sebesar 44,94%, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 48,76%.

Untuk lingkungan permukiman dianggap sebagai kawasan permukiman yang ada di Kabupaten Sleman. Luas kawasan permukiman di Kabupaten

Sleman adalah sebesar 33,65%, didapat dari perhitungan luas kawasan permukiman seluas 19.340 ha dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Sleman sebesar 57.482 ha. Berikut tabel yang menggambarkan indikator bidang pekerjaan umum.

Tabel 2.35
Indikator Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,3423	0,363	0,541	0,516	0,5426
2	Rasio Jaringan Irigasi	1:8.787	1:8.787	1:8.703	1:8,244	1:3.080*)
3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1:311	1:303	1:279	1:312	1:312
4	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	287,254	283,572	286,142	286,08	286,08
5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,918	0,918	1,282	1,052	1,052
6	Panjang jalan dilalui Roda 4 (km)	0,0030	0,0030	0,0015	0,0027	0,0027
7	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam)	34,23%	36,32%	54,06%	51,59	51,59
8	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	33,05	43,89	44,64	44,94	48,76
9	Kawasan Pemukiman (%)	40,574	40,574	39,700	33,65	33,65

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2015,
*) irigasi tersier menjadi kewenangan desa

Luas RTH hanya dihitung dari RTH Perkotaan dengan pertimbangan pernah dilakukan studi tentang RTH kawasan perkotaan. Rasio perhitungannya didasarkan pada luas RTH perkotaan dibagi luas seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Sleman sehingga didapatkan rasio RTH 55,36%. Adapun luas RTH diambil dari laporan RTH wilayah perkotaan yang merupakan luas lahan tidak terbangun.

Rasio IMB dihitung berdasarkan pelayanan IMB yang sudah diberikan baik IMB tetap, IMB sementara maupun IMB pemutihan. Pada tahun tertentu dibanding dengan 5 bangunan pada tahun tertentu yang dihitung dari bangunan-bangunan rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perdagangan, fasilitas transportasi, fasilitas pengairan, persampahan, fasilitas peternakan, stasiun bahan bakar, fasilitas pariwisata dan industri/pergudangan. Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.36
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per SatuanLuas Wilayah ber HPL/HGB (%)	55,36**)	54,96	54,71	54,41	54,17
2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	7,703	13,220	46,58	47,01	42,78

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2015
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2015
Ket *) : Angka perhitungan dengan luasan kawasan perkotaan berdasarkan Perda 23/1994

2.3.1.1.4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator kinerja yang digunakan dalam bidang perumahan diantaranya rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, dan rumah layak huni. Indikator-indikator selain rumah layak huni diukur berdasarkan jumlah pengguna.

Indikator rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Sleman pada tahun 2014 adalah sebesar 98.33%, pada tahun 2015 angka sementara yang telah ada mencapai 98,40%. Untuk indikator rumah tangga pengguna listrik mencapai 99% pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 angka sementara menunjukkan kenaikan menjadi 99,96%.

Untuk indikator rumah tangga bersanitasi pada tahun 2014 angka yang tercatat sebesar 88,27%, pada tahun 2015 angka sementara menunjukkan kenaikan menjadi 88,90%. Indikator rumah layak huni dihitung berdasarkan jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100% sehingga didapatkan angka sebesar 93,64% pada tahun 2014, pada tahun 2015 untuk angka sementara mengalami kenaikan menjadi 94,42%. Indikator urusan perumahan Kabupaten Sleman tahun 2011-2015 selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.37
Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	94,30	95,40	98,30	98,33	98,40
2	Rumah tangga pengguna listrik (%)	97,15	95,00	95,60	99,00	99,96
3	Rumah tangga ber-Sanitasi (%)	65,12	74,28	81,65	88,27	88,90
4	Rumah layak huni (%)	90,92	91,24	91,73	93,64	94,42

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2015

2.3.1.1.5. Urusan wajib Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Stabilitas sosial dan politik adalah prasyarat terhadap tumbuh kembang investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman stabilitas keamanan Pemerintah Kabupaten Sleman juga koordinasi dengan BIN, Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres melalui forum Kominda (Komunitas Intelijen Daerah). Peran aktif deteksi dini komunitas intelijen sangat diperlukan untuk menciptakan stabilitas keamanan terutama pelaksanaan Pilkada tahun 2015 hingga proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati.

Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan. Konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan lembaga-lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman menjadi berkah yang besar untuk Indonesia juga untuk Kabupaten Sleman dimana masyarakatnya merupakan masyarakat multikultur dengan banyaknya perguruan tinggi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sleman. Konflik berbau SARA, aksi terorisme dan separatisme berpotensi menjadi komoditas politik sehingga deteksi dini atas potensi kerawanan harus dilakukan.

Kondisi politik, benturan antar kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan maupun paska Pilkada, isu radikalisme dapat mengganggu pembangunan, dan stabilitas keamanan. Terkait hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri juga telah mengeluarkan SE MENDAGRI NO:

330/3757/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.

Iklim daerah yang kondusif perlu diciptakan salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelejen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat. Pencapaian upaya yang telah dilakukan tersebut seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.38
Kegiatan Pembinaan Organisasi dan Politik
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP(kali)	4	4	2	2	3
2	Kegiatan pembinaan politik daerah (kali)	3	4	12	2	2

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa, 2015

Dalam hal pelaksanaan kewenangan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1(satu) daerah kabupaten, dilakukan oleh anggota Polisi Pamong Praja dan anggota Linmas Kabupaten Sleman.

Tabel 2.39
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas per 10.000 penduduk
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk (%)	0,632	0,686	0,736	0,736	1,4
2	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 penduduk (%)	64,24	60,60	59,40	58,67	54,72

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja , 2015

Apabila dilihat dari rasio dan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja di bandingkan dengan jumlah peduduk Kabupaten Sleman terdapat kekurangan personil anggota dari idealnya antara 250 s/d 400 orang, kenyataannya sekarang baru terdapat 153 orang, jumlah Satuan Polisi Pamong Praja ini sudah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan dan Banpol 10 orang direkrut melalui *outsourching*. Jumlah anggota Linmas berkurang karena banyak yang sudah pensiun. Rata-rata jumlah linmas per desa ada 74 orang. Presentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Sleman pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 100%.

Pelanggaran Peraturan Daerah dari tahun 2013 hingga 2015 menurun karena selalu diadakan pembinaan dan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat. Dari jumlah pelanggaran sebanyak 533, sidang ditempat 177, sidang di Pengadilan Negeri 124. Sebanyak 168 mengurus izin setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pembinaan, 5 pengusaha pindah lokasi di luar Sleman dan 59 pengusaha masih dalam pembinaan.

Tabel 2.40
Data Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Pelanggaran	560	590	608	584	533
2	Pelanggaran Sidang ditempat	151	163	173	169	177
3	Pelanggaran Sidang di PN	123	109	97	129	124

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja , 2015

Berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), jumlah PPNS di Kabupaten Sleman berjumlah 44 orang. Terdiri dari 5 orang di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan 39 orang lainnya tersebar di beberapa SKPD di Kabupaten Sleman. PPNS yang berada di SKPD banyak yang sudah menempati jabatan struktural sehingga dalam menjalankan tugas sebagai PPNS tidak aktif karena kesibukan tugas sebagai pejabat struktural. Pembinaan setiap tahun yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berupa *coaching clinic* dan pemberdayaan gugus tugas PPNS.

Dalam hal perlindungan masyarakat, Kabupaten Sleman termasuk daerah yang rawan bencana karena terdapat Gunung Merapi dan berada di patahan sesar Opak. Berikut jenis potensi bencana di Kabupaten Sleman yaitu:

1) Erupsi Gunungapi Merapi
2) Aliran/Banjir Lahar
3) Gempa Bumi
4) Gerakan Tanah
5) Angin Puting Beliung
6) Kebakaran
7) Kekeringan

Sedangkan data kejadian bencana di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.41
Data Jumlah Kejadian dan Korban Bencana
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

NO	URAIAN DATA	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Daerah Rawan Bencana (desa)	86	86	86	86	86
2	Jumlah Gladi Lapang Penanggulangan bencana	6	7	8	13	16
3	Penanggulangan Bencana:					
	- erupsi	-	-	1	1	-
	- gempa bumi	-	-	-	2	-
	- banjir	-	1	-	3	6
	- banjir lahar hujan	7	9	3	3	-
	- tanah longsor	2	5	5	9	12
	- angin ribut	9	17	23	22	50
	- petir	1	-	2	-	5
	-Kekeringan	3	5	-	-	1
	-Kebakaran	-	-	-	-	1
4	Jumlah korban jiwa akibat bencana					
	- erupsi	-	-	-	1	-
	- gempa bumi	-	-	-	-	-
	- banjir	-	-	-	3	-
	- tanah longsor	-	-	1	-	-
	-angin ribut	-	1	-	1	3
	- petir	1	-	-	-	-
	-Kekeringan	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2015

Berkaitan dengan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana. Beberapa program dan kegiatan yang mendukung berkaitan dengan penanggulangan bencana adalah peta risiko bencana, sosialisasi daerah rawan bencana, operasional dan pemeliharaan *Early Warning System* (EWS), Pembentukan dan operasional Tim SAR dan Komunitas Peduli Bencana.

2.3.1.1.6. Urusan wajib Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya

yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.42
Indikator Urusan Sosial Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Sarana sosial: - Panti Asuhan - Panti Jompo - PantiSosial - Rumah Singgah (girlan & Diponegoro) - Panti cacat	 38 24 1 3 2 8	 38 24 1 3 2 8	 38 24 1 3 2 8	 41 26 1 3 2 9	 43 27 1 4 2 9
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	64	68,36	69,31	78,94	79,36
3	Anak Jalanan	19*	91*	19*	35*	34*

Sumber: DinasTenaga Kerja dan Sosial, 2015* Sumber : Dinsos DIY

Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal. Terlihat adanya peningkatan dari tahun 2014 ke 2015 pada sarana sosial yaitu sebesar 41 menjadi 43. Untuk PMKS tahun 2014 hingga tahun 2015 juga terjadi peningkatan yaitu dari 78,94% menjadi 79,36%. Untuk anak Jalanan dari peningkatan yang terjadi pada tahun 2013 sebesar 19 menjadi 35 pada tahun 2014, lalu pada tahun 2015 dapat ditekan menjadi 34.

2.3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.2.1. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja.

Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Angka pengangguran adalah salah satu indikator penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi ukuran kinerja pemerintah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara banyaknya Angkatan Kerja dengan banyaknya Penduduk Usia Kerja. TPAK pada tahun 2014 sebesar 65,09% dan meningkat menjadi 68,68% pada tahun 2015.

Pencari kerja yang ditempatkan adalah angka dari jumlah tenaga kerja yang ditempatkan baik melalui Antar Kerja Lokal (AKAL), Antar Kerja Daerah (AKAD) maupun Antar Kerja Negara (AKAN). Dari pencari kerja terdaftar, pencari kerja yang ditempatkan menunjukan angka 97,58% di tahun 2014, dan 94,52% di tahun 2015. Pengangguran merupakan indikator bahwa terjadi kesenjangan antara pertambahan kesempatan kerja dengan pertambahan angkatan kerja. Untuk angka tingkat pengangguran terbuka masih menunjukan angka yang cukup tinggi yaitu 6,17% di tahun 2014, dan 6,12% di tahun 2015.

Persentase penerapan keselamatan dan perlindungan K3 di tahun 2014 dan tahun 2015 sudah mencapai angka 100%. Jumlah perusahaan bertambah yaitu 1.264 perusahaan di tahun 2014 menjadi 1.324 perusahaan di tahun 2015. Angka penyelesaian perselisihan pengusaha dengan pekerja di tahun 2015 sebesar 100% yaitu dari 25 kasus dapat terselesaikan semua. Perkembangan capaian indikator ketenagakerjaan dari tahun 2011-2015 secara jelasnya dapat diamati pada tabel berikut :

Tabel 2.43
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	67,02	59,64	61,93	65,09	68,68
2	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	85,93	62,58	26,77	97,58	94,52
3	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,61	6,74	6,47	6,17	6,12
4	Keselamatan dan perlindungan/ K3 (%)	100	100	100	100	100
5	Angka penyelesaian perselisihan pengusaha pekerja (%)	100	92,00	91,43	95,65	100

Sumber : Dinas Nakersos Kabupaten Sleman, 2015.

2.3.1.2.2. Urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososio-kultural yang masih menganggap derajad laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan.

Adapun capaian indikator pemberdayaan dan perlindungan anak tahun 2011-2015 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.44
Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	55,17	55,70	56,31	57,02	57,02*)
2	Rasio KDRT	0,012	0,0312	0,043	0,03	0,002
3	Persentase angkatan kerja perempuan	59,41	57,23	55,57	45,12	42,78
4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	125	132	142	331	237

Sumber: Badan KB,PM, PP, 2015 *) angka sementara

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) semakin meningkat karena semakin banyaknya pengaduan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan KDRT dan telah adanya jejaring dalam penanganan KDRT. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman terus mengoptimalkan kinerja UPT (P2TPA) dalam menangani kasus-kasus KDRT dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

2.3.1.2.3. Urusan Wajib Pangan

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan imbang, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2014, ketersediaan pangan pada tahun tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1,12%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan produktivitas sebesar 6,74% dari 60,19 kw/ha pada tahun 2014 menjadi 64,25 kw/ha pada tahun 2015, pendampingan ditingkat petani dan penurunan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Perkembangan Ketersediaan Pangan Kabupaten Sleman
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Ketersediaan pangan utama (beras) (ton)	147.074,62	197.073,00	194.573,21	198.702,06	200.934,92 *)

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2015. *) Angka Sangat Sementara

2.3.1.2.4. Urusan Wajib Pertanahan

Dalam bidang pertanahan, jumlah sertifikat yang dikeluarkan di Kabupaten Sleman terjadi fluktuasi tiap tahunnya, dimana pada tahun 2011 jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan adalah 491.443, dan tahun 2012 sejumlah 505.093 bidang, data sertifikat tanah tahun 2013 sejumlah 483.183, sedangkan data sertifikat tanah tahun 2014 sejumlah 560.597. Berdasarkan data sertifikat tanah tahun 2015 sejumlah 512.516.

Untuk penyelesaian izin pemanfaatan ruang dibagi menjadi Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah. Izin Lokasi di wilayah Kabupaten Sleman tiap tahunnya mengalami perubahan, tahun 2014 sejumlah 16 izin dan tahun 2015 sejumlah 14 izin. Izin Pemanfaatan Tanah di wilayah Kabupaten Sleman tiap tahunnya mengalami perubahan, tahun 2014 sejumlah 269 izin dan tahun 2015sejumlah 359 izin. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah di wilayah Kabupaten Sleman tiap tahunnya mengalami perubahan, tahun 2014 sejumlah 276 izin dan tahun 2015 sejumlah 492 izin. Data jumlah sertifikat dan ijin lokasi tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Jumlah Sertifikat dan Izin Pemanfaatan Ruang
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah sertifikat tanah(buah)	491.443	505.093	483.183	560.597	512.516
2	Penyelesaian izin lokasi (buah)	9	20	12	16	14
3	Izin Pemanfaatan Tanah (buah)	276	343	326	269	359
4	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (buah)	192	222	384	276	492

Sumber : Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah dan BPMPPT, 2015

2.3.1.2.5. Urusan wajib Lingkungan Hidup

Sumber daya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan.

Pengelolaan sumber daya alam memiliki tujuan yang sama yaitu agar terus tersedianya sumber daya alam yang dapat diperbaharui, menghemat dan meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui serta mencari subtitusi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai contoh, kita dapat memiliki kualitas tanah yang baik sehingga kualitas air juga membaik.

Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup tersebut adalah melalui pengelolaan sampah. Pemerintah menyadari bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional. Perlu adanya sistem pengelolaan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Selain itu dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disusun agar mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kesehatan dan lingkungan.

Dalam Perda Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman dilakukan oleh orang pribadi maupun lembaga pengelola sampah sesuai kewenangannya. Pengelolaan sampah ini meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah, yang berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Jumlah timbulan sampah meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan, aktivitas dan konsumsi penduduk. Pada tahun 2014, timbulan sampah sebesar 1.445,72 m^3/hari dari wilayah perkotaan, pada tahun 2015 meningkat menjadi 2.879 m^3/hari se-Kabupaten Sleman. Dari timbulan sampah tersebut, tidak semua sampah dibuang ke TPST, tetapi dilakukan program pengurangan sampah baik dengan TPST Kiprah, *Waste Refinerring*, LDUS maupun kelompok mandiri. Pada tahun 2014, pengurangan sampah sebesar 247,35 m^3/hari, pada tahun 2015

meningkat menjadi 300,50 m^3/hari. Akibat program pengurangan sampah, jumlah sampah yang ditangani berkurang.

Pelayanan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup telah menjangkau seluruh wilayah di 17 kecamatan dengan 39 *dumptruck* dan 4 unit *armroll* yang mempunyai kapasitas total sebesar 657,60 m^3/hari. Hal ini meningkatkan prosentase cakupan layanan penanganan sampah dari 33,51% pada tahun 2014 menjadi 39,97% pada tahun 2015.

Sedangkan jumlah transfer depo ada 11 buah, TPS besar 6 buah dan TPS kecil 203 buah dengan kapasitas masing-masing 70 m^3, 25 m^3 dan 1,385 m^3. Sehingga rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk mengalami penurunan dari 1.052 pada tahun 2014 menjadi 1,051 pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah TPS tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Pengelolaan air limbah yang dilakukan dengan sistem terpusat dan sistem setempat. Dalam pengelolaan sistem terpusat ini menggunakan jaringan perpipaan dengan tujuan akhir IPAL Sewon. Sampai dengan tahun 2015, telah terbangun sambungan rumah 2.380 unit dengan jumlah penerima manfaat 11.980 jiwa, jaringan servis 17.821 m, pipa lateral 7.325 m, pipa induk 11.000 m dan pipa penggelontor 1.500 m. Sedangkan sistem setempat dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat, yang terdiri dari sistem setempat komunal dan sistem setempat individual. Dengan beberapa program sanitasi, Kabupaten Sleman telah membangun 101 unit IPAL komunal dengan jumlah penerima manfaat 42.300 jiwa.

Selain melalui pembangunan fisik, Kabupaten Sleman juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap pembangunan yang berdampak pada lingkungan melalui pengaduan kasus lingkungan. Jumlah pengaduan kasus lingkungan yang diterima Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sebanyak 30 kasus. Jenis pengaduan meliputi pencemaran udara berupa bau yang ditimbulkan dari peternakan maupun limbah kegiatan, pencemaran air, debu, pengaduan kebisingan serta gangguan lalu lintas. Badan Lingkungan Hidup telah berupaya untuk menangani pengaduan kasus lingkungan tersebut melalui koordinasi dengan instansi terkait, Camat, Kepala Desa, Kepala Dukuh dan tokoh masyarakat setempat yang terkena dampak. Berbagai langkah dan pendekatan dilakukan untuk penanganan dan penyelesaian

masalah lingkungan yang dilakukan. Dari tahun 2011 sampai dengan 2015, dari jumlah kasus yang masuk semuanya ditindaklanjuti.

Tabel 2.47
Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase penanganan sampah	33,64%	35,08%	30,78%	33,51%	39,97 %
2	Rasio Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,918	0,918	1,282	1,052	1,051
3	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Badan Lingkungan Hidup, 2015

2.3.1.2.6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan dokumen administrasi kependudukan dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan, khususnya untuk pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini ditunjukkan dengan rasio kepemilikan KTP atau rasio penduduk yang mempunyai KTP pada tahun 2015 sebesar 97,19% menurun dari 97,72% pada tahun 2014 yang disebabkan penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik pertama kali yang menjadi kewenangan Pusat banyak yang belum jadi, sehingga pihak Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik.

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk, pada tahun 2015 adalah 49,80. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 47,06. Peningkatan ini menunjukkan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kelahiran.

Angka rasio kependudukan tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Angka Rasio Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,93	0,97	0,97	0,97	0,97
2	Rasio bayi berakte kelahiran	100	100	89	89,2	89,04
3	Rasio pasangan berakte nikah	100	100	100	100	100

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
4	Kepemilikan KTP	93,75	97	97,79	97,72	97,19
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	40,86	42,06	47,21	47,06	49,80

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015

2.3.1.2.7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan daerah kabupaten dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang tidak sedikit kepada pemerintah desa.

Tabel 2.49
Jenis Dana yang diterima oleh Desa Kabupaten Sleman
Tahun 2011-2015 (Rp.000)

Jenis Dana	2011	2012	2013	2014	2015
1. Alokasi Dana Desa (ADD)Bantuan Keuangan Khusus	1.756.577,4	7.551.268,3	14.018.569,4	15.145.426	72.250.220.900
2. Dana Desa	-	-	-	-	28.075.179.400
3. Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten	8.978.614	10.426.252,1	16.179.750	19.137.126	37.135.750.729

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa, 2015

Mulai tahun anggaran 2015 pemerintah memberikan dana desa kepada pemerintah desa, selain Alokasi Dana Desa yang perhitungannya minimal 10% dari DAU dikurangi DAK. Semakin besarnya dana yang diterima oleh desa tersebut memungkinkan desa untuk mengembangkan wilayahnya baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan khususnya dalam hal pemberdayaan desa.

Dengan dana yang besar ini pula pemerintah desa diharapkan menjadi desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung

jawab. Desa juga harus memiliki perencanaan pembangunan sebagai strategi mengelola program dan keuangan untuk pemberdayaan masayarakat, mulai dari RPJMDes, RKPDes sampai dengan APBDes. Kepala Desa beserta Perangkat Desa bersama BPD benar-benar harus dapat menjadi mitra sejati dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain pembinaan dari Pemerintah Kabupaten, tidak kalah penting adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa. Kebijakan strategis desa, utamanya pengelolaan pembangunan desa harus dapat dipertanggungjawabkan melalui musyawarah desa.

Pelibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang meliputi LPMD, PKK, Karang Taruna, RT dan RW dalam perencanaan desa merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Demikian pula peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Posyandu, lebih mendorong peran masyarakat dalam hal pembangunan daerah. Tidak hanya dalam hal perencanaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa ini juga diharapkan juga membantu program pemberdayaan masyarakat desa baik yang dilaksanakan oleh desa, maupun tugas pembantuan dari kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat.

2.3.1.2.8. Urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Gambaran pelaksanaan urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dari capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program KB akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan. Selain itu Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif di wilayah masing-masing. Rata-rata jumlah jiwa pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 3,00 sedangkan pada tahun 2014 sebesar 3,42. Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2014 sebanyak 121.901 dan 126.127 tahun 2015. Peserta KB Pria sebanyak 9.815 tahun 2014 dan 2015 sebanyak 9.842. Pasangan Usia Subur sebanyak 159.366 tahun 2015 dan 154.137 tahun 2014. Persentase Peserta KB aktif dengan PUS (Prevalensi) sebesar 79,09% tahun 2014 dan 79,14 tahun 2015. Sedangkan Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) sebanyak 865 tahun 2014 dan 801 pada tahun 2015. Dari tahun 2014 ke

2015 semua indikator mengalami peningkatan, dan hanya 1 (satu) indikator yang mengalami penurunan yaitu Indikator Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. Perkembangan tahun 2011 sampai 2015 capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.50
Indikator Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata jumlah jiwa per keluarga	3,29	3,60	3,26	2,88	3,05
2	Cakupan peserta KB aktif	118.424	120.561	121.536	121.901	126.127
3	Peserta KB Pria	8.586	8.952	9.349	9.815	9.842
4	Pasangan Usia Subur (PUS)	150.009	152.392	153.238	154.137	159.366
5	% Peserta KB Aktif dengan PUS (Prevalensi)	78,41	79,11	79,31	79,09	79,14
6	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	797	854	860	865	801

Sumber: Badan KB,PM, PP, 2015

Cakupan peserta KB aktif atau prevalensi mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat untuk ber KB semakin meningkat. KB pria juga mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran kaum pria untuk ber KB semakin meningkat. Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (UPPKS) semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut mampu meningkatkan perekonomian para anggotanya.

2.3.1.2.9. Urusan wajib perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Jumlah arus penumpang angkutan umum selama empat tahun mengalami penurunan sebagai dampak perkembangan jumlah sepeda motor dan kendaraan pribadi yang cukup pesat. Pada tahun 2014 jumlah penumpang angkutan umum 4.068.315 penumpang dan pada tahun 2015 turun menjadi 3.882.326 penumpang.

Dengan semakin bertambahnya kendaraan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor maka jumlah uji kir angkutan umum dan angkutan barang selama periode empat tahun terakhir dari tahun 2011-2014 mengalami peningkatan. Jumlah angkutan umum dan angkutan barang yang diuji kir di Dinas Perhubungan,

Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sleman tahun 2014 sebanyak 19.523 buah kendaraan menurun menjadi 16.833 buah kendaraan pada tahun 2015 data per Oktober 2015. Tarif biaya pengujian kelayakan angkutan umum selama dua tahun terakhir tidak mengalami kenaikan yakni sebesar Rp30.000,00 untuk Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) JBB<5.000, Rp37.500,00 untuk JBB 5.000-10.000 dan Rp45.000,00 untuk JBB>10.000. Dalam kondisi normal, waktu pengerjaan uji kir rata-rata 15 menit per kendaraan.

Dalam upaya untuk melengkapi sarana dan prasarana jalan di wilayah Kabupaten Sleman, Dinas Hubkominfo setiap tahun selalu melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Hal ini dilakukan dengan maksud agar supaya keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan dapat terlayani secara optimal. Jumlah pemasangan rambu setiap tahunnya bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan. Pada tahun 2014 dilakukan pemasangan rambu sebanyak 300 unit dan tahun 2015 sebanyak 300 unit. Adapun Indikator urusan perhubungan tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.51
Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator		Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum		5.170.429	4.463.688	4.254.314	4.068.315	3.882.326*)
2	Rasio ijin trayek		527	290	285	287	286
3	Jumlah uji kir angkutan umum (bh)		15.337	18.784	19.020	19.523	16.833*)
4	Jumlah Terminal Bis (bh)		5	5	5	5	5
5	Angkutan darat (%)		0,0206	0,0208	0,0209	0,08168	0,0814*)
6	Kepemilikan KIR angkutan umum (bh)		1.825	1.873	1.787	3323	1538**)
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)		15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	JBB < 5.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		JBB 5.000 – 10.000	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		JBB > 10.000	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	Pemasangan Rambu-rambu (unit)		220	285	149	300	300

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2015
*) Angka Sementara per Oktober 2015
**) Angka Sementara per Agustus 2015

2.3.1.2.10. Urusan wajib komunikasi dan informatika

Kemajuan dibidang informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Perkembangan tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan prasarana komunikasi seperti wartel, warnet, maupun informasi dalam bentuk pameran.

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk di Kabupaten Sleman untuk tahun 2015 adalah sebesar 0,00012, menurun jika dibandingkan tahun 2014 sebesar 0,00015. Angka rasio warnet/wartel tahun 2015 yang menurun karena kebutuhan akan akses internet saat ini sudah sangat mudah, antara lain melalui *free hotspot* dan modem GSM/CDMA dengan biaya relatif murah.

Data perkembangan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Angka Rasio dan Jumlah Sarana Komunikasi
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,00055	0,00055	0,00060	0,00015	0,00012
2	Jumlah Surat Kabar Nasional Jumlah Surat Kabar Lokal	17 7	17 7	17 7	17 7	4 5
3	Jumlah penyiaran : Radio Nasional (jaringan ke daerah) Radio Lokal TV lokal TV Nasional	 5 21 5 11	 5 21 5 11	 5 21 5 11	 5 21 5 11	 2 7 4 11
4	*Website* milik pemerintah daerah	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit (55 subdomain)
5	Pameran /expo yang diikuti oleh SKPD Pemerintah Daerah Sleman sebagai partisipan berdasar tingkatan event : - Skala Event tingkat lokal/daerah/Kabupaten - Skala Event tingkat Regional - Skala Event tingkat Nasional - Skala Event tingkat Internasional	 9 4 12 4	 10 4 12 4	 10 4 12 4	 9 3 7	 4 5 5 4

Sumber : Dinas Hubkominfo dan Bagian Humas Setda, Bagian Perekonomian Setda, 2015

2.3.1.2.11. Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Salah satu usaha pengembangan ekonomi di Kabupaten Sleman adalah koperasi. Manfaat koperasi bisa dirasakan sampai lapisan bawah dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat.

Jumlah koperasi pada tahun 2014 sebanyak 630 buah meningkat menjadi 641 buah pada tahun 2015. Jumlah koperasi aktif juga meningkat dari 573 pada tahun 2014 menjadi 593 pada tahun 2015.

Jumlah anggota semakin meningkat dari 275.198 orang pada tahun 2014 menjadi 275.246 orang pada tahun 2015.

Hasil usaha koperasi juga mengalami peningkatan. Dilihat dari jumlah modal sendiri mengalami peningkatan yaitu dari Rp282.739.536.000,00 pada tahun 2014 menjadi Rp349.125.732.180,00 pada tahun 2015. Jumlah volume usaha sebesar Rp1.071.650.408.000,00 pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp1.078.024.018.269,00 pada tahun 2015. Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp23.845.773.000,00 pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp29.365.038.067,00 pada tahun 2015.

Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Sleman tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.53
Perkembangan Koperasi di Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

Koperasi dan PKM		Tahun				
		2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1)	Jumlah koperasi	604	617	623	630	641
2)	Kondisi Koperasi					
	- Koperasi aktif	550	554	562	573	593
	- Koperasi Tidak aktif	54	54	50	50	48
3)	Jumlah anggota koperasi	234.584	240.522	263.874	275.198	275.246
4)	Jumlah Modal Sendiri (000)	173.695.120	211.178.095	255.382.800	282.739.536	349.125.732
	Volume Usaha (000)	732.070.941	819.373.452	972.774.539	1.071.650.408	1.078.024.018
	SHU (000)	16.508.855	18.927.502	22.145.886	23.845.773	29.365.038

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, 2015

2.3.1.2.12. Urusan wajib penanaman modal

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek pengganda (*mulitiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinan perekonomian menghasilkan *output* yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Penanaman modal di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2011 hingga 2015 terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah unit

usahanya. Sedangkan jika dilihat dari nilai investasinya cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Sleman cenderung kondusif. Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2015 meliputi investasi PMA 57 unit dengan nilai investasi US$233,54, investasi PMDN 51 unit dengan nilai investasi Rp3.159.444,00 juta sedangkan Non fasilitas unit usahanya menjadi 34.548 dengan nilai investasi Rp4.756.616,00 juta. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, realisasi nilai investasi PMA pada tahun 2015 sedikit mengalami kenaikan, yaitu naik sebesar 0,68%. Sedangkan pada tahun 2014, realisasi nilai investasi PMDN pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu naik sebesar 62,37%. Naiknya total nilai investasi penanaman modal berdampak pada naiknya penyerapan tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang terserap oleh PMA pada tahun 2014 sebanyak 7.492 orang meningkat menjadi sebanyak 8.479 orang pada tahun 2015, PMDN pada tahun 2014 sebanyak 9.922 orang menjadi sebanyak 11.913 orang pada tahun 2015, dan non fasilitas pada tahun 2014 sebanyak 268.779 orang menjadi 282.872 orang pada tahun 2015.

Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sleman tahun 2011-2015 lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.54
Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Sleman
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Unit Usaha (orang)					
	PMA	41	42	44	45	57
	PMDN	32	32	40	45	51
	Non fasilitas	31,566	32,452	33.341	33.671	34.548
2	Nilai Investasi					
	PMA (juta US$)	186	233,56	206,79	231,96	233,54
	PMDN (juta Rp)	827,390	1.083.065	1.868.199	1.945.866	3.159.444
	Non fasilitas (juta Rp)	2.034.340	3.489.552	3.787.620	3.895.422	4.756.616
3	Daya serap Tenaga Kerja (orang)					
	PMA	6.385	7.200	7.292	7.492	8.479
	PMDN	9.269	9.771	9.782	9.922	11.913
	Non fasilitas	249.189	259.396	266.489	268.779	282.872
4	Rasio daya serap tenaga kerja (orang)					
	PMA	155	171	166	166	146
	PMDN	289	305	244	220	201
	Non fasilitas	8	8	8	8	8
5	Kenaikan/penurunan realisasi PMA, PMDN dan Non fasilitas(%)					
	PMA	13,92	26,12	-11,46	12,17	0,68
	PMDN	148,33	30,90	72,49	4,16	62,37
	Non fasilitas	12,46	13,77	8,54	2,85	22,11

Sumber : BPMPPT Kab. Sleman, 2015.

2.3.1.2.13. Urusan wajib kepemudaan dan olahraga

Pemuda merupakan asset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kegiatan kepemudaan dan olahraga adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk memfasilitasi kegiatan di masyarakat maupun di sekolah. Pada tahun 2011 jumlah kegiatan kepemudaan sebanyak 13 kegiatan. Adapun pada tahun 2012 jumlah kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan sebanyak 12 kegiatan dan pada tahun 2013 sebanyak 7 kegiatan. Sedangkan pada tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 6 kegiatan kepemudaan antara lain: Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan, Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan, Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, Pemberian Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Pemuda, dan Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi siswa. Pada tahun 2015 kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan sebanyak 7 kegiatan.

Untuk kegiatan olahraga pada tahun 2011 diselenggarakan kegiatan sebanyak 14 kegiatan dan pada tahun 2012 sebanyak 10 kegiatan. Sedangkan pada tahun 2013 dilaksanakan 4 kegiatan olahraga dan pada tahun 2014 ada sejumlah 3 kegiatan antara lain: Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, penyelenggaraan kompetensi olahraga dan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga. Untuk tahun 2015 kegiatan olahraga yang diselenggarakan sebanyak 5 kegiatan.

Data lapangan olahraga yang tercantum dalam tabel adalah lapangan olahraga yang ada di sekolah maupun yang ada di masyarakat yang sifatnya *out door*, khususnya untuk lapangan sepakbola, bulutangkis, lapangan voli, tenis meja, sepak takraw, basket, dan lapangan futsal. Pada tahun 2011 di Sleman terdapat 194 lapangan olahraga dan bertambah menjadi 375 lapangan olahraga di tahun 2012. Untuk tahun 2013 lapangan olahraga yang ada di Sleman sebanyak 375 dan pada tahun 2014 ada 313 lapangan. Adapun untuk tahun 2015 di Sleman terdapat 587 lapangan olahraga. Data tentang perkembangan pemuda dan olahraga tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55
Perkembangan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah organisasi pemuda	20	95	95	29	31
2	Jumlah organisasi olahraga	37	34	34	35	38
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	13	12	7	6	7
4	Jumlah kegiatan olahraga	14	10	4	3	5
5	Lapangan olahraga	194	375	375	313	587

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2015

2.3.1.2.14. Urusan wajib statistik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain untuk kebutuhan perencanaan pembangunan pemerintah data dan informasi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk pengembangan usaha, penelitian dan kebutuhan lainnya.

Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi yang beragam, rinci, akurat dan mutakhir. Tuntutan kebutuhan data dan informasi tersebut belum terpenuhi seluruhnya, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Data produk-produk statistik diantaranya adalah; buku Sleman Dalam Angka, buku PDRB kabupaten, buku indikator kesejahteraan rakyat, buku indeks pembangunan gender, buku inflasi, buku penduduk pertengahan, buku statistik harga bangunan, buku IPM, Buku Statistik Industri, Buku Kecamatan Dalam Angka, dan Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

2.3.1.2.15. Urusan Wajib Persandian

Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten.

2.3.1.2.16. Urusan Wajib Kebudayaan

Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Salah satu indikator pengelolaan produk budaya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.56
Perkembangan Seni Budaya
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	4	9	5	11	11
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	135	141	147	148	153
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	124	170	679	737	788

Sumber: Dinas Kebudayan dan Pariwisata, 2015

Pada tahun 2013 penyelenggaraan festival seni budaya ada 5 macam yaitu: Festival Sendratari, Festival Ketoprak, Festival Gelar Seni Pertunjukan, Festival Parade Tari Daerah, dan Festival Prajurit Nusantara. Sedangkan pada tahun 2014 diselenggarakan sebanyak 11 festival, yaitu Festival Sendratari, Festival Ketoprak, Festival Gelar Seni Pertunjukan, Festival Parade Tari Daerah, dan Festival Prajurit Nusantara, Festival Ketoprak, Festival Jathilan, Festival Langen Carito, Festival Ketoprak Lesung, Festival Musik Kelompok, Festival Kesenian Tradisional Kerakyatan. Demikian juga pada tahun 2015 diselenggarakan 11 macam festival.

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya khusus gamelan pada tahun 2013 sebanyak 147 set gamelan dan pada tahun 2014 ada 148 set gamelan yang tersebar di seluruh Kabupaten Sleman. Jumlah gamelan bertambah 1 set karena Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan gamelan untuk jathilan untuk 1 kecamatan. Data yang dimaksud adalah milik masyarakat, termasuk gamelan untuk karawitan maupun jathilan. Pada tahun 2015 jumlah gamelan bertambah 5 set sehingga jumlahnya menjadi 153 set.

Adapun benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2013 telah diadakan penataan dengan lebih baik sehingga terlihat

data secara lebih rinci, jumlahnya berubah secara signifikan yaitu menjadi 679 buah dengan rincian sebagai berikut: situs 172 buah, struktur 4 (Goa Sentonoharjo, Goa di Kompleks Ratu Boko, Goa di Kawasan Kaliurang dan Selokan Van der Wijk Banyurejo Tempel) serta Kawasan 3 tempat (Kawasan Kraton Ratu Boko, Kawasan Prambanan, dan Kawasan Ambarketawang), bangunan 76 buah, rumah tradisional sebanyak 414 buah dan museum sejumlah 10 buah. Sedangkan untuk tahun 2014 ada 737 karena ada tambahan 58 untuk bangunan. Pada tahun 2015 menjadi 788 dengan rincian situs sebanyak 163, bangunan 177, rumah tradisional 414, struktur 17, kawasan 3 dan museum 14.

2.3.1.2.17. Urusan Wajib Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Guna menunjang peningkatan minat baca masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sleman menambah jumlah perpustakaan maupun menambah jumlah koleksi pustaka.

Banyaknya unit perpustakaan ini memberi kemudahan pada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Jumlah perpustakaan sampai dengan tahun 2015 sebanyak 859 unit dan dilengkapi dengan 4 armada perpustakaan keliling. Peningkatan pelayanan perpustakaan dilakukan dengan menambah jumlah jam/hari buka perpustakaan (hari sabtu tetap buka) dan mengikutkan petugas dalam kursus/bintek terkait dengan pustaka untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan. Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2014 sebanyak 580.219 orang, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebanyak 543.520 orang atau sekitar 6,32%. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 59.855 pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi sebanyak 62.670. Buku yang paling banyak di perpustakaan daerah adalah buku non fiksi yaitu sebanyak 37.872 pada tahun 2015. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi buku seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.57
Jumlah Pengunjung dan Koleksi Perpustakaan
Kabupaten Sleman Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	89.427	100.044	102.710	108.875	580.219	543.520
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	50.163	51.278	54.114	56.421	59.855	62.670
	Fiksi (eksemplar)	12.812	13.138	14.402	15.338	17.411	18.960
	Non Fiksi (eksemplar)	32.820	33.383	34.541	35.618	36.644	37.872
	Majalah (eksemplar)	2.425	2.663	2.924	3.156	3.389	2.411
	Referensi (eksemplar)	2.106	2.118	2.107	2.309	2.411	3.617

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah, 2015

Keterangan: jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2014 merupakan gabungan jumlah pengunjung perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, perpustakaan elektronik keliling, 18 lokasi perpustakaan desa dan masyarakat, serta perpustakaan sekolah

2.3.1.2.18. Urusan wajib kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta penerapan Sistim Kearsipan Pola Baru (SKPB) melalui kegiatan-kegiatan antara lain monitoring, lomba dan pendampingan pengelolaan arsip.

Pelaksanaan SKPB tahun 2015 yang diterapkan di 32 SKPD mencapai 68,08%, sedangkan pada tahun 2014 hanya 62,50%. Penanganan arsip menjadi kebutuhan yang amat penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif. Untuk itu perlu ada upaya bersama dari para pejabat struktural untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting. Hasil-hasil yang dicapai selama lima tahun terakhir seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.58
Pengelolaan Kearsipan
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Prosentase nilai rata-rata pengelolaan arsip SKPD(%)	68,02	66,67	67	66,3	68,52
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)	26	26	26	10	16
3	Persentase SKPD menerapkan arsip secara baik (%)	58,69	60,87	60,42	62,50	68,08

Sumber : Kantor Arsip Daerah, 2015

Persentase SKPD yang mengelola arsip kategori baik mengalami peningkatan dari 62,50% pada tahun 2014 menjadi 68,08% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD sudah makin peduli tentang pengelolaan arsip. Persentase nilai rata-rata pengelolaan arsip SKPD mengalami kenaikan dari 66,3% pada tahun 2014 menjadi 68,52% pada tahun 2015.

2.3.2. Urusan Pilihan

2.3.2.1. Urusan Pilihan Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 25,74% dari tahun 2014. Perkembangan jumlah wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2011-2015 sebagai berikut:

Tabel 2.59
Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kunjungan wisatawan (orang)	3.277.728	3.418.254	3.613.577	4.132.933	5.196.816
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Hb (%)	9,49	9,70	9,88	9,95	10,07*)

Sumber: - BPS Kab. Sleman, 2015
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman, 2015*) angka sementara

Peningkatan jumlah kunjungan wisata tidak hanya berdampak pada peningkatan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB saja, tetapi juga pada peningkatan PAD Kabupaten Sleman. Pada tahun 2015 sub sektor penyumbang terhadap PAD Pariwisata terbanyak yaitu dari sektor Pajak

Hotel sebesar Rp52.305.963.907,00, sedangkan sub sektor terendah yaitu dari sektor pajak hiburan sebesar Rp8.688.347.301,00.

Tabel 2.60
Data PAD Sektor Pariwisata Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pajak Hotel	22.637.880.385	32.216.986.820	41.502.758.586	49.800.597.181	52.305.963.907
2	Pajak Restoran	13.257.484.784	16.758.882.196	21.044.463.951	27.979.616.224	39.132.497.134
3	Pajak Hiburan	2.709.834.885	3.804.493.162	4.910.550.640	5.652.846.661	8.688.347.301
4	Retribusi Jasa Umum	18.274.589.200	8.802.463.187	10.950.122.022	11.489.559.605	12.943.268.440
5	Retribusi Jasa Usaha	3.765.115.997	6.174.553.032	7.184.427.643	8.414.596.963	9.663.694.950

Sumber : BPS Kab. Sleman, 2015
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman, 2015

Potensi kepariwisataan di Kabupaten Sleman terdiri dari wisata alam, wisata candi, wisata museum, kegiatan luar atau even dan desa wisata. Kabupaten Sleman memiliki Desa Wisata sebanyak 38 desa wisata. Perkembangan potensi wisata terlihat sebagai berikut:

Tabel 2.61
Potensi Obyek Wisata Di Kabupaten Sleman
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Wisata Alam (jenis)	4	4	4	4	4
2	Wisata Candi	12	12	12	12	12
3	Wisata Museum	10	10	10	13	13
4	Kegiatan luar (event)	-	-	5	5	5
5	Kategori Desa Wisata	35	38	38	38	38

Sumber: - BPS Kab. Sleman, 2015
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman, 2015

Pada tahun 2014 Berdasarkan keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 1157K/40/BGL/2014 Tanggal 2 Oktober 2014 telah ditetapkan 9 situs *Geoheritage* sebagai cagar alam Geologi di DIY. Tiga diantaranya berada di wilayah Kabupaten Sleman, yaitu Lava Bantal di Kecamatan Berbah, Endapan Abu Vulkanik Purba Candi Ijo di Kecamatan Prambanan dan Monumen Batu Gamping Eosen di Kecamatan Gamping.

Ketiga Kawasan *Geoheritage* tersebut selama ini belum mendapatkan perhatian bahkan cenderung masih terabaikan. Kondisi Lava Bantal di Kecamatan Berbah Sleman pada saat ini masih memprihatinkan dikarenakan sungai yang memiliki nilai kesejarahan yang panjang ini

sering dipakai untuk membuang sampah secara sembarangan. Begitu pula situs *Geoheritage* endapan abu vulkanik purba Candi Ijo di Kecamatan Prambanan semakin berkurang karena terus ditambang secara liar untuk dijadikan batu hias.

Melihat keprihatinan tersebut maka perlu dilakukan upaya strategis untuk konservasi, pengamanan dan pemanfaatan warisan geologi tersebut agar bermanfaat bagi dunia pendidikan sebagai destinasi *Geopark*. Selain itu apabila potensi tersebut dikemas dengan baik dan terkonsep maka tidak menutup kemungkinan dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata minat khusus yang handal.

Dari berbagai destinasi wisata di Kabupaten Sleman, pada tahun 2015 kunjungan wisatawan tertinggi terjadi di obyek wisata candi mencapai 42,6% baik untuk kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan asing. Jumlah terendah terjadi di obyek desa wisata yang hanya mencapai 4,29%. Kondisi jumlah kunjungan wisatawan di lokasi obyek wisata di Sleman digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.62
Data Wisatawan Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

URAIAN	TAHUN									
	2011		2012		2013		2014		2015	
	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
REALISASI	3.015.387	262.341	3.076.676	341.578	3.310.781	302.798	3.820.575	312.358	4.936.929	259.887
JUMLAH REALISASI	3.277.728		3.418.254		3.613.577		4.132.933		5.196.816	
(%) (Nus-Manc)	92,00%	8,00%	90,01%	9,99%	91,62%	8,38%	92,44%	7,56%	95,00%	5,00%

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman, 2015

Obyek wisata Candi yang memiliki kunjungan teringgi adalah candi Prambanan. Keberadaan 12 candi yang lain yang juga memiliki keindahan dan spesifikasi yang berbeda dengan candi Prambanan perlu pengelolaan kawasan yang lebih baik, sehingga mampu menjadi daya tarik wisata yang baru.

Wisata alam di kabupaten Sleman menjadi daya tarik kedua para wisatawan. Jumlah pengunjung wisata alam sebanyak 29,8% dari total wisatawan. Obyek yang memiliki kunjungan tertinggi adalah Kaliurang dengan jumlah pengunjung 70,7%, disusul oleh *volcano tour* dengan pengunjung 13,1%.

Keberadaan Museum merupakan daya tarik ketiga wisatawan. Monumen Jogja Kembali memiliki jumlah pengunjung tertinggi mencapai 51,9%, namun seluruh pengunjungnya adalah wisatawan nusantara. Museum

Gunung Merapi merupakan obyek favorit wisatawan setelah Monumen Jogja Kembali dengan jumlah 21,62% dan jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara juga tertinggi setelah Museum Ullen Sentalu.

Potensi wisata luar ruang atau *event* di Kabupaten Sleman juga sangat diminati wisatawan terutama mancanegara. Jumlah kunjungan wisman di obyek ini merupakan rangking kedua setelah candi. Upacara adat dan pentas ramayana menjadi obyek favorit potensi ini.

Keberadaan obyek wisata desa wisata sebagai salah satu destinasi baru memiliki jumlah pengunjung wisman dan wisnu sebanyak 4,3% dari total wisatawan. Oyek ini cukup prospektif untuk dikembangkan.

Kabupaten Sleman saat ini memiliki 38 desa wisata yang tersebar di 15 kecamatan yang dari tahun 2015 diklasifikasikan berdasarkan pemanfaatan potensi, SDM, kunjungan wisatawan, fasilitas, modal, pemasaran, infrastruktur dan masyarakatnya. Dari beberapa indikator tersebut desa wisata diklasifikasikan menjadi tumbuh, berkembang dan mandiri.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam upaya pengembangan pariwisata Kabupaten Sleman pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran wisata melalui pembuatan materi promosi dan pengelolaan *website*.
2. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata melalui gebyar ODTW, Jelajah Wisata, Java Summer Camp dan Pelangi Budaya Bumi Merapi.
3. Promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri melalui pameran di Sleman, Jakarta, Jawa Barat dan di luar jawa, Travel dialog di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan luar Jawa, jumpa pers, Talkshow di radio dan TV, penulisan artikel dan promosi melalui famtrip.
4. Pengembangan statistik kepariwisataan melalui profil desa wisata, penyusunan buku statistik kebudayaan dan pariwisata dan penyusunan direktori hotel.
5. Pelatihan pemandu wisata terpadu.
6. Pengembangan destinasi pariwisata melalui pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi.
7. Pengembangan Museum Gunungapi Merapi.
8. Koordinasi pembangunan obyek pariwisata.

9. Pengembangan kemitraan melalui; pengembangan SDM bidang kebudayaan dan pariwisata berkerjasama dengan lembaga lain, pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya.
10. Perencanaan pembangunan ekonomi melalui kajian standarisasi usaha dan FS *art center* dan TIC.

2.3.2.2. Urusan Pilihan Pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan kehutanan dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari.

Produktivitas padi dan bahan pangan utama dipengaruhi faktor pola tanam, penggunaan bibit yang berkualitas dan penggunaan pupuk organik serta kesadaran pengembangan pangan non padi. Pada tahun 2015 produktifitas padi sebesar 64,25 kw/ha, meningkat jika dibandingkan tahun 2014. Peningkatan produktivitas ini disebabkan karena adanya peningkatan penerapan teknologi dalam budidaya melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) yang meliputi pengolahan tanah sempurna, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, penggunaan pupuk organik, tata tanam jajar legowo (tajarwo) dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), tata pengelolaan air irigasi sesuai kebutuhan tanaman. Perkembangan indikator pertanian tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.63
Produktivitas Padi dan Kontribusi Per Sektor Terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (kuintal/ha)	56,65	67,56	62,72	60,19	64,25
2	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)	8,73	8,90	8,96	8,87	8,78
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	8,25	8,42	8,46	8,35	8,29

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
	a. Tanaman Pangan	2,73	2,70	2,48	2,27	2,07
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	c. Perkebunan Semusim	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	2,98	3,18	3,53	3,58	3,68
	e. Perkebunan Tahunan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	f. Peternakan	1,66	1,67	1,60	1,67	1,66
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,21	0,20	0,19	0,19	0,18
	3. Perikanan	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35
3	Cakupan bina kelompok petani (kelompok)					
	TPH	1.063	1.174	1.174	1.268	1.375
	Ikan	427	507	507	530	571
	Ternak	666	737	751	788	742
	Kebun	138	144	144	152	152

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2015
Keterangan: *) angka sangat sementara

2.3.2.3. Urusan Pilihan Kehutanan

Urusan pilihan kehutanan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan taman hutan rakyat. Kabupaten Sleman tidak memiliki taman hutan rakyat.

2.3.2.4. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

Bahan tambang yang terdapat di Kabupaten Sleman meliputi pasir dan batu, andesit, breksi batu apung, dan tanah liat. Bahan tambang ini dapat kita temui di sepanjang perairan sungai di kaki Gunung Merapi karena memang pasokannya bergantung dari aktivitas Gunung Merapi.

Bahan galian yang tidak boleh ditambang adalah batu gamping yang terdapat di Kecamatan Gamping karena telah ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam atau Taman Wisata Alam Gunung Gamping dengan SK Menteri Pertanian Nomor: 526/KPTS/UM/7/1982 tanggal 21 Juli 1982.

Seluruh padukuhan di Kabupaten Sleman sudah terdapat jaringan listrik dari PLN tetapi masih terdapat kelompok rumah yang belum terjangkau yaitu terutama pada daerah terpencil dan pemukiman baru. Pada tahun

2014 terdapat 5.482 KK yang belum punya KWh meter sendiri, atau elektrifikasi 99%. Sedangkan penyediaan listrik untuk masyarakat yang tidak terjangkau layanan listrik PLN, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengupayakan penggunaan listrik tenaga surya. Sampai dengan tahun 2014 telah terpasang 167 PLTS rumah tangga dan 21 PLTS non rumah tangga (hilang 5 akibat erupsi). Selain itu juga dikembangkan pemanfaatan energi biogas sebanyak 145 unit.

Mulai tahun 2017 urusan pilihan energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah panas bumi. Kabupaten Sleman tidak memiliki potensi panas bumi tersebut.

2.3.2.5. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Perkembangan luas lahan usaha perikanan darat khususnya yang dilakukan di kolam selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Kenaikan ini diikuti dengan kenaikan produksi perikanan dan konsumsi ikan. Keberhasilan pelaksanaan urusan perikanan dicapai melalui pembinaan kelompok perikanan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan jumlah produksi ikan konsumsi pada tahun 2015 mencapai 17,69%. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan luas kolam dan produktivitas kolam, peningkatan produktivitas alat tangkap perairan umum, serta meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidayaan ikan.

Produksi ikan hias rata-rata tahun 2015 naik sebesar 11,28% dari 16.300.500 ekor di Tahun 2013 menjadi 16.127.520 dengan tujuan pemasaran Kota Jakarta dan Kota Yogyakarta. Sementara, peningkatan produksi benih ikan sebesar 2,67% dipasarkan untuk kebutuhan Sleman, waduk di Jawa Tengah dan Waduk Jatiluhur di Jawa Barat (data masih angka sementara).

Tabel 2.64
Indikator Urusan Perikanan Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014 *)	2015 *)
1	Produksi perikanan (ton)	18.364,10	21.899,20	25.883,79	31.120,50	36.627,00
2	Ketersediaani ikan konsumsi	27,78	28,65	29,79	30,41	31,24
3	Cakupan bina kelompok nelayan	427	507	507	530	571
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (benih) (ekor)	843.611.580	908.012.110	947.330.900	994.616.500	1.021.216.850

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2015*) angka sementara

2.3.2.6. Urusan Pilihan Perdagangan

Jika dibandingkan dengan tahun 2014 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku mengalami penurunan dari 8,16% menjadi 8,12%. Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Sleman tahun 2015 meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah usaha informal (PKL) di Kabupaten Sleman tahun 2014 sebanyak 1.488 turun menjadi 1.307 pada tahun 2015. Kontribusi dan nilai ekspor sektor perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.65
Kontribusi Terhadap PDRB dan Nilai Ekspor Sektor Perdagangan
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Hb (%)	8,11	8,15	8,04	8,16	8,12
2	Ekspor Bersih Perdagangan (US$)	32.023.058	37.039.270	27.068.084	33.657.979	39.963.928,57
3	Cakupan bina usaha informal (PKL)	804	991	1.137	1.488	1.307

Sumber: - BPS Kabupaten. Sleman, 2015
- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, 2015
- Dinas Pasar, 2015

2.3.2.7. Urusan Pilihan Perindustrian

Selama tahun 2011-2015, sektor industri memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar 13,78% per tahun. Jika dibanding dengan tahun 2014, kontribusi sektor industri mengalami kenaikan di tahun 2015 dari 13,37% menjadi 13,58%. Jumlah industri di Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,25%. Jumlah industri kecil dan rumah tangga mengalami kenaikan rata-rata 1,02%. Jumlah industri kecil dan rumah tangga tahun 2014 sebanyak 15.944 buah meningkat menjadi 16.088 unit pada tahun 2015. Jumlah pengrajin yang dibina selama tahun 2011-2015juga meningkat yaitu sebesar 20,16%. Jumlah pengrajin yang dibina pada tahun 2014 sebesar 21,10% meningkat menjadi 27,19% pada tahun 2015. Data perkembangan indikator perindustrian tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66
Indikator Urusan Perindustrian
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Hb (%)	14,39	13,62	13,90	13,37	13,58
2	Pertumbuhan Industri (%)	1,09	1,74	0,89	0,68	1,83
3	Jumlah industri kecil & rumah tangga (buah)	15.449	15.707	15.841	15,944	16.088
4	Cakupan bina pengrajin (%)	14,27	17,41	20,83	21,10	27,19

Sumber: - BPS Kab. Sleman, 2015,
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Sleman, 2015

2.3.2.8. Urusan Pilihan Transmigrasi

Pelaksanaan transmigrasi merupakan kerja sama antar pemerintah daerah baik daerah pengirim maupun daerah penerima dengan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator. Pola transmigrasi sudah mencerminkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat baik melalui trasmigrasi umum maupun melalui transmigrasi swakarsa.

Pemerintah Kabupaten Sleman mulai memberangkatkan transmigrasi pada tahun 2007. Transmigrasi swakarsa hanya sampai pada tahun 2010, dikarenakan fasilitas yang diperoleh calon transmigran tidak lebih baik dari transmigrasi umum meskipun calon transmigran sudah membayar sendiri. Jika dilihat dari Persentase Transmigrasi Umum pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 27.38%. Animo calon transmigran cukup besar, namun karena ketidaksiapan daerah penempatan dan terbatasnya kuota penempatan dari pemerintah pusat serta calon lokasi penempatan belum siap oleh pemerintah daerah setempat menjadi kendala dalam pencapaian pemberangkatan calon transmigran yang sudah mendaftar dan terseleksi. Persentase transmigran umum tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.67
Persentase Transmigran Umum
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Transmigran umum (%)	44,58	61,53	33,33	52,38	25,00

Sumber : Dinas Nakersos Kab. Sleman 2015

2.3.3. Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Pada prinsipnya, urusan administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan adalah berbagai kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan secara umum digambarkan dengan pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang berupa indeks reformasi birokrasi. Pada tahun 2015, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sleman masih di angka 61,40, begitu pula hasil penilaian mandiri birokrasi juga masih di angka 68,68. Dari data ini diperoleh gambaran bahwa pemerintah Kabupaten Sleman masih harus bekerja keras dalam rangka melaksanakan 8(delapan) area perubahan yang diamanatkan dalam reformasi birokrasi guna menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Jika indeks reformasi birokrasi masih belum seperti yang diamanatkan hasil penilaian terkait dengan kinerja pemerintahan dan kinerja keuangan sudah dilaksanakan dengan relatif baik. Dalam 5(lima) tahun terakhir, Sleman memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal penilaian kinerja pengelolaan keuangan dan predikat B+ untuk pelaksanaan kinerja pemerintahan (LAKIP). Indeks Kepuasan Masyarakat pada angka 78,54 dari 79 yang ditargetkan. Persentase keterlibatan publik baru mencapai 76,94 % dari target 96%. Leveling Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah Kabupaten Sleman masih di level 2 dari skala 4.

Terkait dengan penggunaan teknologi informasi, jenis layanan masyarakat yang berbasis teknologi informasi masih relatif sedikit dan belum terintegrasi. Dalam era pelibatan masyarakat dan transparansi penyelenggaran pemerintahan ke depan pemerintah Kabupaten Slemn perlu memperbaiki system pelayanan yang lebih baik yang merupakan paduan regulasi, kebijakan, sikap dan perilaku yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi yang modern sehingga mampu memberikan respon dan efektivitas yang tinggi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Berikut capaian kinerja urusan administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan:

Tabel 2.68
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sleman

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,34	78,67	78,65	72,77	78,54
2.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	B	B	B	BB	-
3.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	60,87	60,97	68,68
5.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	61,40
6.	Persentase Keterlibatan Publik	-	-	-	82,35	76,94

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Sleman selama tahun 2011-2014 mengalami kenaikan sebesar 9,87% per tahun. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita pada tahun 2014 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2013, yaitu dari Rp26.544.860,00 menjadi Rp30.263.496,00.

Peningkatan konsumsi rumah tangga per kapita tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya konsumsi barang dan jasa. Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi masyarakat serta perkembangan ilmu dan teknologi mempengaruhi perubahan selera dan perilaku konsumsi masyarakat.

Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita lebih banyak ditopang oleh pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Besarnya kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan per kapita terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita selama tahun 2011-2015 rata-rata sebesar 52,31%.

Produktivitas total Kabupaten Sleman selama tahun 2011-2015 menunjukkan kenaikan sebesar 10,82% per tahun. Produktivitas daerah tahun 2014 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2013, yaitu dari Rp31.783.752,00 menjadi Rp35.715.863,00. Sedangkan produktivitas daerah pada tahun 2015 diasumsikan tidak berubah dari tahun 2014. Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.69
Penggunaan Konsumsi Rumah Tangga dan Non Pangan per-Kapita Kabupaten Sleman Tahun 2011–2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga (ADHB)(Rp)	22.925.637	25.552.069	26.544.860	30.263.496	30.263.496
2	Pengeluaran konsumsi non pajak perkapita (ADHB) (%)	52,68	52,59	51,89	51,89	51,89
3	Produktivitas total daerah	25.457.722	29.004.746	31.783.752	35.715.863	35.715.863

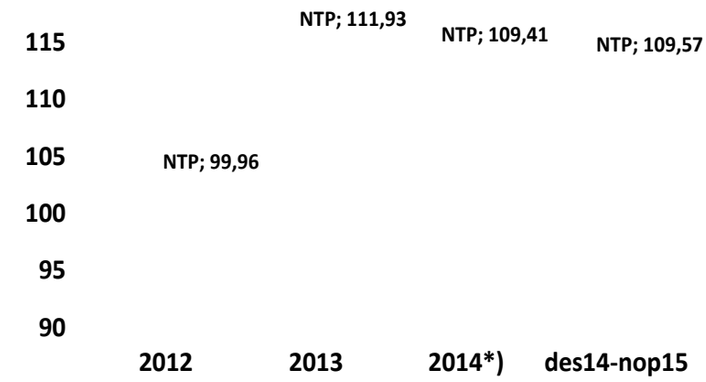
Sumber: BPS Kab. Sleman, 2015 *) angka sementara

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani merupakan nilai tukar *(term of trade)* antara barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam persen. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani (It) dan barang dan jasa yang dikonsumsi petani (Ib). Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dan dengan sendirinya pendapatan petani naik relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus. Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan pertambahan pendapatan petani sangat erat. Karena pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, maka NTP merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani.
Secara umum ada tiga macam pengertian NTP yaitu:

- NTP>100, berarti petani mengalami **surplus**. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya; dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
- NTP=100, berarti petani mengalami **impas** (*breakeven*). Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
- NTP<100, berarti petani mengalami **defisit**. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. S Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahtaraan petani pada periode sebelumnya.

Dalam kurun waktu empat tahun, sejak tahun 2012-2015 perkembangan rata-rata NTP subsektor tanaman pangan Kabupaten Sleman dapat dilihat dalam gambar 2.4 Pada tahun 2012 rata-rata NTP subsektor tanaman pangan Kabupaten Sleman sebesar 99,96, kemudian naik menjadi 111,93 pada tahun 2013. Pada tahun 2014 rata-rata NTP subsektor tanaman pangan mengalami sedikit penurunan menjadi 109,41, dan periode Desember 2014-Nopember 2015 rata-rata NTP subsektor tanaman pangan sebesar 109,57.



*) angka perbaikan

Gambar 2.4 Grafik Nilai Tukar Petani Kabupaten Sleman Tahun 2012-2015.

Selama periode bulan Desember 2014 sampai dengan bulan November 2015 rata-rata indeks yang diterima petani subsektor tanaman pangan di Kabupaten Sleman sebesar 132,51. Sedangkan rata-rata indeks harga yang dibayar petani subsektor tanaman pangan sebesar 120,94 dengan indeks konsumsi rumah tangga 121,55 dan indeks BPPBM 117,41. Rata-rata nilai tukar petani subsektor tanaman pangan Kabupaten Sleman sebesar 109,57 yang berarti bahwa dalam periode Desember 2014 sampai November 2015 kenaikan bahan pokok kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi tanaman pangan tidak melebihi kenaikan harga hasil produksi tanaman pangan, dengan kata lain kesejahteraan petani tanaman pangan mengalami peningkatan (lihat Gambar diatas).

2.4.1.3. Produktifitas Total Daerah

Produktivitas Total Daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor. Adapun produktivitas per sektor di Kabupaten Sleman dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.70
Produktivitas per Sektor di Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Sektor	2011		2012		2013		2014		2015*)	
		(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%
1	Pertanian	979.024	14,60	1.019.264	14,42	1.034.154	13,84	1.027.160	13,05	1.111.987,1	13,42
2	Pertambangan & Penggalian	38.084	0,57	38.636	0,55	39.486	0,53	40.172,6	0,51	43.485	0,52
3	Industri Pengolahan	1.010.358	15,07	1.005.640	14,23	1.055.973	14,13	1.075.466,3	13,66	1.150.740	13,88
4	Listrik,Gas &Air Bersih	61.282	0,91	65.150	0,92	69.343	0,93	71.686,5	0,91	76.064,1	0,92
5	Bangunan	780.153	11,64	827.196	11,70	886.231	11,86	945.557	12,01	989.009,8	11,93
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.526.308	22,77	1.636.136	23,14	1.743.449	23,33	1.858.108	23,60	1.945.857,3	23,48
7	Pengangkutan & Komunikasi	410.324	6,12	433.134	6,13	458.431	6,14	493.830,8	6,27	514.826,6	6,21
8	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	715.317	10,67	779.721	11,03	836.345	11,19	919.887,1	11,69	919.887	11,45
9	Jasa-jasa	1.183.251	17,65	1.264.352	17,89	1.348.486	18,05	1.440.038,4	18,29	1.506.632,7	18,18
	PDRB	6.704.100	100,0	7.069.229	100,0	7.471.780	100,0	7.871.906,8	100,0	8.287.543,5	100,0

Sumber: BPS PDRB Kab. Sleman, 2015
*) angka sementara

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Sleman. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Fasilitas sarana prasarana wilayah tersebut diantaranya :

2.4.2.1. Perhubungan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap jumlah kendaraan semakin bertambah sehingga kepadatan kendaraan semakin bertambah.

Pertumbuhan jumlah orang/barang yang melalui terminal dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya kepemilikan kendaraan pribadi. Rasio panjang jalan dan jumlah orang yang melalui terminal tahun 2011-2015 dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2.71
Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Orang/Barang Pengguna Terminal Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan(km/kend)	0,1309 km/kend	0,1301 km/kend	0,1290 km/kend	0,1232 km/kend	0,006443 km/kend
2	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	5.641.029	4.463.688	4.254.314	4.068.315	3,882,326

Sumber : Dinas Hubkominfo, 2015

Kabupaten Sleman dari sisi ketersediaan infrastruktur transportasi wilayah ditunjang oleh kondisi jalan dan jaringan jalan yang baik serta terkoneksi dengan pusat-pusat kegiatan vital Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Bandara Adi Sucipto, Pusat Pendidikan Tinggi, dan lain-lain. Ketersediaan infrastruktur perhubungan didukung dengan beroperasinya Transjogja pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta serta keberadaan Bandara Adi Sucipto sebagai pusat transportasi udara Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkoneksi dengan moda transportasi kereta api, transjogja, maupun bis antarkota.

Daya saing daerah Kabupaten Sleman didukung oleh Rencana Pengembangan Transportasi Kabupaten Sleman dalam draft Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

1. Pengembangan sistem dan jaringan transportasi
    a. Pengembangan sistem dan jaringan transportasi darat
        i. Pengembangan jaringan pelayanan LLAJ untuk angkutan massal berbasiskan jalan berupa: Jaringan Utama bis berjalur khusus; Jaringan angkutan bis besar; dan Jaringan angkutan pengumpan/feeder (feeder direncanakan pada lokasi stasiun Jombor)
        ii. Sistem dan Prasarana Jalan
            - Pengembangan jaringan jalan nasional (Jalan Arteri Primer Jalan Strategis Nasional)
            - Pengembangan jaringan jalan provinsi (Jalan Kolektor Primer)
        iii. Pengembangan sistem fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride) di pusat kegiatan, stasiun angkutan jalan

rel, shelter angkutan massal dan terminal angkutan umum

iv. Pengembangan sistem prasarana angkutan barang berupa penyediaan terminal angkutan barang beserta fasilitas untuk mendukung Kawasan Industri dan kegiatan ekspor impor

b. Pengembangan sistem dan Jaringan Transportasi Perkeretaapian

i. Pengembangan jaringan dan layanan perekerataapian perkotaan yang melayani jalur timur – barat dan utara – selatan;

ii. Stasiun kereta api kecil :

- Stasiun Maguwo sebagai pendukung terminal angkutan udara di bandarudara Adisutjipto;
- Stasiun Patukan sebagai stasiun penumpang;
- Stasiun Kalasan sebagai stasiun barang.

2. Pengembangan outer ringroad khusus angkutan barang sebagai upaya memecah tumpukan kendaraan pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta agar kendaraan angkutan ber-tonase besar tidak masuk ke Perkotaan Yogyakarta sehingga dapat memperlancar jalur distribusi dan transportasi.

Pembangunan persilangan garis bidang Gejayan, Kentungan, dan Monjali sebagai upaya menambah kelancaran transportasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

2.4.2.2. Sarana Perekonomian

Jumlah restoran di Kabupaten Sleman lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah rumah makan. Pada tahun 2014 persentase jumlah restoran sebesar 20,06%, bertambah menjadi 36,37% pada tahun 2015. Sementara itu persentase jumlah rumah makan menurun dari 79,94% pada tahun 2014 menjadi 63,63% pada tahun 2015.

Persentase jumlah penginapan di Kabupaten Sleman terbesar pada tahun 2014 adalah Pondok Wisata sebesar 59,53% kemudian menurun menjadi 26,92% pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2015 persentase jumlah penginapan di Kabupaten Sleman terbesar adalah Hotel Berbintang sebesar 42,31% yang sebelumnya pada tahun 2014 hanya sebesar 7,67%. Kemudian Persentase hotel melati sebesar 32,79% pada tahun 2014 menjadi 30,77% pada tahun 2015. Persentase jumlah restoran dan hotel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72
Persentase Jumlah Restoran dan Hotel Menurut Jenis
Kabupaten Sleman Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jenis dan jumlah restoran						
	- restoran (%)	20,00	21,21	21,30	20,54	20,06	36,37
	- rumah makan (%)	80,00	78,79	78,70	79,46	79,94	63,63
2	Jenis dan Jumlah hotel						
	- hotel berbintang (%)	4,13	5,04	5,61	6,22	7,67	42,31
	- hotel melati (%)	34,44	34,76	34,39	34,45	32,79	30,77
	- pondok wisata (%)	61,43	60,20	60,00	59,33	59,53	26,92

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2015

2.4.2.3. Jaringan Listrik

Energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sleman. Data rasio elektrifikasi per Desember 2014 sebesar 99% dan pada tahun 2015 sebesar 99,96% (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman, 2015).

2.4.2.4. Ketersediaan Air Baku

Sumber air baku yang digunakan Kabupaten Sleman adalah mata air, sumur dangkal, sumur dalam dan air permukaan dengan tingkat pemanfaatan yang sudah maksimal.Untuk menjamin ketersediaan air baku, SPAM Kabupaten Sleman melakukan beberapa upaya, yaitu:

a. Melakukan penghijauan pada daerah tangkapan air di daerah hilir sekitar Gunung Merapi.
b. Mengupayakan penambahan kapasitas sumber air dari Embung Kembangarum, Embung Argomulyo, Embung Tambakboyo, air permukaan Sungai Bedog dan Sungai Denggung dari Balai Besar SDA Wilayah Sungai Progo Opak Serayu
c. Menyiapkan tindak lanjut atas kesepakatan bersama mengenai pengembangan SPAM di kawasan Regional Kartamantul dengan membuat draft perjanjian kerjasama dalam penyediaan air minum di kawasan SPAM Regional Kartamantul, mengambil sumber air baku dari sungai Progo dengan kapasitas yang direncanakan 700 liter/detik. Kegiatan Pengembangan SPAM Regional Kartamantul dilaksanakan secara *multi years*.

Ada 2 (dua) sistem yang terbangun dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kartamantul diantaranya :

a. Sistem SPAM Bantar kapasitas yang direncanakan sebesar 400 liter/detik (sudah mulai dibangun in-take oleh BBWS).

b. Sistem SPAM Kebonagung Kapasitas yang direncanakan sebesar 300 liter/detik (masih dalam perencanaan).

c. Mengusulkan pada pemerintah pusat melalui BBWSSO agar pembangunan *long storage* Karangtalun segera direalisasikan.

Tabel 2.73
Pelanggan PDAM Kabupaten Sleman Tahun 2015

No	Kecamatan	Sosial	Hidran Umum	Rumah Tangga A1	Rumah Tangga A2	Rumah Tangga A3	Rumah Tangga B	Instansi	Niaga Kecil	Niaga Besar	Industri Kecil	Industri Besar
1	Moyudan	1	2	455	57	-	14	7	1	-	-	-
2	Minggir	12	1	551	5	-	1	5	1	-	-	-
3	Seyegan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Godean	10	8	664	338	-	146	11	2	-	-	-
5	Gamping	22	13	3.643	272	84	21	18	11	-	-	-
6	Mlati	35	18	2.318	738	18	76	17	3	-	-	-
7	Depok	29	-	2.495	1.209	7	273	15	9	12	-	-
8	Berbah	-	-	43	-	-	-	1	-	-	-	-
9	Prambanan	9	1	359	15	-	18	2	-	-	-	-
10	Kalasan	18	22	1.407	605	-	38	7	-	-	-	-
11	Ngemplak	14	17	1.874	134	4	2	16	-	-	-	-
12	Ngaglik	44	9	2.643	1.003	137	20	8	6	-	-	-
13	Sleman	13	2	1.095	109	22	37	45	1	1	-	-
14	Tempel	5	9	276	5	1	-	4	-	-	-	-
15	Turi	1	-	151	74	-	-	-	-	-	-	-
16	Pakem	1	3	346	1	-	1	11	2		1	1
17	Cangkringan	3	1	68	-	-	-	2	-	-	-	-
Jumlah		**217**	**106**	**18.388**	**4.565**	**273**	**647**	**169**	**36**	**13**	**1**	**1**

Sumber: Kabupaten Sleman Dalam Angka Tahun 2015, BPS

Dalam menjalankan fungsi dan tugas penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Sleman memerlukan kelengkapan operasional, baik perangkat lunak maupun perangkat keras untuk keandalan operasi. Pelayanan tersebut dilakukan oleh PDAM dan SPAM Non PDAM.

a. Organisasi

Struktur Organisasi dan tata kerja PDAM Sleman ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 364/Kep.KDH/1996 tanggal 28 November 1996, terdiri dari: Bupati Sleman, selaku pemilik; Dewan Pengawas dan Direksi.

b. Personalia

Jumlah pegawai PDAM Sleman per 31 Desember 2013 adalah 183 orang dengan uraian: Direktur: 1 orang; Pegawai Tetap: 174 orang dan Pegawai Tidak Tetap: 8 orang.

Pada saat ini PDAM Kabupaten Sleman mengelola dan mengoperasikan 17 (tujuh belas) sistem unit wilayah operasional.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Keamanan dan Ketertiban

Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Menurunnya angka kriminalitas dan jumlah demo serta lebih singkatnya waktu penyelesaian perijinan diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Kabupaten Sleman.

Jika dibandingkan dengan tahun 2012, pada tahun 2013 di Kabupaten Sleman tercatat naiknya angka kriminalitas dan jumlah demo, namun hal tersebut tidak sampai mengganggu stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Sleman, sehingga para investor tidak perlu takut untuk tetap menanamkan modalnya di Kabupaten Sleman.

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Sleman, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Kondisi iklim investasi dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.74
Indikator Iklim Investasi
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Angka kriminalitas	6,63	13,76	17,53	15,81	15,81
2	Jumlah demo (kali)	9	15	81	75	18
3	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	39	39	27	27	28
4	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	5	7	7	7	7

Sumber : data diolah dari berbagai sumber, 2015
*) angka sementara

2.4.3.2. Perizinan

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaran Perizinan yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meliputi:

A. BPMPPT
   1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
   2. Keterangan Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan (SKTBL) selain yang dilimpahkan kepada Camat;

3. Dokumen Keterangan Rencana Tata Letak Bangunan dan Lingkungan (RTB);
4. Izin Mendirikan Bangunan selain yang dilimpahkan kepada Camat;
5. Izin Gangguan selain yang dilimpahkan kepada Camat;
6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
7. Izin Usaha Industri;
8. Tanda Daftar Industri;
9. Izin Perluasan Industri;
10. Surat Izin Usaha Perdagangan;
11. Tanda Daftar Perusahaan;
12. Tanda Daftar Gudang;
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
14. Izin Usaha Toko Modern;
15. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
16. Izin Prinsip Penanaman Modal;
17. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
18. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
19. Izin Usaha Penanaman Modal;
20. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
21. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
22. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; dan
23. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal.

B. Organisasi perangkat daerah sebagai penyelenggara pelayanan perizinan yang tidak diselenggarakan oleh BPMPPT

a. Badan Lingkungan Hidup (BLH).
   - Izin Lingkungan;
   - Izin Pembuangan Air Limbah;
   - Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
   - Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
   - Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah;
   - Izin Penebangan Pohon; dan
   - Izin Sambungan Rumah Air Limbah.

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
   - Sertifikat Laik Fungsi;

- Pendaftaran Bangunan Gedung;
- Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan; dan
- Izin Penutupan Saluran Drainase.

c. Dinas Kesehatan
- Izin Apotek;
- Izin Optik;
- Izin Toko Obat;
- Izin Toko Alat Kesehatan;
- Izin Laboratorium Klinik;
- Izin Klinik Pratama;
- Izin Klinik Utama;
- Izin Rumah Sakit;
- Izin Praktik Dokter Umum;
- Izin Praktik Dokter Gigi;
- Izin Praktik Dokter Spesialis;
- Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
- Izin Bidan;
- Izin Perawat;
- Izin Perawat Gigi;
- Izin Tenaga Kefarmasian;
- Izin Fisioterapis;
- Izin Radiografer;
- Izin Refraksionis Optisien;
- Izin Okupasi Terapis;
- Izin Terapis Wicara; dan
- Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.

d. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- Izin Dokter Hewan Praktik;
- Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan;
- Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing;
- Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri;
- Izin Dokter Hewan Praktik Bersama;
- Izin Klinik Hewan;
- Izin Rumah Sakit Hewan;
- Izin Rumah Sakit Hewan Khusus; dan

- Izin Pusat Kesehatan Hewan.

e. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
   - Izin Usaha Angkutan;
   - Izin Pengelolaan Perparkiran; dan
   - Izin Trayek.

f. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
   - Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
   - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga; dan Kerja Asing.

g. Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral
   - Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
   - Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
   - Izin Pertambangan Rakyat;
   - Izin Pemakaian Air Tanah;
   - Izin Pengusahaan Air Tanah;
   - Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah;
   - Izin Juru Bor;
   - Izin Sempadan Saluran Irigasi;
   - Izin Mendirikan Bangunan di Atas atau yang Melintasi Irigasi (Izin Penutupan Saluran Irigasi);
   - Izin Mengubah atau Membongkar Bangunan Irigasi (Izin Memindah Saluran);
   - Izin Pemakaian Air untuk Irigasi;
   - Izin Pengusahaan Air untuk Irigasi; dan
   - Izin Prinsip Alokasi Air.

Sampai dengan Tahun 2015 ini Kabupaten Sleman telah mengeluarkan perizinan seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.75
Perizinan yang sudah dikeluarkan oleh Kabupaten Sleman sampai dengan Tahun 2015

DINAS		JENIS KEGIATAN	BERKAS MASUK	SK JADI
DINAS KESEHATAN	1	Izin Bidan	86	85
	2	Izin Apotek	77	79
	3	Izin Toko Obat	1	1
	4	Izin Optik	7	2
	5	Izin Laboratorium Klinik		6
	6	Izin Rumah Sakit	8	7
	7	Izin Perawat		
	8	Izin Praktek Dokter Umum	240	356
	9	Izin Praktek Dokter Gigi	85	95
	10	Izin Praktek Dokter Spesialis	183	74
	11	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	31	4
	12	Izin Klinik Pratama	12	11
	13	Izin Klinik Utama	4	1
	14	Izin Fisioterapis		
	15	Izin Dokter Hewan		
	16	Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner		
	17	Izin Tenaga Kes Hewan Bukan Dokter Hewan sbg Paramedik Veteriner		
	18	Izin Tenaga Kesehatan Hewan WNA		
		JUMLAH	**734**	**721**
Bid Perizinan Gangguan,	19	Izin Gangguan	562	498
		JUMLAH	**562**	**498**
Bid Perizinan Gangguan, Usaha dan Jasa BPMPPT	20	Izin Usaha Pondok Wisata	12	6
	21	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum		1
		- Izin Usaha Balai Pertemuan	1	1
		- Izin Usaha Barber Shop		
		- Izin Usaha Bazaar		
		- Izin Usaha Bioskop/Teather	3	1
		- Izin Usaha Bowling		
		- Izin Usaha Dunia Fantasi		
		- Izin Usaha Fasilitas Wisata Tirta/ Rekeasi Air		1
		- Izin Usaha Fitnes / Pijat	12	9
		- Izin Usaha Karaoke / Café	19	13
		- Izin Usaha Kolam Pemancingan		
		- Izin Usaha Kolam Renang	2	
		- Izin Usaha Padang Golf		
		- Izin Usaha Panggung Terbuka	1	1
		- Izin Usaha Panggung Tertutup	1	1
		- Izin Usaha Pasar Seni dan Pameran	2	2
		- Izin Usaha Pemandian Alam		

DINAS		JENIS KEGIATAN	BERKAS MASUK	SK JADI
		- Izin Usaha Permainan dan Ketangkasan	4	
		- Izin Usaha Pertunjukan Temporer		
		- Izin Usaha Salon Rias	18	19
		- Izin Usaha Sarana Olahraga	2	2
		- Izin Usaha Taman Rekreasi	1	2
		- Izin Usaha Taman Satwa		
	22	Izin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati	14	13
	23	Izin Usaha Rumah Makan	32	26
	24	Izin Usaha Restoran	15	5
	25	Izin Usaha Perkemahan Wisata		
	26	Izin Usaha Jasa Informasi Wisata	3	4
	27	Izin Usaha Penginapan Remaja		
	28	Izin Mandala Wisata		
	29	Izin Usaha Kawasan Pariwisata		
	30	Izin Jasa Biro Perjalanan Wisata	45	41
	31	Izin Jasa Agen Perjalanan Wisata		
	32	Izin Jasa Pramuwisata dan Usaha jasa Pramuwisata		
	33	Izin Usaha Penyed Akomodasi Khus Hotel Berbintang	11	10
	34	Izin Usaha Penyedia Angkutan Wisata		
	35	Izin Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran/Mice	8	8
		JUMLAH	**206**	**166**
Bid Perizinan Pertanahan BPMPPT	36	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	536	492
	37	Izin Konsolidasi Tanah		
	38	Izin Pemanfaatan Tanah	562	359
	39	Izin Lokasi	13	14
		JUMLAH	**1111**	**865**
Bid Perizinan Bangunan BPMPPT	40	Izin Mendirikan Bangunan	2061	2999
	41	Izin Reklame	124	32
	42	Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi Seluler	37	60
	43	Pengesahan Rencana Tata Bangunan / Site Plan	231	156
	44	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	2717	1778
	45	Rekom Luas Bangunan dan Luas Lahan Terkena Sempadan	7	
		JUMLAH	**5177**	**5025**
Bid Perizinan Gangguan, Usaha dan Jasa BPMPPT	46	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	643	611
	47	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	833	790
	48	Tanda Daftar Gudang (TDG)	15	13
	49	Tanda Daftar Industri (TDI)	35	24

DINAS		JENIS KEGIATAN	BERKAS MASUK	SK JADI
	50	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	16	17
	51	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)		
	52	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol		
	53	Izin Usaha Industri (IUI)	19	22
	54	Izin Perluasan Industri		
		JUMLAH	**1561**	**1477**
Bid Penanaman Modal **BPMPPT**	55	Izin Prinsip Penanaman Modal	4	4
	56	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	1	1
	57	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal		
	58	Izin Usaha Penanaman Modal		
	59	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal		
	60	Izin Usaha Penggabungan/Merger		
	61	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal		
		JUMLAH	**5**	**5**
DISHUBKONINFO	62	Izin Usaha Angkutan		
	63	Izin Trayek	6	6
	64	Izin Pengelolaan Perparkiran		
		JUMLAH	**6**	**6**
JUMLAH BERKAS		**JUMLAH TOTAL**	**9.362**	**8.763**

Sumber: BPMPPT, 2015

Berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) sampai dengan tahun 2015 ini jumlah berkas permohonan izin ada sebanyak 9.362 buah, dan yang sudah keluar Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah sebanyak 8.763 buah. Dari data tersebut ada sebanyak 599 berkas yang belum selesai dan belum keluar SK dari Kepala Daerah tentang status permohonan izin tersebut.

2.4.3.3. Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman Modal menjadi aktivitas investasi yang sangat penting bagi pertumbungan ekonomi suatu wilayah. Aktivitas penanaman modal ini menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek pengganda (*mulitiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinan perekonomian menghasilkan *output* yang banyak,

pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Jika dilihat dari daya saing daerah, Kabupaten Sleman memiliki daya tarik tersendiri bagi penanam modal baik luar maupun dalam negeri. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah pertumbuhan investor yang menanamkan modal di Kabupaten Sleman ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Penanaman modal di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2011 hingga 2015 terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah unit usahanya. Sedangkan jika dilihat dari nilai investasinya cenderung fluktuatif setiap tahunya. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Sleman cenderung kondusif. Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2015 meliputi investasi PMA 57 unit dengan nilai investasi US$233,54, investasi PMDN 51 unit dengan nilai investasi Rp3.159.444,00 juta sedangkan Non fasilitas unit usahanya menjadi 34.548 dengan nilai investasi Rp4.756.616,00 juta. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, realisasi nilai investasi PMA pada tahun 2015 sedikit mengalami kenaikan, yaitu naik sebesar 0,68%. Dibandingkan pada tahun 2014, realisasi nilai investasi PMDN pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu naik sebesar 62,37%. Naiknya total nilai investasi penanaman modal berdampak pada naiknya penyerapan tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang terserap oleh PMA pada tahun 2014 sebanyak 7.492 orang meningkat menjadi sebanyak 8.479 orang pada tahun 2015, PMDN pada tahun 2014 sebanyak 9.922 orang menjadi sebanyak 11.913 orang pada tahun 2015, dan non fasilitas pada tahun 2014 sebanyak 268.779 orang menjadi 282.872 orang pada tahun 2015. Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sleman tahun 2011-2015 lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.76
Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Sleman
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Unit Usaha (orang)					
	PMA	41	42	44	45	57
	PMDN	32	32	40	45	51
	Non fasilitas	31,566	32,452	33.341	33.671	34.548
2	Nilai Investasi					
	PMA (juta US$)	186	233,56	206,79	231,96	233,54
	PMDN (juta Rp)	827,390	1.083.065	1.868.199	1.945.866	3.159.444
	Non fasilitas (juta Rp)	2.034.340	3.489.552	3.787.620	3.895.422	4.756.616
3	Daya serap Tenaga Kerja (orang)					
	PMA	6.385	7.200	7.292	7.492	8.479
	PMDN	9.269	9.771	9.782	9.922	11.913
	Non fasilitas	249.189	259.396	266.489	268.779	282.872
4	Rasio daya serap tenaga kerja (orang)					
	PMA	155	171	166	166	146
	PMDN	289	305	244	220	201
	Non fasilitas	8	8	8	8	8
5	Kenaikan/penurunan realisasi PMA, PMDN dan Non fasilitas(%)					
	PMA	13,92	26,12	-11,46	12,17	0,68
	PMDN	148,33	30,90	72,49	4,16	62,37
	Non fasilitas	12,46	13,77	8,54	2,85	22,11

Sumber : BPMPPT Kab. Sleman 2015.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah menyusun Rancangan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK). Rancangan RUPMK ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMK berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektor terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Selanjutnya, RUPMK Sleman perlu diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Mengacu pada RUPM Daerah Istimewa Yogyakarta dan sesuai potensi perekonomian Kabupaten Sleman, RUPMK Sleman menetapkan 6 (enam) sektor prioritas, yaitu pangan dan agro industri, infrastruktur, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Pengembangan penanaman modal di 6 (enam) sektor prioritas tersebut

didasarkan pada keunggulan kompetititf dan komparatif dari masing-masing wilayah berkenaan dengan potensinya masing-masing.

A. Visi dan Misi

Visi yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sleman pada Tahun 2025, yaitu :

Penanaman modal yang berkelanjutan dalam rangka terwujudnya masyarakat Sleman yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera."

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing.
2. Mendorong penanaman modal yang mendukung diversifikasi usaha, peningkatan produksi, dan nilai tambah.
3. Mendorong pertumbuhan penanaman modal berbasis potensi daerah yang unggul dan berdaya saing.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan dan Agro Industri, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, kemudahan, dan insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

B. Peta Panduan (*Roadmap)* Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sleman disusun dalam 3 (tiga) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Fase I (2015-2016)	:	Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*) dan Percepatan realisasi penanaman modal

untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah dirancang.

Fase II (2015-2019) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pendukungnya, Pengembangan Sleman sebagai *smart city,* Kawasan peruntukan industri berteknologi tinggi, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.

Fase III (2020-2025) : Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Industry*)

C. Pelaksanaan

Untuk melaksanakan arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPMK Sleman menetapkan langkah-langkah nyata sebagai berkaitan dengan pelaksanaan RUPMK Sleman yang meliputi peningkatan iklim penanaman modal, peningkatan koordinasi, dan peningkatan promosi penanaman modal, sebagai berikut:

a) Peningkatan iklim penanaman modal di Kabupaten Sleman dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
b) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman memimpin upaya realisasi penanaman modal, dan dengan dibantu Bappeda Kabupaten Sleman mengkoordinasikan upaya lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal.
c) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga terkait menyusun kebijakan yang turut mendukung kegiatan penanaman modal di Kabupaten Sleman dengan mengacu pada RUPMK Sleman.
d) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait memberikan dukungan penuh pada upaya realisasi penanaman modal.
e) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkala.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman menjadi sektor utama (*leading sector*) dalam identifikasi dan penyusunan prospektus potensi penanaman modal di Kabupaten Sleman

dan pemasaran potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran.

2.4.3.4. Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis Pajak dan Retribusi Daerah menjadi pilar pokok pendapatan daerah sejak keluarnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah. Untuk Kabupaten Sleman pajak daerah yang dipungut adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan untuk jenis retribusi daerah, di Kabupaten Sleman terbagi menjadi tiga (3) jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Adapun realisasi pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sleman tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.77
Realisasi Pendapatan Daerah Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2011 s.d Tahun 2015

No	Jenis Pajak	Realisasi (Rp)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pajak Hotel	22.637.880.385	32.216.986.820	41.502.758.586	49.800.597.181	52.305.963.907
2	Pajak Restoran	13.257.484.784	16.758.882.196	21.044.463.951	27.979.616.224	39.132.497.134
3	Pajak Hiburan	2.709.834.885	3.804.493.162	4.910.550.640	5.652.846.661	8.688.347.301
4	Pajak Reklame	9.322.567.271	11.340.140.023	12.152.054.610	11.367.611.231	9.245.264.673
5	Pajak Penerangan Jalan	40.022.094.803	41.545.531.319	49.413.858.615	60.121.472.627	70.792.410.428
6	Pajak Parkir	851.570.412	856.018.282	1.046.226.931	1.265.723.054	1.659.044.300
7	Pajak Air Tanah	1.441.196.382	1.872.954.478	2.026.756.685	2.042.167.036	2.291.706.278
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.218.385.675	8.020.160.325	9.319.498.650	12.205.938.250	5.803.326.075
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	-	-	57.609.592.471	59.617.670.782	63.111.572.726
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	49.237.392.683	61.420.703.546	82.359.380.085	95.980.352.191	120.107.635.248
11	Retribusi Jasa Umum	18.274.589.200	8.802.463.187	10.950.122.022	11.489.559.605	12.943.268.440
12	Retribusi Jasa Usaha	3.765.115.997	6.174.553.032	7.184.427.643	8.414.596.963	9.663.694.950
13	Retribusi Perizinan Tertentu	11.121.959.274	19.057.953.568	29.867.130.066	22.620.925.827	17.264.781.530
	Jumlah	175.860.071.751	211.870.839.938	329.386.820.954	368.559.077.632	413.009.512.991

Sumber: Dispenda, Kabupaten Sleman, 2015.

Berdasarkan tabel diatas, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) mulai diberikan di Kabupaten Sleman mulai 1 Januari 2013. Penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2011-2015

mengalami kecenderungan peningkatan dengan persentase kenaikan. Kenaikan yang lumayan tinggi terjadi pada tahun 2013, dimana terjadi pendaerahan Pajak PBB P2, kenaikan ini mencapai 50%. Sedangkan untuk kenaikan pada tahun sebelumnya dan sesudahnya hanya sekitar 15%.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan jadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif, sebagai nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun, namun ini memerlukan jumlah kesempatan kerja yang mencukupi.

Indikator yang menggambarkan ketergantungan penduduk non produktif terhadap kelompok usia produktif adalah rasio ketergantungan. Kondisi yang timpang dengan kecenderungan besarnya kelompok usia non produktif akan menyebabkan tekanan di bidang ekonomi dan sosial.

Rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Sleman tahun 2014 mencapai angka 42, ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif menanggung 42 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dan usia tidak produktif (65 keatas) demikian juga di Tahun 2015 total rasio ketergantungan masih berkisar pada angka 46,11 berarti setiap 100 orang berusia produktif menanggung 46,11 usia belum produktif dan usia tidak produktif. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78
Angka Beban Tanggungan Penduduk Kabupaten Sleman
Tahun 2011-2015

Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Rasio Ketergantungan (%)		
	0-14 tahun	15-64 tahun	≥ 65 tahun	Anak	Lansia	Total
2011	216.008	795.512	115.368	28	15	43
2012	231.798	781.207	123.597	30	16	46
2013	225.760	725.097	96.461	31	13	44
2014	201.329	749.805	111.667	27	15	42

Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Rasio Ketergantungan (%)		
	0-14 tahun	15-64 tahun	≥ 65 tahun	Anak	Lansia	Total
2015	234.629	728.194	101.161	32,22	13,89	46,11

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015

Disamping itu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Berdasarkan tabel dibawah ini, dapat dilihat bahwa kualitas SDM di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2015 ini didominasi penduduk dengan lulusan SLTA yaitu berjumlah 329.421 Orang. Tabel dibawah ini juga menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Sleman yang berpendidikan Strata III (S3) mencapai 1.650 orang, Strata II (S2) berjumlah 10.637 orang dan Strata I (S1) berjumlah sekitar 93.091 orang. Keadaan ini didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dari tingkat PAUD sampai Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Sleman. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.79
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per-Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2015

No	Kecamatan	Belum Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	S1	S2	S3
1	Gamping	18.462	10.299	15.223	12.722	27.251	869	2.936	8.280	900	118
2	Godean	13.372	7.897	11.375	9.580	21.804	669	2.081	5.969	624	84
3	Moyudan	5.146	3.605	4.881	3.741	11.624	561	1.043	3.093	156	16
4	Minggir	6.046	4.522	5.379	4.087	10.221	463	976	2.512	122	12
5	Seyegan	9.113	6.170	8.971	7.217	15.483	422	1.056	2.280	146	11
6	Mlati	16.972	10.900	12.615	12.265	28.240	870	2.959	9.012	1.151	150
7	Depok	22.246	10.507	10.771	12.531	37.461	1.629	5.983	18.706	2.851	467
8	Berbah	8.381	6.093	7.869	7.788	17.392	483	1.386	3.330	304	25
9	Prambanan	11.372	4.619	9.362	7.862	17.227	192	856	1.979	122	9
10	Kalasan	13.367	8.870	10.342	11.374	24.630	764	2.646	6.766	805	118
11	Ngemplak	10.790	6.427	6.912	7.156	19.187	439	1.921	5.773	802	150
12	Ngaglik	17.314	9.236	10.598	10.641	28.564	891	3.896	12.337	1.823	419
13	Sleman	12.202	7.423	9.527	9.939	21.767	623	1.969	4.709	370	38
14	Tempel	10.098	6.406	8.334	8.381	15.692	492	1.083	2.393	139	8
15	Turi	6.486	3.965	5.924	5.353	11.576	343	768	1.967	81	6
16	Pakem	6.154	4.094	5.264	4.680	11.960	400	1.192	2.667	168	17
17	Cangkringan	5.153	3.464	6.375	4.477	9.342	268	511	1.318	73	2
JUMLAH		**192.674**	**114.497**	**149.722**	**139.794**	**329.421**	**10.378**	**33.262**	**93.091**	**10.637**	**1.650**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015.

Dari data capaian kinerja selama 5 (lima) tahun periode RPJMD sebelumnya sebagaimana tersaji di atas, terlihat masih ada beberapa capaian yang belum sesuai target, sehingga akan menimbulkan masalah dan menjadi isu strategis yang harus ditangani pada periode RPJMD 2016-2021. Selain itu potensi geografi dan demografi yang dipunyai di Sleman merupakan sumber daya harus dikelola. Berbagai potensi ancaman bencana di sleman juga harus diantisipasi dengan menyiapkan rencana penanggulanagan bencana secara komprehensif.

Keberadaan letak geografis Kabupaten Sleman yang strategis mengakibatkan pertumbuhan pertumbuhan penduduk yang kebanyakan berasal dari mutasi antar daerah. Hal ini berakibat pada dituntutnya pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur dan pelayanan dasar yang lebih untuk mendukung layanan umum kepada masyarakat. Di sisi lain perkembangan wilayah berakibat pada perkembangan sektor perekonomian yang tidak setara, menyebabkan ketimpangan pendapatan (indeks gini) yang semakin lebar.

Aspek kesejahteraan masyarakat, khususnya tingkat pengangguran, merupakan hal yang serius harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Adanya bonus demografi yang mengakibatkan banyakanya usia produktif (angkatan kerja) pada 2020-2025 harus bisa dimanfaatkan dengan menyediakan lapangan kerja atau mencetak wirausaha baru. Untuk itu pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Sleman, yaitu perdagangan, pariwisata dan pertanian mendapat perhatian yang lebih pada 5 (lima) tahun ke depan.

Pada aspek pelayanan umum, untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan daerah, Kabupaten Sleman harus mencari terobosan baru guna mempermudah dan mempercepat layanan pemerintah. Dengan adanya perkembangan masyarakat dan tuntutan pelayanan yang semakin cepat dan transparan Pemerintah Kabupaten Sleman harus bersiap menata diri dengan mengadopsi perkembangan teknologi dan informasi. Penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi diharapkan meningkatkan respon pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Aspek daya saing yang dipunyai oleh pemerintah harus dikelola dan ditingkatkan guna menarik investasi yang ada di Sleman. Dengan banyaknya investsai yang ada di Sleman, diharapkan berimbas positif pada sektor penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat. Tentu saja investasi yang masuk ke kabupaten harus selaras dengan kebijakan

pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap mengedepankan potensi ekonomi lokal yang ada di Kabupaten Sleman.

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 5 (lima) tahun mendatang. Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang kesemuanya mengacu pada tujuan tersebut di atas. Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, perlu dicermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun kebelakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan kedepan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD terdiri atas target dan realisasi pendapatan, target dan realisasi belanja, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pengelolaan keuangan daerah selalu diterapkan prinsip dan pendekatan serta norma yang berlaku secara universal, yaitu dilaksanakan dengan

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan serta dapat di pertanggungjawabkan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun yang lalu dapat dilihat dari anggaran pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik.

Landasan yang dijadikan acuan dalam perhitungan APBD pada 5 (lima) tahun yang lalu, adalah proyeksi indikator makro ekonomi, antara lain terdiri dari (i) laju pertumbuhan ekonomi; (ii) kemiskinan dan pengangguran; (iii) pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan; (iv) daya saing daerah; dan (v) pendapatan perkapita masyarakat dan laju inflasi lokal.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu dilakukan dan dirumuskan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja. Pendekatakan ini diarahkan dan bertujuan untuk dapat menampung aspirasi dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap program pembangunan secara optimal. Namun demikian, agar ada jaminan bahwa dalam penyusunan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, efektif, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat dalam penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam perumusannya memperhatikan beberapa faktor, diantaranya faktor keseimbangan antara pendapatan dengan belanja serta pembiayaan.

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan data tahun 2015, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 25,55% dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari dana transfer sebesar 48,67% dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah

sebesar 25,80%. Proporsi dana pendapatan transfer cenderung menurun dari tahun 2014 ke tahun 2015. Pada tahun 2014, proporsi dana pendapatan transfer mencapai 53,24% dan pada tahun 2015 turun menjadi 48,67%. Penurunan proporsi dana perimbangan ini belum menunjukkan kemandirian daerah. Penurunan proporsi dana pendapatan transfer dikarenakan menurunnya dana alokasi khusus. Selama tahun 2014-2015, terjadi pergeseran yang meningkat proporsi PAD sebesar 5,85%, dimana proporsi PAD pada tahun 2014 adalah sebesar 24,12% dan pada tahun menjadi 25,53%. Pergeseran peningkatan proporsi pendapatan terjadi di pos pendapatan dari pajak daerah. Pada tahun 2014, proporsinya sebesar 14,32% dan pada tahun 2015 hanya mencapai 15,30%.

Sementara itu sumber yang berasal dari sumbangan daerah baik yang berupa dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus, besarnya relatif cukup besar dari keseluruhan penerimaan daerah, meski proporsinya cenderung mengalami penurunan, baik pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 maupun pada tahun 2015, masing-masing sebesar 51,44%, 53,34%, 49,61%, 47,60%, dan 44,18%. Realisasi pendapatan daerah tahun 2011-2015 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Pertumbuhan Rata-Rata Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**	**1.311.473,55**	**1.589.722,97**	**1.899.525,64**	**2.076.820,14**	**2.294.622,77**	15,01
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	**226.723,27**	**301.069,54**	**449.270,31**	**573.337,60**	**643.130,08**	30,54
1.1.1.	Pajak daerah	142.698,41	177.835,87	274.628,96	326.034,00	373.137,77	28,06
1.1.2.	Retribusi daerah	33.163,70	34.034,97	48.001,68	42.632,20	45.052,21	6,52
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	11.036,19	12.783,12	15.551,53	23.654,90	34.330,60	33,67
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	39.825,00	76.415,58	111.088,14	181.016,50	190.609,51	52,11
1.2.	**Dana Perimbangan**	**753.889,00**	**944.143,04**	**989.669,68**	**1.034.404,52**	**1.080.162,45**	**9,70**
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	79.317,98	96.196,89	47.256,44	45.797,11	38.281,94	-10,0
1.2.2.	Dana alokasi umum	631.920,73	795.708,77	891.589,91	952.102,50	984.410,61	12,03
1.2.3.	Dana alokasi khusus	42.650,30	52.237,39	50.823,33	36.504,91	29.421,08	-6,96
1.2.4	Alokasi Dana Desa dari APBN	-	-	-	-	28.048,82	-
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**330.861,27**	**341.510,39**	**460.585,65**	**469.078,02**	**571.330,24**	
1.3.1	Hibah	21.984,52	6.945,22	7.772,19	4.334,14	8.389,43	
1.3.2	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	94.205,33	115.178,63	137.564,71	165.068,47	194.832,06	
1.3.3	BOSNAS	54.525,38	-	-	-	-	
1.3.4	Bantuan keuangan dr provinsi atau pemerint.lain nya	8.080,00	13.900,00	28.336,20	25.013,69	27.241,95	
1.3.5	Dana Tunjangan Pendidikan	148.082,29	208.486,54	254.817,23	248.783,21	340.866,80	
1.3.6	DPIPD	3.983,76	-	-	-	-	
1.3.7	Dana Incentif daerah	-	-	32.095,33	25.878,51	0	

Sumber: Dispenda, 2015

Dari tabel diatas menunjukkan, kondisi keuangan Kabupaten Sleman relatif cukup baik karena pada tahun 2015 jumlah kedua dana perimbangan ini berada di bawah 50% dari keseluruhan pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mempunyai kontribusi yang

cukup siginifikan terhadap APBD Kabupaten Sleman, dengan rata-rata realisasi pertumbuhan mengalami kenaikan sebesar 30,54% per tahun selama lima tahun terakhir (2011-2015). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fislkal pemerintah daerah Kabupaten Sleman termasuk kategori mampu. Hal ini terbukti selama 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015), *trend* kontribusi PAD terhadap APBD mengalami peningkatan, yang menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan PAD akan mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan belanja daerah.

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

NO	Uraian	Tahun					Rata-rata pertum. (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	**PAD**	**226.723,27**	**301.069,54**	**449.270,31**	**573.337,60**	**643.130,08**	30,54
1.1	Pajak Daerah	142.698,41	177.835,87	274.628,96	326.034,00	373.137,77	28,06
1.2	Retribusi Daerah	33.163,70	34.034,97	48.001,68	42.632,20	45.052,21	6,52
1.3	Hasil Pengol. kekayaan daerah Yang dipisahkan	11.036,19	12.783,12	15.551,53	23.654,90	34.330,60	33,67
1.4	Lain-lain yang syah	39.824,98	76.415,58	111.088,14	181.016,50	190.609,51	52,11

Sumber: Dispenda, 2015

Sementara itu perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu yang sama, menunjukkan kenaikan dengan rata-rata sebesar 30,45%. Selain itu, rata-rata realisasi pendapatan yang dicapai melampaui rata-rata target yang telah ditetapkan dengan rasio efektivitas PAD mencapai 111,34% sampai 150,55%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman sudah efektif dalam melakukan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, sumber-sumber potensi pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.

Tabel 3.3
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada APBD Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

Tahun	Target		Realisasi		Rasio Efektivitas (%)
	PAD	Pertumbuhan (%)	PAD	Pertumbuhan (%)	
2011	203.416,68	-	226.723,27	-	111,46
2012	241.003,08	18,48	301.069,54	32,79	124,92
2013	298.406,95	23,82	449.270,31	49,22	150,55
2014	474.917,92	59,15	573.337,60	27,62	120,72
2015	577.585,01	21,62	643.130,08	12,17	111,34
Rata-rata Per Tahun		30,77		30,45	123,80

Sumber: Dispenda, 2015

Dengan prinsip otonomi daerah, undang-undang mewajibkan daerah yang bersangkutan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah dalam hal ini dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam pengelolaan urusan rumah tangganya sendiri, yaitu dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut. Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif di sisi penerimaan dan peranannya dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. PAD hanya merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan di samping penerimaan lainnya berupa bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU, DAK dan lain-lain penerimaan yang sah.

Mencermati struktur hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat diketahui dengan menggunakan indikator Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Derajat desentralisasi fiskal dapat digunakan sebagai indikator kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan. Pelaksanaan desentralisasi dalam perencanaan dan pembangunan di daerah terutama dalam hubungannya dengan tingkat kemandirian suatu daerah akan membawa konsekuensi terhadap posisi kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan dan pembiayaan penyelenggaraaan pembangunan di daerah. Karena itu untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonominya terutama dalam hal keuangan daerah, dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal sebagai ukuran. Derajat desentralisasi fiskal diukur dengan membandingkan rasio PAD

terhadap total penerimaan daerah, rasio sumbangan/bantuan pusat terhadap total penerimaan daerah, dan rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total penerimaan daerah. Dengan melihat struktur realisasi penerimaan Kabupaten Sleman, maka dapat dianalisis besarnya derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Sleman seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Derajat Desentralisasi Fiskal
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 (%)

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Nilai derajat desentralisasi fiskal	17,28	18,94	23,65	27,61	28,03
2	Desentralisasi Perpajakan Daerah	6,05	6,22	2,66	2,21	1,67
3	Bantuan/sumbangan pusat	51,44	53,34	49,61	47,60	44,18

Sumber: DPKAD, 2015

Dari tabel di atas, tampak bahwa rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) Kabupaten Sleman rata-rata masih di bawah angka 30%, yang mengindikasikan bahwa besarnya PAD masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih relatif rendah. Ketergantungan pembiayaan daerah Kabupaten Sleman terhadap pusat dapat pula dilihat dari rasio sumbangan/bantuan serta rasio bagi hasil pajak dan non pajak terhadap total penerimaan daerah. Dilihat dari derajat desentralisasi perpajakan yang diukur dari rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak nilainya relatif rendah yaitu rata-rata hanya 4,7% kurun waktu tahun 2011 sampai 2015. Relatif rendahnya derajat desentralisasi perpajakan juga dapat menunjukkan bahwa pajak yang produktif, baik jenis pajak langsung maupun pajak tidak langsung belum menjadi kewenangan pemerintah daerah secara administrasi. Sementara itu, jika dilihat dari rasio sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat terhadap penerimaan daerah nampak bahwa ketergantungan keuangan pemerintah Kabupaten Sleman terhadap sumbangan pusat selama periode tahun 2013 dan tahun 2015 relative baik karena rata-rata masih di bawah angka 50% yaitu hanya sebesar 49,61% di tahun 2013 dan mengalami penurunan di tahun 2014 dan tahun 2015 menjadi sebesar 47,60 dan 44,18%.

3.1.1.2. Belanja Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat dilihat dari sisi belanja daerah selama periode tertentu yang biasanya selama 5 (lima) tahun. Kinerja ini ditunjukkan oleh seberapa besar penerimaan daerah digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan belanja daerah, baik belanja yang sifatnya rutin maupun belanja non rutin. Tabel berikut menunjukkan besaran belanja yang terjadi selama tahun 2011-2015 di Kabupaten Sleman.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	**Belanjang Tidak Langsung**	**883.184,63**	**985.073,19**	**1.136.665,82**	**1.094.875,63**	**1.304.179,28**
1.1	Belanja Pegawai	776.376,38	878.706,78	911.281,46	966.774,94	1.021.454,82
1.2	Belanja Bunga	61,57	45,28	28,75	12,34	258,765334
1.3	Belanja subsidi	-	-	19.518,56	-	-
1.4	Belanja Hibah	36.819,42	45.170,87	117.707,23	17.015,66	68.645,42
1.5	Belanja Bantuan Sosial	30.102,12	13.974,61	21.801,06	40.214,26	38.703,75
1.6	Belanja Bagi Hasil	19.693,06	23.824,95	33.366,16	34.793,26	41.101,80
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	19.642,86	22.157,04	32.962,59	35.224,01	133.725,02
1.8	Belanja Tak Terduga	489,22	1.193,67	0,00	841,16	289,70
2	**Belanja Langsung**	**394.870,54**	**436.327,98**	**556.862,48**	**801.601,75**	**1.024.572,64**
2.1	Belanja Pegawai	84.196,30	100.546,84	122.974,35	143.285,10	176.067,61
2.2	Belanja Barang dan Jasa	214.562,84	203.244,89	227.028,26	375.454,60	421.722,20
2.3	Belanja Modal	96.111,40	132.536,25	206.859,87	282.862,05	426.782,83
Total Belanja		**1.278.055,17**	**1.421.401,17**	**1.693.528,30**	**1.896.477,38**	**2.328.751,93**
Surplus/Defisit		(33.418,38)	(168.321,80)	(205.997,34)	(180.342,76)	(34.129,15)

Sumber: DPKAD, 2015

Berdasarkan tabel di atas bisa kita lihat bahwa realisasi belanja daerah selalu mengalami kenaikan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, dan rata-rata pertumbuhan belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung. Mencermati struktur belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman selama 5 tahun berturut-turut menunjukkan bahwa belanja daerah pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup besar dibanding periode 2 tahun sebelumnya, bahkan dengan tahun 2015. Sebagian besar belanja tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai, yang masing-masing mencapai angka rata-rata sebesar 85,77% selama 5 (lima) tahun. Sementara itu pos

belanja barang jasa hanya sebesar 14,8% di tahun 2012, dan meningkat menjadi 19,0% di tahun 2014. Di sisi lain belanja modal hanya sebesar 11,6%, 16,9% dan 19,5% masing-masing untuk periode tahun 2013, 2014 dan 2015. Belanja barang dan jasa serta belanja modal masih cukup rendah rata-rata hanya 16,95% dari total belanja daerah, yang berarti daerah masih kekurangan sumber keuangan untuk membiayai program-program pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu kiranya menghitung kembali besarnya potensi penerimaan daerah dari berbagai sumber internal daerah, seperti: potensi pajak daerah dan potensi retribusi daerah, serta mengoptimalkan keberadaan badan usaha milik daerah dalam rangka peningkatan kinerja.

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang diarahkan pada:

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
b. Penyertaan modal kepada BUMD;
c. Persentase SILPA diupayakan tidak meningkat dengan semakin efektifnya perencanaan anggaran.

Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Sleman tahun 2011-2015 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
I	**Penerimaan Pembiayaan**	**111,414**	**138,695**	**289,079**	**431,359**	**530,486**
1	Perkiraan silpa	111,414	138,695	289,079	431,359	499,725
2	Penerimaan Pinjaman daerah	0	0	0	0	0
3	Penerimaan Piutang	0	0	0	0	30,761
II	**Pengeluaran Pembiayaan**	**6,138**	**17,936**	**63,718**	**111,978**	**17,835**
1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0
2	Penyertaan Modal	6,000	17,798	63,580	111,840	17,835
3	Pembayaran pokok utang	0,138	0,138	0,138	0,138	0
	Pembiayaan netto	**105,276**	**120,759**	**225,361**	**319,382**	**512,651**

Sumber: Bappeda (Data diolah), 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa sumber satu-satunya penerimaan pembiayaan adalah berasal dari SiLPA yang semakin lama semakin naik. Hal ini menunjukkan peningkatan SiLPA yang tidak diharapkan tidak dapat terwujud. Di masa mendatang Pemerintah Kabupaten Sleman harus lebih cermat lagi dalam perencanaan anggaran. Dari sisi pengeluaran pembiayaan, persentase terbesar dipergunakan untuk penyertaan modal kepada BUMD disusul sebagian kecil dipergunakan untuk pembayaran pokok hutang. Dengan banyaknya penerimaan pembiayaan, seharusnya Pemerintah Kabupaten Sleman lebih berani lagi dalam penggunaan penerimaan pembiayaan, misalnya dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan.

3.1.2. Neraca Daerah

Sejalan dengan amanat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi

pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.

Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Asset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek) dan Ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) suatu pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dengan demikian Neraca Daerah juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Perkembangan neraca daerah, khususnya tentang perkembangan aset lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 38,25% per tahun. Jika dalam tahun 2012 total aset lancar sebesar Rp355.171.289.883,86 maka dalam tahun 2013 mengalami peningkatan cukup signifikan, mencapai angka sebesar Rp600.467.676.523,78, dan sebesar Rp645.139.003.253,79 di tahun 2014. Kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2013 disebabkan karena komponen aset lancar, yaitu kas dan persediaan, mengalami kenaikan yang cukup signifikan masing-masing sebesar 49,07% dan 123,3%. Tingginya pertumbuhan aset lancar ini menunjukkan bahwa kondisi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berada pada kondisi sehat. Meskipun pertumbuhan asset di tahun 2014 hanya sebesar 7,44%, kondisi keuangan Kabupaten Sleman memberikan indikasi, bahwa Kabupaten Sleman memiliki potensi yang cukup menjanjikan jika dikelola secara efektif dan efesien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung

jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, secara keseluruhan dalam kurun waktu 3 tahun (2012-2014) dengan rata-rata sebesar -13,9%, yang berarti bahwa kewajiban kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah dari tahun 2012 sampai dengan 2014 mengalami penurunan. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman selama kurun waktu tersebut selalu dapat melaksanakan kewajiban finansialnya secara tepat waktu.

Dari sisi kewajiban jangka pendek dengan berbagai pihak dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun pertama mengalami peningkatan, meski pada level yang cukup rendah, dibawah 5%. Jika dalam tahun 2012 kewajiban dengan pihak ketiga masih sebesar Rp5.178.049.058,47, sedangkan dalam tahun 2013 kewajiban dengan pihak ketiga mengalami peningkatan menjadi Rp5.408.648.253,99. Sedangkan pada tahun 2014, kewajiban jangka pendek pemerintah kepada pihak ketiga mengalami penurunan sebesar 36,53%**.** Penurunan kewajiban dengan pihak ketiga yang terus berkurang/menurun dari tahun ke tahun memberikan gambaran dan bermakna, bahwa manajemen pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sleman semakin profesional dan dengan demikian penyelenggaraan pembangunan daerah di era otonomi daerah dapat dilaksanakan semakin mandiri sesuai aspirasi masyarakat

Peningkatan kewajiban dengan pihak ketiga yang terjadi di tahun 2013 sebenarnya bukanlah merupakan suatu kejelekan dalam pengelolaan keuangan daerah, selama manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin profesional dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan pembangunan daerah di era otonomi daerah dapat memberikan multiplier efek pada peningkatan pendapatan masyarakat. Gerak dinamika ini tentunya akan memberikan dampak positif pada berkembangnya berbagai aktivitas pemerintahan, kemasyarakatan dan tentunya dunia usaha dalam rangka mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman khususnya, dan umumnya masyarakat di DIY. Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar, dan Dana Investasi, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Sleman selama kurun waktu 3 tahun mengalami

pertumbuhan sebesar 16,13% yang berarti bahwa ekuitas dananya relatif sedang.

Sementara itu, secara keseluruhan perkembangan neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan yang positif seiring dengan menggeliatnya berbagai aktivitas pembangunan yang secara gencar dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Data yang ada selama 3 (tiga) tahun terakhir penunjukan, bahwa total pertumbuhan neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan, dengan pertumbuhan rata-rata 16,09% per tahun. Hal positif inilah yang mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan usaha baik yang dilaksanakan oleh kelompok pengusaha menengah dan besar serta usaha-usaha masyarakat yang semakin bermunculan di wilayah Kabupaten Sleman.

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah juga dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu selain analisis di atas, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Tabel 3.7
Neraca Konsolidasi
Per 31 Desember 2012, 2013 Dan 2014
(Setelah Konversi)
Auditan

URAIAN	Tahun		
	2012	2013	2014
ASSET			
Asset Lancar			
1. Kas	290,117,255,146.22	432,588,133,628.86	500,218,955,134.23
2. Piutang	2,514,659,138.37	23,191,565,100.90	119,017,559,954.39
- Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	(1,113,006,816.22)	(1,273,701,575.42)	(37,906,306,979.91)
- Piutang Pajak Netto	*1,401,652,322.15*	*21,917,863,525.48*	*81,111,252,974.48*
3. Piutang Retribusi	4,217,416,127.80	5,818,910,937.40	5,497,137,456.00
- Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih	(1,964,922,079.25)	(2,065,930,813.45)	(2,045,075,638.20)
- Piutang Retribusi Netto	*2,252,494,048.55*	*3,752,980,123.95*	*3,452,061,817.80*
4. Piutang lainnya	4,928,627,569.06	15,423,988,205.37	10,278,609,167.96
- Penyisihan Piutang Lainnya Tidak Tertagih	(511,971,837.30)	(514,205,363.65)	(541,453,964.95)
- Piutang Lainnya Netto	*4,416,655,731.76*	*14,909,782,841.72*	*9,737,155,203.01*
5. Persediaan	56,983,232,635.18	127,298,916,403.77	50,619,578,124.27
Jumlah Asset Lancar	**355,171,289,883.86**	**600,467,676,523.78**	**645,139,003,253.79**
Investasi Jangka Panjang			
1. Investasi Non Permanen	50,856,069,417.00	49,927,472,883.00	49,572,784,712.50
2. Investasi Permanen	117,351,601,825.85	182,416,544,743.29	297,802,915,008.49
Jumlah Investasi jangka Panjang	**168,207,671,242.85**	**232,344,017,626.29**	**347,375,699,720.99**
Asset tetap			
1. Tanah	595,243,658,586.00	679,772,589,094.00	702,398,844,833.00
2. Peralatan dan Mesin	333,341,799,815.69	383,720,364,040.00	448,459,951,295.98
3. Gedung dan Bangunan	734,813,161,419.60	803,473,918,381.56	861,235,590,911.41
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	903,722,855,942.07	950,239,706,661.04	1,044,302,247,755.02
5. Aset Tetap Lainnya	52,379,231,183.30	47,746,589,775.52	58,190,859,198.00
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	193,329,000.00	32,362,530,496.00	130,779,256,670.20
Jumlah Aset Tetap	**2,619,694,035,946.66**	**2,897,315,698,448.12**	**3,245,366,750,663.61**
Asset Lainnya			
1. Sistem Informasi	3,803,738,937.00	4,304,352,937.00	5,286,908,237.00
2. Aset Lain-lain	19,492,646,966.00	32,011,485,934.83	19,558,398,017.88
3. Built Operating Transfer (BOT)	272,874,000.00	272,874,000.00	272,874,000.00
Jumlah Aset Lainnya	**23,569,259,903.00**	**36,588,712,871.83**	**25,118,180,254.88**
JUMLAH ASSET	**3,166,642,256,976.37**	**3,766,716,105,470.02**	**4,262,999,633,893.27**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
1. Utang Perhitungan	840,351,020.00	1,173,443,316.00	298,507,810.00

URAIAN	Tahun		
	2012	2013	2014
Pihak Ketiga (PFK)			
2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	166,495,834.23	150,086,013.08	0.00
3. Pendapatan diterima dimuka	0.00	0.00	42,982,705.68
4. Utang jangka Pendek Lainnya	4,171,202,204.24	4,085,118,924.91	3,091,618,088.48
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**5,178,049,058.47**	**5,408,648,253.99**	**3,433,108,604.16**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
1. Utang kepada Pemerintah Pusat	150,086,013.08	0.00	0.00
2. Utang Jangka Panjang Lainnya	323,900,000.00	323,900,000.00	323,900,000.00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**473,986,013.08**	**323,900,000.00**	**323,900,000.00**
JUMLAH KEWAJIBAN	**5,652,035,071.55**	**5,732,548,253.99**	**3,757,008,604.16**
EKUITAS DANA			
1. Ekuitas Dana Lancar			
- Sisa Lebih Pebiayaan anggaran (SiLPA)	289,079,874,715.22	431,359,469,619.86	499,724,664,810.23
- Pendapatan ymang ditangguhkan	197,029,411.00	55,220,693.00	195,782,514.00
- Cadangan Piutang	8,070,802,102.46	40,580,626,491.15	94,300,469,995.29
- Cadangan Persediaan	56,983,232,635.18	127,298,916,403.77	50,619,578,124.27
- Dana yang disediakan untuk Utang Jangka Pendek	(4,337,698,038.47)	(4,235,204,937.99)	(3,134,600,794.16)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	**349,993,240,825.39**	**595,059,028,269.79**	**641,705,894,649.63**
2. Ekuitas Dana Investasi			
- Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	168,207,671,242.85	232,344,017,626.29	347,375,699,720.99
- Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2,619,694,035,946.66	2,897,315,698,448.12	3,245,366,750,663.61
- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	23,569,259,903.00	36,588,712,871.83	25,118,180,254.88
- Dana yang harus disediakan untuk Utang Jangka Panjang	(473,986,013.08)	(323,900,000.00)	(323,900,000.00)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	**2,810,996,981,079.43**	**3,165,924,528,946.24**	**3,617,536,730,639.48**
JUMLAH EKUITAS DANA	**3,160,990,221,904.82**	**3,760,983,557,216.03**	**4,259,242,625,289.11**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**3,166,642,256,976.37**	**3,766,716,105,470.02**	**4,262,999,633,893.27**

Sumber: DPKAD (data diolah), 2015

Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman selama kurun waktu tahun 2012-2014 sangat tinggi, yang berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sleman dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2012 mencapai 68,59 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah daerah Kabupaten Sleman adalah 68,59 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar. Kondisi tersebut bisa dicermati pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2012-2014 (%)

NO	Uraian	2012	2013	2014
1	**Rasio Likuiditas**			
1.1	Rasio lancar (*current ratio*)	68,59	111,04	187,92
1.2	Rasio quick (*quick ratio*)	57,61	87,50	173,18
2.	**Rasio Solvabilitas**			
2.1	Rasio total hutang terhadap total asset	0,18	0,15	0,09
2.2	Rasio hutang terhadap modal	0,18	0,15	0,09
3	**Rasio Aktivitas**			
3.1	Rata-rata umur piutang	1,85	7,69	11,85

Sumber: DPKAD 2015

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*). Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total hutang dibagi total aset. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya.

Dari tabel diatas, rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2012-2014 berturut-turut adalah sebesar berkisar 0,18%, 0,15%, dan 0,09%. Pada tahun 2013 rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sebesar 0,15% artinya sebesar Rp0,0015 dari setiap Rp1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, atau aktiva Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang didanai oleh hutang sebesar 0,0015%, sisanya dari modal sendiri (ekuitas). Dari tahun 2012-2014, rasio hutang terhadap modal, memiliki rasio yang sama dengan rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas juga dimaknai merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam pendayagunaan aktiva yang dimiliki dan dalam pengelolaan sumber-sumber dananya. Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan sebaliknya. Cara perhitungan rata-rata umur piutang adalah 365 dibagi perputaran piutang, dimana perputaran piutang sendiri adalah pendapatan daerah dibagi rata-rata piutang pendapatan daerah. Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah adalah saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang kemudian dibagi 2. Dari tabel 3.7 bahwa rata-rata umur piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman cukup singkat, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menagih piutang atau merubah piutang menjadi kas, yaitu dalam tempo hanya 1,85, 7,69, dan 11,85 hari berturut-turut pada tahun 2012, 2013, dan tahun 2014.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sleman diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni sekitar 68% hingga 72%. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha.

Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kebijakan umum pendapatan daerah adalah sebagai berikut.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.

2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil.
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
7. Meningkatkan kinerja pendapatan dan pengelolaan pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
8. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kabupaten Sleman, pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Belanja yang tidak strategis dan tidak memiliki nilai tambah (*non value-added*) harus diminimalisir.

Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya.

Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/defisit maka selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit maka jumlah pembiayaan neto (penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan) harus dapat menutup defisit tersebut. Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja

menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Selama periode tahun 2012-2014, rata-rata belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur adalah 65,01%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif lebih besar persentasenya apabila dibandingkan dengan belanja untuk masyarakat (belanja publik). Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk pembiayaan pembangunan belum berorientasi kepada masyarakat, sedangkan idealnya pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan.

Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2014
(Juta Rupiah)

No.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
1	Tahun Anggaran 2012	1.016.157,36	1.439.199,17	70,61
2	Tahun Anggaran 2013	1.052.968,98	1.757.246,30	60,09
3	Tahun Anggaran 2014	1.220.306,14	1.896.477,38	64,35
Rata-rata				65,01

Sumber: DPKAD, 2015

Dari data tersebut di atas menunjukan, bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, total belanja daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur tiap tahunnya mengalami kenaikan walaupun secara persentase ada tahun yang mengalami penurunan. Jika pada 2012 persentase total belanja untuk pemenuhan kebutuhan adalah sebesar 70,61%, maka dalam tahun 2013 mengalami penurunan hingga menjadi 60,09%, dan menjadi 64,35% dari total APBD pada tahun 2014.

Dari gambaran kenaikan dan penurunan proporsi total belanja pegawai terhadap total APBD selama 3 (tiga) di atas, pemerintah Kabupaten Sleman dalam 5 (lima) tahun kedepan, besaran persentase porsi belanja

langsung yang berkaitan dengan upaya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di berbagai bidang harus terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah dari berbagai sumber.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Kondisi pembiayaan daerah dapat digambarkan seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa defisit riil anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2012 mencapai sekitar Rp150,39 milyar, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp142,28 miliar pada tahun 2013 dan menurun kembali menjadi Rp68,37 milyar pada tahun 2014.

Tabel 3.10
Defisit Riil Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2012-2014 (Juta Rupiah)

NO	Uraian	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.589.722,13	1.899.525,83	2.076.820,13
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah	1.421.401,33	1.693.528,79	1.896.477,36
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	17.936,40	63.717,40	111.977,40
	Defisit riil	150.385,40	142.279,64	68.365,37

Sumber: DPKAD, 2015

Untuk menutup defisit riil anggaran pada kurun tahun yang sama, dapat digambarkan komposisinya pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2014 (%)

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2012	2013	2014
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	92,29	209,5	630,92
2.	Pencairan Dana Cadangan			
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	8,5	10,93	34,60
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00

Sumber: DPKAD, 2015

Untuk realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah daerah, dengan kurun waktu yang sama pada tahun 2012-2014, gambarannya seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Pamerintah Daerah Kabupaten Sleman (Juta Rupiah)

No.	Uraian	2012		2013		2014	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	289.079,22	100,00	431.359,86	100,00	499.724,23	100,00
2.	Pelampauan penerimaan PAD	60.066,82	20,78	106.374,02	24,66	98.419,65	19,69
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	48.578,00	16,80	16.939,70	3,93	4.802,32	0,96
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	5.949,00	2,06	7.772,00	1,80	4.334,46	0,87
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	174.485,40	60,36	300.272,14	69,61	392.168,80	78,48

Sumber: DPKAD, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa sumber satu satunya penerimaan pembiayaan adalah berasal dari SILPA yang semakin lama semakin naik. Hal ini menunjukkan peningkatan SILPA yang tidak diharapkan tidak dapat terwujud. Pemerintah Kabupaten Sleman kedepan harus lebih cermat lagi dalam hal perencanaan anggaran. Dari sisi pengeluaran pembiayaan, persentase terbesar berasal dari penyertaan modal kepada BUMD, disusul sebagian kecil dipergunakan untuk pembayaran pokok hutang. Dengan banyaknya penerimaan pembiyaan, seharusnya Pemerintah Kabupaten Sleman harus lebih berani lagi dalam penggunaan penerimaan pembiyaan, misalnya dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan.

Data dan informasi yang tersaji dalam tabel di atas, Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2012-2014 terdapat kecenderungan peningkatan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Jumlah SiLPA pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup besar jika dibandingkan dengan

penerimaan SiLPA tahun 2012. Kenaikan dimaksud adalah sebesar Rp142.279.594.904,64 atau sebesar 49,22%. Demikian juga dengan penerimaan SiLPA pada tahun 2014 mengalami kenaikan walaupun tidak sebesar tahun 2013 yaitu sebesar Rp68.365.195.190,37 atau sebesar 15,85%.

3.3. Kerangka Pendanaan

Berpedoman pada prinsip perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka kebijakan penetapan besaran pagu belanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan dan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program. Oleh karena itu, mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun, diharapkan program-program yang dibiayai akan memberi dampak posistif dan daya ungkit yang siginifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Sleman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Terkait dengan hal terebut diatas, maka untuk mendukung analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun yang lalu. Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (25), kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program

pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah kabupaten Sleman selama 5 (lima) tahun ke depan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Kapasitas riil keuangan daerah yang dimaksud merupakan penerimaan/pendapatan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, serta prioritas utama lainnya.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain:

a. Penerimaan retribusi dan pajak daerah diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi dan pajak daerah tersebut dipungut;
b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan asset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan, sehingga akan menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah;
c. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan Kabupaten Sleman;
d. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan;
e. Penerimaan dana bagi hasi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil diperoleh.

Untuk tujuan tersebut maka perlu dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap kemampuan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk 5 (lima) tahun kedepan. Salah satu metode sederhana untuk memperkirakan kemampuan anggaran tersebut adalah fungsi *forecast*, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan hubungan 2 (dua) kumpulan data, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan selama 5 (lima) tahun ke depan di atas adalah:

a. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan:

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi;
3. Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek PBB-P2 dan BPHTB.
4. Terbentuknya sistem zona nilai tanah sebagai dasar pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat, terjadi kecenderungan kenaikan dana perimbangan setiap tahun, dengan uraian sebagai berikut:
   1. DAU cenderung meningkat setiap tahun seiring kebijakan kenaikan gaji pegawai;
   2. Pemerataan dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami kenaikan setiap tahun.

c. Sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat menganggarkan defisit.

d. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sleman, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan setiap tahun.

Berdasarkan hasil *forecasting* menurut data eksisting dan asumsi, didapat proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 3.13
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021
(Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	**Pendapatan Asli Daerah**	**651.525**	**847.769**	**926.116**	**1.017.974**	**1.109.293**	**1.176.615**
1	Pajak Daerah	383.400	567.953	624.708	688.272	759.465	799.680
2	Retribusi Daerah	42.247	53.521	57.402	61.595	66.122	71.012
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	41.793	39.212	41.957	44.894	48.036	51.399
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	184.085	187.083	202.049	223.213	235.670	254.524
II	**Dana Perimbangan**	**1.501.468**	**1.604.313**	**1.691.989**	**1.754.275**	**1.819.362**	**1.887.389**
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	51.833	68.209	74.586	80.962	87.339	93.716
2	Dana Alokasi Umum	1.014.310	1.065.030	1.118.280	1.174.190	1.232.900	1.294.550
3	Dana Alokasi Khusus	372.311	380.011	380.011	380.011	380.011	380.011
4	Alokasi Dana Desa Dari APBN	63.014	91.063	119.112	119.112	119.112	119.112
III	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**221.994**	**239.260**	**257.114**	**286.379**	**297.166**	**319.598**
1	Pendapatan Hibah	6.654	6.654	6.654	6.654	6.654	6.654
2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	199.092	215.795	233.059	261.704	271.840	293.588
4	BOSNAS	-	-	-	-	-	-
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.248	11.811	12.401	13.021	13.672	14.356
6	DPIPD	-	-	-	-	-	-
7	Dana Insentif Daerah	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Jumlah Pendapatan	**2.374.987**	**2.691.342**	**2.875.219**	**3.058.628**	**3.225.821**	**3.383.602**

Sumber: Bappeda (Data diolah), 2016

3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan yang secara umum dapat dicirikan melalui:

a. Mendanai belanja wajib dan mengikat;
b. Mendanai kegiatan program prioritas untuk mendukung capaian target visi dan misi pemerintah Kabupaten Sleman dan program prioritas dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi SKPD; dan
c. Mendanai program-program prioritas lanjutan (program-program unggulan) yang belum terlaksana pada RPJMD tahun 2010-2015.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11, pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara membuat proyeksi untuk belanja daerah sama dengan cara seperti yang digunakan untuk proyeksi pendapatan.

Sementara itu, dari total proyeksi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun anggaran sebagaimana telah disajikan pada tabel diatas, selanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai belanja selama 5 (lima) tahun kedepan baik untuk belanja tidak langsung, maupun belanja langsung. Proyeksi belanja daerah tersebut memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut:

a. Kebutuhan belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari kenaikan gaji, tunjangan sertifikasi, dan tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai;
b. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2016-2021;
c. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

Berdasarkan agenda pembangunan dan asumsi tersebut di atas, maka proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung dimaksud, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.14
Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021
(Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	**Belanja Tidak Langsung**	**1.594.930**	**1.649.223**	**1.626.875**	**1.624.947**	**1.634.214**	**1.751.606**
1	Belanja Pegawai	1.291.437	1.272.055	1.186.614	1.195.682	1.151.248	1.286.303
2	Belanja Bunga	2.600	4.106	4.106	4.106	4.106	0
3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
4	Belanja Hibah	42.857	15.150	25.500	26.500	60.120	30.250
5	Belanja Bantuan Sosial	32.880	40.046	41.046	44.046	45.046	45.046
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa (Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa)	45.669	52.147	68.211	74.987	82.559	87.069
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah						
	- Bagi hasil dana perimbangan	107.121	113.323	119.286	125.515	132.023	138.826
	- Sharing TPA Piyungan, IPAL Sewon, Bantuan keuangan Parpol	2.842	5.165	5.625	5.470	5.675	5.880
	- Dana desa dari APBN	63.015	91.063	119.112	119.112	119.112	119.112
8	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa	0	46.168	47.375	19.530	24.325	29.120
9	Belanja Tidak Terduga	6.509	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II	**Belanja Langsung**	**1.231.445**	**1.431.691**	**1.443.275**	**1.645.780**	**1.810.780**	**1.857.590**
1	Belanja Pegawai	170.421	203.820	214.011	214.712	235.947	247.745
2	Belanja Barang dan Jasa	611.605	602.568	632.696	664.331	697.547	732.425
3	Belanja Modal	449.419	625.303	656.568	786.737	877.286	877.420
	Jumlah Belanja	**2.826.375**	**3.080.914**	**3.070.150**	**3.270.727**	**3.444.994**	**3.609.196**
	Surplus/ (Defisit)	(451.388)	(389.572)	(194.931)	(212.099)	(219.173)	(225.594)

Sumber: Bappeda (Data diolah), 2016

3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Rumusan kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Sleman diarahkan untuk:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun lalu,
2. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis;
3. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (silpa) dan berasal dari penerimaan piutang daerah dan pinjaman daerah.

Adapun pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib antara lain pembayaran utang pokok, dan penyertaan modal pada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan agenda pembangunan dan asumsi tersebut di atas, maka proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.15
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2016-2021 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	**Penerimaan Pembiayaan**	**478.521**	**426.527**	**231.931**	**249.099**	**256.173**	**255.594**
1	Perkiraan silpa	478.521	426.527	231.931	249.099	256.173	255.594
2	Penerimaan Pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0
3	Penerimaan Piutang	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
II	**Pengeluaran Pembiayaan**	**27.136**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**30.000**
1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0	0
2	Penyertaan Modal	8.579	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Penguatan Modal	11.537	0	0	0	0	0
4	Pembayaran pokok utang	7.020	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Pembiayaan netto		**451.385**	**389.572**	**194.931**	**212.099**	**219.173**	**225.594**

Sumber: Bappeda (data diolah), 2016

3.3.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan dilakukan proyeksi sesuai dengan proyeksi kapasitas riil kemampuan daerah, proyeksi penggunaan kapasitas riil kemampuan daerah, kerangka pendanaan alokasi prioritas I, II, III Tahun 2016-2021, seperti tercantum pada tabel 3.15, tabel 3.16, dan tabel 3.17.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.

3. Penerimaan dana alokasi umum dan khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
4. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Data kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sleman selama 5 (lima) tahun kedepan untuk membiayai pembangunan, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.16
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah
Tahun 2016-2021 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pendapatan	2.374.987	2.691.342	2.875.219	3.058.628	3.225.821	3.383.602
2.	SILPA	478.521	426.572	231.931	249.099	256.173	255.594
	Total Penerimaan	2.853.508	3.117.914	3.107.150	3.307.727	3.481.994	3.639.196
	Dikurangi:						
3.	Belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat	1.539.309	1.584.859	1.549.954	1.571.872	1.541.723	1.677.190
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.314.199	1.533.055	1.557.196	1.735.855	1.940.271	1.962.006

Dari tabel di atas dapat diproyeksikan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2016-2021, yaitu :

1. Proyeksi Tahun 2016 sebesar Rp1,314 trilyun atau sebesar 46,05% dari total penerimaan.
2. Proyeksi Tahun 2017 sebesar Rp1,533 trilyun atau sebesar 56,88% dari total penerimaan.
3. Proyeksi Tahun 2018 sebesar Rp1,557 trilyun atau sebesar 54,26% dari total penerimaan.
4. Proyeksi Tahun 2019 sebesar Rp1,736 trilyun atau sebesar 57,65% dari total penerimaan.
5. Proyeksi Tahun 2020 sebesar Rp1,940 trilyun atau sebesar 60,06% dari total penerimaan.
6. Proyeksi Tahun 2021 sebesar Rp1,962 trilyun atau sebesar 58,00% dari total penerimaan.

Selanjutnya, setelah diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk selama 5 (lima) tahun kedepan, tahap berikutnya adalah rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Rincian data penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dimaksud, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.17
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah
Tahun 2016-2021 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kapasitas Keuangan		2.853.508	3.117.914	3.107.150	3.384.727	3.481.994	3.639.196
1.	Prioritas I Wajib dan Mengikat	1.539.309	1.584.859	1.549.954	1.571.871	1.541.723	1.677.190
2.	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II	1.231.445	1.431.691	1.443.275	1.722.780	1.810.780	1.857.590
3.	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III	82.754	101.364	113.921	90.076	129.491	104.416
Surplus Anggaran Riil/ Berimbang		0	0	0	0	0	0

Dari sajian data dan informasi pada tabel diatas, maka rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berupa total penerimaan/pendapatan adalah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.18
Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II, dan III
Tahun 2016-2021 (Juta Rupiah)

NO	Jenis Dana	Alokasi											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1.	Prioritas I	1.539.309	53,9	1.584.859	50,8	1.549.954	49,9	1.571.872	46,4	1.541.723	44,3	1.677.190	46,1
2.	Prioritas II	1.231.445	43,2	1.431.691	45,9	1.443.275	46,5	1.722.780	50,9	1.810.780	52,0	1.857.590	51,0
3.	Prioritas III	82.754	2,9	101.364	3,3	1.139.211	3,7	90.076	2,7	129.491	3,7	104.416	2,9
	TOTAL	2.853.508	100,0	3.117.914	100,0	3.107.150	100,0	3.384.727	100,0	3.481.994	100,0	3.639.196	100,0

Dari tabel di atas, prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan *(dedicated)* Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Selain itu program prioritas II berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
c. Rencana alokasi peneluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja seperti belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, dan bantuan keuangan khusus kepada desa. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

Setelah mengetahui baik proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pendapatan berikut kami sajikan proyeksi APBD Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 3.19
Proyeksi APBD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021
(Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN		**2.374.987**	**2.691.342**	**2.875.219**	**3.058.628**	**3.225.821**	**3.383.602**
I	**Pendapatan Asli Daerah**	**651.525**	**847.769**	**926.116**	**1.017.974**	**1.109.293**	**1.176.615**
1	Pajak Daerah	383.400	567.953	624.708	688.272	759.465	799.680
2	Retribusi Daerah	42.247	53.521	57.402	61.595	66.122	71.012
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	41.793	39.212	41.957	44.894	48.036	51.399
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	184.085	187.083	202.049	223.213	235.670	254.524
II	**Dana Perimbangan**	**1.501.468**	**1.604.313**	**1.691.989**	**1.754.275**	**1.819.362**	**1.887.389**
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	51.833	68.209	74.586	80.962	87.339	93.716
2	Dana Alokasi Umum	1.014.310	1.065.030	1.118.280	1.174.190	1.232.900	1.294.550
3	Dana Alokasi Khusus	372.311	380.011	380.011	380.011	380.011	380.011
4	Alokasi Dana Desa Dari APBN	63.014	91.063	119.112	119.112	119.112	119.112
III	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**221.994**	**239.260**	**257.114**	**286.379**	**297.166**	**319.598**
1	Pendapatan Hibah	6.654	6.654	6.654	6.654	6.654	6.654
2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	199.092	215.795	233.059	261.704	271.840	293.588
4	BOSNAS	-	-	-	-	-	-
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.248	11.811	12.401	13.021	13.672	14.356
6	DPIPD	-	-	-	-	-	-
7	Dana Insentif Daerah	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
BELANJA							
I	**Belanja Tidak Langsung**	**1.594.930**	**1.649.223**	**1.626.875**	**1.624.947**	**1.689.214**	**1.751.606**
1	Belanja Pegawai	1.291.437	1.272.055	1.186.614	1.195.682	1.206.248	1.286.303
2	Belanja Bunga	2.600	4.106	4.106	4.106	4.106	0,000
3	Belanja Subsidi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Belanja Hibah	42.857	15.150	25.500	26.500	60.120	30.250
5	Belanja Bantuan Sosial	32.880	40.046	41.046	44.046	45.046	45.046
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa (Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa)	45.669	52.147	68.211	74.987	82.559	87.069
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah						
	- Bagi hasil dana perimbangan	107.121	113.323	119.286	125.515	132.023	138.826
	- Sharing TPA Piyungan, IPAL Sewon, Bantuan keuangan Parpol	2.842	5.165	5.625	5.470	5.675	5.880
	- Dana desa dari APBN	63.015	91.063	119.112	119.112	119.112	119.112

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
8	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa	0,000	46.168	47.375	19.530	24.325	29.120
9	Belanja Tidak Terduga	6.509	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II	**Belanja Langsung**	**1.231.445**	**1.431.691**	**1.443.275**	**1.645.780**	**1.760.780**	**1.857.590**
1	Belanja Pegawai	170.421	203.820	214.011	214.712	235.947	247.745
2	Belanja Barang dan Jasa	611.605	602.568	632.696	644.331	667.547	732.425
3	Belanja Modal	449.419	625.303	656.568	786.737	857.286	877.420
	Jumlah Belanja	**2.826.375**	**3.080.914**	**3.070.150**	**3.270.727**	**3.449.994**	**3.609.196**
PENERIMAAN							
I	**Penerimaan Pembiayaan**	**478.521**	**426.572**	**231.931**	**249.099**	**256.173**	**255.594**
1	Perkiraan silpa	478.521	426.572	231.931	249.099	256.173	255.594
2	Penerimaan Pinjaman daerah	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Penerimaan Piutang	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II	**Pengeluaran Pembiayaan**	**27.136**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**30.000**
1	Pembentukan dana cadangan	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Penyertaan Modal	8.579	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Penguatan Modal	11.537	0	0	0	0	0
4	Pembayaran pokok utang	7.020	7.000	7.000	7.000	7.000	0,000
	Pembiayaan netto	**451.385**	**389.572**	**194.931**	**212.099**	**219.173**	**225.594**

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan diperlukan untuk menentukan program yang tepat untuk mengatasi hasil kompilasi masalah yang ditemukan. Identifikasi permasalahan didapat dari berbagai sumber dan data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain evaluasi RPJMD dan RKPD, LPPD dan LKPJ serta telaahan dari nara sumber. Identifikasi permasalahan juga didasarkan pada kriteria tertentu sehingga menghasilkan fakta yang aktual tentang permasalahan pembangunan daerah. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang diangkat adalah :

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan yang apabila tidak segera diatasi akan membesar dan berdampak negatif pada pemerintah daerah.
3. Memerlukan penanganan yang konsisten dan melibatkan banyak pihak.

4.1.2. Identifikasi Permasalahan Untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Secara umum permasalahan pembangunan di Kabupaten Sleman sesuai dengan urusan dikelompokkan menjadi 6 (enam) bidang yaitu (1) Permasalahan Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat (2) Permasalahan Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal (3) Permasalahan Prasarana dan Sarana Daerah (4) Permasalahan Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (5) Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan (6) Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4.1.2.1. Permasalahan Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan masyarakat.

1. Urusan Pendidikan
   - Masih terdapatnya penduduk yang buta huruf
   - Belum optimalnya prestasi siswa
   - Sarana dan prasarana penunjang pendidikan belum optimal
   - Masih rendahnya APK PAUD

- Belum meratanya kualitas pendidikan
- Masih adanya anak putus sekolah
- Pelaksanaan pendidikan karakter belum optimal

2. Urusan Kesehatan
   - Meningkatnya penyakit degeneratif pada kelompok umur lansia
   - Cakupan jaminan kesehatan belum optimal
   - Pelayanan kesehatan ke masyarakat belum optimal
   - Tingginya jumlah penderita HIV/AIDS dan jumlah penyalahgunaan narkoba
   - Masih adanya penyakit menular (demam berdarah/DBD, leptospirosis, Tubercolose/TBC, Infeksi Saluran Pernafasan Akut/ISPA, diare)
   - Belum mencukupinya rasio tenaga kesehatan di puskesmas
   - Masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir
   - Masih adanya balita gizi buruk
   - Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia belum memadai
   - Penanganan limbah medis belum optimal
3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
   - Tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan
   - Jumlah fasilitas umumyang ramah anak, remaja dan lansia belum mencukupi
   - Pengarusutamaan gender yang belum optimal
4. Urusan Sosial
   - Pelayanan LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) belum optimal
   - Masih adanya ketidaktepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan
   - Penanggulangan kemiskinan yang sektoral
   - Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang masih relatif besar dengan permasalahan yang semakin komplek
   - Masih adanya perbedaan data kemiskinan, antara data kemiskinan yang diterbitkan BPS dan hasil pendataan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sleman.

- Pertumbuhan penduduk masih tinggi
- Ketimpangan pendapatan masyarakat masih cukup tinggi

5. Urusan pemuda dan olah raga
   - Pemuda belum sebagai *agent of change,* pembentukan karakter kepribadian pemuda belum optimal
   - Prestasi olah raga belum optimal
   - Penguatan organisasi kepemudaan belum maksimal
6. Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa
   - Peluang masyarakat untuk mendapatkan dana hibah/bansos mengalami kendala
   - Pengelolaan Pemerintahan Desa yang belum optimal
   - Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa belum optimal
7. Urusan Perpustakaan
   - Masih rendahnya minat baca masyarakat
   - Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perpustakaan
   - Sarana dan Prasarana serta fasilitas perpustakaan belum memadai
   - Layanan perpustakaan bagi masyarakat belum optimal
8. Urusan Kebudayaan
   - Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi
   - Masih rendahnya pemahaman sejarah lokal masyarakat
   - Belum optimalnya pengelolaan museum
   - Belum optimalnya pelestarian cagar budaya
   - Minimnya pemahaman dan kecintaan anak anak dan kaum muda pada budaya lokal
   - Belum optimalnya pembinaan pengelolaan kesenian
   - Terkikisnya nilai-nilai kearifan lokal
   - Terbatasnya ruang publik untuk tempat berkreatifitas
9. Urusan Transmigrasi
   - Tidak terpenuhinya kuota pengiriman calon transmigran

4.1.2.2. Permasalahan Bidang Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal

1. Urusan Tenaga Kerja
   - Masih tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Sleman
2. Urusan Penanaman Modal

- Belum optimalnya pengelolaan investasi mulai dari perencanaan dan pengembangan investasi yang kurang inklusif sampai dengan pelayanan perizinan yang belum optimal.

3. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
   - Masih rendahnya manajemen pengelolaan koperasi dan UKM
4. Urusan Pangan
   - Belum tercapainya cadangan pangan pemerintah dan pola pangan harapan sesuai dengan target yang ditetapkan (cadangan pangan pemerintah target: 100 ton, realisasi: 28 ton; skor pola pangan harapan target: 100, realisasi: 93,6)
5. Urusan Kelautan dan Perikanan
   - Belum terpenuhinya kebutuhan ikan segar/hidup air tawar di Kabupaten Sleman (kebutuhan: 44.230,86 ton, baru terpenuhi 31.120,5 ton)
   - Belum optimalnya kelembagaan pembudidaya ikan (pemula: 433 klp, madya: 98, utama: 21)
6. Urusan Pariwisata
   - Belum optimalnya pengembangan destinasi dan atraksi wisata
   - Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan pariwisata di destinasi wisata
   - Belum optimalnya pemasaran pariwisata
   - Terbatasnya ketersediaan prasarana zona/ruang kreatif untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi
   - Terbatasnya kemampuan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
7. Urusan Pertanian
   - Belum optimalnya produktivitas pertanian (padi sawah target: 63,52kw/ha, realisasi: 60,43 kw/ha, susu sapi perah target rata2: 15 l/ekor/hari, realisasi rata2: 10 l/ekor/hari, kelapa target: 16,40 kw/ha, realisasi: 16,21 kw/ha, tembakau rakyat target: 6,8 kw/ha, realisasi: 6,66 kw/hatebu target: 44,85 kw/ha, realisasi: 27,74 kw/ha)
   - Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (diantaranya:panjang saluran irigasi:

555.245 km terdiri dari permanen: 253.857 km, tanah: 301.381 km; jumlah traktor roda 2 kondisi baik: 898 buah, dari target sekitar 1.500 buah)

- Belum optimalnya standarisasi dan sertifikasiproduksi (produk segar: register kebun salak pondoh: 42 kelompok dari 129 kelomp, jambu dalhari: 2 kelompok dari 14 kelompok; prima III dan II untuk salak pondoh baru 20 kelompok; organik: salak pondoh: 2 kelompok, sayuran: 2 kelompok, beras: 2 kelompok; produk dalam (PD): beras: 2 kelompok, serealia: 1 kelompok) (produk olahan: PIRT: 32 unit, Halal 7 unit, MD: 1 unit, HKI: 2 unit)
- Belum optimalnya kelembagaan kelompok tani (TPH: Pemula: 925, Lanjut: 316, Madya: 22, Utama: 1) (peternakan: Pemula:674, Lanjut:108, Madya:10) (perkebunan: Pemula:148, Lanjut:10, Madya: 1)

8. Urusan Kehutanan
    - Masih banyaknya lahan kritis di Kabupaten Sleman (395,10 ha di tahun 2014)
    - Belum optimalnya kelembagaan kelompok tani (kehutanan P: 152, L: 61)
9. Urusan Perdagangan
    - Daya tarik dan daya saing pasar masih belum dapat disejajarkan dengan toko modern
    - Belum semua pasar dalam kondisi baik (kondisi baik 13 pasar dari 40 pasar tradisional, 2 resto dan 1 shelter PKL).
    - Masih ada pedagang pasar yang berjualan di luar area yang telah ditentukan
    - Belum optimalnya pemasaran/ekspor di pasar internasional
    - Belum optimalnya perlindungan konsumen
10. Urusan Perindustrian
    - Beberapa produk industri yang dihasilkan kurang berdaya saing
    - Beberapa produk industri masih menggunakan bahan baku pokok dari luar

4.1.2.3. Permasalahan Bidang Prasarana dan Sarana Daerah

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Tingkat ketersediaan prasarana dan sarana penanggulangan bencana belum memenuhi kebutuhan yang ada
- Tingkat Ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian belum memenuhi kebutuhan yang ada
- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara hasil-hasil pembangunan
- Prasarana dan sarana infrastruktur publik belum seluruhnya dalam kondisi baik/kondisi mantap
- Belum terpenuhinya ruang terbuka hijau (termasuk hutan rakyat dan hutan kota) sebesar 30% dari luas wilayah

2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
   - Masih banyak jumlah rumah tidak layak huni
   - Masih terbatasnya kemampuan penyediaan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
   - Persentase kondisi prasarana dan sarana dasar permukiman baik belum mencapai 100%
3. Urusan Perhubungan
   - Persentase proporsi panjang jalan dan jembatan baik belum 100%
   - Masih terjadi perusakan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill, dan lain-lain)
   - Waktu tunda yang semakin meningkat
   - Ketersediaan area parkir yang belum memadai;
   - Belum optimalnya pelayanan transportasi umum.
4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
   - Elektrifikasi belum 100%
   - Pengembangan energi alternatif terbarukan belum optimal

4.1.2.4. Permasalahan Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
   - Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air di saluran irigasi.
   - Masih adanya genangan di wilayah permukiman pada saat hujan
   - Belum adanya regulasi tentang Rencana Detail Tata Ruang sehingga menyulitkan didalam pengendalian pemanfaatan

ruang (Studi RDTR yang telah disusun untuk 17 kecamatan belum dijadikan Peraturan Daerah)

- Alih fungsi (konversi) lahan pertanian ke non pertanian yang semakin tinggi dan sulit dikendalikan. Perubahan lahan yang dominan adalah menjadi tanah kering kemudian untuk pemukiman
- Kurangnya penyediaan ruang publik

2. Urusan Lingkungan Hidup
   - Penurunan kualitas dan kuantitas air permukaan
   - Masih terdapat lahan kritis di Kabupaten Sleman seluas 450ha
   - Masih terdapat usaha yang belum memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah(IPAL)
   - Masih terdapat usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan
   - Penurunan kualitas tanah, kualitas air dan kualitas udara
   - Terjadinya peningkatan suhu udara
   - Pengelolaan persampahan belum optimal
   - Pengelolaan keanekaragaman hayati belum optimal
   - Kerusakan kawasan resapan akibat alih fungsi lahan
   - Kerusakan kawasan lindung sempadan sungai akibat pemanfaatan bantaran sungai yang tidak terkendali
   - Masih terdapat kawasan berpotensi kekeringan
   - Produksi sampah yang dihasilkan 5.261.910 kg/thn dan meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk

4.1.2.5. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

1. Urusan Pertanahan
   - Masih ada bidang tanah yang belum bersertifikat
2. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   - Data kependudukan belum akurat dan mutakhir
   - Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan belum menyeluruh
3. Urusan Komunikasi dan Informatika
   - Masih adanya penggunaan *software* yang tidak resmi dalam kegiatan Pemerintah Daerah.
   - Sistem Informasi Manajemen di Pemerintah Kabupaten Sleman yang belum terintegrasi antar SKPD

- Layanan informasi dan perizinan belum sepenuhnya berbasis teknologi dan informasi

4. Urusan Statistik
   - Kuantitas akurasi data sektoral dari SKPD yang masih kurang konsisten
5. Urusan Persandian
   - Belum optimalnya pengamanan terhadap sistem sandi daerah.
6. Urusan Kearsipan
   - Penerapan SKPB (Sistem Kearsipan Pola Baru) belum dilakukan secara optimal
7. Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang UmumPemerintahan
   - Belum optimalnya hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
   - Belum maksimalnya pelaksanaan roadmap reformasi bikrokrasi, indeks reformasi birokrasi baru di angka 61,40
   - Indeks Kepuasan Masyarakatyang masih harus ditingkatkan.
   - Persentase keterlibatan publik dalam perencanaan dan kebijakan baru belum mencapai 76,94% dari target yang ditetapkan 96%.
   - Leveling APIP yang perlu ditingkatkan
   - Rasio auditor terhadap obyek pemeriksaan belum ideal
   - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di Pemerintahan
   - Tingkat kesadaran Wajib Pajak yang belum merata
   - Belum terpenuhinya pelayanan publik lebih cepat, mudah, murah dan transparan
   - Belum semua SOP yang dimiliki SKPD diterapkan
   - Kekurangan jumlah pegawai
   - Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD baru 70% dari target 88%
   - Kurangnya harmonisasi perencanaan pembangunan daerah

4.1.2.6. Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

- Masih terdapat masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana
- Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih tersentral pada ibukota kabupaten
- Masyarakat pada daerah rawan bencana belum seluruhnya terlatih
- Gangguan ketentraman dan ketertiban cenderung meningkat
- Penegakan Perda belum optimal
- Sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban belum memadai
- Meningkatnya konflik sosial di masyarakat
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan

2. Urusan Pemerintahan Umum
   - Masih terdapatnya konflik sosial dan konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

4.2. Isu Strategis

4.2.1. Kajian KebijakanInternasional dan Kebijakan Pembangunan Nasional

Untukmelengkapi upaya didalam penentuan isu strategis, juga dilakukan dengan menelaah agenda pembangunan internasional dan agenda pembangunan nasional untuk memberikan arah dan pedoman bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Sleman.

4.2.1.1. Sustainable Development Goals (SDG's)

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDG's) yang berakhir pada tahun 2015. MDG's yang diklaim sukses membawa penduduk negara dunia ketiga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang diukur melalui *Human Development Index* dilanjutkan dengan pencanangan SDG's. SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya

kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang.

Bila pada *Millenium Development Goals* (MDG's) terdapat 8 sasaran dan 60 target maka pada *Sustainable Development Goals*(SDG's) ini terdapat 17 sasaran dan 169 target pembangunan. 17 sasaran tersebut terdiri dari:

1. Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana.
2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan diantara negara - negara.
11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumberdaya samudera dan kepesisiran untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, mengembalikan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan,

memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

SDG's sebagai agenda global perlu diintegrasikan dengan agenda nasional sehingga idealnya perlu ada regulasi yang mengatur pelaksanaan pencapaian SDG's tersebut sebelum kemudian diturunkan menjadi agenda daerah. Hal ini bertujuan agar ada kepastian hukum dan arahan dalam penyesuaiannya dengan nawacita maupun RPJMD di daerah.

4.2.1.2. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sehingga pada prakteknya terbentuk sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. MEA ini telah disepakati oleh negara-negara di ASEAN dan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal sehingga ASEAN akan bersifat lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang menerapkan inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN.

Karakteristik utama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah:

a. Pasar dan basis produksi tunggal,
b. Kawasan ekonomi yang kompetitif,
c. Wilayah pembangunan ekonomi yang merata
d. Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global.

Masyarakat Ekonomi ASEAN ini memiliki beberapa dampak positif, diantaranya:

a. Masyarakat Ekonomi ASEAN akan mendorong arus investasi dari luar masuk ke dalam negeri yang akan menciptakan multiplier effect dalam berbagai sektor khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi.

b. Kondisi pasar yang satu (pasar tunggal) membuat kemudahan dalam hal pembentukan *joint venture* (kerjasama) antara perusahaan-perusahaan diwilayah ASEAN sehingga akses terhadap bahan produksi semakin mudah.
c. Pasar Asia Tenggara merupakan pasar besar yang begitu potensial dan juga menjanjikan dengan luas wilayah sekitar 4,5 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk yang mencapai 600 juta jiwa.
d. MEA memberikan peluang kepada negara-negara anggota ASEAN dalam hal meningkatkan kecepatan perpindahan sumber daya manusia dan modal yang merupakan dua faktor produksi yang sangat penting.
e. Khusus untuk bidang teknologi, diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN ini menciptakan adanya transfer teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yang ada diwilayah Asia Tenggara.

Peraturan untuk mengantisipasi berlakunya MEA di akhir 2015 telah diterbitkan, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreements Related to Trade in Goods* (Protokol untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi ASEAN tertentu terkait Perdagangan Barang)

4.2.1.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2020

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengangkat visi "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dari visi tersebut kemudian ditetapkan 7 misi untuk mewujudkannya yang meliputi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan 9 agenda Nawacita dengan sub agenda sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, dengan sub.agenda:
    a. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.
    b. Penguatan sistem pertahanan.
    c. Memperkuat jatidiri sebagai Negara maritim.
    d. Meningkatkan kualitas perlindungan warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri.
    e. Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran.
    f. Memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional.
    g. Meminimalisasi dampak globalisasi.
    h. Membangun industri pertahanan nasional.
    i. Membangun Polri yang professional.
    j. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan.
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan sub.agenda:
    a. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik.
    b. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan.
    c. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
    d. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).
    e. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan, dengan sub agenda:
    a. Peletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris.

b. Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia.
c. Penanggulangan kemiskinan.

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, dengan sub.agenda:
   a. Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan.
   b. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
   c. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
   d. Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah.
   e. Melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, dengan sub.agenda:
   a. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.
   b. Pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
   c. Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat.
   d. Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dengan sub agenda:
   a. Membangun konektivitas Nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan.
   b. Membangun transportasi massal perkotaan.
   c. Membangun infrastruktur/prasarana dasar.
   d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur.
   e. Menguatkan peran investasi.
   f. Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan.
   g. Meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi.
   h. Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
   i. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional.
   j. Meningkatkan daya saing tenaga kerja.
7. Peningkatan kedaulatan pangan, dengan sub.agenda:
   a. Peningkatan kedaulatan pangan.
   b. Peningkatan ketahanan air.

c. Melestarikan sumber daya alam lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.
d. Penguatan sektor keuangan.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

   Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik melalui pendidikan karkater yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

   Meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat Negara.

4.2.2.Kebijakan Provinsi

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, visi pembangunan DIY adalah "Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru". Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi:

1. Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, misi ini mengandung tujuan; mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya; mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter; mewujudkan peningkatan derajad kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran:
   a. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.
   b. Melek huruf masyarakat meningkat.
   c. Asesibilitas pendidikan masyarakat meningkat.
   d. Daya saing pendidikan meningkat.
   e. Harapan hidup masyarakat meningkat.
2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, misi ini mengandung tujuan; memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif; mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata, dengan sasaran:
   a. Pendapatan masyarakat meningkat.
   b. Ketimpangan antar wilayah menurun.
   c. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.

d. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.
e. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, misi ini mengandung tujuan; mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif, dengan sasaran:
   a. Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah meningkat.
   b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah, misi ini mengandung tujuan; mewujudkan peningkatan pelayanan publik; menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang, dengan sasaran:
   a. Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di perdesaan.
   b. Kualitas lingkungan hidup meningkat.
   c. Pemanfaatan tata ruang terkendali.

4.2.3.Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya

Dalam rangka menyelaraskan pembangunan antar daerah, baik dalam provinsi maupun luar provinsi yang berbatasan maka dilakukan analisis keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dari kabupaten/kota yang berbatasan. Berikut telaahan RPJMD beberapa kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Sleman:

Tabel 4.1
Identifikasi Kebijakan Pembangunan Daerah Lain

No	Daerah Lain	Kebijakan Terkait (Misi – Tujuan)	Keterangan Keterkaitan
1	RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016	**Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto**	
		Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di masyarakat Meningkatkan ketahanan pangan dan pengawasan kualitas bahan makanan	Ekonomi kerakyatan sama dengan amanat dari misi kedua yang tertuang dalam RPJP Kab. Sleman mengenai peningkatan kesejahteraan rakyat, dan arah pembangunan ketiga mengenai pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, diutamakan bagi kecamaan/desa/kelurahan yang tertinggal dan kurang berkembang sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang dapat dilakukan secara sinergi oleh Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Pengembangan dan penguatan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing produk di pasar regional dan perluasan pasar dan jaringan pemasaran atas produk lokal
		Mewujudkan daya saing daerah yang kuat	
		Meningkatkan kualitas pendidikan, dengan arah kebijakan: Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pendidikan berkualitas Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dalam menumbuhkan pendidikan karakter Meningkatkan daya tarik perpustakaan dan budaya	Daya saing daerah yang perlu ditingkatkan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan. Daya saing daerah dengan peningkatan SDM ini terkait dengan Kab. Sleman sebagai kabupaten yang berdekatan. Kabupaten Sleman harus meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu bersaing dengan daerah lain

No	Daerah Lain	Kebijakan Terkait (Misi – Tujuan)	Keterangan Keterkaitan
		baca masyarakat Meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar sekaligus memberikan perlindungan ketenagakerjaan	sehingga anak usia sekolah di Kabupaten Sleman lebih tertarik untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sleman
		Memperkuat daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa	Sebagian wilayah Kabupaten Sleman yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta (Kawasan Perkotaan Yogyakarta) adalah merupakan pusat-pusat pelayanan jasa, maka untuk mengimbagi Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman perlu meningkatkan mutu pelayanan jasa untuk menangkap peluang yang terbuka
2	RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015	**Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender**	
		Meningkatkan pengembangan kawasan strategis	Sebagian wilayah Kabupaten Bantul dan sebagian wilayah Kabupaten Sleman yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta bersama-sama seluruh wilayah Kota Yogyakarta merupakan Kawasan Strategis Nasional KPY (Kawasan Perkotaan Yogyakarta).
		Meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan	
		Memantapkan program penanggulangan bencana	Wilayah Sleman ke arah selatan sampai Kabupaten Bantul merupakan dataran alluvial Gunung Api Merapi,

No	Daerah Lain	Kebijakan Terkait (Misi – Tujuan)	Keterangan Keterkaitan
		Memantapkan program peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam	Sleman merupakan hulu dan daerah resapan air yang perlu dijaga pemanfaatan ruangnya agar terjaga ketersediaan air untuk keperluan Kabupaten Sleman hingga Kabupaten Bantul
3	RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019	**Membangun Perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdayasaing**	
		Peningkatan investasi daerah Peningkatan pelayanan administrasi investasi	
		Pengembangan agribisnis yang berdayasaing melalui peningkatan kualitas kelembagaan SDM serta sarana dan prasarana pertanian Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas perikanan Pengembangan perdagangan yang berbasis pada produk unggulan lokal Pembangunan pengembangan industri kecil dan menengah	Potensi lokal pada kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Sleman memiliki karakteristik yang sama (agropolitan), sehingga hal ini bisa memunculkan persaingan antar daerah, khususnya kawasan perbatasan (Tempel - Salam), untuk itu diperlukan penguatan di sektor potensi ekonomi lokal.
		Meningkatkan pembangunan prasarana daerah dan sarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	
		Melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan penanggulangan bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, dan kekeringan	

No	Daerah Lain	Kebijakan Terkait (Misi – Tujuan)	Keterangan Keterkaitan
		Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Peningkatan pelayanan angkutan	Kabupaten Magelang terletak di posisi yang sangat strategis di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata antara Semarang - Magelang – Yogyakarta. Prasarana dan fasilitas perhubungan terkait dan berdampak terhadap Kab. Sleman karena dilintasi oleh jalan arteri yang sama, yang menghubungkan Semarang – Magelang – Yogyakarta melalui Kabupaten Sleman, sehingga diperlukan pengelolaan infrastruktur dan manajemen lalu lintas yang tepat.

4.2.4. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sleman

4.2.4.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025, RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sleman adalah ”Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Sejahtera, Demokratis dan Berdaya Saing”. Visi tersebut akan dicapai dengan menetapkan misi:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang demokratis.

4.2.4.2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031

RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten yang termuat dalam Paraturan Daerah dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Strategi dalam rangka kebijakan pengintegrasian dan pengembangan pusat kegiatan di luar kawasan bencana meliputi:
   a. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang terintegrasi dengan sistem prasarana dan sarana di dalam KPY;
   b. meningkatkan hubungan PPL dengan PPK, PKL, dan/atau PKW;
   c. menjaga keterkaitan antara kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan; dan
   d. mengembangkan pusat pelayanan di luar kawasan rawan bencana Merapi III.
2. Strategi dalam rangka kebijakan pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi meliputi:
   a. mengembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*);
   b. mengembangkan jalur evakuasi bencana;

c. mengembangkan ruang evakuasi bencana; dan
d. mengembangkan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).

3. Strategi dalam rangka kebijakan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:
   a. mengendalikan kegiatan budidaya pada kawasan lindung;
   b. mengendalikan kawasan terbangun pada kawasan lindung;
   c. mengendalikan kegiatan budidaya pertambangan; dan
   d. mengendalikan fungsi kawasan pelestarian alam Taman Nasional Gunung Merapi.
4. Strategi dalam rangka kebijakan pengembangan kawasan pertanian dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan meliputi:
   a. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian; dan
   b. mengembangkan agropolitan dan minapolitan.
5. Strategi dalam rangka kebijakan pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi meliputi:
   a. mengembangkan obyek dan daya tarik wisata;
   b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; dan
   c. melestarikan situs warisan budaya.
6. Strategi dalam rangka kebijakan pengembangan kawasan pendidikan meliputi:
   a. melakukan revitalisasi pendidikan; dan
   b. mengembangkan prasarana dan sarana pendidikan.
7. Strategi dalam rangka kebijakan pengembangan industri menengah, kecil dan mikro yang ramah lingkungan meliputi:
   a. mengembangkan kawasan peruntukan industri;
   b. mengembangkan sentra industri kecil dan menengah; dan
   c. mengembangkan industri ramah lingkungan.
8. Strategi dalam rangka kebiajkan pengembangan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan meliputi:
   a. mengembangkan kawasan permukiman di luar kawasan rawan bencana;
   b. mengembangkan ruang terbuka hijau perkotaan; dan

c. mengembangkan prasarana dan sarana dasar permukiman yang berwawasan lingkungan.

9. Strategi dalam rangka kebijakan pemantapan prasarana wilayah meliputi:
   a. memelihara dan mempertahankan fungsi jaringan prasarana wilayah; dan
   b. mengembangkan prasarana transportasi masal.
10. Strategi dalam rangka kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
   a. mendukung penetapan kawasan strategi nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
   b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
   c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun; dan
   d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

4.2.4.3. Grand Design Kependudukan Kabupaten Sleman 2016 – 2035

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan pedoman bagi kebijakan pembangunan di bidang kependudukan, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan di Kabupaten Sleman. GDPK berpijak dari data kependudukan yang ada masa ini yang menggambarkan kuantitas dan kualitas penduduk untuk selanjutnya diproyeksikan kondisinya pada masa depan. Terdapat lima pilar penting dalam pembangunan kependudukan, ialah pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas dan pembangunan basis data kependudukan. Secara operasional, GDPK ini merupakan bagian integral dari pembangunan di berbagai bidang dalam rangka memerangi kemiskinan dan ketidakberdayaan.

Pengendalian kuantitas dilakukan melalui pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Pengaturan fertilitas dengan program Keluarga

Berencana yang diubah orientasinya dari*supply side approach* ke *demand side approach.* Strategiyang dikembangkan adalah melakukan integrasi, desentralisasi, kemitraan, dan pemberdayaan serta fokus kepada penduduk miskin. Upaya penurunan angka kematian diselenggarakan terpadu dengan masyarakat melalui upaya-upaya proaktif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai peraturan perundang-undangan dan norma agama.

Peningkatan kualitas penduduk dilakukan melalui:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyakat dalam rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup.
2. Meningkatkan kompetensi dan daya kompetisi penduduk melalui pendidikan formal, non formal maupun informal.
3. Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin melalui peningkatan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.
4. Meningkatkan status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran dan setengah pengangguran.
5. Mengurangi kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

Pokok-pokok kebijakan dalam Pembangunan keluarga adalah :

1. Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Membangun iklim berkeluarga melalui perkawinan yang sah.
3. Membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.
4. Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara.
5. Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Pengarahan mobilitas penduduk yang didorong dan mendukung pembangunan pembangunan daerah yang berkeadilan. Strategi mencapai tujuan-tujuan kebijakan pengarahan mobilitas penduduk sebagai berikut:

- menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis;

- memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para migran internasional dan keluarganya;
- menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- mengendalikan kuantitas penduduk di suatu daerah/wilayah tertentu;
- memperluas kesempatan kerja produktif;
- menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran;
- meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia;

Kebijakan umum pembangunan data base kependudukan dilakukan dengan mengembangkan data base kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS). Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat.

4.2.4.4. SIDa (Sistem Inovasi Daerah)

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sleman memiliki fokus pada beberapa bidang. Untuk bidang inovasi daerah, kebijakan pembangunan Kabupaten Sleman memfokuskan pada peningkatan kerjasama lembaga litbang dan perguruan tinggi dengan industri.

Kerjasama ini sebagai interaksi antara aktor sistem iptek dan sistem produksi sehingga dapat menjadi kunci kesuksesan dalam aktivitas inovasi. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan interaksi tersebut antara lain melalui forum komunikasi dan kerjasama antara ilmuwan, perekayasa, praktisi di industri, serta masyarakat, dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam merumuskan kebijakan iptek. Kerjasama ini perlu dijalin sebagai langkah peningkatan inovasi dimana litbang dan perguruan tinggi merupakan salah satu sumber inovasi namun memiliki keterbatasan dalam pendanaan. Peran industri adalah sebagai penyedia dan serta sebagai lembaga pemasaran hasil inovasi oleh litbang dan perguruan tinggi. Inovasi teknologi yang dihasilkan tidak hanya teknologi canggih, namun juga mampu menciptakan inovasi sederhana. Kerjasama ini di masa mendatang akan mendorong industrialisasi yang mendorong penguasaan iptek sebagai sumber penggerak kemajuan dan modal utama kemandirian.

Di wilayah Sleman telah terdapat kawasan-kawasan sentra produksi untuk padi, salak, kambing PE dan bambu. Pengembangan kawasan tersebut merupakan *pilot project* yang didalamnya terdapat aktivitas produksi sampai dengan pengolahan dan terdapat pula upaya pengembangan jaringan pasar baik lokal, nasional maupun internasional.

Meningkatkan produktivitas litbang daerah untuk memenuhi kebutuhan pengembangan teknologi di sektor produksi dan meningkatkan daya saing produk daerah dan budaya inovasi

Strategi penguatan sistem inovasi daerah Kabupaten Sleman dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Peningkatan inovasi daerah melalui *research and development* (R & D) dengan membentuk inkubator teknologi
2. Peningkatan promosi produk inovasi
3. Peningkatan keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam penguatan SIDa
4. Pengembangan *Bisnis Inovation Centre* (BIC)/*Business Technology Centre* (BTC)
5. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai media sebaran inovasi

4.2.4.5. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) 2016-2020

Kemiskinan merupakan masalah multi dimensi yang memerlukan penanganan secara menyeluruh, bersama-sama, partisipatif dan berkesinambungan. Berkesinambungan berarti perlu disusun suatu program kegiatan yang terencana, terpadu, dan melibatkan semua komponen. Melalui serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) dan seminar bersama instansi terkait, LPM Perguruan Tinggi, aktifis penanggulangan kemiskinan telah menghasilkan kesepahaman dan kesepakatan untuk mewujudkan tiga sasaran strategis penanggulangan kemiskinan tahun 2016-2020 yaitu :

1. Sinkronisasi dan koordinasi antar penentu kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya dari luar Pemerintah Daerah.
3. Meningkatnya kemandirian keluarga miskin.

Penanggulangan kemiskinan ditujukan kepada siapapun yang miskin dan dimanapun mereka berada, perlu upaya-upaya yang luar biasa,

perlu kreatifitas dan melibatkan semua aspek. Tidak ada pelaku tunggal yang bisa menyelesaikan masalah kemiskinan, perlu strategi perencanaan berbasis masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. SPKD ini diharapkan menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sehingga keluarga miskin dapat meningkat kesejahteraannya.

4.2.4.6. Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016-2020

Rencana Aksi Daerah Pemberdayan Perempuan merumuskan aksi untuk perempuan ditinjau dari sisi hak politik, hak ekonomi dan pendidikan, hak kesehatan (khususnya kesehatan reproduksi), hak sosial termasuk hak untuk bebas dari pelecehan dan eksploitasi, serta hak atas fasilitas publik yang dilaksanakan antar *stakeholder*danSKPD.Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak mendasarkan pada isu strategis setiap klaster anak dalam indikator Kabupaten Layak Anak, yakni klaster kelembagaan, klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta klaster perlindungan khusus.

Berdasarkan hasil capaian dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya maka ditetapkan isu strategis pembangunan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampakyang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan analisis dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis Kabupaten Sleman berdasarakan bidang permasalahan adalah sebagai berikut:

1 Dinamika Kependudukan, Perlindungan Perempuan dan anak.

2 Pendidikan dan Kebudayaan

3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan Pengangguran
5 Infrastruktur
6 Lingkungan Hidup
7 Ketentraman dan ketertiban
8 Tata kelola pemerintahan
9 Daya saing potensi ekonomi lokal
10 Penanggulangan bencana

Penetapan isu strategis ini sebagai bahan kajian dalam menetapkan cita cita pembangunan sebagai solusi dari isu stategis dengan mempertimbangan sumber daya yang tersedia. Isu strategis Kabupaten Sleman dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Dinamika Kependudukan, Perlindungan Perempuan dan Anak

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman relatif tinggi bila dilihat dari data 5 tahun terakhir. Tingginya laju pertumbuhan penduduk yang mencapai rata-rata 1,26 tersebut lebih disebabkan oleh jumlah migrasi penduduk yang masuk dibandingkan dengan jumlah kelahiran penduduk mengingat fungsi Kabupaten Sleman sebagai penyangga Kota Yogyakarta, pusat pendidikan serta pusat pengembangan perumahan/permukiman. Besarnya jumlah migrasi dan penduduk sementara inilah yang menyebabkan data kependudukan di Kabupaten Sleman belum akurat karena sulitnya proses pendataan penduduk. Faktor lain yang menjadi masalah adalah kurangnya kesadaran penduduk untuk mengurus berkas-berkas kependudukan sehingga cakupan administrasi penduduk di Kabupaten Sleman belum terpenuhi secara keseluruhan.

Jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Sleman paling besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia anak-anak dan lansia. Jumlah angkatan kerja yang sangat besar ini merupakan peluang sekaligus tantangan di dalam pembangunan. Di dalam istilah demografi hal ini disebut dengan *demografic bonus*, karena pada saat itu beban ketergantungan menjadi minimal. Berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Sleman, potensi bonus demografi akan berlangsung sejak tahun 2015 dan akan terus berlanjut hingga tahun 2035. Salah satu implikasi agar terwujud bonus demografi adalah dengan penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumberdaya

manusia, serta mempersiapkan kaum perempuan untuk memasuki dunia kerja.

Jumlah penduduk yang termasuk kategori remaja (*adolescents)* juga besar. Hal ini disebabkan karena fertilitas yang tinggi di masa lalu, dan sampai saat ini belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Implikasi kebijakan yang perlu diambil berkaitan dengan jumlah remaja yang besar ini adalah menyiapkan mereka sebagai generasi penerus bangsa. Untuk itu kualitas, baik yang menyangkut pendidikan maupun kesehatannya (termasuk kesehatan reproduksinya) harus memperoleh perhatian yang serius.

Kelompok penduduk usia 60 tahun keatas juga meningkat secara signifikan. Fenomena "*aging population*" di Sleman telah terjadi dan menjadi masalah utama sebagaimana dihadapi di negara-negara maju. Proporsi kelompok ini cenderung meningkat, telah mencapai 10,5 persen pada 2015 dan terus meningkat menjadi sekitar 15,5 persen pada 2035. Implikasi kebijakan dari fenomena ini adalah upaya-upaya untuk kaum lansia ini dapat hidup lebih sejahtera, melalui antara lain pelayanan program-program dan kegiatan yang lebih ramah lansia.

Permasalahan kependudukan yang lain adalah persebaran yang tidak merata antar wilayah kecamatan. Jumlah penduduk yang banyak dengan kepadatan per kilometer yang tinggi terjadi di kecamatan-kecamatan Depok, Ngaglik, Mlati, Gamping, yang merupakan wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Jumlah penduduk yang tidak merata dan terkonsentrasi di suatu wilayah akan memberikan beban yang berat bagi wilayah yang bersangkutan termasuk masalah lingkungan hidup dan kehidupan sosial.

Di bidang Keluarga Berencana, data 5 tahun terakhir juga menunjukkan bahwa cakupan peserta KB aktif atau prevalensi mencapai 121.901 atau kurang lebih 79% sedangkan peserta KB pria mencapai 7,5% dari seluruh peserta KB aktif. Kepesertaan KB ini dapat lebih ditingkatkan guna menekan laju pertumbuhan penduduk dari kelahiran.

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman tahun 2014 sebesar 0,03 dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar 331 kasus di tahun 2014 naik dari 142 kasus di tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran pemahaman terhadap KDRT

sehingga masyarakat semakin berani dan terbuka dalam pengaduan KDRT. Hanya saja, kesulitan yang masih ditemui adalah jika kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan karena berbagai sebab. Hal demikian perlu kepedulian semua pihak agar permasalahan perlindungan perempuan dan anak dapat lebih mendapatkan penanganan yang tepat.

Kedepan, berkaitan dengan permasalahan kependudukan dan Keluarga berencana, hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sleman adalah meningkatkan cakupan layanan terhadap administrasi kependudukan dengan melaksanakan jemput bola, menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR) dengan memberdayakan kader KB dalam meningkatkan cakupan kepersertaan KB khususnya KB mandiri, meningkatkan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja, memberdayakan Institusi Masyarakat Pedesaan. Permasalahan Perlindungan Perempuan dapat diminimalkan dengan berkoordinasi lebih intensif dengan lembaga yang peduli dengan perlindungan perempuan dan anak.Pemerintah Daerah juga harus lebih responsive terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan mengoptimalkan UPT yang menangani perlindungan perempuan dan anak.Optimalisasi peran perempuan di segala bidang juga diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Gender.

2. Pendidikan dan Kebudayaan

Angka Melek Huruf dapat menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis sehingga AMH dapat dipakai sebagai dasar kabupaten untuk melihat potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Jika dibandingkan tahun 2013, AMH Kabupaten Sleman tahun 2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 angka melek huruf sebesar 98,03% artinya bahwa di Kabupaten Sleman pada tahun 2013 masih ada 1,97% penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf. Sedangkan untuk tahun 2014 AMH sebesar 98,31%, dan mencapai 98,80 di tahun 2015.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/135/SJ tanggal 23 Februari 2013 bahwa data yang dapat digunakan adalah data penduduk kabupaten/kota yang telah diolah dan dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, maka penghitungan APK mengalami perubahan, karena pada tahun-tahun sebelumnya jumlah penduduk berdasarkan data dari BPS. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2013 sebesar 114,77%, artinya bahwa untuk jenjang SD/MI jumlah siswa yang sekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah SD/MI dimana hal ini disebabkan pada sekolah SD/MI siswa ada yang berusia kurang dari 7 tahun tetapi ada pula yang melebihi 12 tahun. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 116,78%, dan pada tahun 2015 sebesar 116,81%.

Demikian pula bagi SMP/M.Ts, dapat dilihat bahwa APK pada tahun 2013 sebesar 108,93 naik pada tahun 2014 menjadi 111,41%, dan 111,70% di tahun 2015. APK SMA/MA/SMK pada tahun 2013 sebesar 79,00 dan pada tahun 2014 APK SMA/MA/SMK menjadi 86,39% atau meningkat sebesar 7,39% dari tahun 2013. Hal ini bisa terjadi karena pada penduduk usia SMA justru mengalami penurunan. APK SMA/MA /SMK di tahun 2015 sebesar 87,37%.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.Pada jenjang SD/MI APM pada tahun 2013 sebesar 99,96% dan tahun 2014 sebesar 102,01%, serta 103,20% di tahun 2015. APM SMP/M.Ts pada tahun 2013 sebesar 81,24 dan tahun 2014 menjadi 81,63%, dan di tahun 2015 sebesar 83,96%. APM SMA/MA/SMK pada tahun 2013 sebesar 55,16 dan tahun 2014 menjadi 57,73%, dan tahun 2015 sebesar 58,95%.

Angka putus sekolah di Kabupaten Sleman pada tahun 2014 mencapai 29 anak pada tingkat Sekolah Dasar, 14 anak pada tingkat SMP, dan 48 anak pada tingkat SMU/SMK. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2014.

Permasalahan lain yang terjadi di Kabupaten Sleman adalah banyaknya peserta didik penduduk Sleman yang memilih bersekolah di Kota Yogyakarta. Hal yang demikian disebabkan oleh kepercayaan terhadap kualitas sekolah di Sleman yang masih kurang.

Pembentukan karakter kepribadian pemuda di Kabupaten Sleman belum optimaldari adanya indikasi banyaknya kenakalan pelajar dan pemuda yang terjadi karena koordinasi penanganan pemuda masih kurang serta masih rendahnya pemahaman dan peran serta pemuda dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda.Pembinaan olahraga di Kabupaten Sleman juga masih belum maksimal dengan terbatasnya sarana prasarana olahraga serta banyaknya atlet-atlet Sleman yang menjadi atlet daerah lain sehingga prestasi olah raga belum optimal.

Kabupaten Sleman memiliki kekayaan budaya yang sangat bervariasi, baik itu yang berupa bangunan maupun kesenian dan upacara adat. Dengan jumlah kesenian sebanyak 1.353 yang masih aktif, masyarakat Kabupaten Sleman cukup dinamis dalam mengembangkan budaya di daerahnya. Akan tetapi, masih ada beberapa permasalahan di bidang budaya ini antara lain belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi dan pelestarian budaya serta pembinaan pengeloaan kesenian.

Permasalahan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sleman ini ke depan akan diatasi dengan peningkatan kompetensi guru, peningkatan pengeloaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan standart yang ditetapkan, pembentukan desa berkarakter serta peningkatan prestasi olah raga. Sedangkan di bidang kebudayaan akan dilakukan peningkatan fasilitasi kekayaan budaya dan nilai tradisi dan pelestarian nilai budaya serta pembentukan desa budaya.

3. Kesehatan

Saat ini rasio tenaga kesehatan puskesmas di Kabupaten Sleman belum memadai karena masih kurangnya SDM kesehatan.Selain itu cakupan jaminan kesehatan belum optimal, dimana belum semua penduduk memiliki jaminan kesehatan. Pada tahun 2015masih terdapat angka kematian bayi 3,61 per 1000 kelahiran hidup, balita gizi buruk 0,40%, angka kematian ibu melahirkan 28,30 per 100.000 kelahiran hidup.

Penyakit menular (DBD, leptospirosis, TBC, ISPA, diare) dan penyakit degeneratif pada kelompok umur lansia juga masih ditemui di Kabupaten Sleman karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjalani pola hidup bersih dan sehat. Hal ini juga disertai tingginya

jumlahpenderita HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba karena didorong oleh mobilitas penduduk dan perilaku reproduksi.

Permasalahan di bidang kesehatan ke depan akan diatasi dengan peningkatan cakupan jaminan kesehatan, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD yang diiringi dengan akreditasi puskesmas dan RSUD, pendampingan PHBS, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta meminimalkan angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, dan angka balita gizi buruk.

4. Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan Pengangguran

Jumlahpenduduk miskin di Kabupaten Sleman menurun dari 13,89% di tahun 2013 menjadi 11,85% di tahun 2014, dan mencapai ke angka 11,36 di tahun 2015. Walaupun demikian, upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu dilakukan melalui kebijakan peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pembinaan peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Terdapat kesulitan yang ditemui dalam upaya tersebut antara lain:

a. Belum sinkronnya antara data pusat dengan data SIM kemiskinan Kabupaten Sleman;
b. Belum optimalnya peran swasta, perguruan tinggi dan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan;
c. Kurangnya sinergi integrasi dan koordinasi antara program pusat dan daerah dan antar SKPD;
d. Belum optimalnya keterlibatan kelompok masyarakat mampu dalam peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

Permasalahan kemiskinan ini juga disertai dengan tingkat pengangguran terbuka yang masih mencapai 6,12% di tahun 2015 dan relatif tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dimana pada tahun 2015 baru sebanyak 79,36% yang mendapatkan bantuan sosial. Bantuan sosial tersebut belum bisa menanggulangi permasalahan yang ada di Kabupaten Sleman karena akses hibah masih terbatas dan program-program penanggulangan masalah kemiskinan masih bersifat sektoral.

Guna mengurangi permasalahan di atas disusun *roadmap*penanggulangan kemiskinan dan *roadmap*penanganan PMKS

yang lebih intensif sehingga menghasilkan upaya penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS yang terpadu lintas bidang.

Pelatihan ketrampilan kepada calon pekerja sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan serta upaya penumbuhan wirausahawan baru diharapkan dapat mengurangi angka pengangggguran.

5. Infrastruktur

Prasarana dan sarana infrastruktur di Kabupaten Sleman belum seluruhnya dalam kondisi baik. Hal ini disebabkan oleh beban penggunaan prasarana infrastruktur yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan penggunaan sarana lalu lintas serta ketidakseimbangan antara penyediaan prasarana sarana publik sesuai rencana tata ruang terhadap desakan pemanfaatan ruang. Data pada tahun 2015 menunjukkan bahwa proporsi jalan dalam kondisi baik baru mencapai 0,5426, rasio jaringan irigasi 1:3.080, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 51,59% dan drainase dalam kondisi baik 48,76. Kondisi infrastruktur ini disertai dengan belum optimalnya layanan transportasi umum yang disebabkan minimnya minat pengguna dan terbatasnya sarana dan prasarana.Dalam kaitannya dengan perekonomian masyarakat, prasarana perekonomian juga masih perlu ditingkatkan kualitas dan jangkauan pelayanannya.

Permasalahan infrastruktur dapat diatasi dengan meningkatkan proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi baik, pemenuhan sarana prasarana dasar masyarakat, penerapan pengelolaan jaringan irigasi, partisipasi di masyarakat dan peningkatan sarana prasarana perekonomian untuk mengembangkan ekonomi lokal.

6. Lingkungan Hidup

Inti dari permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah,ditandai dengan penurunan kualitas tanah, kualitas air dan kualitas udara. Penurunan kualitas air, terutama air permukaan, disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak melalui pengolahan serta sistem sanitasi yang buruk. Selain itu, kurangnya pengendalian pemanfaatan bantaran sungai dan alih fungsi lahan juga memacu kerusakan lingkungan disamping belum mencukupinya kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan sebagai acuan pengelolaan dan pengendalian lingkungan.

Sampai dengan saat ini, di Kabupaten Sleman masih terdapat kawasan kumuh seluas sekitar 41 hektar yang harus dientaskan. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, rendahnya kualitas pengelolaan sampah, masih adanya lahan kritis merupakan permasalahan yang lain di bidang lingkungan hidup.

Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 mencapai 54,41% bila dihitung dari kawasan perkotaan. Akan tetapi, bila dilihat dari kondisinya selama 5 tahun terakhir, luasan RTH di Kabupaten Sleman terus menurun dengan signifikan. Menurunnya RTH tidak dapat dipungkiri selama 5 tahun ke depan, hanya saja harus didukung dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan yang ada. Intervensi yang dilakukan adalah membuat target alih fungsi lahan untuk 5 (lima) tahun kedepan tidak lebih dari 100ha setiap tahunnya sesuai yang di rencanakan dalam RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan dengan meningkatakan pengelolaan air limbah, cakupan layanan persampahan, meminimalkan alih fungsi lahan dan penanganan kawasan kumuh dan lahan kritis.

7. Ketentraman dan ketertiban umum

Kondisi Kabupaten Sleman yang heterogen dengan banyaknya warga pendatang, menimbulkan kerentanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Selain bidang ketentraman dan ketertiban umum, di bidang pemerintahan umum juga masih terdapat konflik sosial dan konflik SARA di masyarakat. Belum optimalnya penegakan perda juga menjadi salah satu permasalahan di bidang ketentraman dan ketertiban.Selain itu, angka kriminalitas di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 masih mencapai 15,81.

Permasalahan ini dapat diatasi dengan sinergitas antar pemuka kelompok yang ada di masyarakat dengan bekerja sama dengan pemerintah, misalnya FKUB, memberdayakan kelompok keamanan swadaya masyarakat, dan optimalisasi penegakkan perda dengan meningkatkan respon terhadap pengaduan pelanggaran perda.

8. Tata Kelola Pemerintahan

Hasil penilaian oleh Kementerian PAN dan RB terhadap Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sleman masih di angka 61,40,

sedangkan angka penilaian mandiri reformasi birokrasi di Kabupaten Sleman masih disekitar angka 60. Angka itu masih terus ditingkatkan seiring dengan pemenuhan indikator-indikator penunjangnya. Indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Sleman mencapai 78,54% dan belum mencapai target yang diinginkan sebesar 79%. Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu jumlahnya yang berkurang karena usia pensiun yang tidak diimbangi pengadaan karena adanya kebijakan moratorium PNS dari Pemerintah Pusat, belum optimalnyapelaksanaan SOP yang telah disusun oleh SKPD serta belum semua SKPD mempunyai SP. Disisi lain pelayanan masyarakat terus dituntut untuk semakin cepat, transparan dan efisien.

Adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat memangkas birokrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat, akan tetapi disisi lain penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah desa perlu dioptimalkan disesuaikan dengan perencanaan kabupaten agar proses pembangunan dapat lebih optimal dan akurat.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan dapat ditingkatkan lebih meningkatkan kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan secara umum, baik di bidang pengelolaan SDM, keuangan, maupun pelayanan publik.Selain itu penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan keterbatasan sumberdaya aparatur dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat dan efisien.

Demikian pula, yang tidak boleh dikesampingkan adalah pendampingan terhadap pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Bagaimanapun juga kinerja pemerintah Kabupaten Sleman dapat berjalan lebih baik jika didukung oleh pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa.

9. Investasi dan Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal

Pengelolaan investasi di Kabupaten Sleman belum optimal, baik itu dari aspekperencanaan, pengembangan, maupun pelayanan perizinan. Potensi investasi belum terdata dan ter-update dengan baik, sehingga informasi terkait dengan kesempatan berinvestasi di Kabupaten Sleman tidak terakses oleh investor.Pengembangan investasi terkendala dengan

letak wilayah yang berada pada daerah resapan air yang menyebabkan industri besar tidak dapat didirikan di Kabupaten Sleman. Oleh sebab itu untuk menggantikan hal tersebut harus dicari sektor yang lain yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Pelayanan perizinan sering kali belum dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga perlu diperketat dalam monitoring dan evaluasi SOP dan SP perizinan.Kemudahan layanan perizinan dan iklim yang kondusif untuk berusaha diharapkan menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sleman sehingga investasi di Kabupaten Sleman terus meningkat.

Pada sektor pertanian, pola pangan harapan dan cadangan pangan pemerintah juga belum sesuai target yang diharapkan disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam memenuhi pola konsumsi yang beragam, bergizi, sehat dan aman, serta pentahapan dalam pemenuhan cadangan pangan pemerintah.Selain itu produktifitas pertanian juga masih perlu untuk ditingkatkan.Peningkatan pengelolaan di bidang pertanian, baik sarana prasarana, peningkatan produksi dan pasca panen diharapkan akan meningkatkan kualitas sektor pertanian yang dapat meningkatkan nilai tukar petani yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani.

Daya saing atas potensi-potensi di Kabupaten Sleman harus terus ditingkatkan sehingga menaikkan nilai ekspor dari Kabupaten Sleman. Ekonomi lokal yang berupa potensi UMKM belum sepenuhnya mampu mengakses pasar yang lebih luas karena masih banyak produk UMKM yangbelumbisa bersaing dengan produk serupa dari daerah lain.Pendampingan terhadap UMKM agar memiliki kriteria untuk masuk ke pasar bebas serta penguatan permodalan terus dilakukan oleh Kabupaten Sleman.

Kondisi alam yang subur dan menawan merupakan pontensi untuk pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata akan membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya dengan tetap mempertahankan lingkungan alamnya. Setiap desa wisata memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri yang berbeda satu dengan yang lain sehingga antar desa wisata bisa saling mendukung dan bersinergi untuk mencapai Desa Wisata Mandiri.

10. Penanggulangan bencana

Potensi bencana di Kabupaten Sleman sangat beragam, baik itu yang disebabkan oleh alam seperti angin ribut, letusan gunung dan tanah longsor, maupun yang disebabkan oleh manusia seperti kebakaran. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Sleman telah ditetapkan akan tetapi masih ada warga yang bersikeras untuk tinggal di kawasan tersebut dan belum semuanya terlatih untuk tanggap bencana.Ketersediaan prasarana dan sarana kebencanaan belum memadai dengan masih adanya kawasan rawan bencana longsor yang belum dipasang EWS dan masih terdapatnya jalan evakuasi yang rusak.

Cakupan pelayanan bahaya kebakaran di Kabupaten Sleman belum optimal.Sampai dengan tahun 2015 target cakupan pelayanan bencana kebakaran menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 adalah sebesar 80%, namun dengan luas wilayah 574,82 km2 dengan satu Wilayah Manajemen Kerja (WMK) dengan radius 7,5 km,cakupan pelayanan kebakaran sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 18,04%.

Target tingkat waktu tanggap *Response Time Rate*(RTR) sampai dengan tahun 2015 menurut SPM adalah sebesar 75% dan sampai dengan tahun 2012 RTR Kabupaten Sleman kondisinya adalah 93,33%, lalu tahun 2013 sebesar 100%. Hal ini terjadi karena suksesnya sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran pada masyarakat yang berarti juga semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencegah/menghindari bahaya kebakaran. Selain itu juga semakin meningkatnya sarpras kebakaran yang ada serta semakin profesionalnya petugas pemadam kebakaran sehingga *response time rate* semakin tinggi dan kedepan dengan rencana penambahan 1 WMK diharapkan seluruh wilayah rawan Kabupaten Sleman dapat masuk dalam WMK.Kabupaten Sleman yang merupakan daerah yang berpotensi terhadap bencana akan terus berupaya untuk membuat masyarakat lebih mandiridalam tanggap bencana, selain juga memenuhi kekurangan sarana prasarana penanggulangan bencana.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Visi Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021.

"Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya Dan Terintegrasikannya Sistem *E-Government* Menuju *Smart Regency* Pada Tahun 2021"

Penjabaran dari visi tersebut adalah:

Sejahtera	:	Suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
Mandiri	:	Suatu keadaan di mana Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang

ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian.

Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi.

Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai eksport, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

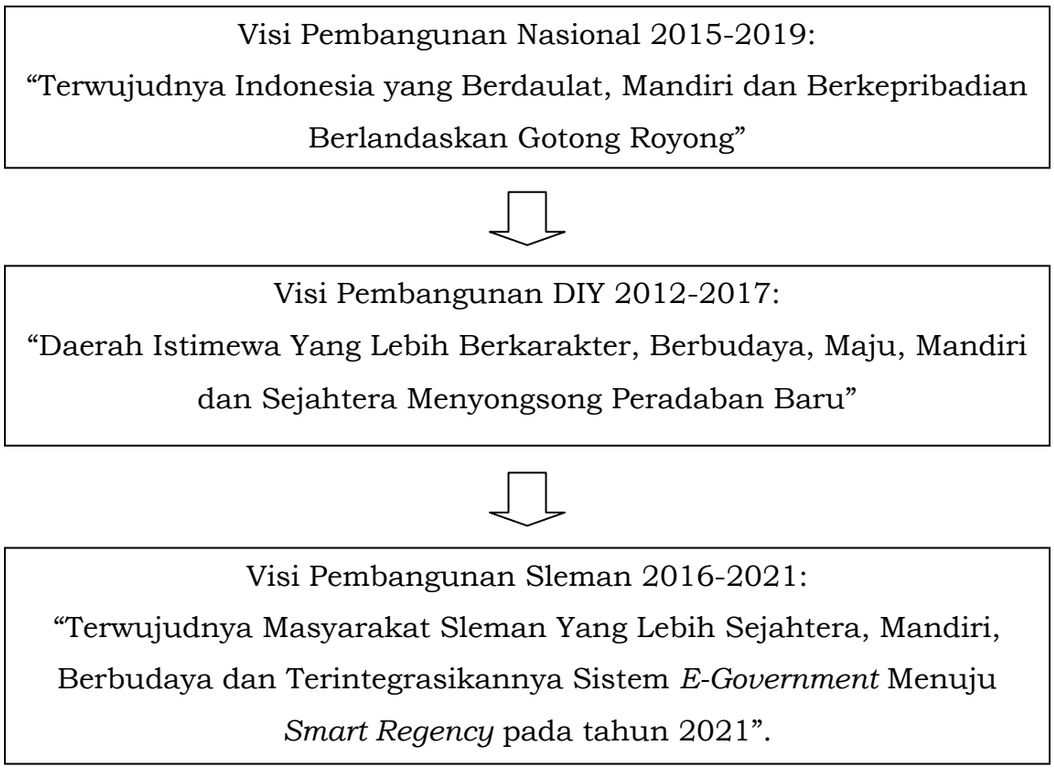
Berbudaya : Suatu keadaan di mana di dalam masyarakat tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan sikap berbudaya masyarakat adalah meningkatnya kenyamanan dan ketertiban, kemampuan mitigasi masyarakat terhadap bencana, penanaman nilai-nilai karakter, meningkatnya kerukunan masyarakat, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya, serta perempuan dan anak yang semakin terlindungi.

Terintegrasikannya Sistem *e-government* : Terintegrasinya sistem e-Govt, bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan yang lebih baik yang merupakan paduan sistem regulasi, kebijakan, sikap dan perilaku, yang didukung dengan teknologi informasi yang modern yang mampu memberikan respon dan efektivitas yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dalam rangka menuju *Smart Regency*,

yaitu suatu kabupaten yang dapat memberikan layanan publik secara tepat, cepat, mudah, murah dan terintegrasi antar unit pemerintah dengan dukungan penggunaan teknologi informasi, untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparasi penyelenggaraan pemerintahan.

Visi Kabupaten Sleman tersebut berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan Visi Pembangunan DIY yang dituangkan dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu "Daerah Istimewa Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru". Keterkaitan Visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 5.1. Keterkaitan visi RPJMN, RPJMD DIY, dan RPJMD Kabupaten Sleman

Visi masyarakat Sleman yang lebih sejahtera selaras dengan visi pembangunan nasional berdaulat dan visi pembangunan DIY sejahtera, dimana pada dasarnya bertujuan meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat. Visi lebih mandiri selaras dengan visi nasional mandiri dan visi DIY mandiri yang berarti dapat memberdayakan potensi lokal dan memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung. Visi lebih berbudaya selaras dengan visi nasional berkepribadian berlandaskan gotong royong dan visi DIY berbudaya, dimana budaya yang ada di masyarakat diharapkan tetap memegang teguh pada kepribadian bangsa yang mengutamakan sifat kegotongroyongan. Visi terintegrasikannya sistem *e-government* adalah merupakan alat untuk menuju masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri dan berbudaya.

5.2. Misi

Misi merupakan penjabarkan dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Sleman selama 5 tahun ke depan adalah:

Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang profesional sehingga bisa menjadi pelayanan masayarakat. Disamping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan

dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju *good governance*.

Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan baik dari sisi tenaga pendidik maupun prasarana, sarana penunjang pendidikan dan peningkatan manajeman pendidikan sesuai standar. Di bidang kesehatan, dengan layanan kesehatan yang sudah terakreditasi diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan tentu saja terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sleman.

Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan lokal, peningkatan infrastruktur dan prasarana perekonomian dan peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Disisi lainnya penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan berbagai program yang bersinergi.

Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan

Misi ini dimaksudkan untuk mengelola infrastruktur khususnya untuk mewujudkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga perlu adanya formulasi penataan ruang yang baik dan penguatan mitigasi bencana agar sinergi antara berbagai aspek dengan daya dukung sumberdaya alam dan

lingkungan yang terbatas, sehingga memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat, produktif, dan nyaman.

Misi 5: Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional

Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat Sleman berkembang dinamis, tetapi tetap tidak meninggalkan dan kehilangan budaya lokal yang luhur dan baik. Disamping itu terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai peran, tetapi juga memperhatikan kesetaraan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Misi RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019, dan RPJMD DIY Tahun 2012-2017, sehingga terdapat hubungan yang kuat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1
Keselarasan Nawacita dengan Misi RPJMN, RPJMD DIY, dan RPJMD Kabupaten Sleman

No	9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) RPJMN 2015-2019	Misi RPJMN	Misi Pembangunan DIY 2012-2017	Misi pembangunan Sleman 2016-2021
1.	Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan		
2.	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
3.		Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim		

No	9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) RPJMN 2015-2019	Misi RPJMN	Misi Pembangunan DIY 2012-2017	Misi pembangunan Sleman 2016-2021
4.	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif	Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan
5.	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
6.	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera	Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan	Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat
7.		Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional		
8.	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional		Memantapkan prasarana dan sarana daerah	Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
			Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif	Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat serta penanggulangan kemiskinan

No	9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) RPJMN 2015-2019	Misi RPJMN	Misi Pembangunan DIY 2012-2017	Misi pembangunan Sleman 2016-2021
9.	Peningkatan kedaulatan pangan		Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif	Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat serta penanggulangan kemiskinan
10.	Melakukan revolusi karakter bangsa	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan	Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan	Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat
9.	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia		Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan	Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional

Selain itu misi dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 tersebut juga mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sleman tahun 2006-2025 dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.2
Keselarasan Misi Pada RPJP Kabupaten Sleman 2006-2025 dengan Misi Pada RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021

MISI RPJPD 2006 - 2025	MISI RPJMD 2016 – 2021
Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Misi 4: Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis	Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat
Misi 2: Meningkatkan kesejahteraan rakyat Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat
Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik Misi 2: Meningkatkan kesejahteraan rakyat	Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan
Misi 2: Meningkatkan kesejahteraan rakyat Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan
Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik Misi 4: Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis	Misi 5: Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan. Berdasarkan visi, misi dan isu-

isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Keterkaitan Misi dan Tujuan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Predikat Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	B	B	B	A

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat	Meningkatkan pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan	IPM= $\sqrt[3]{I1 \times I2 \times I3}$ I_1= kesehatan (harapan hidup) I_2= pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) I_3= pendapatan (pengeluaran pendapatan riil)	%	80,90	80,98	81,05	81,10	81,13	81,15

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat	Indeks Gini	Indeks Gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai indeks Gini berada antara 0 dan 1	Angka absolut 1 dikurangi dengan jumlah total Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas tertentu dikalikan dengan Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai dengan kelas yang dimaksud	Indeks	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan	Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat	Jumlah lembaga tangguh bencana	Lembaga tangguh bencana meliputi desa tangguh bencana dan sekolah siaga bencana	Akumulasi jumlah lembaga tangguh bencana	Desa dan Sekolah	21 dan 36	29 dan 44	37 dan 52	45 dan 60	53 dan 68	61 dan 76
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terbagi dalam tiga kompenen yang terdiri dari Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara, dan Indeks Tutupan Hutan	IKLH_Sleman =(IPA+IPU+ITH)/3 IPA= Indeks Pencemaran Air Sungai IPU= Indeks Pencemaran Udara ITH= Indeks Tutupan Hutan	%	36,82	37	37,5	38	38,5	40

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 5: Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional	Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah desa budaya yang sudah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur DIY	Desa budaya adalah desa yang mempunyai: struktur organisasi/ pengurus, memiliki program dan rencana kegiatan serta memiliki potensi budaya seperti adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang dan warisan budaya	Jumlah desa budaya yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2014	Desa	8	10	12	14	16	18

Misi	Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Indeks Pembangunan Gender	IPG adalah pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan ekonomi (kontribusi pendapatan) dengan mem-perhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.	IPG = 1/3 {(Xede(1) + X ede (2) + I inc-dis)} Xede(1) = Xede untuk harapan hidup X ede (2) = X ede (2) untuk pendidikan I inc-dis = indeks distribusi pendapatan	%	96.15	96.20	96.25	96.30	96.35	96.40

Tabel 5.4

Keterkaitan Misi 1, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman 2016-2021

Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat

TUJUAN	SASARAN									
	NAMA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019	2020	AKHIR RPJMD
Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Predikat LAKIP Kabupaten	Predikat	B+	A	A	A	A	A	A
		Opini BPK terhadap LKD	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	28	30	31	32	33	34	35
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	78.61	78.67	78.74	78.8	78.87	78.9	79.00

Tabel 5.5

Keterkaitan Misi 2, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman 2016-2021

Misi 2: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat

TUJUAN	SASARAN									
	NAMA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019	2020	AKHIR RPJMD
Meningkatkan pembangunan manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia harapan Hidup	Tahun	74.47	74.47	74.48	74.48	74.49	74.49	74.49
	Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	78,17	78,20	78,23	78,26	78,29	78,32	78,35
		Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	%	APK SD/MI≥ 116,81, APK SMP/MTs ≥ 111,70 APK SMA/SMK/MA : 88,69APM SD/MI : 103,20 APM SMP/MTs : 83,96 APM SMA/SMK/MA : 58,95	APK SD/MI ≥ 100, APK SMP/MTs ≥ 100 APK SMA/SMK/MA : 86.45APM SD/MI : ≤100 APM SMP/MTs : 83,97 APM SMA/SMK/MA : 58,96	APK SD/MI ≥ 100, APK SMP/MTs ≥ 100 APM SD/MI : ≤100 APM SMP/MTs : 83,98	APK SD/MI ≥ 100, APK SMP/MTs ≥ 100 APM SD/MI : ≤100 APM SMP/MTs : 83,99	APK SD/MI ≥ 100, APK SMP/MTs ≥ 100 APM SD/MI : ≤100 APM SMP/MTs : 84	APK SD/MI ≥ 100, APK SMP/MTs ≥ 100 APM SD/MI : ≤100 APM SMP/MTs : 84,01	APK SD/MI ≥ 100, APK SMP/MTs ≥ 100 APM SD/MI : ≤100 APM SMP/MTs : 84,50

TUJUAN	SASARAN									
	NAMA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019	2020	AKHIR RPJMD
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,28	10,33	10,36	10,39	10,42	10,45	10,48
		Harapan rata rata lama sekolah	Tahun	15,71	15,71	15,74	15,78	15,81	15,85	15,88
		Nilai rata rata Ujian :								
		SD	Nilai	236,17	236,17	236,18	236,20	236,21	236,21	236,22
		SMP	Nilai	261,65	261,65	261,66	261,68	261,70	261,70	261,71
		SMA	Nilai	335,25	335,25	335,26	335,28	335,28	335,30	335,30
		SMK	Nilai	252,93	252,93	252,94	252,96	252,96	252,97	252,97

Tabel 5.6

Keterkaitan Misi 3, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman 2016-2021

Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan

TUJUAN	SASARAN									
	NAMA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019	2020	AKHIR RPJMD
Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	%	5.35	5.40	5.46	5.50	5.56	5.60	5.65
		Indeks Gini	Indeks	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40
	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian	Lama tinggal wisatawan	Hari	Wisatawan Nusantara: 2,84 wisatawan Mancanegara: 2,60	Wisatawan Nusantara: 2,90 wisatawan Mancanegara: 2,68	Wisatawan Nusantara: 2,92 wisatawan Mancanegara: 2,70	Wisatawan Nusantara: 2,94 wisatawan Mancanegara: 2,72	Wisatawan Nusantara: 2,96 wisatawan Mancanegara: 2,74	Wisata-wan Nusantara: 2,98 wisatawan Mancanegara: 2,76	Wisata-wan Nusantara: 2,98 wisatawan Mancanegara: 2,76
		Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	4.117.000	4.117.000	4.323.000	4.561.000	4.834.000	5.149.000	5.149.000
		Nilai ekspor	US$	41,000,000	42,000,000	42,500,000	43,000,000	43,500,000	44,000,000	45,000,000
		Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	%	2.73	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26
		Nilai tukar petani	nilai	111.54	111.65	111.90	112.10	112.30	112.50	112.70
		Persentase peningkatan nilai produksi industrI	%	2.65	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2

TUJUAN	SASARAN									
	NAMA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019	2020	AKHIR RPJMD
	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	%	6.12	6.00	5.90	5.80	5.60	5.50	5.40
	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian	Persentase prasarana dan sarana perekonomian yang berkualitas	%	63.00	65.99	69.54	71.07	72.59	74.11	76.00
		Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	%	65,18	65,25	65,45	65,65	66,85	66,05	66,25
	Menurunnya kemiskinan	Persentase KK miskin	%	11.36	10.69	10.02	9.35	8.68	8.50	8.00

Tabel 5.7

Keterkaitan Misi 4, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman 2016-2021

Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan Kenyamanan

TUJUAN	SASARAN									
	NAMA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019	2020	AKHIR RPJMD
Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Jumlah lembaga tangguh bencana	Desa	13	21	29	37	45	53	61
			Sekolah	28	36	44	52	60	68	76
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Air Sungai	nilai	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00	46,00	47,00
		Indeks Pencemaran Udara	nilai	38,74	40	41	42	43	44	45
		Indeks Tutupan Hutan	nilai	32,23	32,25	32,26	32,27	32,28	32,29	32,30

Tabel 5.8

Keterkaitan Misi 5, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sleman 2016-2021

Misi 5: Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional

TUJUAN	SASARAN									
	NAMA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019	2020	AKHIR RPJMD
Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	539 (kasus)	1,00	0,98	0,96	0,94	0,92	0,90
	Meningkatnya kerukunan masyarakat	Jumlah Konflik SARA	Kasus	2	≤5	≤5	≤4	≤4	≤3	≤3
	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Persentase Pelestarian warisan budaya	%	23.77	23.80	23.83	23.86	23.89	23.92	23.95

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD DIY Tahun 2012-2017, sehingga terdapat kesesuaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.9
Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
DIY dan Kabupaten Sleman

VISI		MISI		TUJUAN		SASARAN	
DIY	**SLEMAN**	**DIY**	**SLEMAN**	**DIY**	**SLEMAN**	**DIY**	**SLEMAN**
Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru	Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem *E-Government* Menuju *Smart Regency* Pada Tahun 2021	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Misi satu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-govt* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat	Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah	1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah 2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		Membangun peradaban yang berbasis nilai nilai kemanusiaan	Misi dua: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.	1. Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya serta nilai nilai budaya 2. Mewujudkan	Meningkatkan pembangunan manusia	1. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat 2. Melek huruf	1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan

VISI		MISI		TUJUAN		SASARAN	
DIY	**SLEMAN**	**DIY**	**SLEMAN**	**DIY**	**SLEMAN**	**DIY**	**SLEMAN**
			Misi lima: Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional	pengembangan pendidikan yang berkarakter 3. Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat	Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak	masyarakat meningkat 3. Aksesibilitas pendidikan meningkat 4. Daya saing pendidikan meningkat 5. Harapan hidup masyarakat meningkat	1. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak 2. Meningkatnya kerukunan masyarakat 3. Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya
		Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.	Misi tiga: Meningkatkan penguatan system ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat serta penanggulangan kemiskinan	1. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif 2. Mewujudkan peningkatan	Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat	1. Pendapatan masyarakat meningkat 2. Ketimpangan antar wilayah menurun 3. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun 4. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian 3. Meningkatnya kesempatan kerja 4. Meningkatnya prasarana

VISI		MISI		TUJUAN		SASARAN	
DIY	**SLEMAN**	**DIY**	**SLEMAN**	**DIY**	**SLEMAN**	**DIY**	**SLEMAN**
				daya saing pariwisata		mancanegara meningkat 5. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	dan sarana perekonomian 5. Menurunya kemiskinan
		Memantapkan prasarana dan sarana daerah	Misi empat: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang , lingkungan hidup dan kenyamanan	1. Mewujudkan peningkatan pelayanan publik 2. Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat	1. Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi dan akses msyarakat di pedesaan 2. Kualitas lingkungan hidup meningkat 3. Pemanfaatan ruang terkendali	1. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

5.4. Indikator dan Pendekatan Pembangunan

Indikator sasaran dan target capaian kinerja dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan indikator yang direncanakan untuk merealisasikan misi serta khususnya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sleman untuk Mewujudkan Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya Dan Terintegrasikannya Sistem *E-Governance* Menuju *Smart Regency* Pada Tahun 2021.

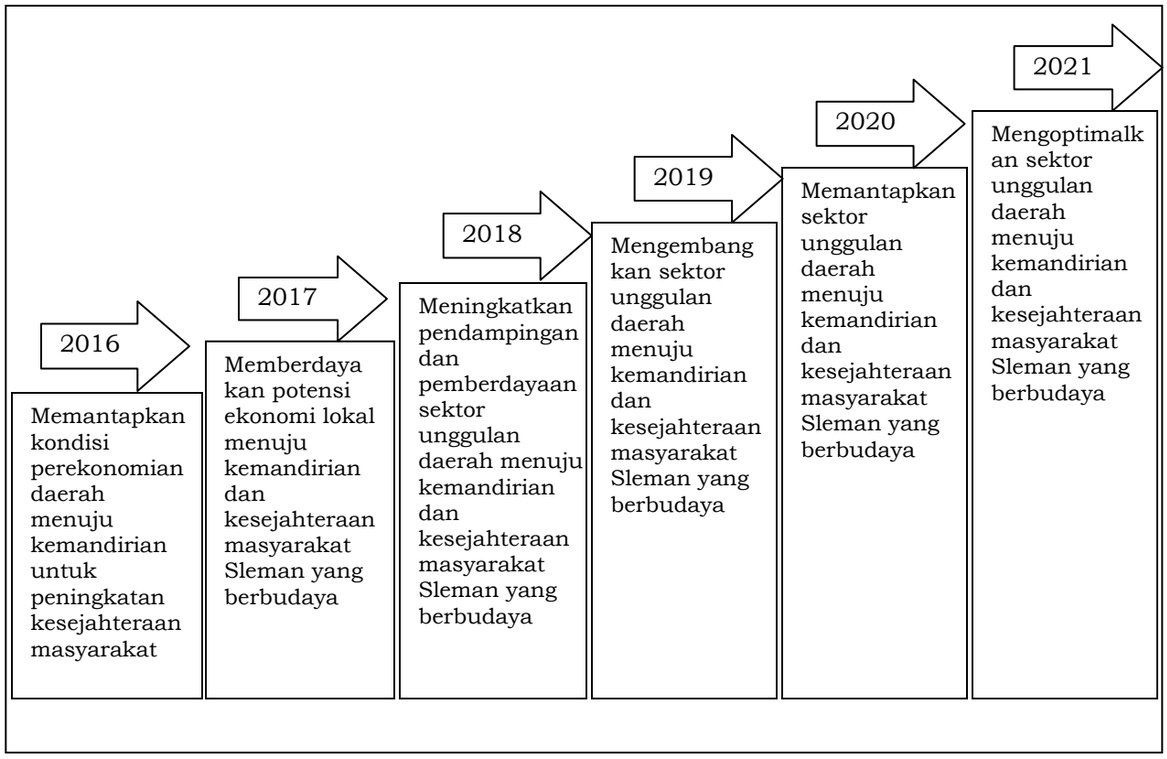
Visi RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 tersebut merupakan Visi yang tidak bisa terlepas atau berdiri sendiri dari Visi Daerah, dan oleh karenanya secara normatif, RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 harus berpedoman kepada arah kebijakan dan sasaran RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025. Dengan demikian, Indikator sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 merupakan indikator yang bersifat strategis, sedangkan indikator yang lebih rendah skalanya berada pada level SKPD yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran untuk mendukung visi "**Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government menuju *smart regency* pada tahun 2021"** maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 dilaksanakan dalam setiap tahun perencanaan dengan arahan prioritas tema tahunan yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6.1. Indikasi prioritas tema perencanaan tahunan Kabupaten Sleman 2016-2021

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Sleman. Dalam rengka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan:

1. Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang sudah terintegrasi.
2. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur yang cukup.
3. Semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pengaturan jarak kelahiran.
4. Prasarana, sarana pendidikan dan kompetensi pendidik yang memadahi serta adanya Jaminan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (JPPD).
5. Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Sleman.
6. Potensi pariwisata yang belum dikelola secara maksimal.
7. Adanya Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi.
8. Adanya potensi pendapatan asli daerah yang masih dapat dimaksimalkan.
9. Tersedianya produk hukum daerah.
10. Prasarana dan sarana kesehatan yang cukup memadahi.
11. Prasarana dan sarana pendidikan yang memadahi.
12. Adanya BOSDA dan Jaminan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (JPPD).
13. Tingkat pendidikan tenaga kerja yang relatif tinggi.
14. Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin meningkat.
15. Penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan yang sudah mencapai 30%.
16. Meningkatnya indeks pembangunan gender.
17. Kesadaran berpolitik masyarakat yang semakin meningkat.

Kelemahan:

1. Angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Masalah Sosial yang masih cukup tinggi.
2. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum terlaporkan.
3. Belum ditetapkan RDTR menjadi produk hukum daerah.
4. Belum optimalnya keberadaan forum keagamaan dan antar etnis.
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi.
6. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya.
7. Belum optimalnya pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan.
8. Belum semua anggota masyarakat tercakup dalam layanan jaminan kesehatan.
9. Perlindungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah yang belum maksimal.
10. Keterampilan tenaga kerja yang belum optimal.
11. Ketersediaan fasilitas penunjang perekonomian yang masih perlu ditingkatkan.
12. Masih adanya kawasan kumuh.
13. Masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Sleman.
14. Nilai kelulusan siswa yang belum optimal.
15. Pelayanan kepada masyarakat masih kurang efektif dan transparan.
16. Penanganan terhadap sampah dan limbah yang belum optimal.
17. Pengelolaan pemerintahan di desa yang belum maksimal.
18. Prasarana dan sarana penanggulangan bencana yang masih terbatas.
19. Tersedianya produk hukum daerah.
20. Masih minimnya minat baca masyarakat.

Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang:

1. Tersedianya pedoman aturan tentang laporan kinerja, penyusunan, perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
2. APK dan APM tingkat satuan pendidikan yang cukup tinggi.
3. Arahan kebijakan nasional mengenai pembangunan infrastruktur.
4. Intervensi pemerintah dengan program 100-0-100.
5. Kebijakan pemerintah pusat mempermudah investasi.

6. Kepedulian sektor swasta dan intervensi program penanganan kemiskinan dari pemerintah yang semakin meningkat.
7. Kewenangan di desa yang semakin banyak.
8. Meningkatnya wisatawan minat khusus dan dukungan dana keistimewaan.
9. Momentum perlindungan anak yang sedang ditingkatkan oleh pemerintah terkait dengan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Peluang penyerapan tenaga kerja antar daerah dan negara.
11. Semakin banyak dan terbukanya akses bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat.
12. Semakin intensifnya program pemerintah terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk.
13. Semakin meluasnya pangsa pasar usaha mikro, kecil dan menengah.
14. Tingkat kunjungan wisatawan yang semakin meningkat.
15. Tuntutan atas pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang semakin tinggi.

Ancaman:

1. Media ekspresi ketidakpuasan terhadap layanan pemerintah yang semakin terbuka.
2. Adanya peraturan perundang undangan di tingkat pusat yang kurang harmonis.
3. Banyaknya pendatang di wilayah perkotaan yang yang berpotensi mengakulturasi budaya setempat dan budaya pendatang.
4. Dampak buruk dari era globalisasi.
5. Ekspansi pemilik modal besar di bidang pasar modern.
6. Kebutuhan penggunaan ruang untuk permukiman yang semakin meningkat.
7. Ketimpangan sosial ekonomi antar suku dan etnis yang semakin tinggi.
8. Ketimpangan sosial ekonomi nasional yang semakin meningkat.
9. Masih adanya anak putus sekolah.
10. Media ekspresi ketidakpuasan terhadap layanan pemerintah yang semakin terbuka.
11. Moratorium pegawai negeri sipil.
12. Penurunan kualitas tanah, air dan udara.
13. Persaingan tenaga kerja asing.

14. Persepsi kesetaraan gender yang belum komprehensif.
15. Potensi kebencanaan di Kabupaten Sleman yang relatif besar.
16. Proyeksi kenaikan alokasi dana bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah dan propinsi yang tidak signifikan.
17. Semakin beragamnya etnis dan suku yang ada di Kabupaten Sleman.
18. Semakin meningkatnya penyakit degeneratif, masih adanya angka kematian ibu dan bayi serta balita gizi buruk.
19. Serbuan barang dan tenaga kerja asing sebagai akibat kebijakan MEA.
20. Tingkat kepatuhan terhadap perda yang masih kurang.

Selanjutnya penentuan strategi disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang, memadukan kelemahan dengan peluang, memadukan kekuatan dengan ancaman, dan memadukan kelemahan dengan ancaman. Dengan demikian diperoleh berbagai strategi yang merupakan hasil dari perpaduan antara unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strategi perpaduan analisis lingkungan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Strategi Antara Kekuatan Dan Peluang

KEKUATAN		PELUANG		STRATEGI	
1.	Sistem informasi manajemen pemerintahan yang sudah terintegrasi.	1.	Tersedianya pedoman aturan tentang laporan kinerja, penyusunan, perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.	1.	Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
2.	Tingkat pendidikan sumber daya aparatur yang cukup.	2.	Tuntutan atas pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang semakin tinggi.	2.	Meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan standar kompetensi.
3.	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang sudah terintegrasi.	3.	Tuntutan atas pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang semakin tinggi.	3.	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses desiminasi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4.	Semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pengaturan jarak kelahiran.	4.	Semakin intensifnya program pemerintah terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk,	4.	Mengendalikan pertumbuhan penduduk.
5.	Prasarana, sarana pendidikan dan kompetensi pendidik yang memadahi serta adanya Jaminan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (JPPD).	5.	APK dan APM tingkat satuan pendidikan yang cukup tinggi.	5.	Meningkatkan nilai kelulusan siswa.
6.	Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Sleman.	6.	Semakin meluasnya pangsa pasar usaha mikro, kecil dan menengah.	6. 7.	Mengembangnya Koperasi. Meningkatkan nilai eksport.
7.	Potensi pariwisata yang belum dikelola secara maksimal	7.	Tingkat kunjungan wisatawan yang semakin meningkat.	8. 9.	Meningkatkan pariwisata berkelanjutan. Meningkatkan diversifikasi produk sektor parwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian.
8.	Kesadaran berpolitik warga masyarakat yang semakin meningkat	8.	Semakin banyak dan terbukanya akses bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat.	10.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi.

Tabel 6.2
Strategi Antara Kelemahan Dan Peluang

KELEMAHAN		PELUANG		STRATEGI	
1.	Pengelolaan pemerintahan di desa yang belum maksimal.	1.	Kewenangan di desa yang semakin banyak.	1.	Penguatan kelembagaan desa.
2.	Pelayanan kepada masyarakat masih kurang efektif dan transparan.	2.	Tuntutan atas pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang semakin tinggi.	2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3.	Nilai kelulusan siswa yang belum optimal.	3.	APK dan APM tingkat satuan pendidikan yang cukup tinggi.	3.	Meningkatkan nilai kelulusan siswa
4.	Belum optimalnya pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan.	4.	Kebijakan pemerintah pusat mempermudah investasi.	4.	Meningkatkan peluang investasi daerah.
5.	Masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Sleman	5.	Peluang penyerapan tenaga kerja antar daerah dan negara	5.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja.
6.	Ketersediaan fasilitas penunjang perekonomian yang masih perlu ditingkatkan.	6.	Arahan kebijakan nasional mengenai pembangunan infrastruktur.	6.	Mengembangkan fasilitas perhubungan.
7.	Angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Masalah Sosial yang masih cukup tinggi.	7.	Kepedulian sektor swasta dan intervensi program penanganan kemiskinan dari pemerintah yang semakin meningkat.	7.	Meningkatkan penanganan kemiskinan.
8.	Masih adanya kawasan kumuh	8.	Intervensi pemerintah dengan program 100-0-100	8.	Meningkatkan pengelolaan kawasan kumuh.
9.	Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum terlaporkan.	9.	Momentum perlindungan anak yang sedang ditingkatkan oleh pemerintah terkait dengan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	9.	Meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
10.	Belum optimalnya pelestarian cagar budaya.	10.	Meningkatnya wisatawan minat khusus dan dukungan dana keistimewaan	10.	Meningkatkan pelestarian terhadap cagar budaya.

Tabel 6.3

Strategi Antara Kekuatan Dan Ancaman

KEKUATAN		ANCAMAN		STRATEGI	
1.	Adanya Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi.	1.	Media ekspresi ketidakpuasan terhadap layanan pemerintah yang semakin terbuka.	1.	Pendampingan pelaksanaan *Road Map* Reformsi Birokrasi.
2.	Adanya potensi pendapatan asli daerah yang masih dapat dimaksimalkan.	2.	Proyeksi kenaikan alokasi dana bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah dan propinsi yang tidak signifikan	2.	Meningkatkan pendapatan asli daerah
3.	Tingkat pendidikan sumber daya aparatur yang cukup.	3.	Moratorium pegawai negeri sipil.	3.	Meningkatkan kualitas pejabat sesuaidengan standar kompetensi.
4.	Tersedianya produk hukum daerah.	4.	Adanya peraturan perundang undangan di tingkat pusat yang kurang harmonis.	4.	Sinkronisasi produk hokum pusat dan daerah.
5.	Prasarana dan sarana kesehatan yang cukup memadahi.	5.	Semakin meningkatnya penyakit degeneratif, masih adanya angka kematian ibu dan bayi serta balita gizi buruk.	5.	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
6. 7.	Prasarana dan sarana pendidikan yang memadahi. Adanya BOSDA dan Jaminan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (JPPD)	6.	Masih adanya anak putus sekolah.	6.	Memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan pendidikan.
8.	Tingkat pendidikan tenaga kerja yang relatif tinggi.	7.	Persaingan tenaga kerja asing.	7.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja.
9.	Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin meningkat.	8.	Potensi kebencanaan di Kabupaten Sleman yang relatif besar.	8.	Meningkatkan penanganan bencana melalui pemberdayaan masyarakat dan penyediaan prasarana dan sarana menuju kemandirian.
10.	Penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan yang sudah mencapai 30%	9.	Kebutuhan penggunaan ruang untuk permukiman yang semakin meningkat.	9.	Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau.
11.	Meningkatnya indeks pembangunan gender.	10.	Persepsi kesetaraan gender yang belum komprehensif.	10.	Mempercepat pengarusutamaan gender.
12.	Kesadaran berpolitik	11.	Ketimpangan sosial ekonomi antar suku	12.	Meningkatkan pemahaman masyarakat

KEKUATAN		ANCAMAN		STRATEGI	
	masyarakat yang semakin meningkat.		dan etnis yang semakin tinggi.		dalam wawasan kebangsaan.

Tabel 6.4
Strategi Antara Kelemahan Dan Ancaman

KELEMAHAN		ANCAMAN		STRATEGI	
1.	Pengelolaan pemerintahan di desa yang belum maksimal.	1.	Media ekspresi ketidakpuasan terhadap layanan pemerintah yang semakin terbuka.	1.	Meningkatkan Pengawasan Pemerintahan Desa.
2.	Tersedianya produk hukum daerah.	2.	Tingkat kepatuhan terhadap perda yang masih kurang.	2.	Mengoptimalkan tindak lanjut pelanggaran perda.
3.	Belum semua anggota masyarakat tercakup dalam layanan jaminan kesehatan.	3.	Semakin meningkatnya penyakit degeneratif, masih adanya angka kematian ibu dan bayi serta balita gizi buruk.	3.	Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan masyarakat.
4.	Masih minimnya minat baca masyarakat.	4.	Dampak buruk dari era globalisasi.	4.	Mengembangkan budaya baca.
5.	Perlindungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah yang belum maksimal.	5.	Serbuan barang dan tenaga kerja asing sebagai akibat kebijakan MEA.	5.	Meningkatkan perlindungan terhadap pelaku usaha dan UMKM
		6.	Ekspansi pemilik modal besar di bidang pasar modern.	6.	Meningkatkan infrastruktur perekonomian.
6. 7.	Masih tingginya pengangguran di Kabupaten Sleman. Keterampilan tenaga kerja yang belum optimal.	7.	Serbuan barang dan tenaga kerja asing sebagai akibat kebijakan MEA.	6.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja.
8.	Angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Masalah Sosial yang masih cukup tinggi.	7.	Ketimpangan sosial ekonomi nasional yang semakin meningkat.	7.	Meningkatkan penanganan kemiskinan.
9.	Prasarana dan sarana penanggulangan bencana yang masih terbatas.	8.	Potensi kebencanaan di Sleman yang relatif besar.	8.	Meningkatkan penanganan bencana melalui pemberdayaan masyarakat dan penyediaan prasarana dan sarana menuju kemandirian.
10.	Penanganan	9.	Penurunan kualitas	9.	Melaksanakan

KELEMAHAN		ANCAMAN		STRATEGI	
	terhadap sampah dan limbah yang belum optimal,		tanah, air dan udara		percepatan pengelolan air minum, air limbah, persampahan dan lingkungan hidup.
11.	Belum ditetapkan RDTR menjadi produk hukum daerah	10.	Kebutuhan penggunaan ruang untuk permukiman yang semakin meningkat.	10.	Meningkatkan pengelolaan tata ruang
12.	Belum optimalnya keberadaan forum keagamaan dan antar etnis.	11.	Semakin beragamnya etnis dan suku yang ada di Kabupaten Sleman	12.	Meminimalkan konflik SARA dan konflik Ipoleksosbudhankam.
13	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi.	12.	Banyaknya pendatang di wilayah perkotaan yang yang berpotensi mengakulturasi budaya setempat dan budaya pendatang.	13.	Meningkatkan pelestarian terhadap tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya.

Strategi dan arah kebijakan dituangkan secara lebih rinci yang dibagi ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 5 berdasarkan pendekatan urusan sebagai berikut :

Misi 1:Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat

1) Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan: Strategi pertama,melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dengan **arah kebijakan**melakukan pendampingan intensif terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pebangunan daerah.**Strategi kedua**: Pendampingan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi dengan **arah kebijakan** perwujudan nilai LAKIP A, perwujudan opini BPK terhadap LKD:WTP. **Strategi ketiga**: Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan **arah kebijakan** penetapan deviasi target PAD dengan realisasi. **Strategi keempat:** Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan **arah kebijakan** peningkatan indeks kepuasan masyarakat. **Strategi kelima:**meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan standar kompetensi dengan**arah kebijakan**memetakan kompetensi pejabat dan melakukan intervensi sesuai dengan standar kompetensi seharusnya. **Strategi keenam** adalah sinkronisasi produk hukum pusat dan daerah dengan **arah**

kebijakan penyelarasan perda yang ditetapkan agar sesuai dengan amanat peraturan diatasnya.

2) **Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa: Strategi**, Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dengan **arah kebijakan** peningkatan pengelolaan keuangan desa.
3) **Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat: Strategi,** Mengoptimalkan tindak lanjut pelanggaran Perda dengan **arah kebijakan**penanganan setiap pelanggaran Perda.
4) **Urusan Komunikasi dan Informatika:Strategi,** meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses dan desiminasi pembangunan serta pelayanankepada masyarakat dengan **arah kebijakan** Penggunaan surat elektronik, sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan pengaktifan sub domain di setiap lembaga pemerintah daerah.

Tabel 6.5
Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 1

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah	Melakukan pendampingan intensif terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
		Pendampingan pelaksanaan Roadmap reformasi birokrasi	Pewujudan Nilai LAKIP Kabupaten: A
			Pewujudan Opini BPK terhadap LKD: WTP
		Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Peningkatan pengelolaan keuangan desa
2.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan Pendapatan asli Daerah	Pengurangan deviasi Target PAD dan realisasi
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat
		Meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan standar kompetensi	Memetakan kompetensi pejabat dan melakukan intervensi sesuai dengan standar kompetensi seharusnya

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Sinkronisasi produk hukum pusat dan daerah	Penyelarasan perda yang ditetapkan agar sesuai dengan amanat peraturan di atasnya
		Mengoptimalkan tindak lanjut pelanggaran perda	Penanganan setiap pelanggaran perda
		Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses dan desiminasi pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat	Penggunaan surat elektronik, sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan pengaktifan sub domain di setiap lembaga pemerintah daerah

Misi 2:Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat

1) **Urusan kesehatan: Strategi**, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan **arah kebijakan** peningkatan cakupan jaminan kesehatan, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, penerapan pola hidup bersih dan sehat, akreditasi puskesmas dan RSUD serta pengendalian penyakit.
2) **Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana: Strategi**, mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan **arah kebijakan**menekan *Total Fertility Rate (TFR)***,**peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri dan peningkatan keluarga sejahtera.
3) **Urusan Pendidikan: Strategi kesatu**, memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan pendidikan dengan **arah kebijakan** peningkatan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah, menaikkan angka harapan sekolah dan menaikkan rata-rata lama sekolah. **Strategi kedua**: Meningkatkan kualitas kelulusan siswa dengan **arah kebijakan** menaikkan rara-rata nilai ujian SD/MI, SMP/MTs, SMA/MI, dan SMK.
4) **Urusan Perpustakaan: Strategi,** mengembangkanbudaya gemar membaca dengan **arah kebijakan** meningkatkan minat baca masyarakat, dan pengembangan dan pembinaan perpustakaan desa dan masyarakat.

Tabel 6.6
Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 2

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan cakupan Jaminan Kesehatan
			Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
			Penerapan pola hidup bersih dan sehat
			Akreditasi RSUD dan puskesmas
			Pengendalian penyakit
		Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Menekan *angka Total Fertility Rate* (TFR)
			Peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri
			Peningkatan keluarga sejahtera
2.	Meningkatknya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan pendidikannya	Peningkatan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah
			Menaikkan angka harapan sekolah
			Menaikkan rata-rata lama sekolah
		Meningkatkan kualitas kelulusan siswa	Menaikkan rata-rata nilai ujian SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
		Mengembangkan budaya gemar membaca	Meningkatkan minat baca masyarakat
			Pengembangan dan pembinaan perpustakaan desa dan masyarakat

Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan

1) **Urusan penanaman modal: Strategi kesatu**, Meningkatkan peluang investasi daerah dengan **arah kebijakan** meningkatkan investasi inklusif.

2) **Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah : Strategi kesatu**, Mengembangkan koperasi dengan **arah kebijakan** meningkatkan keaktifan koperasi. **Strategi kedua,** Meningkatkan perlindungan terhadap pelaku usaha dan UMKM dengan **arah kebijakan** pembinaan terhadap pelaku usaha dan UMKM serta meningkatkan aksesibilitas UMKM.
3) **Urusan pariwisata : Strategi kesatu,** meningkatkan pariwisata berkelanjutan dengan **arah kebijakan** meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata. **Strategi kedua,** Meningkatkan diversifikasi produk sektor pariwisata dengan **arah kebijakan** meningkatkan kuantitas dan kualitas sektor pariwista.
4) **Urusan perdagangan: Strategikesatu**, meningkatkan nilai ekspor dengan **arah kebijakan** memperluas pasar tujuan ekspor. **Strategikedua**, meningkatkan diversifikasi produk sektor perdagangan dengan **arah kebijakan** meningkatkan standarisasi dan sertifikasi produk sektor perdagangan.
5) **Urusan perindustrian: Strategi,** meningkatkan diversifikasi produk sektor perindustrian dengan arah kebijakan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi produk sektor perindustrian.
6) **Uusan pangan, urusan pertanian, dan urusan perikanan dan kelautan:**meningkatkan diversifikasi produk sektor pangan, pertanian dan perikanan dengan arah kebijakan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi produk sektor pangan, pertanian dan perikanan.
7) **Urusan Sosial:.Strategi**, peningkatan penanganan kemiskinan dengan **arah kebijakan** menurunkan angka kemiskinan,
8) **Urusan tenaga kerja: Strategi**, peningkatan kualitas kerja dengan **arah kebijakan** peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar.
9) **Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang: Strategi**, Pengembangan infrastruktur perekonomian dengan **arah kebijakan** pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perekonomian.
10) **Urusan perhubungan:Strategi,** mengembangkan fasilitas perhubungan, dengan **arah kebijakan** menyediakan prasarana dan sarana lalu lintas berdasar rencana pengembangan wilayah

Tabel 6.7
Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 3

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan peluang investasi daerah	Meningkatkan investasi inklusif
		Mengembangkan koperasi	Meningkatkan keaktifan koperasi
		Meningkatkan perlindungan terhadap pelaku usaha dan UMKM	Pembinaan terhadap pelaku usaha dan UMKM
			Meningkatkan aksessibilitas UMKM
2.	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian	Meningkatkan pariwisata berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata
		Meningkatkan Nilai ekspor	Memperluas pasar tujuan ekspor
		Meningkatkan diversifikasi produk sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian
			Meningkatkan standarisasi dan sertifikasi produk sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian
3	Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar
4.	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian	Meningkatkaninsfrastruktur perekonomian	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perekonomian
		Mengembangkan fasilitas perhubungan	Menyediakan prasarana dan sarana perhubungan berdasarkan rencana pengembangan wilayah
5.	Menurunnya kemiskinan	Meningkatkanpenanganan kemiskinan	Menurunkan angka kemiskinan

Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan

1) **Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat: Strategi,** meningkatkan penanganan bencana melalui pemberdayaan masyarakat dan menyediakan sarpras menuju kemandirian dengan **arah kebijakan** menyediakan regulasi, sarana prasarana kebencanaan, memenuhi waktu tanggap dan perbaikan akibat bencana.
2) **Urusan lingkungan hidup: Strategi kesatu,** Melaksanakan percepatan pengelolaan air minum, air limbah, persampahan dan lingkungan hidup dengan **arah kebijakan** menyediakan IPAL komunal, sambungan air minum, tempat pembuangan sampah dan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. **Strategi kedua**, Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau dengan**arah kebijakan** menyediakan ruang terbuka hijau. **Strategi ketiga**, meningkatkan pengelolaan kawasan kumuh dengan **arah kebijakan** penanganan terhadap kawasan kumuh.
3) **Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang: Strategi**, Meningkatkan pengelolaan tata ruang dengan **arah kebijakan** pengendalian pemanfaatan ruang dan pengadaan regulasi tata ruang (RDTR).

Tabel 6.8
Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 4

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Meningkatkan penanganan bencana melalui pemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarana prasaranamenuju kemandirian	Menyediakan regulasi, sarana prasarana kebencanaan, memenuhi waktu tanggap dan perbaikan akibat bencana
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Melaksanakan percepatan pengelolaan air minum, air limbah, persampahan dan lingkungan hidup	Menyediakan IPAL komunal, Sambungan air minum, TPS
			Menurunkan Indeks pencemaranair dan udara
		Meningkatkan ketersedian Ruang Terbuka Hijau	Menyediakan ruang terbuka hijau

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan pengelolaan kawasan kumuh	Penanganan terhadap kawasan kumuh
		Meningkatkan pengelolaan tata ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang
			Regulasi tata ruang (RDTR)

Misi 5:Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional

1) **Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: Strategi kesatu,**meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan **arah kebijakan** meningkatkan respon terhadap pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan. **Strategi kedua**, Mempercepat pengarusutamaan gender dengan **arah kebijakan** Penguatan kelembagaan PUG.
2) **Urusan pemerintahan umum: Strategi kesatu,** meningkatkan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi dengan **arah kebijakan** meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. **Strategi kedua,** meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan dengan **arah kebijakan** sosialisasi wawasan kebangsaandan sosialisasi kesadaran berpolitik kepada masyarakat. **Strategi ketiga**, meminimalkan konflik SARA dan konflik ipoleksosbudhankam dengan **arah kebijakan**memberdayakan FKUB dalam menekan konflik SARA dan konflik ipoleksosbudhankam.
3) **Urusan kebudayaan: Strategi**, Meningkatkanpelestarian terhadap cagar budaya dengan **arah kebijakan** pengelolaan warisan budaya. **Strategi kedua,** Meningkatkan pelestarian terhadap nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya dengan **arah kebijakan**pengelolaan nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya.

Tabel 6.9
Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 5

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.	Meningkatkan respon terhadap pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan.
		Mempercepat pengarusutamaan gender	Penguatan kelembagaan PUG
2	Meningkatnya kerukunan masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu
		Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan	Sosialisasi wawasan kebangsaan
			Sosialisasi kesadaran berpolitikkepada warga masyarakat
		Meminimalkan konflik SARA dan konflik ipoleksosbudhankam	Memberdayakan FKUB dalam menekan konflik SARA dan konflik ipoleksosbudhankam
3	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Meningkatkanpelestarian terhadap cagar budaya	Pengelolaan warisan budaya
		Meningkatkan pelestarian terhadap nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya	Pengelolaan nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya

6.2 Pengembangan Wilayah Terpadu Jangka Menengah Kabupaten Sleman

Strategi Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah (PWT-JM) Kabupaten Sleman merupakan pengembangan tematis kawasan strategis seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Panjang Kabupaten Sleman dengan memperhatikan kondisi dan potensi kawasan strategis terpilih baik Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten.

Kebijakan yang diambil dalam pembangunan wilayah terpadu mendasarkan kepada kebijakan penataan ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Sleman 2011-2031 meliputi:

1. Pengintegrasian dan pengembangan pusat kegiatan di luar kawasan bencana;
2. Pengembangan kawasan dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan;
3. Pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi;
4. Pengembangan kawasan pendidikan;
5. Pengembangan industri menengah, kecil dan mikro yang ramah lingkungan;
6. Pengembangan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan;
7. Pemantapan prasarana wilayah; dan
8. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara

Pengintegrasian dan pengembangan pusat kegiatan di luar kawasan bencana ditempuh melalui strategi (a) mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang terintegrasi dengan sistem prasarana dan sarana di dalam KPY; (b) meningkatkan hubungan PPL dengan PKW, PPK dan atau PKL; (c) menjaga keterkaitan antara kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan; dan (d). mengembangkan PPL di luar Kawasan Rawan Bencana (KRB) Merapi III.

Arah kebijakan yang ditempuh meliputi: (a) Pengembangan PKN di 14 Desa di 6 Kecamatan dengan luas 9.835 hektar; (b) Pengembangan dan pemantapan PKW di Kecamatan Sleman dengan luas 504 hektar;(c)Pengembangan PKL di 4 Kecamatan dengan luas 1.548

hektar;(d) Pengembangan PPK di 11 Kecamatan dengan luas 6.404 hektar;

(e) Pemindahan PPK di Kecamatan Cangkringan; (f) Pengembangan PPL di kawasan perdesaan Kabupaten Sleman; (g) Pemindahan PPL di Kecamatan Cangkringan meliputi 2 Desa.

Pengembangan kawasan dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan diwujudkan melalui strategi (a) mengendalikan alih fungsi lahan pertanian; dan (b) mengembangkan agrobisnis dan minapolitan.

Arah kebijakan yang ditempuh meliputi: peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB), peningkatan produksi hortikultura, peningkatan produksi perkebunan, peningkatan produksi peternakan, pengembangan kawasan agropolitan, kawasan Peruntukan Perikanan, peningkatan produksi perikanan darat dan pengembangan Minapolitan.

Pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi diwujudkan melalui strategi mengembangkan obyek dan daya tarik wisata, mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata, dan melestarikan situs warisan budaya. Arah kebijakan yang diambil didalam mewujudkan pengembangaan kawasan pariwisata terintegrasi adalah pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata yang meliputi pengembangan obyek dan daya tarik wisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan prasarana dan sarana pariwisata.

Pengembangan kegiatan pendidikan terutama pendidikan tinggi merupakan aktivitas utama yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Sleman, selain kegiatan permukiman, pariwisata dan pertanian. Pengembangan kawasan pendidikan diwujudkan melalui strategi:

a. revitalisasi pendidikan; dan
b. mengembangkan prasarana dan sarana pendidikan.

Pengembangan industri menengah, kecil dan mikro yang ramah lingkungan diwujudkan melalui strategi mengembangkan kawasan peruntukan industri, mengembangkan sentra industri kecil dan menengah danmengembangkan industri ramah lingkungan. Arah kebijakan yang ditempuh adalah pengembangan Kawasan peruntukan industri yang mencakup pengembangan industri kecil dan menengah, penataan struktur industri dan pengembangan sentra-sentra industri potensial.

Pengembangan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan ditempuh melalui strategi mengembangkan kawasan permukiman di luar KRB, mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) danmengembangkan prasarana dan sarana dasar permukiman yang berwawasan lingkungan. Arah kebijakan yang ditempuh adalah pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman yang berupa:

a. Pengembangan permukiman perkotaan di Kabupaten Sleman dengan luas 12.590 hektar.
b. Pengembangan permukiman perdesaan di Kabupaten Sleman dengan luas 10.733 hektar.
c. Pengembangan huntara dan huntap.

Pemantapan prasarana wilayah diwujudkan melalui strategi memelihara dan mempertahankan fungsi prasarana wilayah dan mengembangkan prasarana transportasi massal.Arah kebijakan yang diambil ialah pengembanganSistem Jaringan Transportasi Darat, Sistem Jaringan Perkeretaapian, Sistem Jaringan Transportasi Udara, Sistem Jaringan Energi, Sistem Jaringan Telekomunikasi, Sistem Jaringan Sumber Daya Air dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan hidup.

Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara diwujudkan melalui strategi:

a. mendukung penetapan Kawasan Strategi Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan; dan
d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Strategi tersebut selanjutnya diwujudkan melalui arah kebijakan pengendalian perubahan peruntukan ruang disekitar kawasan pertahanan dan keamanan, di Gamping, Depok, dan Berbah dengan luas 472 hektar.

Wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi tiga skala kawasan strategis, ialah Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis

Provinsi (KSK) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). KSN meliputi KSN Candi Prambanan dan KSN Taman Nasional Gunung Merapi. KSP meliputi KSP Kawasan Perkotaan Yogyakarta, KSP Koridor Tempel-Prambanan, KSP Koridor Tempel – Parangtritis, KSP Koridor Yogyakarta –Piyungan – Wonosari – Rongkop – Sadeng, KSP Teknologi Tinggi Gunung Merapi, KSP Cagar Budaya, KSP IKK Godean, KSP IKK Pakem, KSK Keamanan dan Ketahanan Pangan Wilayah dan KSK Kawasan Resapan Air.

Guna melaksanakan Pembangunan Wilayah Terpadu, kemudian dari kawasan-kawasan strategis tersebut, diturunkan menjadi 21 (duapuluh satu) Kawasan Pengembangan Wilayah Terpadu Jangka Menengah Kabupaten Sleman. Kedua puluh satu kawasan beserta skala prioritas pengembangannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.10
Prioritas Kawasan PWT Jangka Menengah Kabupaten Sleman

No	Kawasan PWTJM	Kaitan Kawasan Strategis	Prioritas
1.	Kawasan Ketahanan Pangan	KSK	1
2.	Kawasan Pertanian Koridor Selokan Mataram dan Van der Wijck	KSK	2
3.	Kawasan Perkebunan Salak Pondoh	KSK	3
4.	Kawasan Transisi Resapan Air	KSK	4
5.	Kawasan Pertanian Organik dan Mina Padi	KSK	5
6.	Kawasan Penyangga Prambanan Ratu Boko-Kalasan	KSN	6
7.	Wisata Gunungapi Merapi	KSN	7
8.	Koridor Tempel-Sleman-Mlati	KSP	8
9.	KPY Wilayah Sleman	KSP	9
10.	Koridor Godean – Gamping – Mlati – Kalasan –Prambanan	KSP	10
11.	Koridor Berbah	KSP	11
12.	Perkotaan PKL Godean	KSP	12
13.	Kawasan Resapan Air	KSK	13
14.	Kawasan Candi dan Artefak	KSP	14
15.	Super blok Depok	KSP	15
16.	Perkotaan PKL Pakem	KSP	16
17.	Kawasan Olah raga dan RTH Maguwo	KSP	17
18.	KRB Gunung Merapi	KSN	18
19.	Kawasan Dry port Patukan	KSP	19

No	Kawasan PWTJM	Kaitan Kawasan Strategis	Prioritas
20.	Riset Merapi	KSP	20
21.	Pertanian Perkotaan	KSK	21

Sumber: PWTJM Kabupaten Sleman,2015

Tabel 6.11
Tahap Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Terpadu
Jangka Menengah Kabupaten Sleman
berdasarkan Prioritas per Kawasan Strategis

No.	Kawasan Strategis	Tahun Pelaksanaan				
		1	2	3	4	5
Kawasan Strategis Nasional						
1	Kawasan Penyangga Prambanan Ratu Boko Kalasan					
2	Wisata Gunungapi Merapi					
3	Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi					
Kawasan Strategis Provinsi						
1	Koridor Tempel-Sleman-Mlati					
2	KPY Wilayah Sleman					
3	Koridor Godean – Gamping – Mlati – Kalasan –Prambanan					
4	Koridor Berbah					
5	Perkotaan PKL Godean					
6	Kawasan Candi dan Artefak					
7	Super blok Depok					
8	Perkotaan PKL Pakem					
9	Kawasan Olah raga dan RTH Maguwo					
10	Kawasan Dry port Patukan					
11	Riset Merapi					
Kawasan Strategis Kabupaten						
1	Kawasan Ketahanan Pangan					
2	Kawasan Pertanian Koridor Selokan Mataram dan Van der Wijck					
3	Kawasan Perkebunan Salak Pondoh					

No.	Kawasan Strategis	Tahun Pelaksanaan				
		1	2	3	4	5
4	Kawasan Transisi Resapan Air					
5	Kawasan Pertanian Organik dan Mina Padi					
6	Kawasan Resapan Air					
7	Pertanian Perkotaan					

Sumber: PWTJM Kab. Sleman, 2015

Tabel 6.12
Lokasi Kawasan Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah Kabupaten Sleman

No	Kawasan PWTJM	Lokasi
1.	Kawasan Ketahanan Pangan	Moyudan – Minggir – Godean- Seyegan
2.	Kawasan Pertanian Koridor Selokan Mataram dan Van der Wijck	Moyudan – Minggir – Godean- Seyegan – Gamping- Mlati – Depok – Kalasan – Berbah
3.	Kawasan Perkebunan Salak Pondoh	Tempel – Turi – Pakem
4.	Kawasan Transisi Resapan Air	Tempel-Turi- Pakem-Ngaglik- Ngemplak-Kalasan
5.	Kawasan Pertanian Organik dan Mina Padi	Berbah-Kalasan-Prambanan- Ngemplak
6.	Kawasan Penyangga Prambanan Ratu Boko-Kalasan	Prambanan, Kalasan, Berbah
7.	Wisata Gunungapi Merapi	Cangkringan, Pakem, Turi, Tempel
8.	Koridor Tempel-Sleman-Mlati	Koridor Tempel- Sleman – Mlati
9.	KPY Wilayah Sleman	Depok, Ngaglik, Mlati, Gamping, Godean
10.	Koridor Godean – Gamping – Mlati – Kalasan –Prambanan	Koridor Godean – Gamping – Mlati – Kalasan –Prambanan
11.	Koridor Berbah	Berbah
12.	Perkotaan PKL Godean	Godean
13.	Kawasan Resapan Air	Tempel-Turi- Pakem
14.	Kawasan Candi dan Artefak	Kawasan UII-Ngemplak-Kalasan-Candisari-Sambisari- Kedulan Kompleks
15.	Super blok Depok	Caturtunggal-Depok
16.	Perkotaan PKL Pakem	Pakem
17.	Kawasan Olah raga dan RTH Maguwo	Stadion Maguwoharjo-Embung Tambakboyo, Kalikuning dan sekitarnya
18.	KRB Gunung Merapi	Cangkringan, Pakem, Ngemplak, Turi
19.	Kawasan Dry port Patukan	Stasiun Patukan-Gamping
20.	Riset Merapi	Disaster Oasis-Pakem-

No	Kawasan PWTJM	Lokasi
		Museum Merapi – Pakem
21.	Pertanian Perkotaan	Gamping – Mlati – Depok

Sumber: PWTJM Kabupaten Sleman, 2015

Adapun Sinergi Pengembangan Wilayah Terpadu Jangka Menengah dengan prioritas pengembangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota yang berbatasan adalah bahwaStrategi Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah (PWT-JM) Kabupaten Sleman merupakan penjabaran kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman dengan memperhatikan kondisi dan potensi kawasan yang yang ada pada Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan StrategisKabupaten. Untuk mendukung pengembangan kawasan strategis yang terletak di Kabupaten Sleman, ditetapkan tematik pengembangan kawasan dalam Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah Kabupaten Sleman sebagai berikut:

Tabel 6.13
Tematik Pengembangan Kawasan Dalam Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah Kabupaten Sleman

No.	Nama Kawasan	Fungsi Kawasan	Prioritas Spesifik Bagi Kab. Sleman	Tematik Pengembangan PWT-JM Kab. Sleman
Kawasan Strategis Nasional (RTRW Nasional)				
1	KSN Candi Prambanan	Cagar Budaya	1. Pengembangan ekonomi sosial budaya bagi wilayah Sleman, khususnya kawasan dan masyarakat di sekitar KSN Candi Prambanan. 2. Menjadikan Candi Prambanan dan Ratu Boko sebagai branding budaya Kabupaten Sleman	KawasanPenyangga Prambanan RatuBoko
2	KSN TNGM	Cagar Alam dan Kawasan Bencana Gunungapi	1. Konservasi kawasan lindung dan rawan bencana; 2. Mewujudkan tata kelola pengembangan wilayah lereng Gunung Merapi yang tanggap bencana. 3. Pengembangan pariwisata alam dan minat khusus	1. Kawasan Wisata Gunungapi Merapi 2. KRB Gunung Merapi
Kawasan Strategis Provinsi (RTRW DIY)				
1	KSP Kawasan Perkotaan Yogyakarta	Kawasan perkotaan regional	1. Pengembangan, pengelolaan dan pengendalian kawasan perkotaan regional dengan standar metropolitan. 2. Peningkatan kemitraan dan daya saing dalam kerjasama pengembangan wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY).	1. KPYWilayahSleman 2. SuperblokDepok 3. KawasanOlah Ragadan RTHMaguwo
2	KSP Koridor Temon-Prambanan	Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi	Pengembangan, pengelolaan, dan pengendalian kawasan koridor pertumbuhan ekonomi regional.	1. KoridorGodean-Gamping-Mlati-Kalasan-Prambanan 2. Kawasan *Dryport*Patukan 3. KoridorTempel-Sleman-Mlati 4. KoridorBerbah
3	KSP Koridor Tempel-Parangtritis	Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi	Pengembangan, pengelolaan, dan pengendalian kawasan koridor pertumbuhan ekonomi regional.	
4	KSP Teknologi Tinggi Gunung Merapi	Sains dan Teknologi	Pengembangan kawasan riset, pendidikan, dan pelatihan penanggulangan bencana kegunungapian.	Riset Merapi

No.	Nama Kawasan	Fungsi Kawasan	Prioritas Spesifik Bagi Kab. Sleman	Tematik Pengembangan PWT-JM Kab. Sleman
5	KSP Cagar Budaya	Cagar Budaya	Pengelolaan cagar budaya sebagai bagian pengembangan budaya dan perekonomian wilayah.	Kawasan Candi &artefak
6	KSP IKK Godean	kawasan strategis pertumbuhan ekonomi	Pengembangan, pengelolaan dan pengendalian pusat kegiatan pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi untuk Sleman bagian barat.	Perkotaan PKL Godean
7	KSP IKK Pakem	kawasan strategis pertumbuhan ekonomi	Pengembangan, pengelolaan dan pengendalian pusat kegiatan pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi untuk Sleman bagian utara, sekaligus pengendalian pengembangan kawasan resapan air dan rawan bencana vulkanik.	Perkotaan PKL Pakem
Kawasan Strategis Kabupaten (RTRW Kab. Sleman)				
1	KSK Keamanan dan Ketahanan Pangan Wilayah	Pertanian	Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan kawasan pertanian lahan pangan berkelanjutan	1. KeamananKetahananPangan 2. KawasanPertanianOrganikdan MinaPadi 3. KawasanPertanianKoridorSelokanMataram& Van derWijck 4. KawasanPerkebunanSalakPondoh 5. PertanianPerkotaan
2	KSK Kawasan Resapan Air	Lingkungan hidup	1. Pengendalian pembangunan wilayah pada kawasan resapan air dan transisi resapan air. 2. Pengembangan pertanian unggulan selaras kawasan resapan air dan transisi resapan air.	1. KawasanResapanAir 2. KawasanTransisiResapan Air

Tematik Pengembangan PWT-JM Kabupaten Sleman dianalisa melalui pembobotan dengan menggunakan kriteria pengembangan wilayah. Dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah:

a. Mendukung prioritas nasional & provinsi
b. Memiliki pengaruh besar/signifikan terhadap pencapaian sasaranpembangunan daerah
c. Memiliki dampak positif terhadap perekonomian kawasan dan masyarakat
d. Memiliki daya ungkit signifikan terhadap pembangunan kawasan

e. Kemudahan untuk dikelola

Sehingga didapat prioritas pengembangan kawasan sebagai berikut:

Tabel 6.14
Prioritas Pengembangan Kawasan

Prioritas	Tematik Kawasan PWT-JM Kabupaten Sleman	
Kawasan Strategis Nasional		
1	N2A	Kawasan Penyangga Prambanan Ratu Boko Kalasan
2	N1A	Wisata Gunungapi Merapi
3	N1B	Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi
Kawasan Strategis Provinsi		
1	P4	Koridor Tempel Sleman
2	P1	Kawasan Perkotaan Yogyakarta Wilayah Sleman
3	P3	Koridor Gamping-Berbah-Kalasan-Prambanan
4	P2	Koridor Berbah
5	P7A	Perkotaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Godean
6	P5	Kawasan Candi dan Artefak
7	P1A	Super Blok Depok
8	P7B	Perkotaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pakem
9	P1B	Kawasan Olahraga dan RTH Maguwoharjo
10	P3A	Kawasan Dry Port Patukan
11	P6	Riset Merapi
Kawasan Strategis Kabupaten		
1	K2	Keamanan Ketahanan Pangan
2	K2A	Kawasan Pertanian Koridor Selokan Mataram
3	K2B	Kawasan Perkebunan Salak Pondoh
4	K1B	Kawasan Transisi Resapan Air
5	K2C	Kawasan Pertanian Organik dan Mina Padi
6	K1A	Kawasan Resapan Air
7	K2D	Kawasan Pertanian Perkotaan

Adapun Rencana PWT-JM Kabupaten Sleman dikaitkan dengan prioritas pengembangan Kabupaten/Kota yang berbatasan yang dilakukan dengan strategi mensinergikan tujuan Bagian Wilayah Perencanaan

(BWP) Kabupaten/Kota yang berbatasan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah masing-masing Kabupaten Kota.

Tabel 6.15
Sinergitas Rencana PWT-JM Kabupaten/Kota dan tujuan BWP Kabupaten/Kota, serta Keterkaitan dengan PWT-JM Kab. Sleman

No	Kabupaten/Kota yang berbatasan	Tujuan BWP	Keterkaitan dengan PWT-JM Kab. Sleman
1	Kota Yogyakarta	Mewujudkan BWP Kota Yogyakarta dalam mendorong pengembangan ekonomi perkotaan yang didasarkan pada kegiatan pariwisata, pendidikan dan budaya.	▪ Pengembangan KPY WilayahSleman dengan skala KawasanPerkotaanregional yang menitikberatkan pada sektor Perdagangan dan jasa,perumahan, dan pendidikan tinggi ▪ Pengembangan Superblok Depok sebagai PusatPengembanganPerkotaanTerpadu pada sektor Perdagangan dan jasa skalaregional(termasuk pendidikantinggi), dan perumahan vertikal. ▪ Pengembangan Kawasan Olahraga dan RTHMaguwo sebagai fasilitas olahraga dan RTH dengan aspek unggulan Fasilitas olahraga outdoor/indoor dan taman kota/rekreasioutdoor
2	Kabupaten Bantul	Mewujudkan Kabupaten Bantul yangmaju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomiserta didukung oleh sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan,dan jasa serta perikanan dan kelautan denganmemperhatikan pelestarianlingkungan dan pengurangan risikobencana.	▪ Pengembangan Kawasan Keamanan dan Ketahanan Pangan, KawasanPertanianOrganikdan Mina Padi, KawasanPertanian KoridorSelokan Mataram dan vander Wijck, serta PertanianPerkotaan dengan sektor unggulan Tanamanpangan,hortikultura danperikanan. ▪ Penataan Kawasan Rawan Bencana Merapi dengan strategi pengurangan resiko bencana dan pengembangan pariwisatalansekap danMinat Khusus. ▪ Pengembangan KPY Wilayah Sleman dengan skala KawasanPerkotaan regional yang menitikberatkan pada sektor Perdagangan dan jasa, perumahan, dan pendidikan tinggi.
3	Kabupaten Magelang	Mewujudkan ruang wilayahKabupaten sebagai sentra agrobisnisberbasis pada pertanian, pariwisatadan industri yang mengutamakanpemanfaatan potensilokal melaluisinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan, yang memperhatikanpelestarian fungsi wilayah sebagai daerah resapan air.	▪ Pengembangan Koridor Tempel-Sleman sebagai kawasanstrategispertumbuhanekonomi dengan aspek unggulan pada sektor Perdagangandan jasa, Industri, dan Rest Area ▪ Penataan Kawasan Resapan Air dan Kawan Transisi Resapan Air melalui konservasi KRA dan PengendalianPembangunanpada kawasantransisi resapanair
4	Kabupaten Kulonprogo	Mewujudkan Kabupaten sebagai basis komoditas pertanian didukung pariwisata, pertambangan, serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah	▪ Pengembangan Kawasan Keamanan dan Ketahanan Pangan, Kawasan Pertanian Organik dan Mina Padi, Kawasan Pertanian Koridor Selokan Mataram dan Van der Wijck, serta Pertanian Perkotaan dengan sektor unggulan Tanaman

No	Kabupaten/Kota yang berbatasan	Tujuan BWP	Keterkaitan dengan PWT-JM Kab. Sleman
			pangan,hortikultura dan perikanan.
5	Kabupaten Klaten	Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pertanian, industri, dan pariwisata.	▪ Pengembangan KawasanPenyanggaPrambanan RatuBoko dengan aspek unggulan Konservasicagar budaya, pariwisatabudaya, perdagangan &jasa pendukungwisata budaya(pasar kerajian,pasar hewantradisional) ▪ Penataan Kawasan Rawan Bencana Merapi dengan strategi pengurangan resiko bencana dan pengembangan pariwisata lansekap dan Minat Khusus.

6.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan.

Alur proses penyusunan KLHS RPJMD sebagai berikut:

1. Pra pelingkupan
   a. Identifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial budaya, dan isu-isu ekonomi, melalui diskusi internal Pokja PL;
   b. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu-isu sebagaimana dimaksud huruf a seperti gambaran umum kondisi daerah, hasil-hasil kajian, dan publikasi-publikasi yang ada;
   c. Mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia; dan
   d. Menginventarisasi pemangku kepentingan yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan KLHS sesuai dengan daftar panjang isu pembangunan.
2. Pelingkupan
   a. Verifikasi daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan;
   b. Penapisan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial budaya, dan isu-isu ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan kriteria sekurang-kurangnya lintas sektor, lintas wilayah, berdampak kumulatif jangka panjang, dan berdampak luas terhadap berbagai pemangku kepentingan;
   c. Penyepakatan hasil penapisan.
3. Baseline data

   Baseline data diperoleh dengan melakukan analisis data dan informasi .
4. Pengkajian

a. Kajian keterkaitan, meliputi:
    1) Keterkaitan antar wilayah;
    2) Keterkaitan antar waktu;
    3) Keterkaitan antar sektor;
    4) Keterkaitan antar pemangku kepentingan;
b. Kajian keseimbangan, meliputi:
    1) Keseimbangan antar kepentingan ekonomi;
    2) Keseimbangan sosial budaya;
    3)Keseimbangan lingkungan hidup.
c. Kajian keadilan, meliputi:
    1) Keadilan antar kelompok masyarakat
    2) Keadilan antar generasi

5. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan rencana program (KRP).
6. Rekomendasi perbaikan.

Hal yang paling krusial dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rekomendasi mitigasi terhadap program-program yang dilaksanakan dalam RPJMD agar memenuhi kriteria pembangunan yang berkelanjutan. Program dan rekomendasi mitigasi dalam KLHS tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6.16
Rekomendasi Mitigasi

No	Bidang	Program Prioritas	PENGARUH PROGRAM (*Negatif*)	Rekomendasi Mitigasi/Adaptasi
1.	Sosial	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Berpotensi meningkatkan *runoff* dan mengurangi RTH,menghasilkan limbah medis; menimbulkan kemacetan lalu lintas	Pembangunan sarana mengikuti persyaratan perizinan lingkungan Menerapkan konsep *green building*(Perbup Sleman No 49 Tahun 2012 dan Lampiran I KLHS)
2.	Sosial	Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Berkurangnya media resapan air hujan, menimbulkan kemacetan lalu lintas	Pembangunan dengan konsep *green building*(Perbup Sleman No 49 Tahun 2012 dan Lampiran IKLHS)disertai dengan penyediaan ruang parkir yang mencukupi
3.	Fisik dan Prasarana	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Berpotensi meningkatkan *runoff* dan mengurangi RTH	Membuat drainase jalan yang ramah lingkungan dan penghijauan di sepanjang jalan
			Berpotensi menimbulkan genangan	
			Munculnya pembuangan sampah liar di sekitar jembatan	Sosialisasi pelarangan pembuangan sampah liar dan penegakan aturan
4.	Fisik dan Prasarana	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Normalisasi sungai yang tidak ramah lingkungan berpotensi menganggu ekosistem sungai	Menerapkan kaidah/konsep *eco-hidraulika*(Lihat Lampiran I KLHS)
			Berpotensi menimbulkan longsor, banjir, kekeringan dll	
5.	Fisik dan Prasarana	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Berpotensi menurunkan muka air tanah	Pembangunan sarana mengikuti persyaratan perizinan lingkungan pengaturan dan pembatasan penggunaan air tanah dalam
			Berpotensi menyebabkan bencana kekeringan	

No	Bidang	Program Prioritas	PENGARUH PROGRAM (*Negatif*)	Rekomendasi Mitigasi/Adaptasi
6.	Fisik dan Prasarana	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan sumber pencemaran baru	Pembangunan sarana pengolahan air limbah terpadu, Pembuatan SOP pengelolaan sarana air limbah, pemantauan effluent agar sesuai dengan baku mutu
7.	Fisik dan Prasarana	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Memicu alih fungsi lahan	Meminimalisasi konversi lahan pertanian produktif
				Pembangunan sarana mengikuti persyaratan perizinan lingkungan
				Menerapkan kaidah/konsep *green infrastructure*(Lihat Lampiran I KLHS)
8.	Fisik dan Prasarana	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Berpotensi meningkatkan *runoff* dan mengurangi RTH, menimbulkan kemacetan lalu lintas	Pembangunan sarana mengikuti persyaratan perizinan lingkungan menerapkan kaidah/konsep *green building*(Perbup Sleman No 49 Tahun 2012 dan Lampiran I KLHS)
9.	Fisik dan Prasarana	Program Perencanaan Tata Ruang	Apabila alokasi ruang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung	Alokasi ruang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung
10.	Fisik dan Prasarana	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Apabila terjadi pelanggaran tata ruang	Menegakkan peraturan penataan ruang
				Mengembangkan mekanisme insentif-disinsentif atau *reward – punishment*

No	Bidang	Program Prioritas	PENGARUH PROGRAM (*Negatif*)	Rekomendasi Mitigasi/Adaptasi
11.	Fisik dan Prasarana	Program Pengembangan Perumahan	Berpotensi alih fungsi lahan dan mengganggu kelestarian lingkungan apabila persyaratan pengelolaan lingkungan tidak terpenuhi	Meminimalisasi konversi lahan pertanian produktif
			Memacu urbanisasi jika pemanfaatan ruang tidak terkendali	Penyediaan sarana perumahan diutamakan untuk penduduk ber-KTP Sleman
			Meningkatkan pencemaran dan mengurangi RTH	Menerapkan konsep *green settlement* dan *green building*(Perbup Sleman No 49 Tahun 2012 dan Lampiran I KLHS)
				Pembangunan sarana mengikuti persyaratan perizinan lingkungan
12.	Fisik dan Prasarana	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Berpotensi alih fungsi lahan dan mengganggu kelestarian lingkungan apabila persyaratan pengelolaan lingkungan tidak terpenuhi	Menerapkan konsep *green settlement* dan *green building*(Perbup Sleman No 49 Tahun 2012 dan Lampiran I)
13.	Fisik dan Prasarana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Berpotensi meningkatkan *runoff* dan mengurangi RTH	Membuat drainase jalan yang ramah lingkungan dan penghijauan di sepanjang jalan
			Berpotensi minimbulkan limbah cair dan padat	Pembangunan sarana dan prasarana MCK dan persampahan
14.	Ekonomi	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, kemacetan lalu lintas	Menerapkan konsep *eco-tourism*(Lihat Lampiran I)
15.	Ekonomi	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, kemacetan lalu lintas	Pembangunan sarana mengikuti persyaratan perizinan lingkungan
				Mengaplikasikan SOP wisata ramah lingkungan

No	Bidang	Program Prioritas	PENGARUH PROGRAM (*Negatif*)	Rekomendasi Mitigasi/Adaptasi
16.	Ekonomi	Program Pengembangan Desa Wisata	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan/atau merusak keanekaragaman hayati	Menerapkan konsep *eco-tourism*(Lihat Lampiran I KLHS)
				Mengaplikasikan SOP wisata ramah lingkungan
17.	Ekonomi	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lingkungan jika pasca penanggulangan tidak dikelola dengan baik dan benar	Melakukan pengelolaan lingkungan sektor peternakan
18.	Ekonomi	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan	Menerapkan prinsip *eco farming*(Lihat Lampiran I KLHS)
19.	Fisik dan Prasarana	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Berpotensi merusak kelestarian lingkungan kalau kewajiban pengelolaan lingkungan hidup tidak dilakukan	Menerapkan konsep pertambangan rakyat ramah lingkungan
20.	Ekonomi	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, kemacetan lalu lintas dan meningkatkan run off	Pembangunan sarana mengikuti persyaratan perizinan lingkungan
21.	Ekonomi	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan	Melakukan pengelolaan lingkungan Menyediakan IPAL Komunal
			Memacu urbanisasi, karena berpotensi banyak menyerap tenaga kerja dari daerah lain	Penyiapan SDM
22.	Ekonomi	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan	Melakukan pengelolaan lingkungan
			Memacu urbanisasi, karena berpotensi banyak menyerap tenaga kerja dari daerah lain	Penyiapan SDM

No	Bidang	Program Prioritas	PENGARUH PROGRAM (*Negatif*)	Rekomendasi Mitigasi/Adaptasi
23.	Pemerintahan	Program perencanan pembangunan daerah rawan bencana	Berpotensi mengganggu ekosistem apabila perencanaan tidak sesuai dengan persyaratan PLH	- Sesuai tata ruang - *Green building* - Dilengkapi infrastruktur yang mendukung PLH
24.	Fisik dan Prasarana	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan	- Sosialisasi kegiatan pertambangan ramah lingkungan. - Penegakan peraturan
25.	Sosial	Program pengembangan lingkungan sehat	Berpotensi pencemaran dan kerusakan lingkungan	- Pendampingan dan penerapan pola hidup bersih dan sehat. - Monitoring secara rutin
26.	Fisik dan Prasarana	Program kinerja pengelolaan persampahan	- Menimbulkan bau dan pencemaran - Menurunkan keindahan - Timbulan sampah liar	- Layanan pengelolaan sampah harus optimal - Sosialisasi pengelolaan sampah mandiri
27.	Fisik dan Prasarana	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	- Penyebaran informasi pencemaran & kerusakan lingkungan. - Optimalkan pengawasan dan penegakan hukum
28.	Fisik dan Prasarana	Program peningkatan pengendalian polusi	Terjadinya polusi udara	- Penyadaran kewajiban uji emisi - Uji petik emisi kendaraan bermotor 2x setahun
29.	Fisik dan Prasarana	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Langka/terbatasnya SDA	Penerapan *eco* efisiensi RT
30.	Fisik dan Prasarana	Program lingkungan sehat perumahan	Berpotensi pencemaran dan kerusakan lingkungan	Menerapkan konsep *green environmental*

No	Bidang	Program Prioritas	PENGARUH PROGRAM (*Negatif*)	Rekomendasi Mitigasi/Adaptasi
31.	Fisik dan prasarana	Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Eksploitasi berlebihan terhadap sumber air yang berada di embung dapat menyebabkan krisis air pada lokasi yang berada di bawah embung tersebut.	Menggunakan konsep pengelolaan SDA secara berkelanjutan
32.	Fisik dan prasarana	Program rehabilitasi/pemeli haraan jalan dan jembatan	Berpotensi meningkatkan *run off* dan mengurangi RTH	Memadukan pembangunan dengan drainase ramah lingkungan Meminimalisasi konversi lahan pertanian produktif
33.	Fisik dan prasarana	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Kemungkinan terjadinya genangan, Pembebasan lahan dan relokasi (pemindahan) penduduk Penyesuaian-penyesuaian berkaitan dengan adanya limbah domestik dan limbah industri.	Sistem drainase yang dibangun/diperbai ki harus harmonis dengan lingkungan perkotaan.
			Berpotensi menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan	Pengembangan pertanian/perkebu nan organik
34.	Ekonomi	Program peningkatan produksi pertanian/perkebu nan	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara/bau)	Pengembangan peternakan ramah lingkungan
35.	Ekonomi	Program pengembangan budidaya perikanan	Berpotensi menimbulkan pencemaran air	Pengembangan perikanan ramah lingkungan (penggunaan pakan yang tidak mencemari air)
36.	Ekonomi	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara/bau)	Pemilihan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan
37.	Ekonomi	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan dengan masuknya spesies asing yang dapat	Pemilihan spesies lokal untuk jenis ikan yang ditebarkan

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi Kabupaten Sleman adalah "Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem *e-government* menuju *smart regency* pada tahun 2021". Visi ini dilaksanakan dengan 5 (lima) misi untuk kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi disusun program-program pembangunan. Program yang ada di RPJMD ini merupakan program pedukung dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

7.1 Program-program pada Misi 1

Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Misi diatas didukung oleh program:

1. Program perencanaan pembangunan daerah
2. Program pengembangan data dan informasi
3. Program pengkajian dan penelitian bidang iptek
4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
5. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
6. Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
7. Program pengembangan kualitas kebijakan publik
8. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
9. Program peningkatan kualitas pelayanan publik
10. Program peningkatan administrasi pemerintahan
11. Program kerjasama pembangunan
12. Program pengembangan wilayah perbatasan
13. Program kerjasama dan informasi dan media masa
14. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
15. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
16. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

17. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
18. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
19. Program pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana kerasipan
20. peningkatan kualitas pelayanan informasi
21. Program pelayanan administrasi perkantoran
22. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
23. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
24. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
26. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
27. Program pengelolaan pendapatan daerah
28. Program penataan administrasi kependudukan
29. Program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah
30. Program pengelolaan dan pengembangan persandian daerah
31. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
32. Program Pendidikan Kedinasan
33. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
34. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
35. Program penataan peraturan perundang-undangan
36. Program pelayanan dan bantuan hukum
37. Program penegakkan hukum
38. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
39. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
40. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
41. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
42. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
43. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
44. Program peningkatan kemanan dan kenyaman lingkungan
45. Program pemeliharaan katrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

46. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kemanan
47. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)

7.2 Program-program pada Misi 2

Misi 2:Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Misi di atas didukung oleh Program:

1. Program perencanaan sosial budaya
2. Program obat dan perbekalan obat
3. Program upaya kesehatan masyarakat
4. Program pengawasan obat dan makanan
5. Program promosi kesehetan dan pemberdayaan masyarakat
6. Program perbaikan gizi masyarakat
7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
8. Program standarisasi pelayanan kesehatan
9. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata
10. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
11. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
12. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
13. Program peningkatan pelayanan kesehatan
14. Program pengembangan lingkungan sehat
15. Program keluarga berencana
16. Program kesehatan reproduksi remaja
17. Program pelayanan kontrasepsi
18. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayananKB/KR yang mandiri
19. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
20. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
21. Program pengembangan model operasional BKB-POSYANDU-PADU
22. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
23. Program pengembangan kreativitas siswa dan guru
24. Program manajemen pelayanan pendidikan
25. Program pendidikan anak usia dini
26. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
27. Program pendidikan menengah

28. Program peningkatan kualitas pendidikan non formal
29. Program pengembangan budaya baca
30. Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan
31. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
32. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
33. Program peningkatan peran serta kepemudaan
34. Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
35. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
36. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
37. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
38. Program peningkatan sarana dan Prasarana Olah raga

7.3 Program-program pada Misi 3

Misi 3: Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan

Misi di atas didukung oleh program:

1. Program perencanaan pembangunan ekonomi
2. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
3. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
4. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
5. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
6. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
7. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
8. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
9. Program pembinaan dan penataan pedagang pasar
10. Program perlindungan konsumen pengamanan perdagangan
11. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
12. Program pengembangan pemasaran pariwisata
13. Program pengembangan destinasi pariwisata
14. Program pengembangan kemitraan
15. Program peningkatan dan pengembangan eksport
16. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
17. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

18. Program peningkatan kesempatan kerja
19. Program transmigrasi regional
20. Program pembangunan sarana dan prasarana ekonomi
21. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pangairan lainnya
22. Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
23. Program pembangunan insfrastruktur perdesaan
24. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
25. Program pembangunan jalan dan jembatan
26. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
27. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
28. Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan
29. Program peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan
30. Program pembinaan jasa dan kontruksi
31. Program pengembangan desa wisata
32. Program peningkatan kesejahteraan petani
33. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
34. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
35. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
36. Program peningkatan produksi hasil peternakan
37. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
38. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
39. Program pengembangan budidaya perikanan
40. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
41. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
42. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
43. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
44. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
45. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
46. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
47. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
48. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
49. Program pengambangan industri kecil dan menengah

50. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
51. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
52. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
53. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
54. Program pembinaan anak terlantar
55. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
56. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
57. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
58. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
59. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
60. Program pengembangan perumahan
61. Program pengembangan energiterbarukan
62. Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan.
63. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
64. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
65. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
66. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasaran dan fasilitas LLAJ
67. Program peningkatan pelayanan angkutan
68. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
69. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

7.4 Program-program pada Misi 4

Misi 4: Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan

Misi di atas didukung oleh program:

1. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
2. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
3. Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
4. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
5. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
6. Program perencanaan tata ruang
7. Program penyediaan dan pengolahan air baku

8. Program pengendalian pemanfaatan ruang
9. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
10. Program pengandalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
11. Program peningkatan pengendalian polusi
12. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
13. Program pengelolaan ruang terbuka hijau
14. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
15. Program lingkungan sehat perumahan
16. Program pengelolaan areal permakaman
17. Program pengembangan system informasi pertanahan
18. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
19. Program rehabilitasi hutan dan lahan
20. Program prencanaan dan pengembangan hutan

7.5 Program-program pada Misi 5

Misi 5:Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional

Misi di atas didukung oleh program:

1. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
3. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
4. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
5. Program Pengembangan wawasan kebangsaan
6. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
7. Program pendidikan politik masyarakat
8. Program pengembangan nilai budaya
9. Program pengelolaan budaya
10. Program pengelolaan keragaman budaya
11. Program pelestarian pengembangan peninggalan budaya
12. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
13. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Adapun keterkaitan antara misi, sasaran, indikator sasaran, strategi dan arah kebijakan berserta program dalam RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.3

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2021

Misi 3 : Meningkakan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, penanggulangan kemiskinan

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
1	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	**Strategi :** 1. Meningkatkan peluang investasi daerah 2. Mengembangkan koperasi 3. Meningkatkan perlindungan terhadap pelaku usaha dan UMKM **Arah Kebijakan :** 1. Meningkatkan investasi inklusif 2. Meningkatkan keaktifan koperasi 3. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan UMKM 4. Meningkatkan aksessibilitas UMKM	Pertumbuhan ekonomi Indeks Gini	5,40 % ≤0,40	5,65% ≤0,40	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PERINDAGKOP, BUDPAR, SETDA, DPKAD, D.PASAR NAKERSOS
						Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	--
						Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	--
						Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	--
						Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	--
						Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	--
						Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	PASAR
						Program pembinaan dan penataan pedagang pasar	Perdagangan	Dinas Pasar	D. PERINDAGKOP
						Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	BPMP2T, SETDA, PASAR
						Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Perdagangan	Dinas Pasar	--
2	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan, dan pertanian	**Strategi :** 1. Menguatkan pariwisata berkelanjutan 2. Meningkatkan Nilai ekspor 3. Meningkatkan diversifikasi produk pariwisata, perindustrian perdagangan dan pertanian	Lama tinggal wisatawan	Wisatawan Nusantara: 2,90 hari wisatawan Manca negara: 2,68 hari	Wisatawan Nusantara: 2,98 hari wisatawan Manca negara: 2,76 hari	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BPMP2T
						Program pengembangan destinasi pariwisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
		Arah Kebijakan : 1. Meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata 2. Memperluas pasar tujuan ekspor 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pariwisata, perindustrian perdagangan dan pertanian 4. Meningkatkan standarisasi dan sertifikasi produk sektor pariwisata, perindustrian perdagangan dan pertanian	Jumlah wisatawan	4.117.000	5.149.000	Program pengembangan desa wisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	--
						Program pengembangan kemitraan	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	--
			Nilai Eksport	42.000.000 US$ □	45.000.000 US$ □	Program peningkatan dan pengembangan eksport	Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	--
			Nilai tukar petani	111,65%	112,70%	Program peningkatan kesejahteraan petani	Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	--
						Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	--
						Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan	Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	--
						Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	--
						Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	--
						Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	--
						Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	--
						Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	--
						Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	--
						Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Pangan	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
			Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	3,26%	3,26%	Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	--
						Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	--
						Program pengembangan budidaya perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	--
			Presentase Peningkatan Nilai Produksi Industri	2,70%	3,20%	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	--
						Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	--
						Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	--
						Program pengembangan industri kecil dan menengah	Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	BPMP2T
3	Meningkatnya kesempatan kerja	**Strategi:** 1 Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	3,26%	3,26%	Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	--
		Arah kebijakan: 1 Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan sesuai dengan				Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
		kebutuhan pasar				Program peningkatan kesempatan kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	--
						Program transmigrasi regional	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	--
4	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian	**Strategi :** 1 Mengembangkan insfrastruktur perekonomian 2 Mengembangkan fasilitas perhubungan **Arah Kebijakan :** 1 Pembangunan dan pemeliharan infrastruktur perekonomian 2 Menyediakan prasarana dan sarana lalu lintas berdasarkan rencana pengembangan wilayah	Persentase prasarana dan sarana perekonomian yang berkualitas	65,99 %	76%	Program pembangunan sarana dan prasarana ekonomi	Perdagangan	Dinas Pasar	PUP
						Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pangairan lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral	BAPPEDA
						Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral	--
						Program pembangunan insfrastruktur perdesaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	--
						Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	--
			Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	65,25%	66,25%	Program pembangunan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	RSUD SLEMAN

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	--
						Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	--
						Program pembangunan sistem informasi / database jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	--
						Program peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	--
						Program pembinaan jasa dan kontruksi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	--
						Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	--
						Program pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	--
						Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	--

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasaran dan fasilitas LLAJ	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	--
						Program peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	--
						Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	--
						Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	--
5	Menurunnya kemiskinan	**Strategi:** Meningkatkan penanganan kemiskinan **Arah Kebijakan:** Menurunkan angka kemiskinan	Persentase KK Miskin	10,69%	8,00%	Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	PERINDAGKOP, PASAR
						Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	SETDA
						Program pembinaan anak terlantar	Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	--
						Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	--
						Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	--
						Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Badan Keluarga Berencana,	SETDA, KEC. GAMPING,

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						membangun desa		Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan	KEC. GODEAN, KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN
						Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan	D.PERINDAGKOP, D.BUDPAR, SETDA, D.PERTANIAN, KEC. GAMPING, KEC. GODEAN,
									KEC. MOYUDAN, KEC. MINGGIR, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. BERBAH,

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
									KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN
						Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan	D.PERINDAGKOP, D.PERTANIAN
						Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan	D.PERINDAGKOP

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)				
						Program pengembangan perumahan	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	--
						Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	--
						Program pengembangan energi terbarukan	Energi dan sumberdaya mineral	Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral	--
						Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Energi dan sumberdaya mineral	Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral	--

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam bab ini akan diuraikan program yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dibagi dalam setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu akan disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan, kemudian akan dialokasikan pagu indikatif program yang merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan.

Prioritas pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam program-program sesuai dengan program yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Indikasi rencana program prioritas terdiri dari program-program dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah dan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif adalah jumlah anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program kegiatan tahunan. Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Selain itu dalam RPJMD ini, tercantum sejumlah program yang ada di setiap SKPD antara lain: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan Keuangan. Program-program tersebut nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Pencapaian target kinerja program di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sleman saja, tetapi juga bersumber dari APBN, APBD Propinsi, Dana Keistimewaan dan sumber-sumber pendanaan lainnya. Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam tabel 8.1

hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Sleman dan yang diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 8.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
0	Urusan Umum				129.751.973.309,00		141.605.024.864,00		151.596.095.258,50		164.529.099.320,15		178.129.909.529,03		190.307.944.802,57	
0.00	Urusan Umum				129.751.973.309,00		141.605.024.864,00		151.596.095.258,50		164.529.099.320,15		178.129.909.529,03		190.307.944.802,57	
0.00.00	Urusan Umum				129.751.973.309,00		141.605.024.864,00		151.596.095.258,50		164.529.099.320,15		178.129.909.529,03		190.307.944.802,57	
0.00.00.xx.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	88.953.616.089,00	100%	94.712.647.745,00	100%	102.681.366.133,00	100%	112.132.565.311,00	100%	120.525.516.737,80	100%	131.065.511.789,15	Semua SKPD
0.00.00.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	32.675.606.995,00	75%	36.217.869.144,00	75%	37.422.907.846,00	75%	39.915.429.201,00	75%	43.021.356.140,00	75%	44.651.085.497,50	Semua SKPD
0.00.00.xx.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	90%	4.118.079.480,00	93%	5.359.852.600,00	96%	5.639.897.905,00	98%	6.192.884.591,00	100%	6.800.051.914,50	100%	7.305.016.175,35	Semua SKPD
0.00.00.xx.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	4.004.670.745,00	100%	5.314.655.375,00	100%	5.851.923.374,50	100%	6.288.220.217,15	100%	7.782.984.736,73	100%	7.286.331.340,57	Semua SKPD
1	Urusan Pemerintahan Wajib				832.804.078.342,00		962.878.546.639,00		966.930.261.824,50		1.137.062.742.585,15		1.149.606.881.599,28		1.240.989.159.705,73	
1.01	Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				728.479.269.828,00		807.310.475.854,00		809.143.322.854,00		979.274.065.128,80		974.929.206.797,68		1.066.220.867.699,08	
1.01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				88.728.479.525,00		100.222.496.539,00		96.204.638.025,00		101.481.583.682,00		110.853.054.249,00		118.542.167.820,00	
1.01.01.xx.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terlayaninya pendidikan anak usia dini umur 0-6 tahun	78.17 %	78.2 %	4.003.210.025,00	78.23 %	18.670.481.500,00	78.26 %	4.685.777.900,00	78.29 %	5.177.800.280,00	78.32 %	5.628.807.336,00	78.35 %	5.862.536.000,00	DISDIKPORA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.01.01.xx.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD/MI	116.81 %	≥100%	32.547.925.475,00	≥100%	38.299.263.889,00	≥100%	38.782.857.094,00	≥100%	43.768.303.998,00	≥100%	47.005.668.698,00	≥100%	49.824.435.698,00	SETDA, DISDIKPORA
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP/MTs	111.7 %	≥100%		≥100%		≥100%		≥100%		≥100%		≥100%		
		Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI	103.2 %	≥100%		≥100%		≥100%		≥100%		≥100%		≥100%		
		Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/MTs	83.96 %	83.97 %		83.98 %		83.99 %		84%		84.01 %		84.5 %		
1.01.01.xx.17	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/SMK/MA	88.69 %	88.7	7.146.651.725,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISDIKPORA
		Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA/SMK/MA	58.95 %	58.96 %		0		0		0		0		0		
1.01.01.xx.18	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal	Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang berizin dari Dinas Dikpora Kabupaten Sleman	68.1 %	74%	1.634.643.800,00	75.25 %	1.766.538.500,00	76%	7.252.300.000,00	77%	2.653.350.000,00	78%	3.375.718.000,00	80%	2.587.943.000,00	DISDIKPORA, KBPMPP
		Meningkatnya angka melek huruf di kabupaten sleman	98.6 %	99.03 %		99.04 %		99.05 %		99.06 %		99.07 %		99.08 %		
		Terbentuknya desa berkarakter	0 Desa	0 Desa		4 Desa		6 Desa		9 Desa		13 Desa		17 Desa		
1.01.01.xx.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memiliki kualifikasi S1/D4	88.31 %	88%	32.046.336.975,00	87%	31.458.384.500	88%	34.553.572.826,00	89%	38.008.419.109,00	90%	41.809.159.020,00	91%	45.988.708.527,00	DISDIKPORA, BKD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.01.01.xx.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase pengelolaan sekolah yang memenuhi manajemen mutu berbasis sekolah (MBS)	96.92 %	97%	9.179.553.300,00	97.1 %	7.219.275.150,00	97.2 %	7.827.934.400,00	97.3 %	8.507.296.900,00	97.3 %	9.284.094.000,00	97.4 %	10.184.013.500,00	DISDIKPORA
		Persentase sekolah yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	77.16 %	98%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.01.01.xx.23	Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru	Jumlah guru kreatif dan mengikuti lomba	33 Jumlah prestator	66 Jumlah prestator	2.170.158.225,00	99 Jumlah prestator	2.808.553.000,00	132 Jumlah prestator	3.102.195.805,00	165 Jumlah prestator	3.366.413.395,00	198 Jumlah prestator	3.749.607.195,00	231 Jumlah prestator	4.094.531.095,00	SETDA, DISDIKPORA
		Meningkatnya jumlah prestasi siswa baik akdemis dan non akademis tingkat Kabupaten	1052 Jumlah prestasi	1055 Jumlah prestasi		1056 Jumlah prestasi		1057 Jumlah prestasi		1060 Jumlah prestasi		1062 Jumlah prestasi		1065 Jumlah prestasi		
		Meningkatnya jumlah prestasi siswa baik akdemis dan non akademis tingkat Propinsi	483 Jumlah prestasi	485 Jumlah prestasi		486 Jumlah prestasi		487 Jumlah prestasi		489 Jumlah prestasi		490 Jumlah prestasi		492 Jumlah prestasi		
		Meningkatnya jumlah prestasi siswa baik akdemis dan non akademis tingkat nasional	34 Jumlah prestasi	35 Jumlah prestasi		36 Jumlah prestasi		37 Jumlah prestasi		38 Jumlah prestasi		39 Jumlah prestasi		40 Jumlah prestasi		
1.01.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				368.431.680.340,00		293.469.740.045,00		285.436.922.692,00		390.937.208.594,00		326.108.525.194,00		345.687.489.659,00	
1.01.02.xx.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan jenis obat menurut kelas terapi	93.2 %	95%	6.779.020.250,00	95%	7.139.040.000,00	95%	5.370.296.800,00	95%	5.907.326.100,00	95%	6.498.058.900,00	95%	6.848.389.600,00	DINKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.01.02.xx.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan	73.52 %	74%	152.835.557.325,00	77%	106.011.832.435,00	79%	100.883.817.850,00	82%	106.222.416.300,00	85%	112.844.661.240,00	88%	119.729.128.005,00	DINKES
		Menurunnya AKI	28.3 per 100.000 kelahiran hidup	63.23 per 100.000 kelahiran hidup		62.79 per 100.000 kelahiran hidup		55.42 per 100.000 kelahiran hidup		55.04 per 100.000 kelahiran hidup		47.83 per 100.000 kelahiran hidup		47.51 per 100.000 kelahiran hidup		
		Menurunnya AKB	3.61 per 1000 kelahir-an hidup	3.43 per 1000 kelahir-an hidup		4.33 per 1000 kelahir-an hidup		4.23 per 1000 kelahir-an hidup		4.13 per 1000 kelahir-an hidup		4.03 per 1000 kelahir-an hidup		3.94 per 1000 kelahir-an hidup		
		Persentase desa stop buang air besar sembarangan (BABS)	60%	70%		80%		90%		100%		100%		100%		
		Persentase desa Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	0%	5%		10%		15%		20%		25%		30%		
		Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	90%	92%		94%		96%		98%		100%		100%		
		Persentase angka bebas jentik	95%	≥ 95 %		≥ 95 %		≥ 95 %		≥ 95 %		≥ 95 %		≥ 95 %		
1.01.02.xx.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan dan pengendalian obat dan makanan	75%	75%	509.768.500,00	76%	742.030.000,00	77%	819.034.000,00	78%	905.060.000,00	79%	999.316.000,00	80%	1.103.560.000,00	DINKES, PERINDAGKOP
1.01.02.xx.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase rumah tangga yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	47.9 %	50%	1.317.288.000,00	52.5 %	1.551.000.000,00	55%	1.706.098.000,00	57.5 %	1.876.708.000,00	60%	2.064.379.000,00	60%	2.270.817.000,00	DINKES
1.01.02.xx.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Status balita gizi buruk	0.4 %	0.45 %	1.891.345.450,00	0.44 %	1.844.779.800,00	0.43 %	2.029.238.000,00	0.42 %	2.232.182.000,00	0.41 %	2.455.400.000,00	0.4 %	2.700.941.000,00	DINKES
		Cakupan balita pendek dan sangat pendek	12.86 %	12.6 %		12.4 %		12%		11.5 %		11.2 %		11%		
1.01.02.xx.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase pemahaman masyarakat terhadap PHBS	45.6 %	50%	104.020.950,00	52.5 %	140.000.000,00	55%	114.683.042,00	57.5 %	120.417.194,00	60%	126.438.054,00	60%	126.438.054,00	SETDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.01.02.xx.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pengendalian penyakit menular	100%	100%	2.448.943.800,00	100%	3.092.473.050,00	100%	2.819.318.000,00	100%	3.676.549.000,00	100%	4.044.305.000,00	100%	4.448.625.000,00	DINKES
		Pengendalian penyakit tidak menular	68.6 %	69%		70%		80%		90%		95%		100%		
1.01.02.xx.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kualitas pelayanan kesehatan baik (puskesmas)	72%	90%	811.656.750,00	100%	726.132.500,00	100%	765.383.000,00	100%	907.581.000,00	100%	1.001.386.000,00	100%	1.250.580.000,00	DINKES, RSUD PRAMBANAN, RSUD SLEMAN
		Kualitas pelayanan kesehatan baik (RS Pemda)	50%	50%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.01.02.xx.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan sarana prasarana di rumah sakit	80%	80%	54.430.594.886,00	80%	46.999.728.000,00	95%	35.890.000.000,00	95%	124.250.000.000,00	95%	35.750.000.000,00	95%	32.850.000.000,00	RSUD SLEMAN, RSUD PRAMBANAN
1.01.02.xx.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan Balita	0.21 per 1000 kelahiran hidup	< 1.9 per 1000 kelahiran hidup	88.569.900,00	< 1.8 per 1000 kelahiran hidup	107.281.500,00	< 1.7 per 1000 kelahiran hidup	118.009.000,00	< 1.65 per 1000 kelahiran hidup	129.810.000,00	< 1.6 per 1000 kelahiran hidup	142.791.000,00	< 1.6 per 1000 kelahiran hidup	157.070.000,00	DINKES
1.01.02.xx.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Pelayanan kesehatan lansia	75.82%	70%	34.457.500,00	71%	61.295.500,00	72%	67.425.000,00	73%	74.167.000,00	74%	81.584.000,00	75%	89.742.000,00	DINKES
1.01.02.xx.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Pengawasan Industri Kecil Menengah (IKM) pangan/ makanan olahan yang menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya	30 Unit usaha	30 Unit usaha	23.791.500,00	30 Unit usaha	25.873.000,00	30 Unit usaha	29.754.000,00	30 Unit usaha	34.300.000,00	30 Unit usaha	39.445.000,00	30 Unit usaha	45.362.000,00	PERINDAGKOP
1.01.02.xx.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan masyarakat baik	33.3%	33.4%	147.156.665.529,00	33.5%	125.028.274.260,00	33.6%	134.823.866.000,00	33.7%	144.600.692.000,00	33.8%	160.060.761.000,00	34%	174.066.837.000,00	DINKES, RSUD SLEMAN, RSUD PRAMBANAN
1.01.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				233.842.673.613,00		345.415.210.270,00		365.469.591.517,00		415.463.077.581,80		458.389.165.711,68		518.160.215.291,08	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.01.03.xx.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (jalan & jembatan)	65.18 %	65.25 %	47.878.377.500,00	65.45 %	78.633.000.000,00	65.65 %	94.720.000.000,00	65.85 %	98.243.400.000,00	66.05 %	107.873.160.000,00	66.25 %	123.440.640.000,00	RSUD SLEMAN, PUP
		Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (jalan)	54.26 %	54.3 %		54.5 %		54.7 %		54.9 %		55.1 %		55.3 %		
		Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (jembatan)	76.1 %	76.2 %		76.4 %		76.6 %		76.8 %		77%		77.2 %		
1.01.03.xx.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Proporsi drainase dan gorong - gorong kabupaten dalam kondisi baik	48.76 %	48.8 %	16.817.986.500,00	48.85 %	14.854.894.940,00	48.9 %	16.340.384.434,00	49%	17.974.422.877,00	50%	19.771.865.165,00	52%	21.749.051.682,00	PUP
1.01.03.xx.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (jalan & jembatan)	65.18 %	65.25 %	55.028.699.493,00	65.45 %	101.603.734.230,00	65.65 %	66.436.957.653,00	65.85 %	73.080.653.418,00	66.05 %	80.345.461.260,00	66.25 %	88.334.587.136,00	PUP
		Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (jalan)	54.26 %	54.3 %		54.5 %		54.7 %		54.9 %		55.1 %		55.3 %		
		Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (jembatan)	76.1 %	76.2 %		76.4 %		76.6 %		76.8 %		77%		77.2 %		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.01.03.xx.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Ketersediaan data base jalan dan jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	443.040.000,00	1 Dokumen	630.000.000,00	1 Dokumen	693.000.000,00	1 Dokumen	762.300.000,00	1 Dokumen	838.530.000,00	1 Dokumen	922.383.000,00	PUP
1.01.03.xx.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Proporsi sarana prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	97.84 %	93%	8.020.975.000,00	95%	4.703.402.420,00	96%	5.173.742.662,00	98%	5.691.116.928,00	98%	6.260.228.621,00	98%	6.886.251.484,00	PUP
1.01.03.xx.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Cakupan ketersediaan air untuk pertanian	73%	75%	43.191.420.995,00	77%	51.865.154.430,00	78%	57.032.163.288,00	78%	54.899.234.930,80	79%	68.434.941.394,88	80%	76.747.109.991,20	BAPPEDA, SDAEM
1.01.03.xx.25	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Kondisi Prasarana penyediaan air baku baik	60%	65%	731.394.500,00	70%	441.137.000,00	75%	485.250.700,00	80%	833.775.770,00	85%	587.153.347,00	85%	645.868.681,70	RSUD PRAMBANAN, SDAEM
1.01.03.xx.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Embung dan sungai terkelola baik	74%	76%	7.792.562.125,00	77%	10.261.164.800,00	78%	12.787.281.280,00	79%	13.916.009.408,00	80%	15.157.610.348,80	82%	16.523.371.383,68	SDAEM, RSUD SLEMAN
1.01.03.xx.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Ketersediaan instalasi pengolah air limbah terpusat (IPAL)	2.75 %	2.88 %	15.026.618.400,00	3%	16.430.809.450,00	3.25 %	21.551.518.000,00	3.5 %	26.163.436.000,00	3.75 %	25.204.779.000,00	4%	26.967.724.000,00	BLH, PUP, RSUD PRAMBANAN
		Ketersediaan instalasi pengolah air limbah terpusat (SR)	4.5 %	4.59 %		5.49 %		6%		6.5 %		7%		8%		
		Cakupan ketersediaan layanan air bersih/air minum masyarakat	11%	19.5 %		20%		20.1 %		20.5 %		21%		21%		
1.01.03.xx.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh	N/A	11,11%	0,00	44,44%	5.250.000.000,00	55,56%	6.500.000.000,00	66,67%	5.500.000.000,00	88,89%	9.500.000.000,00	100%	10.550.000.000,00	PUP
1.01.03.xx.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Infrastruktur pedesaan dalam kondisi baik (air bersih)	49.83 %	52.99 %	7.709.447.150,00	56.15 %	9.200.000.000,00	59.31 %	16.157.500.000,00	62.41 %	18.075.125.000,00	65.62 %	20.229.793.000,00	66%	22.652.020.000,00	PUP
1.01.03.xx.31	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Kondisi gedung pemerintahan baik	81.63 %	83.33 %	28.031.659.450,00	84.34 %	47.628.930.000,00	84.87 %	62.951.800.000,00	85.71 %	95.315.600.000,00	86.55 %	98.727.340.000,00	87.39 %	116.786.074.000,00	PERPUSDA, KEC. SLEMAN, DISDIKPORA, PUP, BPMP2T, RSUD SLEMAN, HUBKOMINFO
1.01.03.xx.32	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase peserta pembinaan	50%	20%	463.382.600,00	40%	850.000.000,00	60%	999.500.000,00	80%	1.091.950.000,00	100%	1.193.145.000,00	100%	1.303.959.500,00	PUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.01.03.xx.33	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Rencana Detail yang telah di tetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah	4 Raperda	7 Raperda	1.132.327.500,00	7 Raperda	839.970.000,00	10 Raperda	1.246.993.500,00	13 Raperda	1.477.203.250,00	15 Raperda	1.617.423.575,00	16 Raperda	1.774.165.932,50	BAPPEDA, PUP
		Jumlah Rencana Detail yang telah di tetapkan menjadi Peraturan Daerah	0 Perda	0 Perda		0 Perda		0 Perda		1 Perda		1 Perda		1 Perda		
1.01.03.xx.34	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah desa target pengawasan	40 desa	40 desa	1.574.782.400,00	42 desa	2.223.013.000,00	45 desa	2.393.500.000,00	48 desa	2.438.850.000,00	50 desa	2.647.735.000,00	52 desa	2.877.008.500,00	KPPD, BPMP2T, PUP
		Luasan alih fungsi lahan	61,5 ha	<100 ha		<100 ha		<100 ha		<100 ha		<100 ha		<100 ha		
1.01.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				20.432.293.100,00		34.005.560.500,00		31.460.302.400,00		35.038.652.640,00		39.052.701.904,00		43.561.272.894,00	
1.01.04.xx.15	Program Pengembangan Perumahan	Ketersediaan rumah layak huni	97.96 %	98%	16.349.465.100,00	98.25 %	4.600.000.000,00	98.50 %	5.280.000.000,00	98.75 %	6.072.000.000,00	99%	6.996.400.000,00	99.25 %	8.075.760.000,00	PUP
1.01.04.xx.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase kawasan kumuh yang tertangani	56.91 %	60.8 %	0,00	71.5 %	15.664.184.000,00	97.87 %	17.230.602.400,00	100%	18.953.662.640,00	100%	20.849.028.904,00	100%	22.933.931.794,00	PUP
1.01.04.xx.18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase perbaikan rumah akibat bencana	N/A	50%	1.080.000.000,00	50%	7.226.376.500,00	55%	1.783.200.000,00	60%	2.129.840.000,00	65%	2.535.808.000,00	70%	3.012.969.600,00	PUP, BPBD
1.01.04.xx.20	Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase ketersediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	16%	16%	3.002.828.000,00	23%	6.515.000.000,00	30%	7.166.500.000,00	38%	7.883.150.000,00	46%	8.671.465.000,00	46%	9.538.611.500,00	PUP
1.01.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat				14.323.813.350,00		30.437.576.550,00		25.509.240.617,00		31.019.138.698,00		34.675.711.260,00		33.963.781.556,00	
1.01.05.xx.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase pos keamanan lingkungan yang aktif	N/A	13%	1.037.379.000,00	21%	1.060.393.500,00	30%	1.389.142.000,00	40%	1.466.199.000,00	50%	1.565.261.300,00	60%	1.622.799.000,00	SATPOL PP, PASAR, KESBANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.01.05.xx.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah kelompok jaga warga	0 kelompok	17 kelompok	1.934.853.925,00	34 kelompok	3.374.125.500,00	51 kelompok	2.351.353.965,00	68 kelompok	2.537.731.687,00	85 kelompok	2.522.200.374,00	102 kelompok	2.556.358.611,00	KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, SATPOL PP
1.01.05.xx.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah kasus di masyarakat sebagai akibat dari penyakit masyarakat	438 Kasus	≤ 400 Kasus	132.633.800,00	≤ 380 Kasus	412.978.550,00	≤ 360 Kasus	420.000.000,00	≤ 340 Kasus	450.000.000,00	≤ 320 Kasus	475.000.000,00	≤ 300 Kasus	480.000.000,00	KESBANG
1.01.05.xx.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik	55.81 %	61%	6.704.932.375,00	63%	11.962.695.700,00	67%	12.432.259.362,00	71%	13.455.800.224,00	75%	16.678.129.574,00	78%	18.596.940.677,00	KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, BPBD, NAKERSOS, KEC. SLEMAN
1.01.05.xx.23	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	87.09 %	88%	1.735.321.350,00	89%	4.434.128.700,00	90%	4.801.243.175,00	91%	3.379.899.467,00	95%	4.277.444.062,00	95%	4.903.608.662,00	BPBD, KEC. SEYEGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.01.05.xx.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100%	100%	913.366.875,00	100%	2.165.506.500,00	100%	776.432.250,00	100%	926.023.835,00	100%	955.221.731,00	100%	872.087.217,00	KEC. GAMPING, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. KALASAN, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, HUBKOMINFO, PERINDAGKOP, SATPOL PP
1.01.05.xx.25	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kapasitas anggota linmas	0 orang	500 orang	1.865.326.025,00	1010 orang	7.027.748.100,00	1520 orang	3.338.809.865,00	2030 orang	8.803.484.485,00	2540 orang	8.202.454.219,00	3050 orang	4.931.987.389,00	KEC. GAMPING, KESBANG, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, SATPOL PP, PASAR
1.01.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				2.720.329.900,00		3.759.891.950,00		5.062.627.603,00		5.334.403.933,00		5.850.048.479,00		6.305.940.479,00	
1.01.06.xx.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Kelompok PMKS yang aktif	145 Kelompok	150 Kelompok	698.432.400,00	155 Kelompok	663.212.000,00	165 Kelompok	1.437.367.000,00	170 Kelompok	1.527.882.000,00	185 Kelompok	1.664.391.000,00	200 Kelompok	1.829.516.000,00	NAKERSOS, PERINDAGKOP, PASAR
1.01.06.xx.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan penanganan orang terlantar dan anak jalanan	90%	90%	1.070.743.250,00	90%	1.484.820.050,00	90%	1.550.787.603,00	90%	1.628.325.933,00	90%	1.789.642.479,00	90%	1.912.688.479,00	SETDA, NAKERSOS
1.01.06.xx.17	Program pembinaan anak terlantar	Cakupan penanganan anak terlantar	90%	90%	39.346.750,00	90%	41.324.000,00	90%	44.217.000,00	90%	46.427.000,00	90%	51.070.000,00	90%	54.645.000,00	NAKERSOS
1.01.06.xx.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Cakupan penanganan penyandang cacat dan trauma	65%	70%	340.341.500,00	70%	536.206.000,00	75%	997.460.000,00	75%	1.047.333.000,00	75%	1.152.066.000,00	75%	1.232.711.000,00	NAKERSOS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.01.06.xx.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Cakupan pembinaan panti asuhan/panti jompo	90%	90%	36.637.000,00	90%	58.936.000,00	90%	347.681.000,00	90%	365.066.000,00	90%	401.572.000,00	90%	429.682.000,00	NAKERSOS
1.01.06.xx.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	40%	45%	534.829.000,00	50%	975.393.900,00	55%	685.115.000,00	60%	719.370.000,00	65%	791.307.000,00	67%	846.698.000,00	NAKERSOS
1.02	Urusan Pemerintahan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				104.324.808.514,00		155.568.070.785,00		157.786.938.970,50		157.788.677.456,35		174.677.674.801,60		174.768.292.006,65	
1.02.01	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				7.618.405.328,00		10.699.175.460,00		10.705.295.000,00		11.009.608.000,00		11.049.299.000,00		11.489.465.502,00	
1.02.01.xx.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang dilatih	68.33 %	68.33 %	5.634.158.500,00	70%	8.437.810.000,00	70%	8.184.694.000,00	75%	8.363.488.000,00	75%	8.179.963.000,00	75%	8.464.381.502,00	NAKERSOS
1.02.01.xx.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase penempatan pencari kerja	70%	70%	891.103.000,00	75%	968.185.500,00	80%	1.035.956.000,00	85%	1.089.289.000,00	90%	1.198.218.000,00	90%	1.282.092.000,00	NAKERSOS
1.02.01.xx.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase konflik yang ditangani	85%	100%	1.093.143.828,00	100%	1.293.179.960,00	100%	1.484.645.000,00	100%	1.556.831.000,00	100%	1.671.118.000,00	100%	1.742.992.000,00	NAKERSOS
1.02.02	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak				3.857.968.301,00		3.678.786.600,00		4.536.000.000,00		4.611.000.000,00		4.688.000.000,00		4.810.000.000,00	
1.02.02.xx.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah desa lokasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	24 Desa	26 Desa	827.341.925,00	28 Desa	800.000.000,00	30 Desa	1.005.000.000,00	32 Desa	1.030.000.000,00	34 Desa	1.055.000.000,00	36 Desa	1.085.000.000,00	KBPMPP
1.02.02.xx.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase pemenuhan hak anak	80%	81%	2.312.367.475,00	82%	2.020.000.000,00	83%	2.355.000.000,00	84%	2.387.000.000,00	85%	2.420.000.000,00	86%	2.470.000.000,00	KBPMPP
1.02.02.xx.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	311.182.450,00	100%	408.786.600,00	100%	499.000.000,00	100%	506.000.000,00	100%	515.000.000,00	100%	540.000.000,00	KBPMPP
1.02.02.xx.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase lembaga PUG aktif	100%	100%	407.076.451,00	100%	450.000.000,00	100%	677.000.000,00	100%	688.000.000,00	100%	698.000.000,00	100%	715.000.000,00	KBPMPP
1.02.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				4.422.821.400,00		6.322.163.850,00		6.892.500.000,00		7.804.000.000,00		7.796.000.000,00		8.273.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.02.03.xx.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	100%	100%	4.422.821.400,00	100%	6.322.163.850,00	100%	6.892.500.000,00	100%	7.804.000.000,00	100%	7.796.000.000,00	100%	8.273.000.000,00	PERTANIAN
		Persentase cadangan pangan	27.86 %	60%		70%		80%		90%		100%		100%		
		Persentase Pola Pangan Harapan	85.5 %	86.5 %		87.5 %		88%		88.5 %		89%		89.5 %		
		Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100%	90%		90%		90%		90%		90%		100%		
		Persentase stabilitas harga dan pasokan pangan	100%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		
		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%		
		Persentase ketersediaan energi dan protein (energi)	157%	140%		140%		140%		140%		140%		140%		
		Persentase ketersediaan energi dan protein (protein)	153%	141%		141%		141%		141%		141%		141%		
		Peningkatan jumlah kelompok penangkar benih/bibit pertanian	1 Kelompok	1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok		
1.02.04	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				2.987.174.518,00		6.175.764.375,00		4.683.211.571,00		4.971.973.655,00		5.267.948.807,00		5.491.944.922,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.02.04.xx.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	86.4 %	86.5 %	1.953.066.250,00	87%	4.961.764.375,00	87.5 %	3.427.111.571,00	88%	3.631.873.655,00	88.5 %	3.846.298.807,00	89%	4.023.539.922,00	KEC. GAMPING, KPPD, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, BPMP2T, PERINDAGKOP, PASAR, PUP, KEC. DEPOK
1.02.04.xx.17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi	100%	100%	462.760.850,00	100%	275.000.000,00	100%	246.100.000,00	100%	264.600.000,00	100%	285.100.000,00	100%	300.200.000,00	KEC. GAMPING, KPPD, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. MLATI, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, KEC. KALASAN
1.02.04.xx.18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen pertanahan	0 Jenis	1 Jenis	571.347.418,00	2 Jenis	939.000.000,00	3 Jenis	1.010.000.000,00	4 Jenis	1.075.500.000,00	5 Jenis	1.136.550.000,00	5 Jenis	1.168.205.000,00	KPPD, BPMP2T
1.02.05	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				18.539.628.280,00		31.949.380.950,00		29.513.896.720,00		31.882.069.902,00		34.627.328.102,20		38.118.350.172,95	
1.02.05.xx.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Layanan pengelolaan sampah Tipe A	15 TPS	15 TPS	7.729.039.150,00	15 TPS	10.059.348.650,00	17 TPS	10.653.640.600,00	20 TPS	11.936.609.500,00	21 TPS	13.279.411.300,00	21 TPS	15.263.825.200,00	BLH, PASAR
		Layanan pengelolaan sampah Tipe B	3 TPS	3 TPS		3 TPS		5 TPS		7 TPS		9 TPS		9 TPS		
		Layanan pengelolaan sampah Tipe C	180 TPS	200 TPS		225 TPS		260 TPS		300 TPS		350 TPS		360 TPS		
		Rasio layanan pengelolaan sampah	6.5	8		9.4		9.9		10.5		11.2		12.4		
		Sampah yang tertangani	26%	28.8 %		29.5 %		32%		33.5 %		35%		36.5 %		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.02.05.xx.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Presentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	84.37 %	85%	2.473.112.900,00	86%	8.051.273.500,00	87%	4.573.793.350,00	88%	4.691.959.855,00	89%	5.213.892.300,50	90%	5.776.221.120,55	RSUD PRAMBANAN, BAPPEDA, BLH, PUP, HUBKOMINFO, PERINDAGKOP, SDAEM, PASAR, RSUD SLEMAN
		Jumlah dokumen KLHS tata ruang	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		
		Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	72.91 %	74%		76%		78%		80%		82%		84%		
1.02.05.xx.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah kampung iklim	8 Kampung	11 Kampung	2.729.041.330,00	14 Kampung	4.466.182.200,00	17 Kampung	5.107.866.770,00	20 Kampung	5.562.853.547,00	23 Kampung	6.067.438.501,70	26 Kampung	6.523.442.852,40	PERTANIAN, BLH, SDAEM, BAPPEDA
		Meningkatnya perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	4%	7%		10%		15%		20%		25%		30%		
1.02.05.xx.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan jumlah sekolah berbudaya lingkungan	33 Sekolah	42 Sekolah	306.029.900,00	51 Sekolah	315.000.000,00	60 Sekolah	404.598.000,00	69 Sekolah	443.449.000,00	78 Sekolah	486.041.000,00	87 Sekolah	526.329.000,00	BLH
		Peningkatan jumlah pondok pesantren berbudaya lingkungan	15 Pondok pesantren	18 Pondok pesantren		21 Pondok pesantren		24 Pondok pesantren		27 Pondok pesantren		30 Pondok pesantren		33 Pondok pesantren		
1.02.05.xx.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase jumlah kendaraan peserta uji emisi yang memenuhi baku mutu lingkungan	79%	79.1 %	79.950.000,00	79.15 %	110.000.000,00	79.2 %	136.184.000,00	79.25 %	149.803.000,00	79.3 %	164.783.000,00	79.4 %	175.645.000,00	BLH
1.02.05.xx.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH yang dikelola	20.03 %	20.04 %	5.222.455.000,00	20.05 %	8.947.576.600,00	20.06 %	8.637.814.000,00	20.07 %	9.097.395.000,00	20.08 %	9.415.762.000,00	20.08 %	9.852.887.000,00	BLH
		RTH yang dikelola (untuk kepentingan publik)	1 Unit	1 Unit		1 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.02.06	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				3.848.733.475,00		5.231.775.900,00		5.367.433.205,00		5.768.646.154,00		6.221.044.569,00		6.675.213.168,00	
1.02.06.xx.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	100%	3.848.733.475,00	100%	5.231.775.900,00	100%	5.367.433.205,00	100%	5.768.646.154,00	100%	6.221.044.569,00	100%	6.675.213.168,00	KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, DUKCAPIL
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	99.17 %	99.23 %		99.32 %		99.39 %		99.4 %		99.45 %		99.5 %		
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	87%	88%		89%		90%		91%		91.5 %		92%		
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	88%	56%		58%		62%		65%		70%		72%		
1.02.07	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				9.862.530.385,00		17.162.817.960,00		10.794.431.044,00		11.279.387.012,00		11.887.774.099,00		12.449.992.689,00	
1.02.07.xx.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase jumlah Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang terlatih	4%	9%	1.202.787.375,00	15%	2.629.414.150,00	20%	2.368.907.386,00	30%	2.465.845.159,00	40%	2.562.721.464,00	45%	2.637.988.490,00	KEC. GAMPING, SETDA, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, PERTANIAN, BUDPAR, PERINDAGKOP, KBPMPP
1.02.07.xx.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sudah terbentuk	10 Bumdes	17 Bumdes	450.875.500,00	20 Bumdes	593.130.000,00	23 Bumdes	541.457.000,00	25 Bumdes	587.650.000,00	28 Bumdes	641.298.000,00	35 Bumdes	689.945.000,00	PERTANIAN, PERINDAGKOP, KBPMPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.02.07.xx.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase KK miskin	11.36 %	10.69 %	6.398.989.260,00	10.02 %	12.050.529.935,00	9.35 %	6.797.519.406,00	8.68 %	7.059.751.611,00	8.5 %	7.413.233.427,00	8%	7.791.151.287,00	KEC. GAMPING, SETDA, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC.
		Keaktifan Tim Penanggula-ngan Kemiskinan (TPK) Desa	65%	75%		77%		79%		80%		85%		87%		
1.02.07.xx.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90%	90%	1.550.440.750,00	90%	1.738.764.875,00	90%	912.921.252,00	90%	966.440.242,00	90%	1.040.896.208,00	90%	1.066.837.912,00	KEC. GAMPING, SETDA, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, INSPEKTORAT
1.02.07.xx.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) yang ber KB	87.07 %	88.05 %	259.437.500,00	88.1 %	150.979.000,00	88.15 %	173.626.000,00	88.2 %	199.700.000,00	88.25 %	229.625.000,00	88.3 %	264.070.000,00	PERINDAGKOP, KBPMPP
1.02.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				3.668.143.100,00		8.588.136.125,00		7.247.755.625,00		7.311.693.406,00		7.394.693.406,00		7.562.678.077,00	
1.02.08.xx.15	Program Keluarga Berencana	Angka prevalensi peserta KB aktif	79.14 %	79.2 %	1.457.206.575,00	79.25 %	5.456.246.750,00	79.3 %	3.868.000.000,00	79.35 %	3.883.000.000,00	79.4 %	3.922.000.000,00	79.5 %	3.992.000.000,00	KBPMPP
		Total Fertility Rate (TFR)	2.1 angka per 1.000 penduduk perempuan	2 angka per 1.000 penduduk perempuan		2 angka per 1.000 penduduk perempuan		2 angka per 1.000 penduduk perempuan		2 angka per 1.000 penduduk perempuan		2 angka per 1.000 penduduk perempuan		2 angka per 1.000 penduduk perempuan		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.02.08.xx.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase usia nikah bagi perempuan < 20 tahun	0.63 %	1.5 %	198.175.475,00	1.4 %	235.066.500,00	1.3 %	238.000.000,00	1.2 %	241.000.000,00	1.1 %	245.000.000,00	1%	255.000.000,00	KBPMPP
1.02.08.xx.17	Program pelayanan kontrasepsi	Jumlah Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	86%	86%	248.769.000,00	86%	254.415.500,00	86%	313.000.000,00	86%	318.000.000,00	86%	323.000.000,00	86%	345.000.000,00	KBPMPP
		Persentase KB pria	8.2 %	8.25 %		8.28 %		8.3 %		8.35 %		8.4 %		8.5 %		
1.02.08.xx.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri	Persentase capaian KB mandiri	80%	80.02 %	1.109.555.475,00	80.03 %	1.750.362.500,00	80.04 %	1.760.000.000,00	80.06 %	1.775.000.000,00	80.08 %	1.790.000.000,00	80.1 %	1.820.000.000,00	KBPMPP
1.02.08.xx.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah kelompok PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang berkualitas pada PIK-R tingkatan tegar	117 kelompok	134 kelompok	348.191.850,00	151 kelompok	356.870.000,00	168 kelompok	360.000.000,00	185 kelompok	365.000.000,00	202 kelompok	370.000.000,00	219 kelompok	380.000.000,00	KBPMPP
1.02.08.xx.21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Jumlah desa yang telah mendapat orientasi HIV AIDS	4 Desa	6 Desa	150.407.850,00	8 Desa	170.407.000,00	10 Desa	218.755.625,00	12 Desa	229.693.406,00	14 Desa	234.693.406,00	16 Desa	240.678.077,00	KBPMPP, KEC. SEYEGAN
1.02.08.xx.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Jumlah kelompok Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang mendukung program KB	86 Kelompok	86 Kelompok	45.535.875,00	86 Kelompok	250.535.875,00	86 Kelompok	355.000.000,00	86 Kelompok	360.000.000,00	86 Kelompok	365.000.000,00	86 Kelompok	375.000.000,00	KBPMPP
1.02.08.xx.24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu Padu)	6 Kelompok	23 Kelompok	110.301.000,00	40 Kelompok	114.232.000,00	57 Kelompok	135.000.000,00	64 Kelompok	140.000.000,00	71 Kelompok	145.000.000,00	86 Kelompok	155.000.000,00	KBPMPP
1.02.09	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				14.858.713.680,00		20.638.220.250,00		27.903.942.600,00		19.837.457.200,00		28.681.369.300,00		19.086.016.700,00	
1.02.09.xx.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase ketersediaan Prasarana dan fasilitas perhubungan	59%	60%	6.590.402.625,00	61%	8.617.576.550,00	62%	8.951.975.000,00	63%	9.021.000.000,00	64%	9.933.575.000,00	64%	10.084.000.000,00	HUBKOMINFO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.02.09.xx.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase kondisi fasilitas LLAJ baik	74%	75%	3.000.554.000,00	76%	2.902.056.500,00	78%	4.175.000.000,00	79%	3.077.550.000,00	80%	3.129.500.000,00	85%	540.000.000,00	HUBKOMINFO
1.02.09.xx.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	56.25 %	56.25 %	387.890.455,00	56.25 %	1.029.756.950,00	56.25 %	986.054.650,00	56.25 %	1.176.119.100,00	56.25 %	1.248.550.100,00	56.25%	1.289.366.700,00	HUBKOMINFO
1.02.09.xx.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana perhubungan	74%	75%	1.143.531.350,00	76%	1.415.568.750,00	78%	7.350.792.000,00	79%	1.601.035.000,00	80%	9.209.816.000,00	85%	1.768.650.000,00	HUBKOMINFO
1.02.09.xx.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase ketersediaan perlengkapan keamanan lalu lintas	94%	98%	2.478.956.500,00	98%	3.460.177.000,00	98%	3.380.800.000,00	98%	3.673.000.000,00	98%	3.845.000.000,00	98%	4.054.000.000,00	HUBKOMINFO
1.02.09.xx.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Umum (KBU) yang lolos uji	92.76 %	100%	1.257.378.750,00	100%	3.213.084.500,00	100%	3.059.320.950,00	100%	1.288.753.100,00	100%	1.314.928.200,00	100%	1.350.000.000,00	HUBKOMINFO
1.02.10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				14.154.119.022,00		19.579.206.495,00		20.750.722.116,00		21.603.160.866,50		22.874.049.945,15		23.784.476.294,55	
1.02.10.xx.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer	60%	70%	7.796.394.767,00	75%	11.522.279.220,00	80%	10.871.439.472,00	85%	11.443.953.651,50	90%	12.153.481.984,15	100%	12.893.932.566,55	KORPRI, SETDA, KPPD, KESBANG, KAD, PERPUSDA, DINKES, SATPOL PP, INSPEKTORAT, BAPPEDA, PERTANIAN, BKD, NAKERSOS, BLH, BPMP2T, PUP, DPKAD, HUBKOMINFO, PERINDAGKOP, SDAEM, PASAR, KBPMPP, DISDIKPORA, BPBD, DUKCAPIL, KEC. DEPOK, KEC. GODEAN, KEC. KALASAN, KEC. MOYUDAN, DISPENDA
		Jumlah publikasi informasi melalui media online	290 Publikasi	300 Publikasi		325 Publikasi		350 Publikasi		360 Publikasi		375 Publikasi		400 Publikasi		
		Jumlah lelang pengadaan barang jasa	240 Lelang	250 Lelang		250 Lelang		250 Lelang		250 Lelang		250 Lelang		250 Lelang		
		Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	65%	75%		80%		85%		85%		90%		90%		
1.02.10.xx.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Persentase pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi berita di media sebagai materi arah kebijakan daerah	80%	80%	146.016.825,00	80%	146.154.000,00	80%	166.680.718,00	80%	175.014.754,00	80%	183.765.492,00	80%	183.765.492,00	SETDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.02.10.xx.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo	40%	50%	63.403.975,00	55%	91.428.000,00	60%	97.500.000,00	65%	102.500.000,00	70%	110.000.000,00	80%	120.000.000,00	HUBKOMINFO, KBPMPP
1.02.10.xx.18	Program kerjasama informasi dan media massa	Jumlah jejaring informasi dan media massa	41 Jejaring	41 Jejaring	2.425.168.060,00	42 Jejaring	2.768.201.525,00	43 Jejaring	2.794.974.461,00	44 Jejaring	2.941.402.249,00	45 Jejaring	3.088.773.236,00	46 Jejaring	3.150.496.236,00	KORPRI, SETDA, BPMP2T, SETWAN
1.02.10.xx.19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah modul layanan kepemerintahan berbasis TIK	5 layanan	15 layanan	3.723.135.395,00	20 layanan	5.051.143.750,00	25 layanan	6.820.127.465,00	28 layanan	6.940.290.212,00	30 layanan	7.338.029.233,00	35 layanan	7.436.282.000,00	BPBD, BKD, HUBKOMINFO, BUDPAR, RSUD SLEMAN
		Jumlah modul layanan publik (masyarakat) yang berbasis TIK	25 layanan	35 layanan		40 layanan		45 layanan		52 layanan		60 layanan		65 layanan		
		Jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	3	10		15		20		30		40		50		
		Persentase peningkatan layanan informasi berbasis teknologi	64%	74%		76%		80%		82%		85%		95%		
1.02.11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah				2.312.772.100,00		2.885.360.500,00		3.482.097.000,00		4.004.435.000,00		4.605.370.000,00		5.296.177.000,00	
1.02.11.xx.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi yang terbentuk pertahun	6 Koperasi	10 Koperasi	75.551.000,00	10 Koperasi	129.020.000,00	10 Koperasi	220.473.000,00	10 Koperasi	253.549.000,00	10 Koperasi	291.586.000,00	10 Koperasi	335.322.000,00	PERINDAGKOP
1.02.11.xx.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru	100 Wirausaha baru	105 Wirausaha baru	608.616.500,00	115 Wirausaha baru	632.193.000,00	125 Wirausaha baru	727.105.000,00	135 Wirausaha baru	836.179.000,00	140 Wirausaha baru	961.617.000,00	145 Wirausaha baru	1.105.860.000,00	PERINDAGKOP
1.02.11.xx.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan aksesibilitas UMKM	45 UMKM	45 UMKM	1.168.027.100,00	45 UMKM	1.880.042.500,00	45 UMKM	2.162.413.000,00	45 UMKM	2.486.776.000,00	45 UMKM	2.859.933.000,00	45 UMKM	3.288.925.000,00	PERINDAGKOP
1.02.11.xx.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	92.47 %	92.5 %	460.577.500,00	92.55 %	244.105.000,00	92.6 %	372.106.000,00	92.65 %	427.931.000,00	92.7 %	492.234.000,00	93%	566.070.000,00	PERINDAGKOP
1.02.12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				927.330.925,00		1.085.000.000,00		1.245.000.000,00		1.375.000.000,00		1.514.000.000,00		1.667.550.000,00	
1.02.12.xx.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase investor sektor prioritas	70.84 %	70.97 %	751.724.000,00	71.28 %	910.000.000,00	72%	1.050.000.000,00	72.16 %	1.155.000.000,00	72.45 %	1.270.500.000,00	72.62 %	1.397.550.000,00	BPMP2T
1.02.12.xx.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi	4.261 Rp	4.393 Rp	175.606.925,00	4.525 Rp	175.000.000,00	4.661 Rp	195.000.000,00	4.8 Rp	220.000.000,00	4.944 Rp	243.500.000,00	5.092 Rp	270.000.000,00	BPMP2T
1.02.13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga				3.419.287.700,00		4.288.150.900,00		4.875.568.231,00		5.442.374.902,00		6.029.010.532,00		6.520.667.832,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.02.13.xx.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Tersedianya dokumen data potensi kepemudaan	1 Dokumen	1 Dokumen	202.443.450,00	1 Dokumen	303.000.000,00	1 Dokumen	333.300.000,00	1 Dokumen	366.630.000,00	1 Dokumen	403.293.000,00	1 Dokumen	443.621.000,00	DISDIKPORA
1.02.13.xx.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase ormas kepemudaan yang aktif	90%	90%	345.983.450,00	90%	408.313.900,00	93%	432.462.800,00	93%	478.332.100,00	96%	526.165.400,00	96%	578.781.000,00	DISDIKPORA
1.02.13.xx.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase ormas pemuda yang aktif di bidang kewirausahaan	24%	25%	75.727.500,00	26%	188.000.000,00	27%	206.300.000,00	28%	225.430.000,00	29%	250.473.000,00	30%	275.520.000,00	DISDIKPORA
1.02.13.xx.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Meningkatnya pemahaman pemuda tentang bahaya penyalah gunaan Napza	22%	22%	634.740.500,00	25%	648.434.500,00	25%	910.541.284,00	29%	970.613.498,00	29%	1.056.712.673,00	32%	1.125.129.673,00	SETDA, DISDIKPORA, NAKERSOS
		Jumlah satuan tugas (satgas) narkoba tingkat desa	21 Satuan Tugas	25 Satuan Tugas		28 Satuan Tugas		31 Satuan Tugas		34 Satuan Tugas		37 Satuan Tugas		41 Satuan Tugas		
1.02.13.xx.19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase keaktifan budaya olah raga di sekolah	90.3 %	90.6 %	77.096.900,00	91%	227.983.700,00	92%	250.000.000,00	93%	274.000.000,00	94%	298.100.000,00	94%	327.910.000,00	DISDIKPORA
1.02.13.xx.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase prestasi olahraga pelajar	73%	73%	1.869.395.900,00	74%	2.512.418.800,00	74%	2.742.964.147,00	75%	3.127.369.304,00	76%	3.494.266.459,00	76%	3.769.706.159,00	KORPRI, SETDA, DISDIKPORA
1.02.13.xx.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana dan prasarana olahraga yang layak	83%	83%	213.900.000,00	83%	0,00	83%	0	83%	0	83%	0	83%	0	PUP
1.02.14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				2.087.484.700,00		2.946.114.750,00		3.255.074.009,00		3.623.197.740,00		4.209.486.543,00		4.472.957.612,50	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.02.14.xx.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	90%	95%	2.087.484.700,00	95%	2.946.114.750,00	95%	3.255.074.009,00	95%	3.623.197.740,00	95%	4.209.486.543,00	95%	4.472.957.612,50	KEC. GAMPING, SETDA, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, BAPPEDA, PERTANIAN, NAKERSOS, PERINDAGKOP, KBPMPP
1.02.15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				0,00		109.199.500,00		155.594.171,00		163.373.880,00		171.545.574,00		171.542.574,00	
1.02.15.xx.15	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunika-si terlayani dan terlindungi keamanannya	90%	90%	0,00	90%	109.199.500,00	90%	155.594.171,00	90%	163.373.880,00	90%	171.545.574,00	90%	171.542.574,00	SETDA
1.02.16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				6.443.786.600,00		7.084.260.000,00		8.158.833.750,00		7.742.875.438,00		7.060.319.209,00		7.326.185.170,00	
1.02.16.xx.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	58.23 %	58.26 %	598.196.100,00	58.29 %	977.275.000,00	58.32 %	1.120.833.750,00	58.35 %	1.225.875.438,00	58.38 %	1.018.319.209,00	58.41 %	1.257.185.170,00	PERPUSDA, BUDPAR, KEC. GODEAN
1.02.16.xx.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pengelolaan kekayaan budaya secara profesional	17.62 %	17.65 %	2.159.148.500,00	17.68 %	3.612.500.000,00	17.71 %	3.932.000.000,00	17.74 %	3.422.000.000,00	17.77 %	2.862.000.000,00	17.8 %	2.902.000.000,00	BUDPAR
1.02.16.xx.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase pengelolaan keragaman budaya	13.6 %	13.9 %	3.346.545.000,00	14.2 %	1.960.320.000,00	14.5 %	2.063.000.000,00	14.8 %	2.005.000.000,00	15.1 %	2.112.000.000,00	15.4 %	2.049.000.000,00	BUDPAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.02.16.xx.18	Program Pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya	Persentase pelestarian dan pengembang-an peninggalan budaya	5.65 %	5.68 %	339.897.000,00	5.7 %	534.165.000,00	5.73 %	1.043.000.000,00	5.76 %	1.090.000.000,00	5.79 %	1.068.000.000,00	5.82 %	1.118.000.000,00	BUDPAR
1.02.17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				1.369.502.225,00		1.666.851.000,00		1.771.403.550,00		1.859.973.728,00		1.952.972.414,00		2.050.621.034,00	
1.02.17.xx.16	Program Pengembangan Budaya Baca	Persentase minat baca masyarakat	55.85 %	56.91 %	789.105.250,00	57.22 %	910.686.500,00	57.31 %	974.826.825,00	57.85 %	1.023.568.166,00	58.18 %	1.074.746.575,00	58.63 %	1.128.483.903,00	PERPUSDA
1.02.17.xx.17	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan desa dan masyarakat	0 Unit	4 Unit	580.396.975,00	8 Unit	756.164.500,00	12 Unit	796.576.725,00	16 Unit	836.405.562,00	20 Unit	878.225.839,00	24 Unit	922.137.131,00	PERPUSDA, KBPMPP
1.02.18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				3.946.406.775,00		5.477.706.170,00		6.448.180.378,50		7.498.450.572,85		8.647.463.301,25		9.521.453.258,65	
1.02.18.xx.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase SKPD yang menerapkan tertib arsip dengan kategori baik.	68.08 %	68.08 %	312.697.010,00	69%	394.869.000,00	70%	451.809.800,00	72%	517.956.700,00	74%	592.906.400,00	76%	658.005.300,00	KAD
1.02.18.xx.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%	20%	3.090.479.090,00	20%	4.062.742.295,00	20%	4.817.521.335,50	20%	5.540.561.817,85	20%	6.312.434.293,25	20%	6.796.412.350,65	KORPRI, KEC. GAMPING, SETDA, KPPD, KESBANG, KAD, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, PERPUSDA, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, DINKES, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, DISDIKPORA, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, BPBD, SATPOL PP, INSPEKTORAT, BAPPEDA, PERTANIAN, BKD, NAKERSOS, BLH, BPMP2T, PUP, BUDPAR, DUKCAPIL, DISPENDA, DPKAD, HUBKOMINFO, PERINDAGKOP, PASAR, SETWAN, KBPMPP, SDAEM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
1.02.18.xx.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	90%	90%	169.795.000,00	90%	256.013.500,00	90%	462.000.000,00	90%	597.000.000,00	90%	747.000.000,00	90%	933.700.000,00	KAD, SDAEM, KBPMPP
1.02.18.xx.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Tingkat kepuasan masyarakat	70%	71%	373.435.675,00	72%	764.081.375,00	73%	716.849.243,00	74%	842.932.055,00	75%	995.122.608,00	76%	1.133.335.608,00	SETDA, KAD
2	Urusan Pemerintahan Pilihan				112.976.699.438,00		90.260.814.750,00		102.734.567.837,00		166.258.644.506,00		237.936.173.136,00		155.361.344.677,00	
2.00	Urusan Pemerintahan Pilihan				112.976.699.438,00		90.260.814.750,00		102.734.567.837,00		166.258.644.506,00		237.936.173.136,00		155.361.344.677,00	
2.00.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				3.505.484.500,00		3.699.097.500,00		3.992.000.000,00		4.190.000.000,00		4.385.000.000,00		4.585.000.000,00	
2.00.01.xx.20	Program pengembangan budidaya perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan	7%	9%	2.882.179.000,00	9%	2.513.968.300,00	9%	2.715.000.000,00	9%	2.835.000.000,00	9%	2.955.000.000,00	9%	3.075.000.000,00	PERTANIAN
2.00.01.xx.22	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan teknologi yang dirokemendasi-kan	5%	5%	135.753.500,00	5%	431.629.200,00	5%	455.000.000,00	5%	470.000.000,00	5%	485.000.000,00	5%	500.000.000,00	PERTANIAN
2.00.01.xx.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase peningkatan konsumsi ikan	1.1 %	1.1 %	339.313.500,00	1.1 %	609.500.000,00	1.1 %	660.000.000,00	1.1 %	705.000.000,00	1.1 %	750.000.000,00	1.1 %	800.000.000,00	PERTANIAN
		Peningkatan produk perikanan yang bersertifikasi	2.5 Jumlah produk	5 Jumlah produk		5 Jumlah produk		5 Jumlah produk		5 Jumlah produk		5 Jumlah produk		5 Jumlah produk		
2.00.01.xx.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Peningkatan jumlah ikan di perairan umum	1150 kg	1000 kg	148.238.500,00	1100 kg	144.000.000,00	1200 kg	162.000.000,00	1300 kg	180.000.000,00	1400 kg	195.000.000,00	1500 kg	210.000.000,00	PERTANIAN
2.00.02	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				5.697.995.620,00		18.878.571.000,00		18.575.075.545,00		19.798.523.100,00		22.025.625.409,00		23.257.487.950,00	
2.00.02.xx.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	4.117.000 orang	4.117.000 orang	2.015.783.000,00	4.323.000 orang	4.052.496.000,00	4.561.000 orang	4.604.600.000,00	4.834.000 orang	4.754.500.000,00	5.149.000 orang	4.906.000.000,00	5.149.000 orang	5.060.000.000,00	BPMP2T, BUDPAR
		Lama tinggal wisatawan mancanegara	1,99 hari	2,00 hari		2,01 hari		2,02 hari		2,03 hari		2,04 hari		2,05 hari		
		Lama tinggal wisatawan nusantara	1,62 hari	1,63 hari		1,64 hari		1,65 hari		1,66 hari		1,67 hari		1,68 hari		
2.00.02.xx.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan kapasitas destinasi wisata	3 buah	3 buah	2.621.480.880,00	3 buah	12.982.945.000,00	3 buah	12.513.000.000,00	3 buah	13.539.000.000,00	3 buah	15.565.000.000,00	3 buah	16.591.000.000,00	BUDPAR
2.00.02.xx.17	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kerjasama/ kemitraan pariwisata	6 Buah	6 Buah	715.776.790,00	6 Buah	1.194.612.000,00	7 Buah	1.012.000.000,00	7 Buah	1.035.000.000,00	7 Buah	1.058.000.000,00	7 Buah	1.080.000.000,00	BUDPAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
2.00.02.xx.18	Program Pengembangan Desa Wisata	Jumlah desa wisata kategori mandiri	6 jumlah	7 jumlah	344.954.950,00	8 jumlah	648.518.000,00	9 jumlah	445.475.545,00	10 jumlah	470.023.100,00	11 jumlah	496.625.409,00	12 jumlah	526.487.950,00	BUDPAR
2.00.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				24.710.219.218,00		16.984.121.750,00		19.909.860.000,00		21.136.700.000,00		22.559.670.000,00		23.819.410.000,00	
2.00.03.xx.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kenaikan kelas kelompok	56 Kelom-pok	48 Kelom-pok	1.477.411.500,00	48 Kelom-pok	2.219.055.625,00	48 Kelom-pok	2.969.000.000,00	48 Kelom-pok	3.085.000.000,00	48 Kelom-pok	3.260.000.000,00	48 Kelom-pok	3.390.000.000,00	PERTANIAN
2.00.03.xx.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan produk pertanian/ perkebunan yang bersertifikat	39 Jumlah produk	5 Jumlah produk	860.104.525,00	5 Jumlah produk	1.371.006.725,00	5 Jumlah produk	1.764.000.000,00	5 Jumlah produk	1.918.000.000,00	5 Jumlah produk	2.073.000.000,00	5 Jumlah produk	2.228.000.000,00	PERTANIAN
2.00.03.xx.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan SOP GAP	15%	15%	2.557.377.350,00	15%	3.384.720.100,00	15%	3.505.000.000,00	15%	3.710.000.000,00	15%	3.915.000.000,00	15%	4.120.000.000,00	PERTANIAN
2.00.03.xx.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian	0.5 %	0.5 %	16.092.236.000,00	0.5 %	5.530.927.100,00	0.5 %	6.394.860.000,00	0.5 %	6.955.000.000,00	0.5 %	7.641.100.000,00	0.5 %	8.220.000.000,00	PERTANIAN
2.00.03.xx.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase peningkatan pengetahuan penyuluh dan petugas teknis	10%	10%	1.437.559.850,00	10%	2.006.042.600,00	10%	2.330.000.000,00	10%	2.385.000.000,00	10%	2.440.000.000,00	10%	2.525.000.000,00	PERTANIAN
2.00.03.xx.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase penangan kesehatan ternak	80%	80%	1.233.663.993,00	80%	1.128.906.600,00	80%	1.392.000.000,00	80%	1.453.700.000,00	80%	1.525.570.000,00	80%	1.556.410.000,00	PERTANIAN
2.00.03.xx.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan	0.23 %	0.267 %	110.668.000,00	0.267 %	320.000.000,00	0.267 %	450.000.000,00	0.267 %	500.000.000,00	0.267 %	550.000.000,00	0.267 %	600.000.000,00	PERTANIAN
2.00.03.xx.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan produk perternakan yang bersertifikat	2 Jumlah produk	3 Jumlah produk	190.200.500,00	3 Jumlah produk	193.866.000,00	3 Jumlah produk	255.000.000,00	3 Jumlah produk	280.000.000,00	3 Jumlah produk	305.000.000,00	3 Jumlah produk	330.000.000,00	PERTANIAN
2.00.03.xx.24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Persentase peningkatan peternak yang menerapkan teknologi yang direkomendasi-kan	5%	5%	750.997.500,00	5%	829.597.000,00	5%	850.000.000,00	5%	850.000.000,00	5%	850.000.000,00	5%	850.000.000,00	PERTANIAN
2.00.04	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan				1.339.940.250,00		0,00		0		0		0		0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
2.00.04.xx.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase peningkatan luasan hutan rakyat	3.9 %	2%	224.862.000,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	PERTANIAN
2.00.04.xx.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Persentase penurunan luas lahan kritis	6.1 %	2%	1.057.458.250,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	PERTANIAN
2.00.04.xx.20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Peningkatan kelompok yang mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan kehutanan	14 Kelom-pok	14 Kelom-pok	57.620.000,00	0 Kelom-pok	0,00	0 Kelom-pok	0	0 Kelom-pok	0	0 Kelom-pok	0	0 Kelom-pok	0	PERTANIAN
2.00.05	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral				6.558.903.750,00		0,00		0		0		0		0	
2.00.05.xx.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persentase usaha penambangan yang sudah memiliki ijin dan direkomendasikan	60%	70%	113.073.150,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	SDAEM
2.00.05.xx.16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Persentase Penambangan rakyat yang sesuai kaidah teknis	12%	15%	99.182.250,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	SDAEM
2.00.05.xx.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase rumah yang teraliri listrik	99.96 %	99.97 %	6.030.718.050,00	0%	0,00	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	SDAEM
2.00.05.xx.18	Program Pengembangan Energi Terbarukan	Jumlah unit energi alternatif yang terbangun	400 Unit	410 Unit	315.930.300,00	0 Unit	0,00	0 UnitUnit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	SDAEM
2.00.06	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				69.413.163.300,00		47.911.156.500,00		57.130.064.292,00		117.642.102.406,00		185.012.786.727,00		99.253.463.727,00	
2.00.06.xx.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase penyalur barang dalam pengawasan yang patuh	49%	50%	1.292.391.850,00	51%	6.485.317.000,00	52%	1.661.348.292,00	53%	2.373.040.406,00	54%	1.903.262.727,00	55%	2.027.491.727,00	SETDA, BPMP2T, PERINDAGKOP, PASAR
		Jumlah temuan produk tidak layak dikonsumsi	260 produk	248 produk		236 produk		224 produk		213 produk		202 produk		195 produk		
2.00.06.xx.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor kumulatif	44.840.907 US$	42.000.000 US$	846.032.850,00	42.500.000 US$	733.054.000,00	43.000.000 US$	843.107.000,00	43.500.000 US$	969.585.000,00	44.000.000 US$	1.115.074.000,00	45.000.000 US$	1.282.350.000,00	PERINDAGKOP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
2.00.06.xx.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha perdagangan	19.011 Pelaku usaha perda-gangan	19.106 Pelaku usaha perda-gangan	1.532.799.500,00	19.198 Pelaku usaha perda-gangan	817.475.000,00	19.281 Pelaku usaha perda-gangan	940.905.000,00	19.352 Pelaku usaha perda-gangan	1.082.042.000,00	19.424 Pelaku usaha perda-gangan	1.244.356.000,00	19.501 Pelaku usaha perda-gangan	1.431.011.000,00	PERINDAGKOP, PASAR
2.00.06.xx.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah pedagang kaki lima yang menempati lokasi yang telah ditentukan	581 Orang	962 Orang	762.979.000,00	1064 Orang	717.485.000,00	1314 Orang	858.166.000,00	1424 Orang	986.893.000,00	1529 Orang	1.134.928.000,00	1723 orang	1.305.168.000,00	PASAR
2.00.06.xx.20	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi	Jumlah pasar dan obyek wisata dalam kondisi baik yang dimiliki kabupaten	20 Pasar dan obyek wisata	21 Pasar dan obyek wisata	64.149.811.700,00	22 Pasar dan obyek wisata	38.048.673.500,00	23 Pasar dan obyek wisata	51.524.676.000,00	24 Pasar dan obyek wisata	110.733.378.000,00	25 Pasar dan obyek wisata	177.893.385.000,00	26 Pasar dan obyek wisata	91.227.394.000,00	PUP, PASAR
2.00.06.xx.21	Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar	Persentase peningkatan pedagang pasar yang tertib	-2.5 %	7%	829.148.400,00	2%	1.109.152.000,00	2%	1.301.862.000,00	2%	1.497.164.000,00	2%	1.721.781.000,00	2%	1.980.049.000,00	PASAR, PERINDAGKOP
2.00.07	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				1.044.236.000,00		1.783.865.500,00		2.050.287.000,00		2.356.552.000,00		2.708.147.000,00		3.113.812.000,00	
2.00.07.xx.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah industri yang menerapkan standardisasi di tahun berkenaan	5 IKM	60 IKM	475.343.000,00	65 IKM	819.399.000,00	70 IKM	942.364.000,00	75 IKM	1.083.719.000,00	80 IKM	1.246.300.000,00	85 IKM	1.433.245.000,00	PERINDAGKOP
2.00.07.xx.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	0.5 %	0.5 %	307.014.000,00	0.5 %	566.256.500,00	0.5 %	649.773.000,00	0.5 %	745.960.000,00	0.5 %	856.479.000,00	0.5 %	983.772.000,00	BPMP2T, PERINDAGKOP
2.00.07.xx.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah industri yang menerapkan teknologi industri	25 IKM	33 IKM	220.376.000,00	38 IKM	317.225.000,00	43 IKM	365.000.000,00	48 IKM	419.750.000,00	53 IKM	482.173.000,00	58 IKM	555.120.000,00	PERINDAGKOP
2.00.07.xx.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra yang dikukuhkan	10 Sentra industri	15 Sentra industri	41.503.000,00	20 Sentra industri	80.985.000,00	25 Sentra industri	93.150.000,00	30 Sentra industri	107.123.000,00	35 Sentra industri	123.195.000,00	40 Sentra industri	141.675.000,00	PERINDAGKOP
2.00.08	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi				706.756.800,00		1.004.002.500,00		1.077.281.000,00		1.134.767.000,00		1.244.944.000,00		1.332.171.000,00	
2.00.08.xx.17	Program Transmigrasi Regional	Persentase calon transmigran yang berangkat	40%	40%	706.756.800,00	45%	1.004.002.500,00	50%	1.077.281.000,00	55%	1.134.767.000,00	60%	1.244.944.000,00	60%	1.332.171.000,00	NAKERSOS
3	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				155.912.015.782,00		236.946.613.747,00		222.014.075.080,40		177.929.513.588,70		195.107.035.735,85		270.931.550.814,60	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
3.00	Urusan Administrasi Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				155.912.015.782,00		236.946.613.747,00		222.014.075.080,40		177.929.513.588,70		195.107.035.735,85		270.931.550.814,60	
3.00.01	Urusan Sekretariat Daerah				18.522.653.543,00		19.123.705.715,00		19.815.191.916,25		21.285.454.435,75		22.142.844.396,50		22.544.554.856,05	
3.00.01.xx.15	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase pemenuhan layanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	100%	100%	1.352.666.970,00	100%	1.360.464.865,00	100%	1.338.699.017,00	100%	1.405.633.966,00	100%	1.476.015.664,00	100%	1.476.015.604,00	SETDA
3.00.01.xx.17	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya	100%	100%	2.578.006.150,00	100%	3.118.792.225,00	100%	2.947.288.933,00	100%	3.121.066.478,00	100%	3.019.966.558,00	100%	3.063.996.480,00	KEC. GAMPING, SETDA, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, DINKES, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, BPBD, NAKERSOS, BLH, BUDPAR, SETWAN
3.00.01.xx.18	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kinerja "baik"	90%	90%	1.061.615.250,00	90%	983.050.000,00	90%	1.110.445.984,00	90%	1.176.607.283,00	90%	1.247.184.646,00	90%	1.280.982.646,00	SETDA, DINKES, BLH
3.00.01.xx.19	Program pengembangan kualitas kebijakan publik	Persentase kajian kebijakan yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati	3%	5%	1.828.090.211,00	10%	1.954.025.500,00	15%	1.940.025.184,00	20%	2.050.821.675,00	25%	2.183.321.883,00	30%	2.225.087.883,00	SETDA, DINKES, DISDIKPORA, BUDPAR, SETWAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
3.00.01.xx.20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP)	30%	30%	8.295.201.912,00	45%	7.344.423.125,00	60%	8.272.249.624,25	75%	8.806.123.562,75	90%	9.296.373.229,50	100%	9.622.485.983,55	KORPRI, KEC. GAMPING, SETDA, KESBANG, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, DINKES, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, BAPPEDA, PERTANIAN, BPMP2T, PUP, DPKAD, PASAR, SETWAN, KBPMPP
		Indeks Kepuasan Masyarakat	78.61 nilai	78.67 nilai		78.74 nilai		78.8 nilai		78.87 nilai		78.9 nilai		79 nilai		
		Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3.00.01.xx.21	Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelengga-raan pemerintahan diatas 70	10 Ke-camat-an	10 Ke-camat-an	2.005.319.025,00	12 Ke-camat-an	2.963.749.450,00	14 Ke-camat-an	1.812.857.134,00	17 Ke-camat-an	1.973.055.004,00	17 Ke-camat-an	2.056.085.051,00	17 Ke-camat-an	2.030.424.504,00	KEC. GAMPING, SETDA, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN
3.00.01.xx.22	Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum	Persentase penanganan hukum	100%	100%	822.419.850,00	100%	739.124.500,00	100%	734.785.070,00	100%	789.574.874,00	100%	848.835.616,00	100%	872.206.866,00	KORPRI, SETDA, SATPOL PP
3.00.01.xx.24	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama yang aktif	93.33 %	90%	496.213.475,00	90%	571.797.050,00	90%	1.567.200.398,00	90%	1.866.348.993,00	90%	1.914.028.019,00	90%	1.872.321.159,50	SETDA, KEC. GODEAN, KEC. MINGGIR, DINKES, SATPOL PP, BAPPEDA
3.00.01.xx.25	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Persentase penanganan permasalahan di wilayah perbatasan	2%	2%	83.120.700,00	2%	88.279.000,00	3%	91.640.572,00	3%	96.222.600,00	4%	101.033.730,00	4%	101.033.730,00	SETDA
3.00.02	Urusan Sekretariat DPRD				26.237.260.700,00		30.258.429.350,00		25.821.384.152,50		26.916.156.687,50		27.903.588.025,00		28.709.000.000,00	
3.00.02.xx.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah Raperda inisiatif DPRD yang ditetapkan menjadi Perda	3 Perda	3 Perda	26.237.260.700,00	4 Perda	30.258.429.350,00	3 Perda	25.821.384.152,50	2 Perda	26.916.156.687,50	3 Perda	27.903.588.025,00	3 Perda	28.709.000.000,00	KESBANG, SETWAN
3.00.03	Urusan Inspektorat				2.621.097.750,00		3.219.189.025,00		3.264.676.548,00		3.466.306.155,00		3.663.578.315,00		3.856.402.719,40	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
3.00.03.xx.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A	50%	50%	2.494.723.750,00	60%	3.032.954.025,00	70%	3.074.676.548,00	80%	3.261.306.155,00	90%	3.443.578.315,00	100%	3.621.402.719,40	KORPRI, KEC. GAMPING, SETDA, KPPD, KESBANG, KAD, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, PERPUSDA, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, DINKES, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, DISDIKPORA, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, BPBD, SATPOL PP, INSPEKTORAT, BAPPEDA, PERTANIAN, BKD, NAKERSOS, BLH, BPMP2T, PUP, BUDPAR,
		Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	3 SKPD	8 SKPD		11 SKPD		14 SKPD		17 SKPD		20 SKPD		22 SKPD		
3.00.03.xx.16	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti PKS/ Bimtek/ Setifikasi JFA/IB/TB	100%	100%	86.678.000,00	100%	144.550.000,00	100%	145.000.000,00	100%	155.000.000,00	100%	165.000.000,00	100%	175.000.000,00	INSPEKTORAT
3.00.03.xx.17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level 2	Level 2	39.696.000,00	Level 2	41.685.000,00	Level 2	45.000.000,00	Level 3	50.000.000,00	Level 3	55.000.000,00	Level 3	60.000.000,00	INSPEKTORAT
3.00.04	Urusan Perencanaan				8.533.160.640,00		7.944.792.875,00		8.842.672.149,65		11.532.647.696,95		12.418.726.561,20		14.183.585.893,10	
3.00.04.xx.15	Program Pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data untuk perencanaan	40%	60%	481.841.750,00	65%	449.487.500,00	65%	489.037.345,00	70%	521.745.139,00	75%	545.815.777,90	80%	572.293.479,85	BPBD, BAPPEDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
3.00.04.xx.18	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	99.4 %	95%	5.489.296.945,00	95%	4.284.709.875,00	95%	4.523.065.814,00	95%	7.101.791.776,75	95%	6.894.170.312,80	95%	7.977.262.520,20	KORPRI, KEC. GAMPING, SETDA, KESBANG, KAD, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, PERPUSDA, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, DINKES, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, DISDIKPORA, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, SATPOL PP, INSPEKTORAT, BAPPEDA, PERTANIAN, BKD, NAKERSOS, BLH, BPMP2T, BUDPAR, DUKCAPIL, DISPENDA, DPKAD, PERINDAGKOP, SDAEM, PASAR, SETWAN, KBPMPP, KPPD, BPBD, HUBKOMINFO
3.00.04.xx.19	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase dokumen kajian perencanaan ekonomi yang diimplementasikan	33.33 %	33.33 %	1.682.126.625,00	33.33 %	2.485.328.000,00	33.33 %	2.913.505.615,65	33.33 %	2.929.737.763,70	33.33 %	3.891.730.151,25	33.33 %	4.273.318.551,70	SETDA, BAPPEDA, BUDPAR, DPKAD, PERINDAGKOP, PASAR, NAKERSOS
3.00.04.xx.20	Program perencanaan sosial budaya	Persentase kajian sosial budaya yang diimplementasikan	35%	40%	636.639.900,00	45%	502.917.500,00	50%	670.063.375,00	55%	691.391.662,50	60%	760.530.828,75	65%	1.001.583.901,80	DINKES, BAPPEDA, BUDPAR
3.00.04.xx.21	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	0 dokumen	1 dokumen	136.372.000,00	1 dokumen	140.000.000,00	1 dokumen	147.000.000,00	1 dokumen	164.981.355,00	1 dokumen	181.479.490,50	1 dokumen	199.627.439,55	BAPPEDA
3.00.04.xx.22	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	0 dokumen	1 dokumen	106.883.420,00	2 dokumen	82.350.000,00	3 dokumen	100.000.000,00	4 dokumen	123.000.000,00	5 dokumen	145.000.000,00	6 dokumen	159.500.000,00	BPBD
3.00.05	Urusan Keuangan				85.507.735.274,00		159.926.760.807,00		146.584.254.153,00		94.648.506.761,50		106.942.310.832,65		180.627.635.846,20	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
3.00.05.xx.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Opini BPK terhadap laporan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	WTP	WTP	67.225.706.752,00	WTP	139.030.586.107,00	WTP	128.439.887.003,00	WTP	75.396.254.016,50	WTP	86.511.082.420,65	WTP	158.969.041.591,20	KORPRI, KEC. GAMPING, SETDA, KESBANG, KAD, KEC. BERBAH, PERPUSDA, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, DINKES, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, DISDIKPORA, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, BPBD, SATPOL PP, INSPEKTORAT, BAPPEDA, PERTANIAN, BKD, NAKERSOS, BLH, BPMP2T, BUDPAR, DUKCAPIL, DISPENDA, DPKAD, HUBKOMINFO, PERINDAGKOP, PASAR, SETWAN, KPPD, SDAEM, KBPMPP, PUP, RSUD SLEMAN
		Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
3.00.05.xx.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah	86 desa	86 desa	327.425.550,00	86 desa	846.944.500,00	86 desa	398.850.948,00	86 desa	425.235.745,00	86 desa	454.998.412,00	86 desa	480.714.254,00	KEC. GAMPING, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN
3.00.05.xx.18	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase deviasi realisasi PAD terhadap target	7%	5%	17.954.602.972,00	5%	20.049.230.200,00	5%	17.745.516.202,00	5%	18.827.017.000,00	5%	19.976.230.000,00	5%	21.177.880.001,00	BPMP2T, DISPENDA, DPKAD, PASAR
3.00.06	Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan				4.509.046.325,00		6.789.422.600,00		6.406.026.447,00		7.041.159.592,00		7.733.087.913,00		8.481.172.140,00	
3.00.06.xx.15	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase kepuasan pengguna alumni diklat	N/A	55%	38.035.000,00	60%	40.000.000,00	60%	46.022.350,00	65%	50.624.586,00	65%	55.687.043,00	65%	61.300.000,00	BKD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
3.00.06.xx.16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan	37.13 %	38%	811.321.500,00	39%	2.343.371.000,00	39%	2.263.999.540,00	40%	2.490.399.495,00	40%	2.739.439.443,00	42%	3.014.750.000,00	BKD
3.00.06.xx.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan sesuai dengan kompetensi	87%	89%	3.659.689.825,00	90%	4.406.051.600,00	91%	4.096.004.557,00	92%	4.500.135.511,00	93%	4.937.961.427,00	94%	5.405.122.140,00	SETDA, INSPEKTORAT, PERTANIAN, BKD, BLH, KBPMPP
		Persentase pelayanan pensiun tepat waktu	N/A	85%		85%		85%		90%		90%		90%		
		Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian	89.49 %	86%		86%		88%		90%		92%		92%		
3.00.07	Urusan Penelitian dan Pengembangan				327.548.000,00		288.227.000,00		303.388.350,00		329.727.185,00		358.199.903,50		394.019.893,85	
3.00.07.xx.15	Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek	Persentase agenda riset daerah yang menjadi dokumen penelitian/ kajian	30%	32%	327.548.000,00	33%	288.227.000,00	34%	303.388.350,00	35%	329.727.185,00	36%	358.199.903,50	37%	394.019.893,85	BAPPEDA, KBPMPP
3.00.08	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				9.653.513.550,00		9.396.086.375,00		10.976.481.364,00		12.709.555.075,00		13.944.699.789,00		12.135.179.466,00	
3.00.08.xx.16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah konflik SARA	≤ 2 Kasus	≤ 5 Kasus	8.606.848.150,00	≤ 5 Kasus	7.307.902.950,00	≤ 4 Kasus	9.217.212.024,00	≤ 4 Kasus	9.458.168.155,00	≤ 3 Kasus	9.949.418.828,00	≤ 3 Kasus	10.094.127.307,00	KEC. GAMPING, SETDA, KESBANG, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD
			Awal RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Penanggung
		(outcome)	(Tahun 2015)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab
3.00.08.xx.17	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase penanganan konflik ipoleksosbud-hankam	100%	100%	464.370.375,00	100%	697.945.000,00	100%	762.350.000,00	100%	778.364.500,00	100%	794.015.015,00	100%	846.535.766,00	KEC. GAMPING, KESBANG, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN
3.00.08.xx.18	Program pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada, Pilkades	76.75 %	77%	582.295.025,00	77%	1.390.238.425,00	77%	996.919.340,00	78%	2.473.022.420,00	79%	3.201.265.946,00	79%	1.194.516.393,00	KEC. GAMPING, KESBANG, KEC. GODEAN, KEC. BERBAH, KEC. MOYUDAN, KEC. PRAMBANAN, KEC. MINGGIR, KEC. KALASAN, KEC. SEYEGAN, KEC. MLATI, KEC. DEPOK, KEC. NGEMPLAK, KEC. NGAGLIK, KEC. SLEMAN, KEC. TEMPEL, KEC. TURI, KEC. PAKEM, KEC. CANGKRINGAN, SETDA
TOTAL					1.231.444.766.871,00		1.431.691.000.000,00		1.443.275.000.000,40		1.645.780.000.000,00		1.760.780.000.000,16		1.857.589.999.999,90	total

BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk membergambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
2. Aspek Daya saing Daerah;
3. Aspek Pelayanan Umum;

Indikator Kinerja Daerah ini dituangkan dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9.1

Matriks Indikator Kinerja Dan Target Kinerja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	SKPD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**											
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka Indeks	80,85	80,90	80,98	81,05	81,10	81,13	81,15	81,15	Tujuan	Bappeda
2.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.47	74.47	74.48	74.48	74.49	74.49	74.49	74.49	Misi 2	Dinas Kesehatan
3	Indeks Gini	Indeks	0,41	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	Misi 3	Bappeda
4	Persentase KK Miskin	%	11.36	10.69	10.02	9.35	8.68	8.50	8.00	8.00	Misi 3	Badan KBPMPP
5	Indeks Pembangunan Gender	%	96.09	96.15	96.20	96.25	96.30	96.35	96.40	96,40	Tujuan	Bappeda
6	Pertumbuhan ekonomi	%	5.35	5.40	5.46	5.50	5.56	5.60	5.65	5,65	Misi 3	Bappeda
II	**Aspek Daya Saing**											
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	N/A	B	B	B	B	B	A	A	Misi 1	Sekretariat Daerah
8	Nilai	Nilai/	BB	A	A	A	A	A	A	A	Misi 1	Inspektorat

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	SKPD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat										Kabupaten
9	Opini BPK terhadap LKD	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Misi 1	DPKAD
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	78.61	78.67	78.74	78.8	78.87	78.9	79.00	79.00	Misi 1	Sekretariat Daerah
11	Nilai eksport	US$	41.000.000	42.000.000	42.500.000	43.000.000	43.500.000	44.000.000	45.000.000	45.000.000	Misi 3	Dinas Perindagkop
12	Persentase Nilai Tukar Petani	%	111.54	111.65	111.90	112.10	112.30	112.50	112.70	112.70	Misi 3	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
13	Persentase	%	63.00	65.99	69.54	71.07	72.59	74.11	76.00	76,00	Misi 3	Bappeda

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	SKPD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	prasarana dan sarana perekonomian yang berkualitas											
14	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	%	65,18	65,25	65,45	65,65	65,85	66,05	66,25	66,25	Misi 3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
III	**Aspek Pelayanan Umum**											
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat											
15	Jumlah lembaga tangguh bencana	desa dan sekolah	13 dan 28	21 dan 36	29 dan 44	37 dan 52	45 dan 60	53 dan 68	61 dan 76	61 dan 76	Misi 4	BPBD
	Urusan Keuangan											
16	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	28	30	31	32	33	34	35	35	Misi 1	Dinas Pendapatan Daerah
	Urusan Lingkungan Hidup											

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	SKPD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	36	36,82	37	37,5	38	38,5	40	40	Misi 4	Badan Lingkungan Hidup
18	Indeks pencemaran air sungai Indeks pencemaran udara Indeks tutupan hutan	nilai	41,00 38,74 32,23	42,00 40 32,25	43,00 41 32,26	44,00 42 32,27	45,00 43 32,28	46,00 44 32,29	47,00 45 32,30	47,00 45 32,30	Misi 4	Badan Lingkungan Hidup
	Urusan Pariwisata											
19	Lama tinggal wisatawan	Hari	Wisatawan Nusantara : 1,62 wisatawan Mancanegara: 1,99	Wisatawan Nusantara: 1,63 wisatawan Mancanegara: 2,00	Wisatawan Nusantara: 1,64 wisatawan Mancanegara: 2,01	Wisatawan Nusantara: 1,65 wisatawan Mancanegara: 2,02	Wisatawan Nusantara: 1,66 wisatawan Mancanegara: 2,03	Wisata-wan Nusantara: 1,67 wisatawan Mancanegara: 2,04	Wisata-wan Nusantara : 1,68 wisatawan Mancanegara: 2,05	Wisata-wan Nusantara: 1,68 wisatawan Mancanegara: 2,05	Misi 3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
20	Jumlah	Orang	4.117.000	4.117.000	4.117.000	4.323.000	4.561.000	4.834.000	5.149.000	5.149.000	Misi 3	Dinas

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	SKPD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wisatawan											Kebudayaan dan Pariwisata
	Urusan Tenaga Kerja											
21	Tingkat pengangguran terbuka	Rasio	6.12	6.00	5.90	5.80	5.60	5.50	5.40	5,40	Misi 3	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
	Urusan Pertanian											
22	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	%	2.73	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	Misi 3	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
	Urusan Perindustrian											
23	Persentase Peningkatan nilai produksi industri	%	2,65	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,2	Misi 3	Dinas Perindagkop
	Urusan Pendidikan											

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	SKPD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	78,17	78,20	78,23	78,26	78,29	78,32	78,35	78,35	Misi 2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
25	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	%	APK SD/MI ≧ 116,81%, APK SMP/MTs ≥ 111,70% APK SMA/SMK/ MA : 88,69% APM SD/MI : 103,20% APM SMP/MTs : 83,96% APM SMA/SMK/ MA : 58,95%	APK SD/MI ≧ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APK SMA/SMK/ MA : 86.45% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 83,97% APM SMA/SMK/ MA : 58,96%	APK SD/MI ≧ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 83,98%	APK SD/MI ≧ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 83,99%	APK SD/MI ≧ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 84%	APK SD/MI ≧ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 84,01	APK SD/MI ≧ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 84,50%	APK SD/MI ≧ 100%, APK SMP/MTs ≥ 100% APM SD/MI : ≤100% APM SMP/MTs : 84,50%	Misi 2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
26	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,28	10,33	10,36	10,39	10,42	10,45	10,48	10,48	Misi 2	Dinas Pendidikan,

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	SKPD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Pemuda dan Olahraga
27	Harapan Lama sekolah	Tahun	15,65	15,71	15,74	15,78	15,81	15,85	15,88	15,88	Misi 2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
28	Nilai rata-rata hasil ujian SD/MI SMP/MTs	Nilai	236,15 261,64	236,17 261,65	236,18 261,66	236,20 261,68	236,21 261,70	236,21 261,70	236,22 261,71	236,22 261,71	Misi 2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	SMA/MA SMK		335,23 252,92	335,25 252,93	335,26 252,94	335,28 252,96	335,28 252,96	335,30 252,97	335,3 252,97	335,3 252,97		
	Urusan Kebudayaan											

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2015	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Keterangan	SKPD Penanggung Jawab Utama
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Persentase Pelestarian warisan budaya	%	23.77	23.80	23.83	23.86	23.89	23.92	23.95	23,95	Misi 5	Dinas Kebudayaan dan Pariisata
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
30	Peresentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	539 kasus	1	0,98	0,96	0,94	0,92	0,90	0,90	Misi 5	BKBPMPP
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Peraturan Perundang-Undangan											
31	Angka Konflik Sara	Jumlah kasus	2	≤ 5	≤ 5	≤ 4	≤ 4	≤ 3	≤3	≤3	Misi 5	Kantor Kesatuan Bangsa

Tabel 9.2

Matriks Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia	IPM= $\sqrt[3]{I1 \; x \; I2 \; x \; I3}$ I1= kesehatan (harapan hidup) I2= pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) I3= pendapatan (pengeluaran pendapatan riil)	Bappeda	Badan Pusat Statistik
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	$e_x = \frac{Tx}{Ix}$ e_x : tingkat angka harapan hidup pada umur x Tx : jumlah orang yang hidup setelah mencapai umur x, jumlah ini adalah total orang-tahun yang mencapai kehidupanIx Ix : jumlah orang-orang yang bertahan hidup pada umur x (dimulai pada interval x sampai x+n) dari jumlah total kelahiran menurut “radix life table” Estimasi angka harapan hidup dengan metode tak langsung menggunakan softare mortpak	Dinas Kesehatan	Badan Pusat Statistik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat	Indeks gini	Angka absolut 1 dikurangi dengan jumlah total Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas tertentu dikalikan dengan Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai dengan kelas yang dimaksud	Bappeda	Badan Pusat Statistik
4.	Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	Selisih PDRB tahun yang bersangkutan dengan PDRB tahun sebelumnya terhadap PDRB tahun sebelumnya dikalikan 100%	Bappeda	Badan Pusat Statistik
5.	Menurunnya kemiskinan	Persentase keluarga miskin	Jumlah KK miskin di bagi seluruh jumlah KK di Kabupaten Sleman dikalikan 100%	Badan KB, PM, PP	Tim Koordinsi Penanngulangan Kemiskinan Daerah
6.	Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	IPG = 1/3 {(Xede(1) + X ede (2) + I inc-dis)} Xede(1) = Xede untuk harapan hidup X ede (2) = X ede (2) untuk pendidikan I inc-dis = indeks distribusi pendapatan	Bappeda	Badan Pusat Statistik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai IKM dari semua OPD dan UPT dibagi jumlah OPD dan UPT dikalikan 100%	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
8.	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian	Nilai eksport	Besaran total ekspor seluruh komoditas pada tahun yang bersangkutan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
9.	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian	Persentase Peningkatan nilai Produksi	Selisih nilai produksi IKM pada tahun yang bersangkutan dengan nilai produksi IKM pada tahun sebelumnya dibagi nilai produksi IKM pada tahun sebelumnya dikalikan 100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
10.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Jumlah lembaga tangguh bencana	Akumulasi jumlah lembaga tangguh bencana yang berupa Desa tangguh bencana dan Sekolah tangguh bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
11.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah	Realisasi PAD dibagi realisasi pendapatan daerah dikalikan 100%	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah
12.	Mewujudkan lingkungan hidup, dan penataan ruang yang nyaman bagi masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH_Sleman =(IPA+IPU+ITH)/3 IPA= Indeks Pencemaran Air Sungai IPU= Indeks Pencemaran Udara ITH= Indeks Tutupan Hutan	Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
13.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Sungai	$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ Keterangan: Lij : konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) Ci : konsentrasi Sample parameter kualitas air (i) PIjadalahIndeksPencemaranbagiperuntukan (j) PIj = (C1/L1j, C2/L2j,…,Ci/Lij) (Ci/Lij)M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij)R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij	Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Udara	$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ dimana: IPU= Indeks Pencemaran Udara IPNO2=IndeksPencemar NO2 IPSO2=Indeks Pencemar SO2	Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
15.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Tutupan hutan	$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ Indeks Tutupan Hutan atau vegetasi (ITH) adalah luas tutupan hutan atau tutupan vegetasi dibagi luas wilayah administrasi	Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
16.	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian	Lama tinggal wisatawan	Jumlah malam tamu dibagi jumlah tamu yang datang dan menginap	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17.	Meningkatnya	Jumlah	Jumlah wisatawan tahun t	Dinas	Dinas

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian	wisatawan		Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata
18.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Jumlah pencari kerja dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan 100%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
19.	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Rata-rata persentase peningkatan produksi pertanian/perkebunan, persentase peningkatan produksi peternakan dan persentase peningkatan produksi perikanan	Dinas Pertanian, perikanan dan Kehutanan	Dinas Pertanian, perikanan dan Kehutanan
20.	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian	Persentase Nilai Tukar Petani	Indeks harga yang diterima petani (It) dibagi indeks harga yang dibayar petani (Ib) dikalikan 100%	Dinas Pertanian, perikanan dan Kehutanan	Badan Pusat Statistik
21.	Meningkatnya	Angka	Anak usia 0-6 tahun yang terlayani pada	Dinas	Dinas

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	lembaga PAUD dibagi jumlah anak usia 0-6 tahun	Pendidikan dan Olah Raga	Pendidikan dan Olah Raga
22.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Jumlah siswa SD, SMP, SMA dan jumlah siswa usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun	Dinas Pendidikan dan Olah Raga	Dinas Pendidikan dan Olah Raga
23.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	$\bar{X} = \frac{\sum xi}{n}$ $\bar{X}$: rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas xi :lamanya sekolah individu usia 55 tahun ke atas n : jumlah penduduk usia 55 tahun ke atas	Dinas Pendidikan dan Olah Raga	Dinas Pendidikan dan Olah Raga
24.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan	Harapan lama sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$	Dinas Pendidikan dan Olah Raga	Dinas Pendidikan dan Olah Raga

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	aksesibilitas pendidikan		Keterangan: HLS_a^t Harapan Lama Sekolah pada umur *a* di tahun *t* E_i^t Jumlah penduduk usia *i* yang bersekolah pada tahun *t* P_i^t Jumlah penduduk usia *i* pada tahun *t* i Usia (a, a + 1, ..., n) FK Faktor koreksi pesantren		
25.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	Nilai rata rata ujian SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK	Jumlah nilai ujian pada setiap jenjang pendidikan dibagi seluruh jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan dan Olah Raga	Dinas Pendidikan dan Olah Raga
26.	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Persentase pelestarian warisan budaya	Jumlah warisan budaya yang dilestarikan dibagi jumlah warisan budaya yang ada dikalikan 100%	Dinas Kebudayaan dan pariwisata	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
27.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan	Persentase penurunan kasus kekerasan	Selisih Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun n dikurangi jumlah kasusu kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun sebelumnya	Badan KB, PM dan PP	Badan KB, PM dan PP

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	anak	terhadap perempuan dan anak	dibagi dengan jumlah kasus tahun sebelumnyadikalikan 100%		
28.	Meningkatnya kerukunan masyarakat	Jumlah kasus SARA	Jumlah konflik SARA	Kantor Kesatuan Bangsa	Kantor Kesatuan Bangsa

BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAHPELAKSANAAN

10.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi dalam penyusunan RPJMD iniadalah :

1. RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan kebijakan umum serta prioritas program dalam APBD masa transisi yaitu tahun pertama pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. RPJMD sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan untukmenyelesaikan permasalahan yang belum dapat terselesaikan pada RPJMD sebelumnya dan masalah yang dihadapi pada periode RPJMD masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
3. RKPD masa transisi pada tahun pertama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2016-2021 dan berpedoman pada RPJP Kabupaten Sleman tahun 2006-2025. RPJMD juga sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renstra SKPD) dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD).

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016-2021, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagaiberikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Sleman dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Sleman dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Sleman;
3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman agar melaksanakan

program-program dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;

4. Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021;
5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021;
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Sleman harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten;
7. RKPD Kabupaten Sleman harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
8. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Sleman merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
9. Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
10. Dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, setiap SKPD perlu mengupayakan pengaturan peran *stakeholders* dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, instansi terkait maupun masyarakat luas;
11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, sebagai berikut:
    a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;

b. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;
d. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

12. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
13. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Sleman dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Sleman untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

BAB XI
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sleman 2016-2021 disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sleman selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan RPJMD ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sleman. RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dan searah dengan RPJMD DIY dan RPJMN.

Sebagai tanggung jawab bersama, pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja, perlu dikembangkan peran aktif seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perlu peran aktif seluruh masyarakat sleman, swasta dan sikap mental, tekad dan semangat aparatur pemerintah daerah kabupaten Sleman, dukungan DPRD Kabupaten Sleman, Pemerintah DIY maupun Pemerintah Pusat. Dengan didukung dan kepedulian semua pihak Kabupaten Sleman akan lebih baik dari hari kemarin.

BUPATI SLEMAN

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO